RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

Membangun Desa Menata Kota
Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

copyright BAPPEDALITBANG 2021

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, serta program Bupati Balangan perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tertentu.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Balangan tahun 2021-2026.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Balangan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terusmenerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan :

1. Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026; dan

2. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati dengan arah pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menetapkan startegi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun agar mekenisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karekteristik Daerah;
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya;
3. Pedoman penyusunan rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2021-2026 meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strtegis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX : Penutup

(2) Isi dan Uraian Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan secara berkala.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. merugikan kepentingan Nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.

(3) Merugikan kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Setelah RPJMD ini berakhir dan belum ditetapkan RPJMD baru periode berikutnya, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 (5-81/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BALANGANTAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Balangan, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Balangan pada Tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel.

Penyusunannya RPJMD ini berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu – isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Balangan untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Balangan dalam menyelenggarakan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra-PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

SAMBUTAN BUPATI BALANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji - syukur kehadirat Allah SWT serta atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah yang keempat setelah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2010, 2011-2015 dan 2016-2021.

Keempat RPJMD tersebut diatas mempunyai saling keterkaitan secara *inherent* yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam naungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD yang dikawal oleh Bappeda Kabupaten Balangan telah berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Balangan 2005-2025, RTRW Kabupaten Balangan dan mengacu kepada Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, serta RPJM Nasional tahun 2020-2024.

Secara mandiri RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 mengandung jiwa dan semangat Visi-Misi Bupati Balangan terpilih untuk periode Tahun 2021-2026 yaitu ***" Membangun Desa Menata Kota, Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera "***. Materi penjabaran Visi-Misi Bupati tersebut juga sudah dimusyawarahkan melalui forum Musrenbang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 pada tanggal 08 Juni 2021 di Paringin. Dengan telah tersusunnya RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini maka **Tujuan**, **Sasaran**, **Indikator Sasaran, Program**, **Kegiatan serta Indikator Capaian Kinerja** dapat ditetapkan secara lebih *objective* dan *integrative* mencakup seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Pengerahan semua *resources* dengan melibatkan semua *stakeholders* akan dapat lebih mewujudkan keterpaduan guna menciptakan **sinergi**.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat mendukung tersusunnya RPJMD ini, Semoga segala daya upaya kita dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, daerah maupun masyarakat Balangan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PARINGIN, AGUSTUS 2021

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika Penulisan I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-45
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-78
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-210
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-28
3.3 Kerangka Pendanaan III-32
BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2 Isu Strategis IV-41
4.3 Isu Strategis Eksternal IV-49
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-2
5.2 Misi V-4
5.3 Tujuan dan Sasaran V-10
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi VI-1
6.2 Arah Kebijakan VI-4
6.3 Program Pembangunan Daerah VI-13
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1
7.2 Program Prioritas Perangkat Daerah VII-6
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

8.1 Indikator Makro Daerah VIII-1
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah VIII-3
BAB IX PENUTUP IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi Dirinci Tiap Kecamatan Kabupeten Balangan Tahun 2008	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan	II-6
Tabel 2.3	Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan	II-14
Tabel 2.4	Objek Wisata yang Mendapatkan SK Pokdarwis	II-17
Tabel 2.5	Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan	II-24
Tabel 2.6	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.7	Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.8	Daerah Potensi Banjir di Wilayah Kabupaten Balangan	II-37
Tabel 2.9	Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan	II-38
Tabel 2.10	Jumlah Desa yang MengalamiBencana Tanah Longsor Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan	II-40
Tabel 2.11	Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.12	Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.13	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020	II-47
Tabel 2.15	Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020	II-50
Tabel 2.16	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020	II-53
Tabel 2.17	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.18	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan 2016-2020	II-56

Tabel 2.19 Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-59
Tabel 2.20 Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pengeluaran Tahun 2016-2019..... II-60
Tabel 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020..... II-61
Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020..... II-62
Tabel 2.23 Gedung Olahraga di Kabupaten Balangan II-63
Tabel 2.24 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-65
Tabel 2.25 Capaian Predikat LAKIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.26 Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... II-74
Tabel 2.27 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020..... II-80
Tabel 2.28 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020..... II-81
Tabel 2.29 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... II-82
Tabel 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020..... II-83
Tabel 2.31 Rekapitulasi Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020..... II-84
Tabel 2.32 Capaian Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Balangan..... II-88
Tabel 2.33 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Balangan 2016 – 2020 .... II-88
Tabel 2.34 Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020..... II-101
Tabel 2.35 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-116
Tabel 2.36 Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-117

Tabel 2.37 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel 2.38 Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 II-120
Tabel 2.39 Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020 ..... II-122
Tabel 2.40 Capaian Indikator SPM Sosial Kabupaten Balangan 2017-2020 ..... II-123
Tabel 2.41 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... II-128
Tabel 2.42 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... II-129
Tabel 2.43 Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-131
Tabel 2.44 Capaian Indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan II-134
Tabel 2.45 Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, 2017-2020 ..... II-137
Tabel 2.46 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... II-139
Tabel 2.47 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020 ..... II-141
Tabel 2.48 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-143
Tabel 2.49 Klasifikasi Status Desa Kabupaten Balangan II-144
Tabel 2.50 IKLH Nasional dan Provinsi serta IKL BalanganKhusus 2020 ..... II-147
Tabel 2.51 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-148
Tabel 2.52 Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... II-156
Tabel 2.53 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.54 Capaian Indikator Perindustrian Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... II-158

Tabel 2.55 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-159
Tabel 2.56 Jumlah Investor PMDN / PMA Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020 ..... II-160
Tabel 2.57 Jumlah Investasi PMDN / PMA Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-160
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2013-2020 ..... II-161
Tabel 2.59 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2020 ..... II-164
Tabel 2.60 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-165
Tabel 2.61 Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020 ..... II-165
Tabel 2.62 Capaian Indikator SPM Kesenian Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020 ..... II-166
Tabel 2.63 Capaian Indikator Perpustakaan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020 ..... II-167

Tabel 2.64 Capaian Indikator Kearsipan Kabupaten Balangan 2017-2020 ..... II-168
Tabel 2.65 Capaian Indikator Pariwisata Kabupaten Balangan 2017-2020 ..... II-170
Tabel 2.66 Distribusi Persentase PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum II-170
Tabel 2.67 Target dan Realisasi PDRB Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-170
Tabel 2.68 Capaian Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Balangan 2016-2020 ..... II-171
Tabel 2.69 Jumlah Petani di Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan 2020 . II-171
Tabel 2.70 Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2015-2020(Ha) II-172
Tabel 2.71 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020 (Ton) II-173
Tabel 2.72 Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan 2016-2020 (Ton/Ha) II-174

Tabel 2.73 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawah di setiap kecamatan Tahun 2020 ..... II-175
Tabel 2.74 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian di setiap kecamatan Tahun 2020 ..... II-176
Tabel 2.75 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2020 ..... II-177
Tabel 2.76 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan di Kabupaten Balangan 2020 ..... II-178
Tabel 2.77 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat di Kabupaten Balangan 2018-2020 ..... II-180
Tabel 2.78 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Semua Tanaman Obat di Setiap Kecamatan Tahun 2020 ..... II-180
Tabel 2.79 Jumlah dan Produksi Hewan Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Balangan, 2016-2020 ..... II-181
Tabel 2.80 Jumlah Ternak dan Produksi Unggas di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-182
Tabel 2.81 Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-183
Tabel 2.82 Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Per Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2020 ..... II-184
Tabel 2.83 Capaian Indikator Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020 ..... II-185
Tabel 2.84 Capaian Indikator Perindustrian Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020 ..... II-187
Tabel 2.85 Capaian Indikator Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2019 ..... II-188
Tabel 2.86 Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020 ..... II-190
Tabel 2.87 Produksi Perikanan (ton) menurut Tempat Pemeliharaan di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020 ..... II-191
Tabel 2.88 Jumlah Nelayan (orang) berdasarkan Alat Tangkap yang Beroperasi di Perairan Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020 . II-193
Tabel 2.89 Luas Areal Budidaya Perikanan (m2) di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020 ..... II-193

Tabel 2.90 Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Gunung Manau Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020 ..... II-195
Tabel 2.91 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR) Di Kabupaten Balangan Tahun 2020 ..... II-196
Tabel 2.92 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-198
Tabel 2.93 Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-199
Tabel 2.94 Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-203
Tabel 2.95 Capaian Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-206
Tabel 2.96 Capaian Indikator Pengawasan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-209
Tabel 2.97 Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2015-2019 ..... II-211
Tabel 2.98 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2015 – 2019 ..... II-212
Tabel 2.99 Upah Minimum Pekerja Di Kabupaten Balangan berdasarkan Sektor Tahun 2015-2017 ..... II-215
Tabel 2.100 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan, Januari – Desember dan rata-rata Tahun 2014 – 2020 dan Januari 2021 (2012=100) II-216
Tabel 2.101 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d 2021 Provinsi Kalimantan Selatan II-217
Tabel 2.102 Produk Layanan OSS DPMPTSP Beserta Lama Waktu Pelayanan Kabupaten Balangan II-220
Tabel 2.103 Rasio Ketergantungan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-225
Tabel 2.104 Rasio Penduduk Menurut Mata Pencaharian (%) II-226
Tabel 2.105 Capaian Indikator Tujuan Dalam RKPD Kabupaten Balangan II-227
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... III-2
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) III-21

Tabel 3.3 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan (Rp. Miliar) III-30
Tabel 3.4 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan III-31
Tabel 3.5 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Balangan . III-32
Tabel 3.6 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 ..... III-35
Tabel 3.7 Daerah Potensi Banjir di Wilayah Kabupaten Balangan III-38
Tabel 4.1 Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan IV-7
Tabel 4.2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Balangan IV-16
Tabel 4.3 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan..... IV-22
Tabel 4.4 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan IV-33
Tabel 4.5 Permasalahan Bidang Sosial Budaya..... IV-40
Tabel 4.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Suistanable Development Goals* (*SDGs*) IV-50
Tabel 5.1 Perumusan Visi Kabupaten Balangan 2021-2026 ..... V-4
Tabel 5.2 Penjelasan Visi Kabupaten Balangan 2021-2026..... V-4
Tabel 5.3 Perumusan Misi Kabupaten Balangan..... V-6
Tabel 5.4 Jabaran Visi Kabupaten Balangan 2021-2026..... V-7
Tabel 5.5 Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2016.....
Tabel 5.6 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2016 ..... V-11
Tabel 5.7 Hubungan RPJMD - RPJMN..... V-17
Tabel 5.8 Hubungan RPJMD - RPJPD V-18
Tabel 5.9 Hubungan RPJMD - RTRW V-20
Tabel 5.10 Hubungan RPJMD - RKPD..... V-22
Tabel 5.11 Hubungan RPJMD - KLHS V-23
Tabel 5.12 Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Tabalong V-24
Tabel 5.13 Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Paser V-25
Tabel 5.14 Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Kotabaru V-25
Tabel 5.15 Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... V-26

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ..... VI-2
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026..... VI-4
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Balangan VI-14
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (PP 12 Tahun 2019) VII-2
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 ..... VII-7
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Makro Daerah Dalam Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ..... VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ..... VIII-3
Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ..... VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan	I-2
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah	I-6
Gambar 1.3	Keterkaitan RPJMD dan RPJPD	I-7
Gambar 1.4	Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	I-7
Gambar 1.5	Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program	I-8
Gambar 2.1	Peta Geologi Kabupaten Balangan	II-3
Gambar 2.2	Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan	II-4
Gambar 2.3	Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Balangan (dalam satuan Km^2)	II-5
Gambar 2.4	Persentase Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Balangan (dalam satuan Km^2)	II-6
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Balangan	II-12
Gambar 2.6	Persentase Luas Penggunaan Lahan 2020	II-13
Gambar 2.7	Model Struktur Ruang Kawasan Agropolitan	II-19
Gambar 2.8	Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan	II-39
Gambar 2.9	Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (dalam jiwa)	II-42
Gambar 2.10	Persentase Penduduk Kabupaten Balangan per Kecamatan Tahun 2020 (dalam jiwa)	II-43
Gambar 2.11	Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 (dalam jiwa)	II-43
Gambar 2.12	Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	II-44
Gambar 2.13	Distrbusi PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020	II-49
Gambar 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-52
Gambar 2.15	PDRB Per Kapita Kabupaten Balangan Dengan dan Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2016 – 2020	II-55
Gambar 2.16	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020	II-57

Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 ..... II-58
Gambar 2.19 Persentase Jumlah Atlet Menurut Cabang Olahraga di Kabupaten Balangan..... II-64
Gambar 2.20 Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan 2016-2019 ..... II-68
Gambar 2.21 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 2016-2019 ..... II-69
Gambar 2.22 Dana Perimbangan Kabupaten Balangan 2016-2019 ..... II-70
Gambar 2.23 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Balangan 2016-2019 .. II-70
Gambar 2.24 Perkembangan APK Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-79
Gambar 2.25 Perkembangan APM Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 ..... II-80
Gambar 2.26 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakatdi Kabupaten Balangan 2015-2019 ..... II-214
Gambar 2.27 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan Januari 2020 – Januari 2021 ..... II-219
Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-11
Gambar 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... III-12
Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... III-13
Gambar 3.4 Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020(dalam Miliar Rupiah III-13
Gambar 3.5 Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Balangan III-14
Gambar 3.6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)..... III-14
Gambar 3.7 Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer Kabupaten Balangan 2016-2019 ..... III-15
Gambar 3.8 Persentase Luas Penggunaan Lahan 2020..... III-16
Gambar 3.9 Belanja Modal Kabupaten Balangan 2016-2020..... III-17
Gambar 3.10 Belanja Transfer Kabupaten Balangan 2016-2020 ..... III-17
Gambar 3.11 Pembiayaan Kabupaten Balangan 2016-2020 ..... III-18
Gambar 3.12 Porsi Belanja Kabupaten Balangan 2016-2020 ..... III-29
Gambar 3.13 Porsi Belanja Pegawai Kabupaten Balangan 2016-2020 ..... III-30

Gambar 5.1 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan V-16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang dua puluh tahun, jangka menengah lima tahun dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Politik

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik
   Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif
   Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir Pendekatan Politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Balangan, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu : Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu : Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

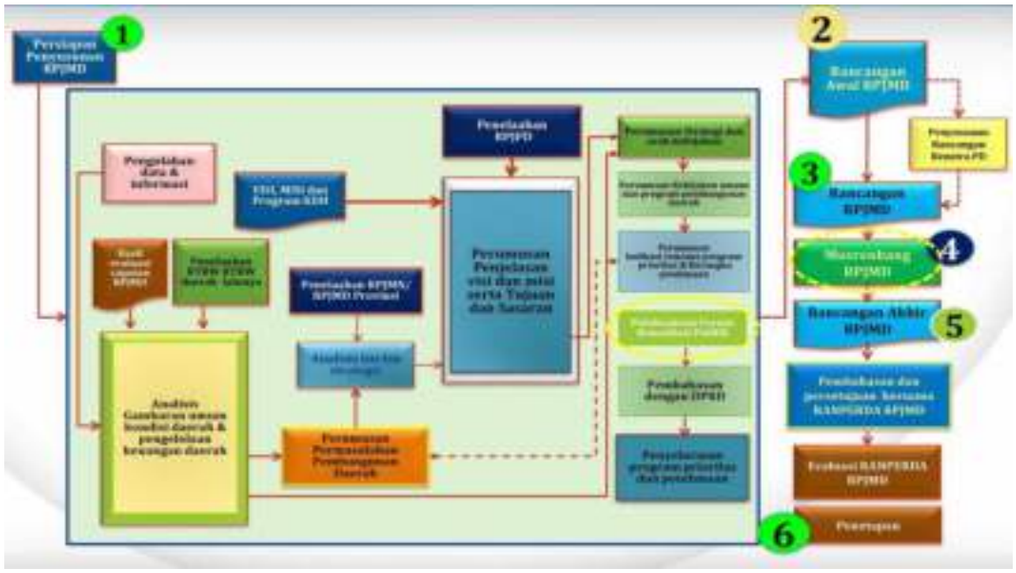

Gambar 1. 1
Tahapan dan tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

22. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Ftsik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271).
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).

33. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018).
34. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN 2020- 2024, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

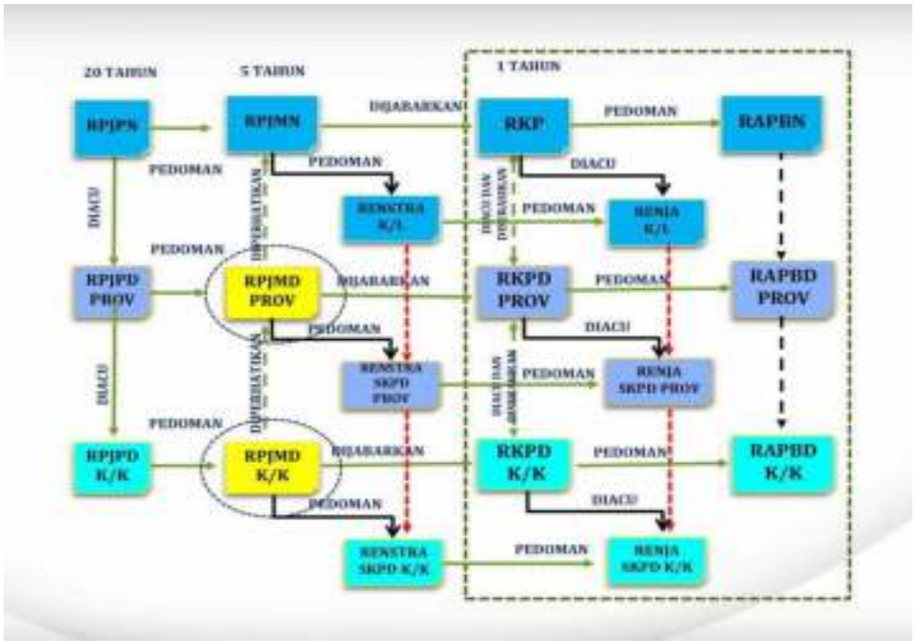

Gambar 1. 2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1 RPJMD Kabupaten Balangan dengan RPJPD Kabupaten Balangan

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kabupaten Balangan periode 2021-2024. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1. 3
Keterkaitan RPJMD dan RPJPD

1.3.2 RPJMD Kabupaten Balangan dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD.

Gambar 1. 4
Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

1.3.3 RPJMD Kabupaten Balangan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Balangan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, serta RPJMN. Berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

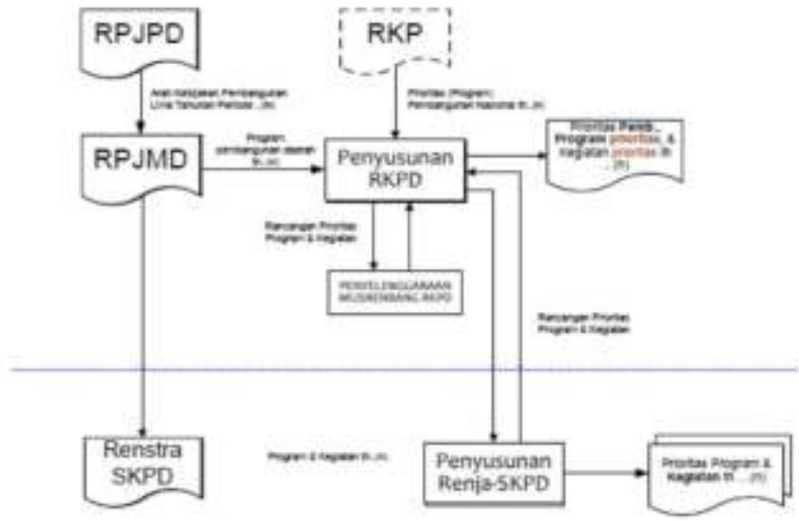

Gambar 1. 5
Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

1.3.4 RPJMD Kabupaten Balangan dengan Perencanaan Lainnya

Dalam penyususunan dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka berbagai dokumen perencanaan juga perlu ditelaah baik dokumen pada level Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten, yaitu :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Balangan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Paser dan Tabalong);
5. Dokumen terkait lainnya (Dokumen perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan berpedoman pada RTRW Kabupaten Balangan yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata

ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW dan RPJMD daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024. RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD.

Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima (5) tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Merumuskan gambaran umum daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta dasar prioritas penanganannya ke depan.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan daerah 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dan perangkat daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
4. Memberikan gambaran strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

6. Menetapkan indikator kinerja utama Kabupaten Balangan dan indikator kinerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026.
7. Sebagai wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Balangan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**
- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 6.1. Strategi

6.2. Arah Kebijakan
6.3. Program Pembangunan Daerah

BAB VII **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah

BAB VIII **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

8.1. Indikator Makro Daerah
8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

BAB IX **PENUTUP**

9.1. Pedoman Transisi
9.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah otonom baru pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibu kota berada di Kota Paringin. Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto “SANGGAM” yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.

Dalam upaya untuk lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen RKPD ini dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Balangan secara umum merupakan dataran, perbukitan dan pegunungan (klasifikasi bentuk lahan absolut Van Zuidam, 1985). Dari klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Balangan mempunyai nilai kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen To, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Jenis batuan pada bagian utara formasi Tanjung (Tet) memiliki sebaran sekitar 5%, tersusun atas perselingan antara batu pasir, batu lempung, batu lanau, batu gamping, dan konglomerat aneka bahan. Sedangkan bagian timur sebaran formasi Berai (Tomb) ada di sekitar Gunung Berai Kecamatan Awayan, tersusun oleh batu gamping bersisipan napal dan batu lempung dengan ketebalan lapisan rata-rata 1-6 meter. Formasi Warukin (Tmw) merupakan

tutupan dominan yang hampir mencapai 70% tersebar di bagian utara dan timur Paringin, tersusun dengan perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung bersisipan serpih dan batu bara dengan ketebalan lapisan rata-rata 2 meter. Formasi Dahor tersebar sekitar 15% di bagian tengah dan barat, tersusun oleh batu pasir kuarsa bersisipan lempung dan limonit. Endapan Quarter (Qa) tersebar di daerah dataran bagian selatan (Gambar 2.1).

Berdasarkan sebaran satuan geomorfologi pada tiap-tiap wilayah kecamatan, Kecamatan Halong dan Juai tercatat sebagai wilayah kecamatan dengan kondisi geomorfologi yang bervariatif. Sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan wilayah kecamatan yang memiliki kondisi geomorfologi dengan satuan perbukitan relatif curam dan pegunungan curam. Wilayah kondisi landau hamper terdapat di setiap kecamatan kecuali Tebing Tinggi. Luas wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan satuan geomorfologi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi Dirinci Tiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas Satuan Geomorfologi					
		Dataran (Landai)		Perbukitan (Relatif Curam)		Pegunugan (curam)	
		Km^2	%	Km^2	%	Km^2	%
1.	Halong	12,09	1,90	154,21	33,60	485,99	63,00
2.	Juai	141,71	21,80	150,11	32,80	1,80	0,20
3.	Tebing Tinggi	-	-	66,20	14,40	283,21	36,70
4.	Batu Mandi	181,01	27,90	4,86	1,10	-	-
5.	Awayan	55,32	8,50	67,65	14,80	-	-
6.	Lampihong	70,58	10,90	-	-	-	-
7.	Paringin	126,71	19,50	15,29	3,30	-	-
8.	Paringin Selatan	61,62	9,50	-	-	-	-
	Total	649,01	100	458,30	100	770,99	100

Sumber: SRTM Data V4 (Path 60 Row 13), CIAT-CSI 2008 (Diolah Menggunakan Software Global Mapper 8.0 Dengan Metode Interpolasi Reuter Et Al. (2007); Diolah 2010. Luasan Satuan Geomorfologi Dihitung Menggunakan Piranti Lunak Berbasis GIS, Mapinfo 8.0 SCP. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2016, Kab. Balangan

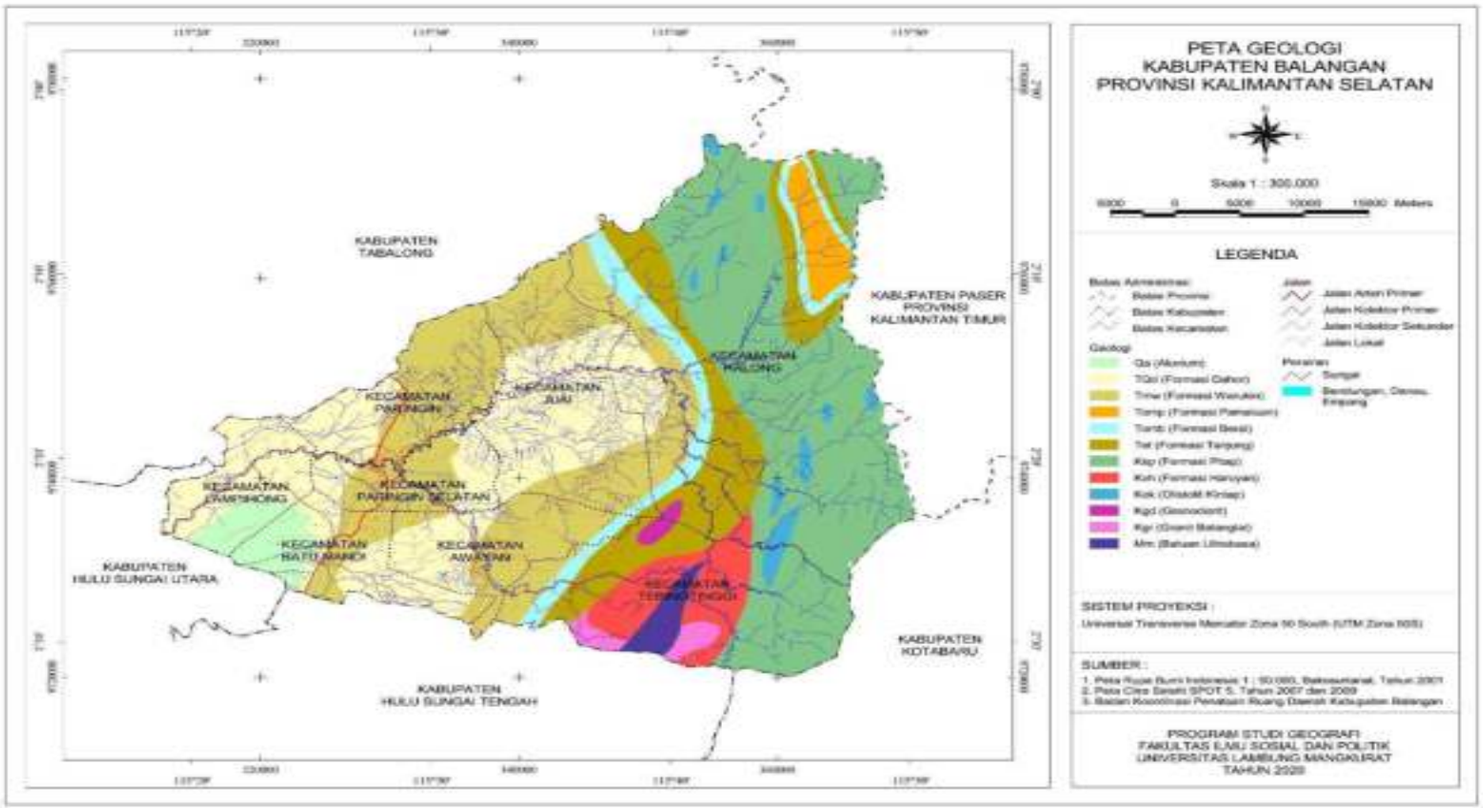

Sumber: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.1
Peta Geologi Kabupaten Balangan

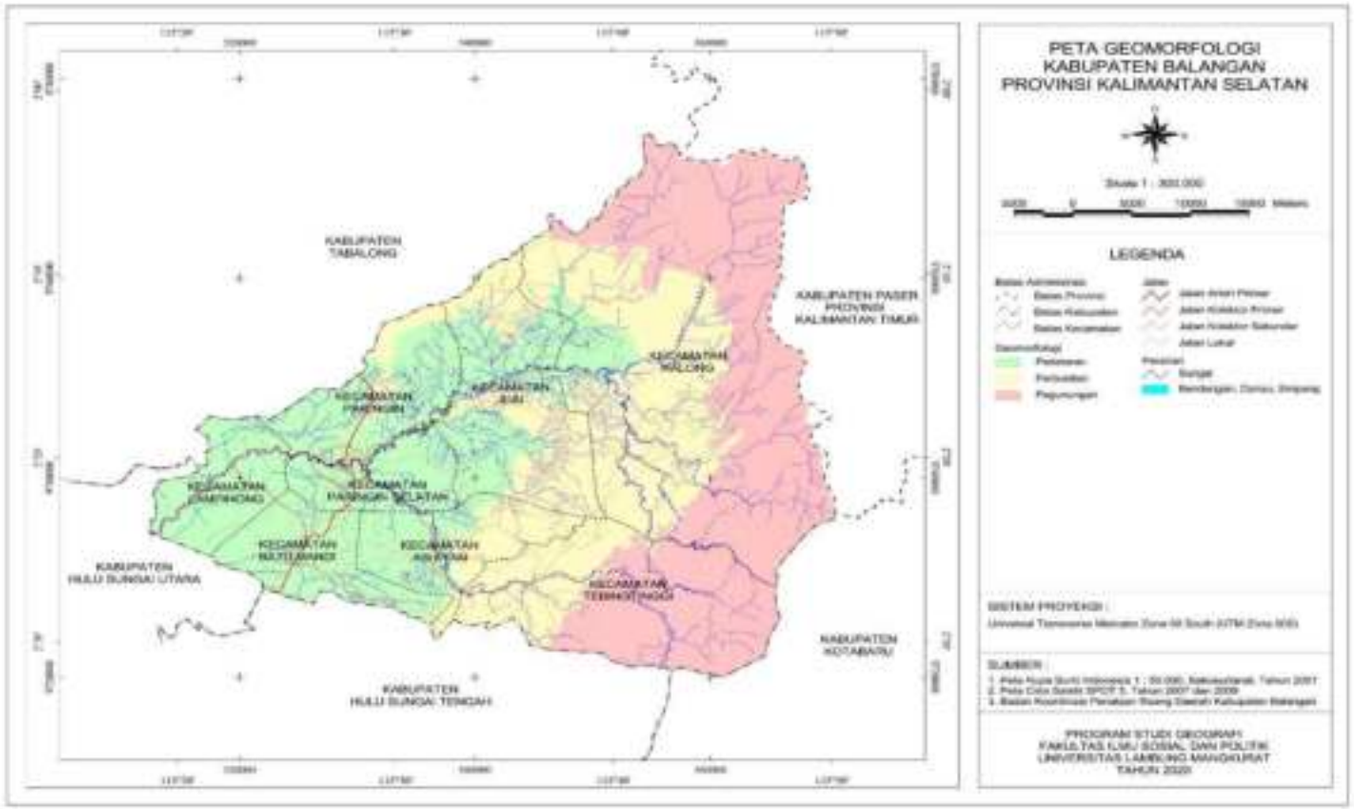

Sumber: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.2
Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1830,70 km2 dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)
Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)

Wilayah administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan no. 23 tahun 2006 luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (96,96 km2), Batumandi (147,96 km2), Awayan (142,57 km2), Tebing Tinggi (257,25 km2), Paringin (100,04 km2), Paringin Selatan (86,80 km2), Juai (368,88 km2), seta Halong (659,84 km2).

Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3, Gambar 2.4, dan Tabel 2.2 berikut.

Sumber: RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2014

Gambar 2.3.Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Balangan (dalam Satuan km^2)

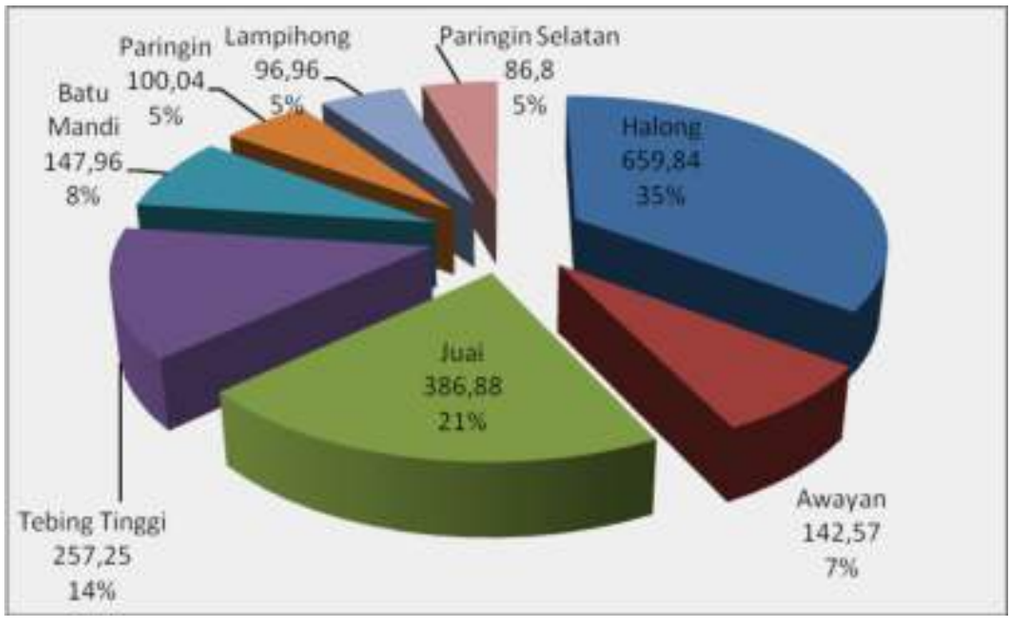

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2020

Gambar 2.4.Persentase Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Balangan(dalam Satuan km^2)

Tabel 2.2.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1	Lampihong	-	27
2	Paringin	2	14
3	Juai	-	21
4	Halong	-	23
5	Batu Mandi	-	18
6	Paringin Selatan	1	15
7	Awayan	-	23
8	Tebing Tinggi	-	12
	Jumlah	3	153

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2020

B. KondisiGeografis

KabupatenBalangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19

persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong.

Secara morfologi, wilayah Kabupaten Balangan terdiri dari daerah pegunungan di sisi Timur dan Utara serta dataran rendah hingga rawa di sisi Barat dan Selatan. Wilayah Kabupaten Balangan dengan dominasi permukaan lahan berupa kawasan hutan yang mencapai 48,11% dari luas wilayah kabupaten atau seluas 90.383 Ha, merupakan potensi besar sebagai kawasan tangkapan air bagi DAS dibawahnya. Wilayah Kabupaten Balangan secara umum merupakan dataran, perbukitan dan pegunungan (klasifikasi bentuk lahan absolut Van Zuidam, 1985). Dari klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Balangan mempunyai nilai kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen,15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kabupaten Balangan sebagian besar wilayahnya berada pada kemiringan 0-2 meter, yaitu sebesar 129.693 Ha mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Artinya sebagian besar wilayah Balangan berada pada daerah yang landai.

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Hanya sebesar 29.970 Ha saja yang terletak pada kelas kemiringan di atas 40 meter. Wilayah dengan kelas ketinggian di atas 40 meter ini hanya terdapat pada Kecamatan Halong, dan Awayan (lihat Tabel 2.2). Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Kecamatan Awayan dan Halong, memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

C. Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m di bawah permukaan laut (dpl) (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 persen yaitu mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

D. Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan.

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

E. Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, di antaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

1. Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh Sungai Pitap, Sungai Muning, Sungai Lok Batu, Sungai Juuh, Sungai Batumandi, Sungai Jauk, Sungai Pelasan serta Sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya.

2. Pola Pengaliran Dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan, yaknidi sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

3. Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya.

4. Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat di bagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada termasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering.

F. Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 133,3°C. Kelembaban udara relatif rata-rata harian di wilayah ini pada tahun yang sama mencapai 201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan, tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan ratarata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan.

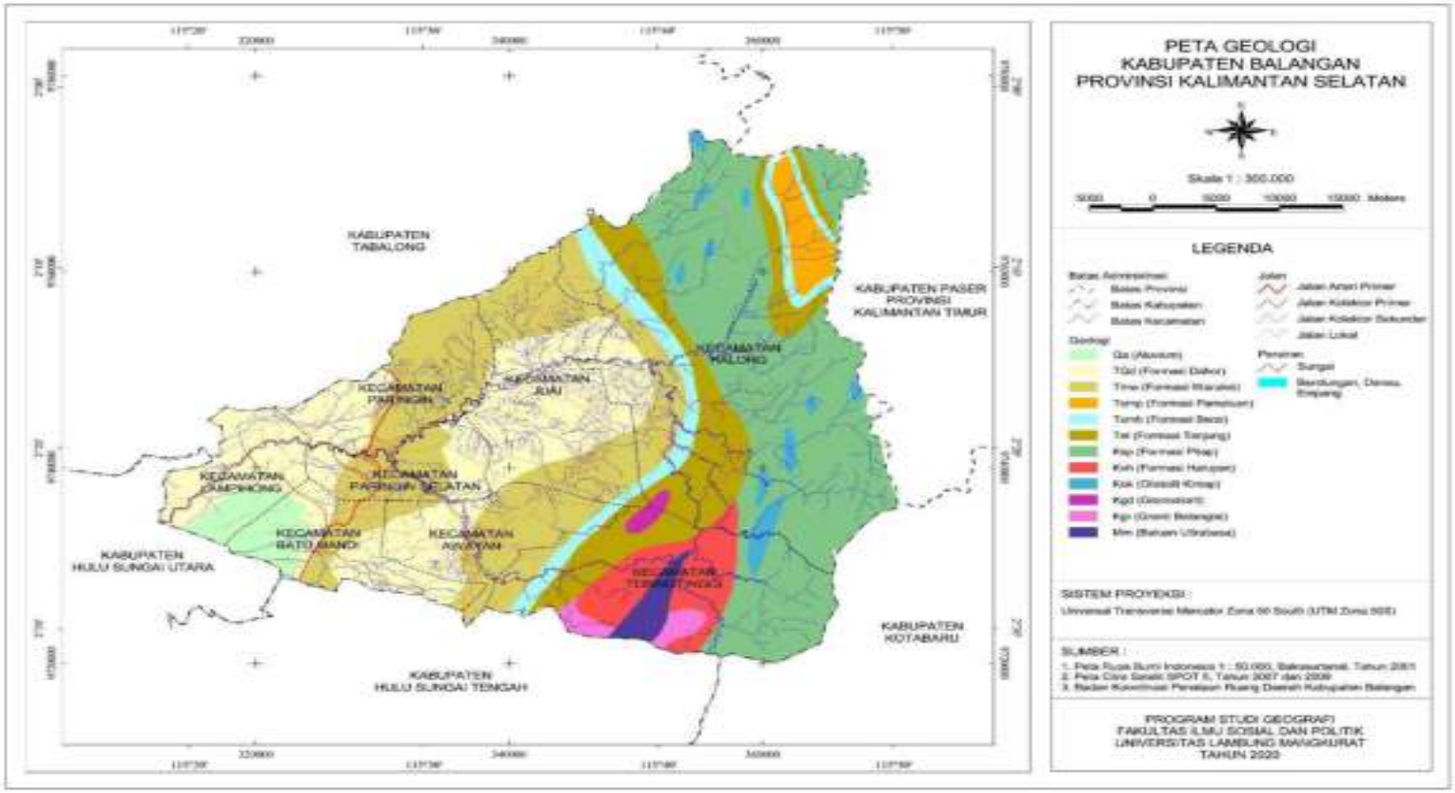

Sumber: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Balangan

G. Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan di sepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Gambaran penggunaanlahandapatdlihat pada Gambar 2.6 dan Tabel 2.3 berikut:

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, data dan grafik diolah 2021

Gambar 2.6
Persentase Luas Penggunaan lahan 2020

Tabel 2.3
Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan

No	Jenis Penggunaan Lahan (*Land Utilization*)	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah/*Wetland*	14.092,12
2	Tanah Bukan Sawah	94.737,12
	a. Kebun Campuran	163,01
	b. Ladang	197,01
	c. Kelapa Sawit	2.755,08
	d. Perkebunan	90.687,01
	e. Kolam	935,01
3	Bukan Lahan Pertanian	73.981,80
	a. Permukiman	2.899,01
	b. Hutan Lahan Kering Sekunder	13.797,40
	c. Hutan Lahan Kering Primer	46.830,01
	d. Rawa	349,01
	e.Semak Belukar	1,71
	f. Lahan Terbuka	305,13
	g. Bendung/Waduk	45,07
	h. Sungai	415,40
	i. Gosong sungai	13,70
	j. Pertambangan	9.314,33
	k. Timbunan Sampah	11,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.1.2 Potensi Kawasan Sumber Daya

Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Balangan adalah :

A. Sektor Pertanian

Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan daerah dari sektor

pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2020 penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 32 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18 persen. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjaganya bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi:

1. Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung, kedelai serta tanaman holtikultura lainnya.
2. Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah *Karet*dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan, *Sawit* dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi dan *Kelapa (Gula Aren)* dengan lokasi prioritaspengembangannyayaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
3. Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Burasdengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potongdengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
4. Sektor Perikananmerupakanpotensiuntuk Kawasan Agropolitanserta dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan, komoditi utama yang diunggulkan adalah Ikan Nila, Patin, Lele/Mujair, Ikan Mas.

Karet merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Balangan. Karena itu kenaikan atau penurunan harga karet akan berdampak terhadap kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang bergantung di sektor ini. Berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan, pada tahun 2010 luas perkebunan karet mencapai 34.433 Ha dengan luas perkebunan yang menghasilkan seluas

22.245 Ha dan total produksi sebanyak 26.713 ton atau 1.200 ton per hektar/tahun. Kemudian di tahun 2020 total luas area perkebunan karet menjadi 37.454 Ha, telah terjadi kenaikan luas area perkebunan produktif sebesar 8,77 persen dalam kurun waktu 10 Tahun.

Meskipun luasan area perkebunan cukup besar, pendapatan petani karet sangat bergantung pada perkembangan harga di pasar komoditi global dan di Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Menurut data Bank Dunia, harga karet dunia pada tahun 2020 dibandingkan 2010 secara nominal mengalami penurunan sebesar 53 persen. Di UPPB, rata-rata tingkat harga karet pada tahun 2020 sekitar Rp8.100 per bokar (bahan olah karet). Tingkat harga ini naik sekitar 15 persen dibandingkan rata-rata tingkat harga di tahun 2016 tetapi turun 7 persen dibandingkan tahun 2019. Sementara itu rata-rata harga jual di petani karet lebih rendah sebesar Rp2.000 per bokar dibandingkan dengan harga di UPPB. Atas dasar kondisi ini, diperlukan peranan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengangkat harga jual karet di tingkat petani dan mendorong pemanfaatan lahan perkebunan untuk pertanian hortikultura agar produktivitas dan penghasilan para petani karet meningkat.

B. Sektor Pertambangan

Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor Pertambangan dan Galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar, yaitu 58,91% pada tahun 2020.

Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti Bijih Besi, Kaolin, Lempung, Pasir Kuarsa, Batu Gamping, Pasir Batu bahkan Batu Bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan tersebut, terutama pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan.

C. Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha hotel dan restoran, transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran, dan penyelenggaraan paket pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah lokasi obyek wisata alam yang potensial di Kabupaten Balangan adalah sebanyak sembilan lokasi terdiri dari delapan lokasi obyek wisata alam dan satu lokasi obyek wisata religi. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata religi dan wisata budaya.

Potensi wisata terbaru yang akan dikembangkan adalah **Air Terjun Batarius** di Dusun Jajanang, Desa Mamigang, Kecamatan Halong, selain itu terdapat 10 objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan dan telah mendapatkan SK Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sepertiterlihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Objek Wisata yang Mendapatkan SK Pokdarwis

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Desa Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tayak	Desa Uren, Kecamatan Halong
3.	Gunung Hauk & Arus Deras Nanai	Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.	Gua Gunung Batu	Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.	Desa Wisata Rano Liyu	Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.	Baruh Bahinu Binjai	Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.	Taman Bunga	Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.	Racah Mampulang	Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.	Gunung Belawan	Desa Kapul, Kecamatan Halong

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, 2021

Objek wisata tersebut sebagian besar bisa terjangkau baik dengan kendaraan roda dua hingga roda empat, dan ada juga yang harus dijangkau dengan berjalan kaki. Namun dengan banyaknya kalangan milenial dan pemuda yang memiliki jiwa petualang serta minat akan keindahan pesona alam di pegunungan meratus Balangan yang masih sangat asri, membuat wisata tersebut ramai dikunjungi walaupun hanya untuk sekedar berfoto ria, mencoba destinasi wisata baru hingga membuat dokumentasi hasil kunjungan wisata. Selain akses yang menjadi kendala, pemenuhan infrastruktur pendukung juga sangat diperlukan guna memberikan rasa aman dan nyaman wisatawan. Di samping itu faktor promosi terhadap pesona wisata yang ada di Kabupaten Balangan juga harus ditingkatkan melalui berbagai media.

Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata mengalami peningkatan yang tidak signifikan, sebesar 0.32% di tahun 2016, menjadi 0,38% di tahun 2020. Potensi penerimaan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Tahun 2020 adalah sebesar 0,97% dan kemudian cenderung menurun karena dampak Covid-19 turun menjadi 0,39%, tetapi di proyeksikan untuk tahun-tahun berikutnya (2022-2026) bergerak naik dari 1,06% menjadi 1,25%. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Balangan dapat terus dilaksanakan tanpa melakukan eksploitasi terhadap keberadaan hutan lindung. Pada sisi yang lain pengembangan sektor pariwisata harus memperhatikan pengembangan potensi kawasan sentra produksi yang mendorong terbentuknya Kota Tani sebagai penyangga Kawasan Agropolitan.

D. Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Agropolitan, diartikan sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian dan desa- desa sentra

produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Kabupaten Balangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan adalah Paringin dan Batumand

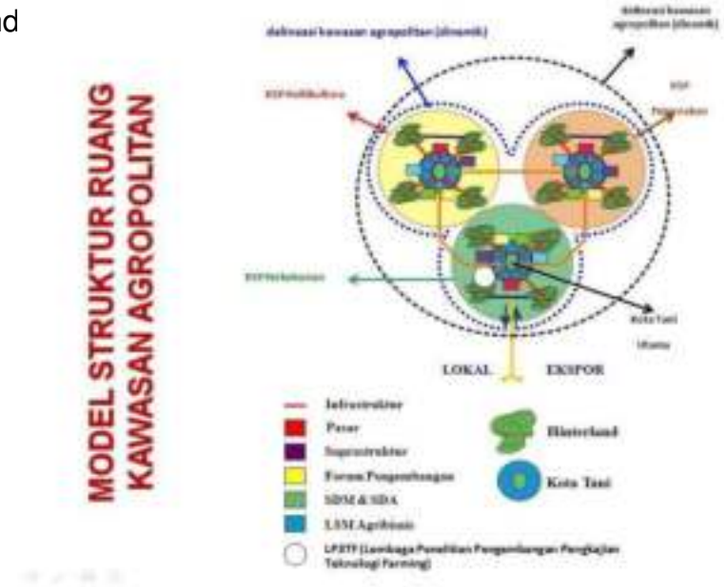

Gambar 2.7
Model Struktur Ruang Kawasan Agropolitan

1. Kota Tani Utama Paringin

Kota tani utama Paringin dengan desa pusat pertumbuhan Kota Paringin meliputi Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur, Desa Teluk Keramat, Desa Haur Batu dan Desa Gunung Pandau. Kota Paringin Kota Paringin sebagai Kota Tani Utama akan berperan sebagai daerah pusat pertumbuhan agribisnis. Kota Paringin sebagai Kota Tani Utama hal ini dikarenakan Kota Paringin memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perkotaan, memiliki pasar dengan skala regional. Pusat agropolitan, berfungsi sebagai:

a. Pusat pedagangan dan transportasi
b. Penyedia jasa pendukung pertanian
c. Pasar konsumen produk non-pertanian
d. Pusat industri pertanian *(agro-based industry)*
e. Penyedia pekerjaan non pertanian
f. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi, dan kabupaten

2. Kota Tani

Kawasan Batumandi adalah kota tani dan termasuk dalam kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan;
b. Lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di wilayah kabupaten Balangan yang juga merupakan bagian dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Sesuai dengan sifat dari Kota Tani yang merupakan pusat dari orientasi kawasan sentra produksi sekitarnya dengan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang lebih lengkap dibandingkan desa-desa yang akan menjadi Kawasan Sentra Produksi (KSP), maka pengembangan Kota Tani berada di Desa Batumandi dan sekitarnya yaitu; (*Desa Timbun Tulang, Desa Teluk Mesjid, Desa Bungur, Desa Riwa, Desa Mantimin, Desa Kasai dan Desa Guha).*Pada kawasan ini nantinya diharapkan akan dapat muncul sentra-sentra pengolahan hasil dari komoditi unggulan yang berada di KSP sekitarnya. Untuk itu sarana dan prasarana penunjang akan dikembangkan untuk dapat semakin memperkuat kemampuan kota tani ini untuk menjadi katalisator pertumbuhan dan perkembangan kawasan agropolitan

Sesuai arahan dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Identifikasi Lokasi Agropolitan dari Direktorat Bina Teknik Dirjen Cipta Karya PU tahun 1996 maka batasan dari Kawasan Sentra Produksi (KSP) memiliki deliniasi atau batas kawasan yang bersifat p*ermeable*/plastis/fleksibel. Artinya batas ini bukan merupakan batas yang mengikuti batas administrasi wilayah. Untuk itu, dalam aplikasi di kegiatan ini akan di bagi kawasan KSP dalam dua sentra yaitu KSP I dan KSP II.

a. Kawasan Sentra Produksi (KSP) I

Khusus untuk KSP ini secara internal kawasan yang nantinya diharapkan menjadi kawasaan lingkar pertama pengembangan Produksi Komoditi Unggulan adalah *desa Hamparaya, Banua Hanyar, Mampari, Kasai, Pelajau, Munjung, Karuh, Bakung Lok Batum Tarawin dan gunung Manau*.

b. Kawasan Sentra Produksi (KSP) II

Kawasan KSP II ini adalah kawasan produksi komoditi unggulan yang berada di Kecamatan Halong (pisang talas) dan Kecamatan Juai (labu). Pada kedua kawasan KSP ini diharapkan nantinya akan terjadi spesialisasi/pengkhususan pengembangan produk komoditi unggulan, yang kedepan nantinya dapat menjadi bahan baku untuk dapat diolah dan dipasarkan melalui sarana dan prasarana yang ada di Kota Tani Batumandi.

2.1.1.3 Struktur dan Pola Ruang

A. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan di Indonesia umumnya memilki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir. Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan.

1. Kawasan Perdesaan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian. Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

2. Kawasan Perkotaan

Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), kota diartikansebagaikesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut.

a. Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.
b. IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
c. Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

Arah pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam *subcluster of services*, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas dan kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman di sekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem klaster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian di sekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perspektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini.

Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (*network system*), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer. Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang

akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada desa pertanian, desa industri, dan desa wisata.

Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter perdesaan (*rural*) asli dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis), sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (*farm village type*), maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu.

Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian, sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni. Pusat-pusat permukiman di Desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada di sekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi.

Dalam Sistem Perkotaan, di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan. Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Tabel 2.5
Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan

Peran	Perkotaan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Batumandi (Kecamatan Batumandi)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan 2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong 3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan 4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi 5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai 6. Halong berada di Kecamatan Halong
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi 2. Pudak berada di Kecamatan Awayan 3. Bihara berada di Kecamatan Awayan 4. Tabuan berada di Kecamatan Halong 5. Mauya berada di Kecamatan Halong 6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin 7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan 8. Layap berada di Kecamatan Paringin 9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Balangan, 2014

Dalam sistem struktur ruang yaitu pembentukan peran dan fungsi perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Balangan meliputi

a. Mempercepat pengembangan Perkotaan Paringin dan Batumandi sebagai PKL dan PKLp melalui pengembangan paringin baru dan Batumandi sebagai Kota Agropolitan.
b. Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Batumandi sebagai fungsi PKLp dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kota tani dan jasa industri agribisnis (pengolahan pertanian) dengan daerah hinterland nya.
c. Mendorong pengembangan perkotaan Halong dan Tebing Tinggi sebagai perkotaan dengan fungsi PPK yang didukung dengan pengembangan Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Industri Ekowisata berbasis sumberdaya alam.
d. Meningkatkan pengembangan kota-kota yang berperan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ada di sekitar pertumbuhan perkotaan dengan fungsi PPK maupun desa-desa pendukungnya, melalui pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi.

Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah lingkungan yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten Balangan dalam kerangka pembangunan jangka panjang terbagi beberapa fungsi dan peran wilayah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayahnya, yaitu

a. Wilayah Kecamatan sebelah selatan dan barat yang meliputi kecamatan Batumandi dan Lampihong dengan kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: mendorong pertanian berkelanjutan pada dan agroindustri (investasi industri pengolahan dan industri pertanian), mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian tanaman pangan.
b. Wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan sebagai pusat kota yang dilayani oleh sistem jaringan jalan lingkar timur dan lingkar barat, perlu dilakukan pengendalian terhadap meningkatkan aktivitas pembangunan kawasan-kawasan perumahan.
c. Kecamatan Paringin, perlu dilakukan pengendalian dampak aktivitas pertambangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan.
d. Wilayah Batumandi, Lampihong, Paringin Selatan dan sepanjang DAS Sungai Balangan perlu didorong pertumbuhan aktivitas perikanan.

e. Wilayah kecamatan Awayan dan Juai merupakan basis komoditas karet di Kabupaten Balangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan no 9 tahun 2015, tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka disusunlah rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat di Kabupaten Balangan meliputi:

a. jaringan jalan dan jembatan, yang terdiriatas:
    1. jaringan jalan kewenangan Nasional yaitu jaringan jalan arteri primer(A1), terdiri atas ruas jalan:
        a) Desa Hamparaya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah) – Batumandi-Mantimin;
        b) Mantimin - Paringin; dan
        c) Paringin - Dahai/ Desa Padang Panjang (Batas Kabupaten Tabalong).
    2. jaringan jalan kewenangan Provinsi yaitu jaringan jalan kolektor primer(K1), terdiri atas ruas:
        a) Desa Teluk Karya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara) - Lampihong;
        b) Lampihong - Mantimin;
        c) Lampihong - Paringin;
        d) Paringin – Halong; dan
        e) Batumandi – Lokbatu - Tariwin.
    3. jaringan jalan kewenangan Kabupaten terdiri atas:
        a) rencana pengembangan jalan kolektor primer (K-1) yangmenghubungkan ibu kota Kabupaten dengan Kecamatan, terdiri atasruas jalan :
            1) Paringin - Awayan;
            2) Awayan - Tebing Tinggi; dan
            3) Jalan lingkar barat dan jalan lingkar timur di Kecamatan Paringindan Kecamatan Paringin Selatan.
        b) rencana pengembangan jalan kolektor sekunder (K-2) yangmenghubungkan antar ibu kota Kecamatan, terdiri atas ruas jalan :
            1) Lokbatu (Kecamatan Batumandi)-Muara Jaya (Kecamatan Awayan);dan
            2) Muaraninian-Awayan.

c) rencana pengembangan jalan lokal yang menghubungkan ibukotaKecamatan dengan pusat Desa serta menghubungkan antar Desa danjalan lingkungan

4. jaringan jalan khusus antara lain :
   a) jaringan jalan yang melalui Desa Lasung Batu, Desa Sungai Ketapi,Desa Dahai di Kecamatan Paringin;
   b) jaringan jalan pada ruas Uren - Mamantang - Batas Kabupaten PaserProvinsi Kalimantan Timur;
   c) jaringan jalan pada ruas Tundakan – Pamurus – Balang; dan
   d) jaringan jalan pada ruas Handiwin – Gunung Riut – Puyun – BatasKabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
   e) jaringan jalan strategis Provinsi pada ruas Halong – Magalau (KabupatenKotabaru).

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; terdiriatas:
   1. terminal penumpang; yakni:
      a) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Paringin Kota, KecamatanParingin;
      b) rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Kelurahan BatuPiring atau Desa Haur Batu; dan
      c) rencana pengembangan sub terminal penumpang di Desa Batumandi,Desa Halong, Desa Simpang Tiga, Desa Mungkur Uyam, Desa PutatBasiun, Desa Simpang Nadung.
   2. terminal barangyaknidi Desa Haur Batu, Kecamatan Paringin.

c. jaringan layanan lalu lintas, yang terdiriatas:
   1. trayek angkutan perkotaan, yang terdiri atas :
      a) dilintasi oleh angkutan umum dalam sistem jaringan pelayananangkutan umum kota antar Provinsi (AKAP) berupa trayekBanjarmasin - Paringin – Samarinda, Paringin – Halong – Paser.
      b) dilintasi oleh rute angkutan umum kota dalam Provinsi (AKDP) berupatrayek Pantai Hambawang - Barabai - Batumandi - Paringin danParingin - Lampihong – Amuntai dan Paringin – Halong – Kotabaru
      c) rencana pengembangan angkutan umum dalam sistem jaringanpelayanan angkutan umum kota dalam Provinsi (AKDP) yang

belumterlayani berupa trayek Batumandi – Mantimin – Lampihong – Amuntai.

d) rencana rute angkutan umum dalam sistem jaringan pelayananangkutan umum kota dalam Kabupaten (AKDK) meliputi :
   1) trayek Paringin - Juai - Halong;
   2) trayek Paringin - Awayan – Tebing Tinggi;
   3) trayek Batumandi – Lok Batu – Awayan – Tebing Tinggi;
   4) trayek Batumandi – Lok Batu – Awayan – Juai – Halong;
   5) trayek yang melintasi jalan lingkar barat dan lingkar timur yangdiintegrasikan dengan pengembangan terminal angkutan umum.

2. trayek angkutan perdesaan merupakan trayek rintisan yang belumterlayani oleh trayek Angkutan Umum Kota Antar Provinsi (AKAP),Angkutan Umum Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Umum KotaDalam Kabupaten (AKDK).

Jaringan Energi

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan meliputi standar kebutuhan perencanaan listrik yang mencapai kapasitas rumah tangga mencapai 900 watt, untuk fasilitas umum mencapai 30% dari fasilitas rumah tangga, untuk penerangan jalan mencapai 2% dari rumah tangga. Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan disuplai oleh 2 (dua) Gardu Induk yaitu GI Tanjung di Kabupaten Tabalong dan GI Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan jaringan transmisi adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan GI Amuntai dan dan GI Tanjung.

Adapun perencanaan pengembangan jaringan energi di Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dilakukan dengan :

a. Penambahan daya dan jaringan energi listrik di seluruh kecamatan disesuaikan dengan permintaan;
b. Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kabupaten Balangan;
c. Pembangunan jaringan energi listrik; (di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi);
d. Pengusahaan listrik masuk desa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat;

e. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan;
f. Pengusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik; dan
g. Mengusahakan sumber energi sebagai pengganti energi bahan bakar minyak, meliputi energi tidak terbarukan (batubara, gas metan, dll), dan terbarukan (tenaga air, tenaga matahari, bio gas, bio diesel dan limbah);
h. Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana energi dan sistem jaringan energi disiapkan dengan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten.

1. Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten terdiri dari sistem jaringan kabel dan nirkabel. Adapun perencanaan untuk peningkatan pelayanan jaringan kabel berupa pelayanan telepon umum dan layanan sambungan tak bergerak (fixed/*mobile telephone*) dilakukan oleh PT. Telkom yaitu meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis meliputi Kecamatan Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, dan Kecamatan Batu Mandi dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Eksisting menara BTS di Kabupaten Balangan ada di Kecamatan Lampihong (Desa Simpang Tiga dan Desa Lajar), Juai (Desa Marias, Desa Mungkur Uyam, Desa Tawahan), Halong (Desa Halong), Paringin Selatan (Desa Margo Mulyo, Desa Harapan Baru), Paringin (Desa Balida, Kelurahan Paringin Kota, Desa Lesung Batu dan Desa Dahai), Awayan (Desa Pandam, Desa Pulantan, Desa Putat Basiun), Batumandi (Desa Batumandi, Desa Mampari). Direncanakan untuk kedepannya pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di setiap desa-desa pusat pertumbuhan dan desa-desa pelosok dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi.

Sedangkan untuk perencanaan sistem jaringan nirkabel dalam hal ini adalah *mobile cellular service* oleh operator cellular berupa peningkatan jaringan dan cakupan pelayanan melalui pembangunan (BTS) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembangunan menara jaringan telekomunikasi/ BTS meliputi Kelurahan Batu Piring, Kelurahan Paringin Timur, Desa Tabukan, Desa Mauya, Desa Simpang Nadung, Desa Tebing Tinggi, dan Dayak Pitap;

b. Rencana pengembangan menara jaringan telekomunikasi untuk melayani kebutuhan telekomunikasi pada desa-desa pusat pertumbuhan dan terutama pada wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi; dan
c. Rencana pengembangan serat optik yang meliputi Kecamatan Batu Mandi, Paringin Selatan dan Paringin;

2. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan sumber daya air meliputi wilayah sungai, cekungan air tanah, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, dan sistem pengendalian banjir. Wilayah sungai (WS) Kabupaten Balangan adalah WS Barito mencakup Daerah Aliran Sungai Barito. Cekungan Air Tanah Kabupaten Balangan adalah Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin. Jaringan irigasi Kabupaten Balangan dibagi menjadi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Bendung Pitap di Kecamatan Awayan yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan irigasi, meliputi : D.I. Paringin; D.I. Putat Basiun; D.I. Lok Batu; dan D.I. Sikuntan.

Sedangkan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : D.I. Batu Mandi; D.I. Lok Batu; D.I. Paran; D.I. Suapin; dan D.I .Tundakan. Untuk meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi direncanakan pembangunan Bendung Bihara dalam rangka mengatasi permasalahan air pada daerah hulu agar pembagian aliran ke daerah hilir dapat terbagi dengan baik. Bendung Pitap yang merupakan bendungan nasional dalam jaringan irigasi nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder.

Rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi:

a. Rencana pengembangan kapasitas jaringan irigasi provinsi di Bendungan Balangan;
b. Rencana pengembangan daerah irigasi (DI) Provinsi berupa D.I Bendung Pitap;
c. Rencana pengembangan saluran rawa provinsi di Kecamatan Batu Mandi;
d. Rencana pengembangan daerah rawa di Kecamatan Batu Mandi;
e. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan
f. Pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Rencana jaringan air baku untuk air minum meliputi:

a. Rencana pengembangan sumber air baku, (Bendung Pitap, Bendung Bihara; dan Sungai Balangan.
b. Saluran Air Baku (SAB) Perusahaan Air Minum di Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional.

Sistem pengendalian banjir, meliputi: pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai Balangan.

3. Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem drainase, sistem jaringan air limbah, jalur evakuasi bencana, sistem proteksi kebakaran. Beberapa rencana yang dapat diuraikan yakni:

a. Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Merah di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong dengan cakupan pelayanan Kabupaten Balangan. Sistem pengelolaan direncanakan menggunakan sistem *sanitary landfill* untuk sampah domestik dan sampah non domestik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPA sistem *sanitary landfill* dan TPA sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

Rencana pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diarahkan untuk diletakkan di pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan. Sedangkan pada fasilitas- sosial dan fasilitas umum wajib dilengkapi dengan menempatkan sarana persampahan berupa container minimal tempat sampah/ bak sampah. Untuk memudahkan pembuangan sampah dan penerapan konsep 3R maka untuk TPS diterapkan sistem pemilahan sampah, untuk sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa didaur ulang.

RencanapengembanganTempatPengolahan Sampah dengan konsep 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang yang terdapat di Kecamatan Paringin. Kemudian dari segi

pengangkutan diperlukan adanya sistem pengaturan dan penjadwalan untuk pengambilan sampah sehingga sampah tidak sempat menumpuk karena tidak terangkut. Selain itu juga perlu diperhatikan manajemen organisasi operasional kebersihan dan persampahan yaitu peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi operasional kebersihan dan peningkatan peran masyarakat dan swasta untuk pengelolaan persampahan.

b. Rencana sistem jaringan air minum

Rencana sistem jaringan air minum dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Saluran Air Baku (SAB) perusahaan air minum Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional;
2) Rencana jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersih,
3) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.

4. Pengembangan Fasilitas Rumah Sakit Untuk Pelayanan Lanjutan

RSUD Balangan sedang dalam upaya meningkatkan status akreditasi RS. Berdasarkan hasilDiskusiKelompokTerpumpun dengan pihak RSUD Balangan, ditemukan permasalahan yang sedang dihadapi adalah standard bangunan, luas ruangan, ruang isolasi Covid-19, SDM kesehatan, fasilitas pemeriksaan penunjang seperti CS-scan masih belum ada, pengeluaran banyak untuk pembayaran gaji kontrak/honor, serta *Bed Occupancy Rate (BOR)* dan *Length of Stay (LOS)* masih belum sesuai standar.

Upaya renovasi beberapa ruangan sudah pernah dilakukan, tapi karena keterbatasan lahan dan luas bangunan, maka pemenuhan standard bangunan dan luas ruangan masih sulit dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dipertimbangkan untuk: (1) Kemungkinan membangun RS di lahan baru yang sesuai standard dan memenuhi jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan (2) Formasi ASN SDM kesehatan (3) Pengadaan fasilitas pemeriksaan pemeriksaan penunjang seperti CT-scan.

2.1.1.4 Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi

kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kabupaten Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha.

Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 Ha atau sekitar 41,44 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 persen); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 persen); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 persen); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 persen); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 persen); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 persen); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 persen); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 persen).

2.1.1.5 Rencana Kawasan Budidaya

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007, rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 persen. Adapun sebaran kawasan budidaya berada di seluruh wilayah yang meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 persen); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 persen); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 persen); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 persen); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 persen); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 persen); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 persen) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 persen).

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian,

Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.

2.1.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi Kawasan bencana di Kabupaten Balangan secara umum berada di wilayah Kabupaten Balangan bagian Timur dan tengah tepatnya di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi, Sedangkan potensi rawan bencana lainnya adalah rawan banjir yang berada pada areal sekitar Sungai Balangan dan Sungai Pitap yakni sekitar Kecamatan Lampihong, Paringin dan Kecamatan Juai. Berikut merupakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Balangan:

1. Perkembangan penduduk perlu diawasi dan dikendalikan dan atau menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam dengan cara reboisasi.
2. Pencegahan terhadap longsor dapat memanfaatkan unsur alam, seperti penanaman pohon pada wilayah potensial longsor.
3. Pengembangan organisasi masyarakat, yang siap dan siaga terhadap kemungkinan tejadinya bencana alam.
4. Pembuatan *Check Dams* penahan erosi di lereng gunung dan celah antar bukit dan atau pembuatan DAM penahan dan kantong-kantong pasir yang mengatur erosi di daerah pegunungan.
5. Membangun sumur resapan di area pemukiman untuk meresapkan air hujan ke tanah.
6. Melindungi dan meningkatkan fungsi hutan sebagai sarana penyimpan air.
7. Menjaga kolam-kolam penampungan dan rawa sebagai penyangga air dan sumber air sungai.
8. Membangun *Check Dams* di hulu untuk menghambat aliran sedimen ke hilir.
9. Konservasi tumbuhan pada daerah aliran sungai sebagai daerah peresapan air.

Potensi bencana yang sudah diantisipasi melalui mitigasi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Balangan antara lain: kebakaran, banjir, longsor, cuaca ekstrim, dan angin puyuh.

1. Kebakaran

Potensi bencana kebakaran biasa disebabkan karena kondisi lingkungan yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan jarak antar bangunan yang sangat dekat. Kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran, rata-rata adalah kawasan kumuh yang memiliki kondisi fisik bangunan yang terbuat dari

kayu, serta memiliki jarak antar bangunan yang sangat rapat. Kebakaran terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Bencana kebakaran di Kabupaten Balangan tercatat dalam Kabupaten Balangan dalam angka memiliki rata-rata frekuensi terjadi bencana kebakaran dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 107 kali. Frekuensi kebakaran paling tinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 29 kali (lihat Tabel 2.6). Frekuensi kebakaran dari Tahun 2016-2019 semakin meningkat, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kondisi fisik bangunan, dimana perumahan khususnya perumahan perkampungan dan perumahan di kawasan kumuh yang terdapat di Kabupaten Balangan masih menggunakan bahan dasar dari kayu. Selain itu juga dari hasil survey lapangan terhadap kawasan kumuh terhadap jarak antar bangunan di Kabupaten Balangan, tercatat sekitar 60% rumah dikawasan kumuh Kabupaten Balangan memiliki jarak antar bangunan berkisar antara 1-2,5 meter dan juga pengaruh cuaca yang sangat dominan atau kemarau Panjang pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 frekuensi kebakaran menurun menjadi hanya 19 kali kejadian.

Tabel 2.6
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	2 Kali	-	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	-	2 Kali	10 Kali
2017	3 Kali	2 Kali	1 Kali	3 Kali	1 Kali	4 Kali	2 Kali	6 Kali	22 Kali
2018	7 Kali	2 Kali	1 Kali	4 Kali	6 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	27 Kali
2019	4 Kali	6 Kali	-	2 Kali	3 Kali	7 Kali	1 Kali	6 Kali	29 Kali
2020	4 Kali	2 Kali	-	2 Kali	1 kali	2 kali	3 Kali	5 Kali	19 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

2. Banjir

Bencana banjir terjadi akibat beberapa faktor, berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Jumlah frekuensi bencana banjir di Kabupaten Balangan dari dari Tahun 2016-2020 adalah sebanyak 158. Jumlah banjir paling tinggi di Tahun 2017 yaitu sebanyak 87 kali (lihat Tabel 2.7) dimana pada tahun 2017 Kecamatan yang paling sering mengalami kejadian bencana Banjir pada tahun 2017 adalah Kecamatan Juai

mengalami kejadian bencana banjir sebanyak 38 kali, Kecamatan Halong 22 kali dan kecamatan Lampihong sebanyak 20 kali.

Tabel 2.7
Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	4 Kali	4 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	-	2 Kali	12 Kali
2017	22 Kali	38 Kali	-	2 Kali	-	3 Kali	2 Kali	20 Kali	87 Kali
2018	5 Kali	4 Kali	-	-	-	2 Kali	-	4 Kali	15 kali
2019	3 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	-	1 Kali	-	13 Kali
2020	2 Kali	10 kali	2 Kali	2 Kali	4 Kali	3 Kali	3 Kali	5 kali	31 kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Setelah tahun 2017, potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Balangan cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2018 kejadian banjir sebanyak 15 kali dan di tahun 2019 kejadian banjir turun menjadi 13 kali bahkan di tahun 2019 Kecamatan Paringin dan Kecamatan Lampihong tidak mengalami kejadian bencana banjir, namun di 2020 menaik menjadi 31 kali. Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap. Tingkat potensi banjir di Kabupaten Balangan terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni potensi banjir dengan tingkat tinggi, tingkat menengah dan tingkat rendah (lihat Tabel 2.8). Tingkat potensi banjir yang terdapat di Kabupaten Balangan berada pada kisaran tingkat menengah dan rendah. Potensi banjir menengah terdapat disebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Tebing Tinggi, Awayan, Lampihong dan Paringin Selatan. Potensi banjir rendah ada di Kecamatan Batu Mandi dan Kecamatan Paringin. Kabupaten Balangan tidak ada daerahnya yang memiliki potensi banjir tinggi.

Tabel 2.8
Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Halong	-	Bangkal	Marajai
	-	Binju	Binuang Santang
	-	Binjai Punggal	Halong
	-	Baruh Panyambaran	Kapul
	-	Gunung Riut	-
	-	Tabuan	-
	-	Mauya	-
	-	Mantuyan	-
	-	Buntut Pilanduk	-
Juai	Teluk Bayur	Bata	Buntu Karau
	Mungkur Uyam	Mihu	-
	-	Lalayau	-
	-	Galumbang	-
Tebing Tinggi	-	Langkap	Gunung Batu
	-	Mayanau	Sungsum
Awayan	-	Tundakan	-
	-	Ambakiang	-
	-	Badalungga	-
	-	Badalungga Hilir	-
	-	Awayan	-
Paringin Selatan	-	Baruh Bahinu Dalam	Murung Abuin
Paringin	-	Paringin Timur	Layap
	-	-	Paringin Kota
	-	-	-
Batumandi	-	Banua Hanyar	-
	-	Teluk Mesjid	-
	-	Batumandi	-
Lampihong	Mundar	Matang Hanau	Papuyuan

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yangada di daerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sendimentasi. Jumlah desa yang mengalami bencana banjir di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir
Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Kecamatan	Tahun				
	2011	2014	2018	2019	2020
Halong	12	18	19	3	6
Juai	8	9	14	5	11
Tebing Tinggi	4	7	5	1	-
Batu Mandi	-	4	7	4	5
Awayan	5	13	15	1	4
Lampihong	8	11	9	-	6
Paringin	-	4	2	2	3
Paringin Selatan	1	8	1	-	1
Total	38	74	72	16	36

Sumber : BPBD kabupaten Balangan, 2021

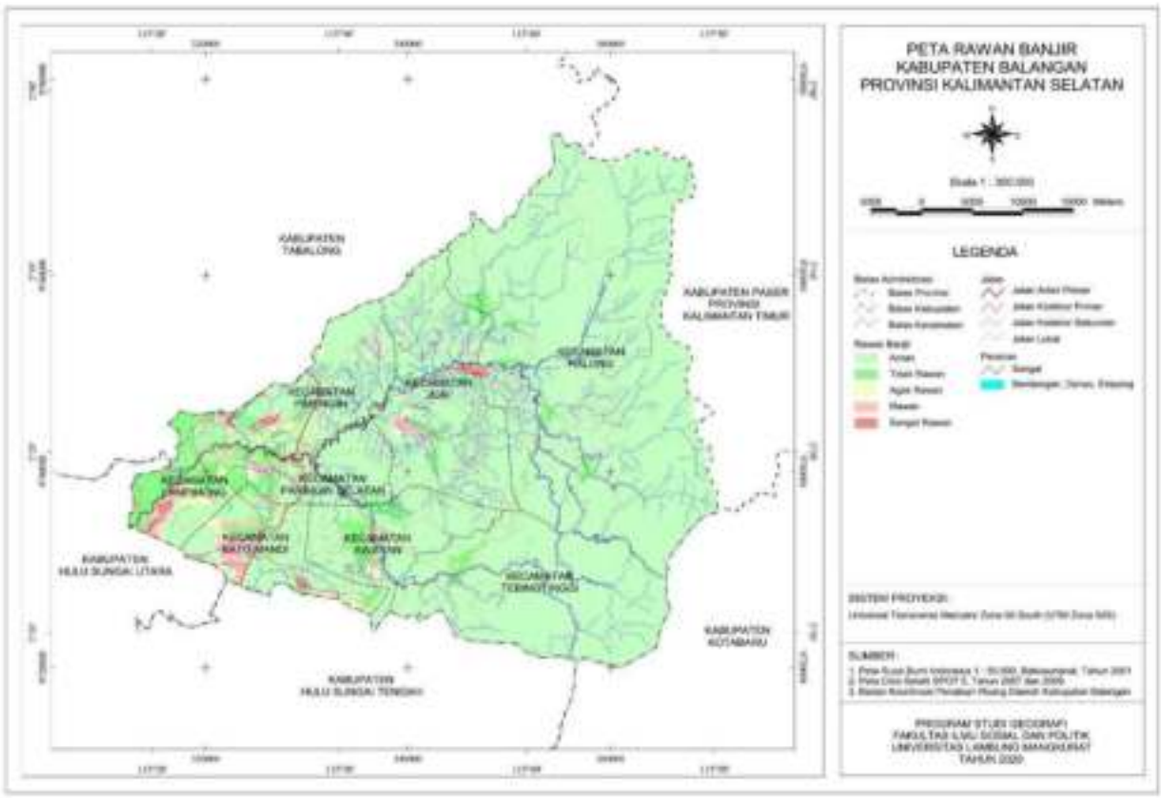

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Gambar 2.8.
Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan

3. Tanah Longsor/Tanah Amblas

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan.

Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir.

Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan. Potensi dapat terjadi di sekitar daerah kemiringan lereng 25 - 40% dan lebih dari 40% dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2018 (lihat Tabel 2.10). Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (*mass movement*) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan.

Tabel 2.10
Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Tanah Longsor
Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halong	3	-	-	2	4
Juai	-	-	1	-	2
Tebing Tinggi	-	3	2	-	-
Batu Mandi	-	-	-	-	-
Awayan	-	-	-	-	-
Lampihong	1	-	4	3	2
Paringin	-	-	1	1	2
Paringin Selatan	1	-	5	2	-
Total	5	3	13	8	10

Sumber : BPBD kabupaten Balangan, 2021

Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Balangan terjadi di sebagian besar kecamatan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Awayan, Tebing Tinggi, Paringin, Paringin Selatan, Lampihong. Kecamatan yang tidak ditemukan bencana tanah amblas hanya di Kecamatan Batumandi dari Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 2.11). Bencana tanah amblas paling tinggi terjadi pada Tahun 2018. Jumlah kejadian tanah amblas di Kabupaten Balangan dari Tahun 2015-2020 sebanyak 52 kali.

Tabel 2.11
Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	-	-	-	2 Kali	-	3 Kali	-	-	5 Kali
2017	3 kali	1 Kali	2 Kali	1 kali	-	5 Kali	5 Kali	1 Kali	18 Kali
2018	5 Kali	2 Kali	-	-	-	3 Kali	3 Kali	8 Kali	21 Kali
2019	1 Kali	-	-	-	-	-	3 Kali	4 Kali	8 Kali
2020	3 Kali	1 kali	-	-	-	4 Kali	-	2 Kali	10 kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

4. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim termasuk salah satu jenis bencana di Kabupaten Balangan. Bencana initerjadi disebagian besar kecamatan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Awayan, Batumandi, Paringin, Paringin Selatan, dan Lampihong. Kecamatan yang tidak ditemukan bencana cuaca ekstrim hanya di Kecamatan Tebing Tinggi dari Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 2.12). Bencana cuaca ekstrim paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dan pada tahun 2017 tidakadakejadiansamasekali.

Tabel 2.12
Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	-	-	-	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	1 Kali	-	1 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	14 Kali
2019	4 Kali	1 Kali	-	1 Kali	5 Kali	3 Kali	8 Kali	4 Kali	26 Kali
2020	2 Kali	-	-	6 Kali	4 Kali	3 Kali	7 Kali	10 kali	32 kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

5. Angin Puyuh

Bencana angin puyuh di Kabupaten Balangan selama lima Tahun terakhir terjadi sebanyak dua kali di Kecamatan Paringin, sementara Kecamatan yang lain relatif lebih aman dari bencana angin puyuh.

2.1.1.7 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan tahun 2020 berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2020 adalah 132.103 jiwa dengan luas wilayah 1.878,30 km². Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 70,33 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Balangan setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang paling signifikan adalah pada tahun 2017. Perkembangan penduduk Balangan dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut:

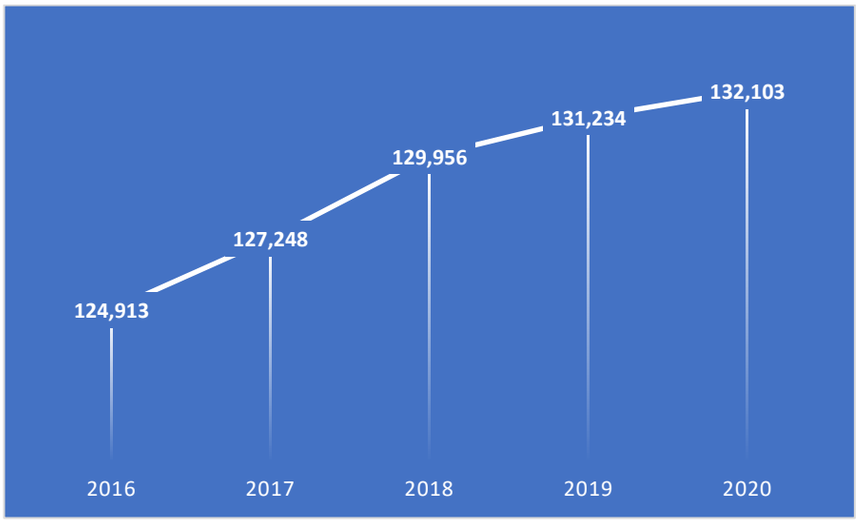

Sumber : Agregat Kependudukan Kabupaten Balangan 2016 -2020

Gambar 2.9
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan
Tahun 2016 – 2020 (dalam jiwa)

Penyebaran penduduk Balangan relatif merata antar kecamatan, kecuali untuk Kecamatan Tebing Tinggi yang populasinya 7.257 jiwa atau mencakup hanya 5,49 persen dari jumlah penduduk Balangan. Kecamatan Halong adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Kecamatan terluas ini memiliki populasi 20.736 jiwa, kemudian disusul Kecamatan Paringin dengan populasi 19.224 jiwa. Persentasependuduk per kecamatandapatdilihat pada Gambar 2.10 berikut:

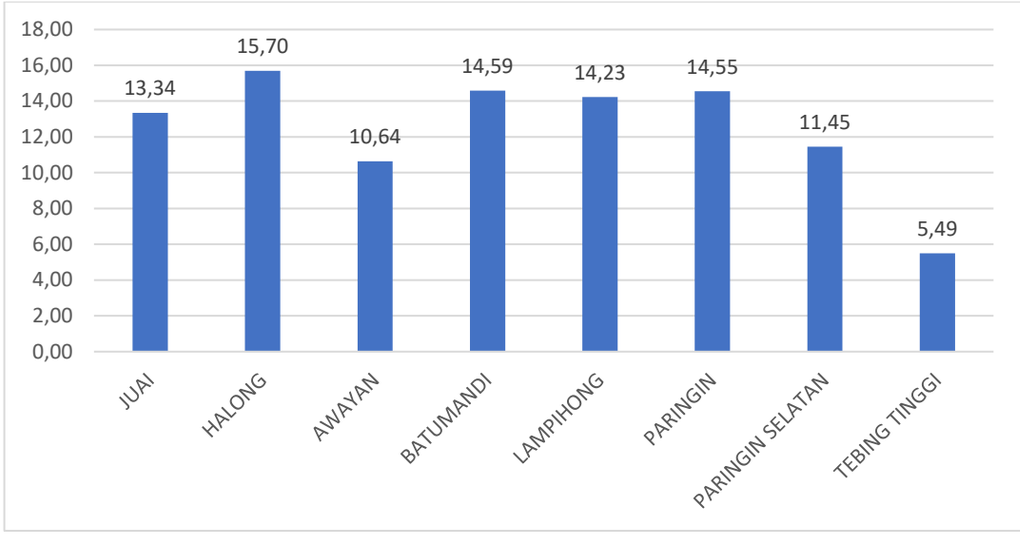

Sumber : Agregat Kependudukan Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan
Tahun 2020 (dalam jiwa*)*

Dari data jumlah penduduk tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki (66.863 jiwa) lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan (65.240 jiwa), selisihnya 1.623 jiwa. Hal ini dapat dikatakan bahwa antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama atau sebanding. Perkembangan penduduk Kabupaten Balangan tahun 2020 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut.

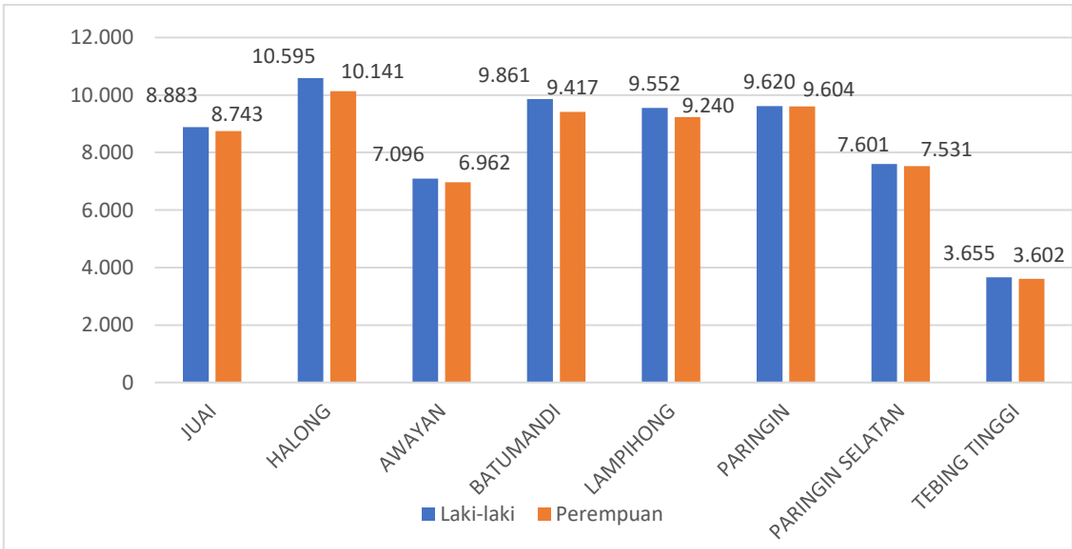

Sumber : Agregat Kependudukan Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.11
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan
Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2020 (dalam jiwa)

Jumlah penduduk Balangan 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar itu pemerintah perlu menyiapkan perencanaan dalam hal peningkatan pemerataan kesejahteraan baik pangan, kesempatan kerja, pendidikan kesehatan maupun perumahan di masa mendatang. Komposisi penduduk Kabupaten Balangan yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok umur muda, yakni kelompok umur 05-09 tahun dan 30-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Balangan memiliki populasi penduduk muda yang relatif besar seperti seperti digambarkan oleh piramida penduduk dengan karakteristik expansif. Bentuk piramida seperti ini umumnya dijumpai di negara-negara berkembang, disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Ditinjau dari rasio jenis kelamin per kelompok umur, persentase penduduk laki-laki hampir pada setiap kelompok umur lebih besar dari pada penduduk perempuan. Namun pada kelompok umur tua (50 thn ke atas) terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Dapat dikatakan bahwa pada usia senja penduduk perempuan lebih tinggi harapan hidupnya dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, penduduk usia muda (usia di bawah 15 tahun) sebesar 25,5 persen, penduduk usia produktif (15-64 tahun) 70,92 persen dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) 3,56 persen. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif ini mengimplikasikan tersedianya angkatan kerja dan basis konsumen yang besar dan potensial.

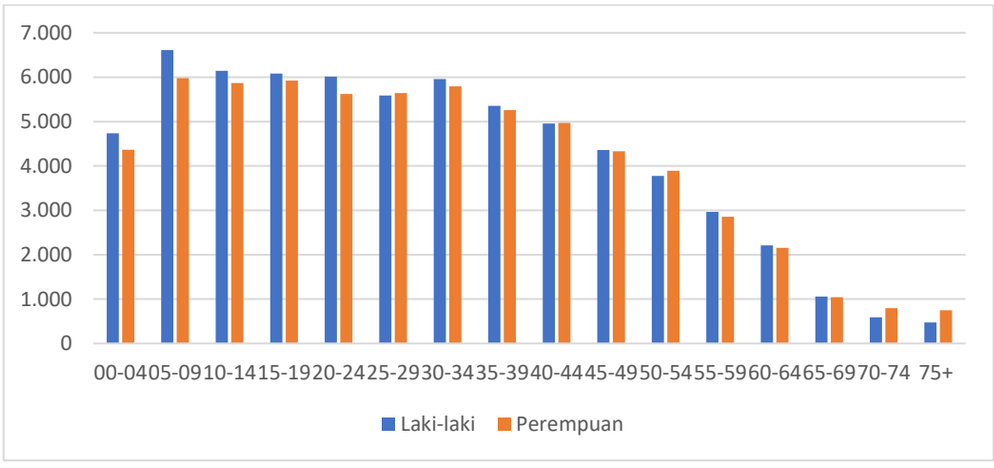

Sumber : Agregat Kependudukan Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.12
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 10,72 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,31 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 11,03 triliun rupiah. Menurunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Namun Jika dilihat PDRB tanpa Batu Bara pada tahun 2020 sebesar 4,406 Triliun rupiah naik sebesar 0,02 Trilyun dibandingkan tahun 2019.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 9,41 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,18 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Balangan mengalami perlambatan ekonomi ekonomi sekitar 0,71 persen. Penurunan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha akibat dampat Pandemi Covid-19.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah) 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,167,004	1,186,809	1,251,211	1,340,489	1,311.84
B	Pertambangan dan Penggalian	5,859,618	6,259,742	6,679,597	6,650,900	6,316.79
C	Industri Pengolahan	180,255	200,614	207,478	213,921	212.25
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,926	3,406	3,891	4,136	4.42
E	Pengadaan Air	21,567	23,368	25,985	28,297	30.15
F	Konstruksi	411,386	446,641	477,798	503,310	501.39
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	480,283	544,165	590,463	647,006	639.48
H	Transportasi dan Pergudangan	173,724	186,633	204,302	222,171	217.85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,695	32,339	36,442	40,135	40.27
J	Informasi dan Komunikasi	120,700	130,522	143,021	155,062	157.48
K	Jasa Keuangan da Asuransi	27,916	31,510	35,306	39,014	40.66
L	Real Estate	87,384	97,461	105,219	110,059	115.76
M,N	Jasa Perusahaan	6,157	6,897	7,699	8,617	8.68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	424,624	445,910	480,739	535,640	553.30
P	Jasa Pendidikan	296,927	326,072	350,089	373,121	396.31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,053	86,727	94,588	104,786	110.86
R, S, T, U	Jasa Lainnya	48,292	53,002	58,170	63,700	65.42
PDRB		9,418,511	10,061,818	10,751,68	11,028,52	10,722.93
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		3,558,893	3,802,076	4,072,401	4,389,464	4.406,140

Sumber : BPS Kab.Balangan, 2020

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah) 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	926,620	926,020	971,677	1,010,308	992,17
B	Pertambangan dan Penggalian	5,917,876	6,063,905	6,219,901	6,384,434	6,142,74
C	Industri Pengolahan	130,222	137,217	141,595	145,041	140,77
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,107	2,168	2,336	2,453	2,55
E	Pengadaan Air	16,453	17,393	18,627	20,045	21,27
F	Konstruksi	304,126	324,614	332,339	339,689	339,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Rearasi Mobil dan Sepeda Motor	350,330	378,769	392,775	411,099	407,34
H	Transportasi dan Pergudangan	128,655	134,872	141,492	148,585	146,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,431	23,878	25,454	27,347	27,28
J	Informasi dan Komunikasi	100,739	105,965	110,350	114,000	122,32
K	Jasa Keuangan da Asuransi	20,336	22,060	23,880	25,771	26,94
L	Real Estate	68,419	75,044	79,136	81,398	83,42
M,N	Jasa Perusahaan	4,325	4,661	5,019	5,418	5,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	289,893	296,874	308,239	329,470	341,45
P	Jasa Pendidikan	218,992	233,540	244,420	255,906	265,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,654	61,317	64,826	68,276	72,28
R, S, T, U	Jasa Lainnya	34,278	36,453	39,055	41,749	41,26
PDRB		8.593,456	8.844,750	9.121,121	9.410,67	9.178,01
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		2.675,580	2.780,845	2.901,220	3.026,555	3.035,27

Sumber : BPS Kab. Balangan, 2020

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / *rebalancing* dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier

(misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama.

Namun demikian, pada prakteknya kondisi tersebut tidak selalu berjalan. Kondisi yang dijelaskan di atas, berlangsung di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari mulai menurunnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori lapangan usaha pertambangan. Pada tahun 2016 share kelompok kategori primer ini mencapai 76,37 persen, dan di tahun 2020 share-nya menjadi 71,14 persen atau berkurang sebesar 5,23% selama kurun waktu 5 tahun. Penurunan *share* kategori lapangan usaha primer dalam hal ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (perdagangan, real estat dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih agraris.

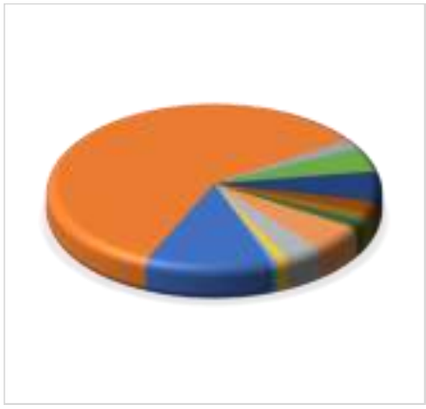

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,23
Pertambangan dan Penggalian	59,91
Industri Pengolahan	1,98
Pengadaan Listrik, Gas	0,94
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28
Konstruksi	4,68
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,96
Transportasi dan Pergudangan	2,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38
Informasi dan Komunikasi	1,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38
Real Estate	1,08
Jasa Perusahaan	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,16
Jasa Pendidikan	3,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,03
Jasa Lainnya	0,61
PDRB	100

Gambar 2.13
Distribusi PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

PDRB Kabupaten Balangan masih sangat didukung oleh komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2016-2020 sebesar 62,24 %. Tetapi ada kecenderungan terjadi penurunan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2016 sebesar 62,21% turun menjadi 58,91% pada tahun 2020. Meskipun demikian, komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan.

Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan.Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2020, pangsa PDRB kategori ini mencapai 5,96 persen. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Tabel 2.15
Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Kategori	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018*	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishery	12.39	11.80	11.64	12.14	12.23
B	Pertambangan dan Penggalian /Mining and Quarrying	62.21	62.21	62.12	60.24	58.91
C	Industri Pengolahan /Manufacturing	1.91	1.99	1.93	1.94	1.98
D	Pengadaan Listrik, Gas / Electricity and Gas	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
E	Pengadaan Air / Water Supply. Sewerage, Waste Management And Remediation Activities	0.23	0.23	0.24	0.26	0.28
F	Konstruksi / *Construction*	4.37	4.44	4.44	4.56	4.68

G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale And Retail Trade; Repair of Motor Vehicles And Motorcycles	5.10	5.41	5.49	5.86	5.96
H	Transportasi dan Pergudangan /Transportation And Storage	1.84	1.85	1.90	2.01	2.03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation And Food Service Activities	0.32	0.32	0.34	0.36	0.38
J	Informasi dan Komunikasi /Information And Communication	1.28	1.30	1.33	1.40	1.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /Financial And Insurance Activities	0.30	0.31	0.33	0.35	0.38
L	Real Estate / Real Estate Activities	0.93	0.97	0.98	1.00	1.08
M,N	Jasa Perusahaan / Bussiness Activities	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	4.51	4.43	4.47	4.85	5.16
P	Jasa Pendidikan / Education	3.15	3.24	3.26	3.38	3.70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health Services And Social Work Activities	0.85	0.86	0.88	0.95	1.03
R,S,T,U	Jasa lainnya / Other Service Activities	0.51	0.53	0.54	0.58	0.61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kab. Balangan, 2020

Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia, perekonomian antar negara kini semakin terintregasi. Hal ini mengakibatkan perlambatan ritme ekonomi global yang kemudian turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarut-larut, Perekonomian Balangan sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara) merupakan kategori yang sangat dominan dalam perekonomian Balangan. Oleh karena itu, jalur perdagangan (ekspor) dari kategori lapangan usaha ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, yang mempengaruhi pergerakan ekonomi Balangan. Disamping itu, adanya pandemic covid -19 yang tentunya berdampak serius terhadap pertumbuhan sektor-sektor terbesar seperti

Pertumbuhan perekonomian Balangan cenderung mengalami percepatan selama tahun 2015–2019, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami perlambatan dari 3,18% menjadi -2,47%, hal ini seiring

dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan yang juga melambat menjadi dari 4,08% menjadi -1,81 persen. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian -3,77%, industry pengolahan -2,91%, pertanian, kehutanan dan perikanan -1,77% dan transportasi dan pergudangan -1,73%.

Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. *Share* subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan.

Salah satu efek dari perlambatan akibat krisis yang terjadi di dunia pada kisaran tahun 2015 ke bawah adalah perubahan permintaan dunia akan batubara. Hal ini tampak dari kecenderungan melambatnya permintaan beberapa komoditas dunia hingga pada tahun 2015 termasuk diantaranya batubara. Krisis global dan berlebihnya produksi minyak USA, bahkan tertinggi selama seperempat abad terakhir turut menyebabkan permintaan batubara cenderung menurun bahkan hingga tahun 2015. Perlambatan permintaan dunia terhadap batubara tercermin dari turunnya harga batubara dan penurunan volume perdagangan batubara (ekspor impor).

Kondisi tersebut tentu menyebabkan negara/wilayah yang memproduksi batubara juga terimbas. Kasus tersebut juga berimbas pada perekonomian Balangan. Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi Balangan mulai membaik pada tahun 2016, yaitu mencapai 2,62 persen. Kondisi perekonomian semakin membaik hingga pada tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 3,18 persen. Sama halnya dengan penyebab kondisi perlambatan ekonomi di Balangan sebelumnya. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu salah satunya oleh peningkatan produksi batubara dan perbaikan harga batu bara di pasar global.

Namun pada tahun 2020, dampak pandemic covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan mengalami perlambatan atau tumbuh minus, meskipun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lainnya, Kabupaten Balangan mengalami perlambatan ekonomi tertinggi ke dua setelah Kabupaten Tabalong. Hal ini yang patut menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah kabupaten Balangan untuk dapat

meningkatkan sektor-sektor lainnya di luar pertambangan dan penggalian lima tahun ke depan.

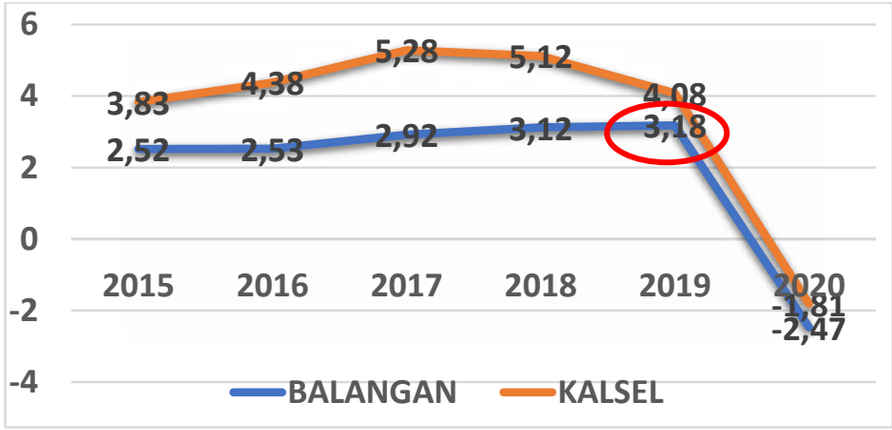

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2015 – 2020

Tabel 2.16
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota
Di Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020

KABUPATEN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
KALIMANTAN SELATAN	4,38	5,28	5,12	4,08	-1,81
TANAH LAUT	3,26	4,64	4,65	3,76	-1,99
KOTABARU	4,23	5,02	4,89	4,19	-1,87
BANJAR	4,70	4,66	5,01	4,54	-1,96
BARITO KUALA	5,15	5,79	5,22	5,06	-1,04
TAPIN	4,85	5,14	5,01	4,26	-1,50
HULU SUNGAI SELATAN	6,08	6,12	6,14	5,32	-1,19
HULU SUNGAI TENGAH	6,21	5,73	5,15	4,80	-1,01
HULU SUNGAI UTARA	4,70	5,77	5,81	5,54	-0,67
TABALONG	3,06	3,74	3,77	3,69	-2,62
TANAH BUMBU	3,11	4,14	4,14	3,64	-1,46
BALANGAN	2,53	2,92	3,12	3,18	-2,47
KOTA BANJARMASIN	6,28	6,40	6,38	6,13	-1,91
KOTA BANJAR BARU	6,95	6,96	6,90	6,93	-1,88

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2020

2.1.2.3 Kesejahteraan Sosial

A. Kemiskinan

a) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Terdapat dua sumber dalam memberikan gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Balangan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Balangan. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Atas dasar angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS, penduduk miskin di Kabupaten Balangan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Dan pada tahun 2020 angka kemiskinan sebsar 5,325 menurun dari tahun 2019 sebesar 5,55%. Perkembangan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

Uraian	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,67	5,68	5,59	5,55	5,32
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	7,09	7,21	7,21	7,27	7,06

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2020

B. PDRB Per Kapita

Tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga banyak dimensi yang tercakup dan target yang perlu dicapai. Oleh karenanya, pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Pertumbuhan hanyalah salah satu syarat bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita.

Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan

membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Perkembangan PDRB perkapita di Balangan dapat dilihat pada gambar 2.15. Selama kurun tahun 2016 - 2020 PDRB perkapita Balangan dengan sektor Pertambangan dan Penggalian meningkat dari 71,30 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 83,48 juta rupiah pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 81,17 juta rupiah. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi PDRB perkapita tanpa Sektor Pertambangan dan Batu Bara pendapatan perkapita Kabupaten Balangan cukup rendah yaitu 33,36 juta rupiah ditahun 2020.

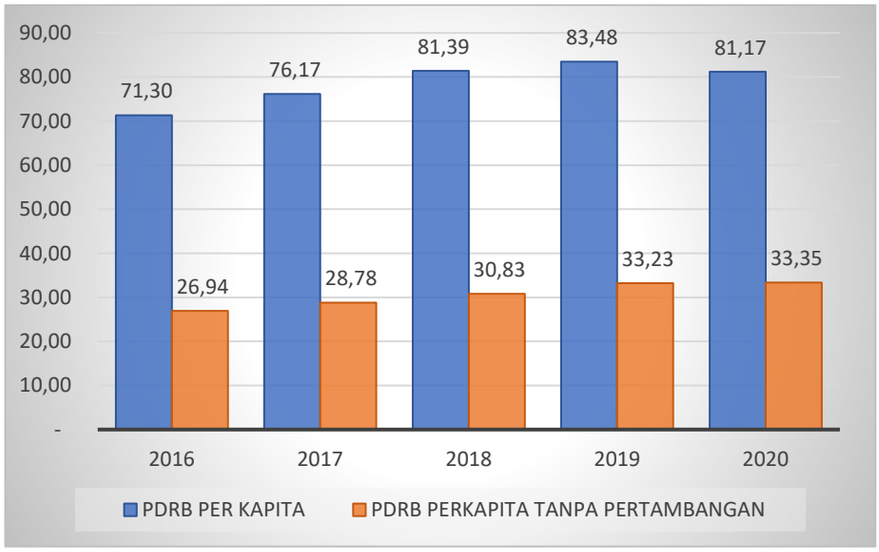

Sumber : BPS Kabupaten Balangan

Gambar 2.15
PDRB Per Kapita Kabupaten Balangan Dengan dan Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2016 – 2020

C. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan

distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2.18
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

Indeks Gini	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Balangan	0,33	0,41	0,31	0.35	0,298
Kalsel	0,351	0,347	0.344	0.393	0.351

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, data diolah 2021

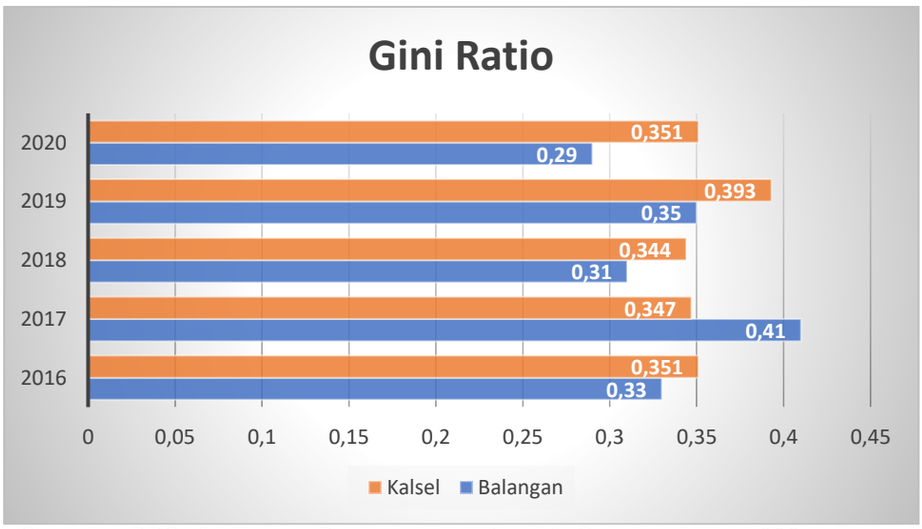

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2021

Gambar 2.16
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan
dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Gini ratio Kabupaten Balangan selama periode 2016 – 2020 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan sedang. Berdasarkan tabel diatas, *gini ratio* Kabupaten Balangan cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016 *gini ratio* Kabupaten Balangan sebesar 0,33 dan pada tahun 2020 *gini ratio* Kabupaten Balangan mengalami penurunan menjadi 0,29. Dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan, maka indeks Gini Kabupaten Balangan lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Report*(HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerjapembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuanmasyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan,pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

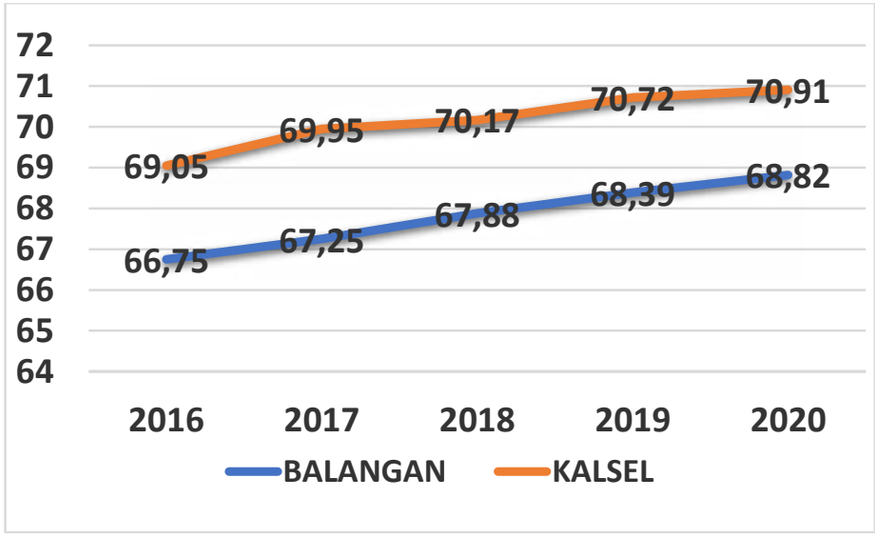

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2016-2020 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2016 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 66,75 dan terus meningkat menjadi 68,82 pada tahun 2020, bahkan merupakan persentase perumbuhan tertinggi se provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 6,3%, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan ditahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional.

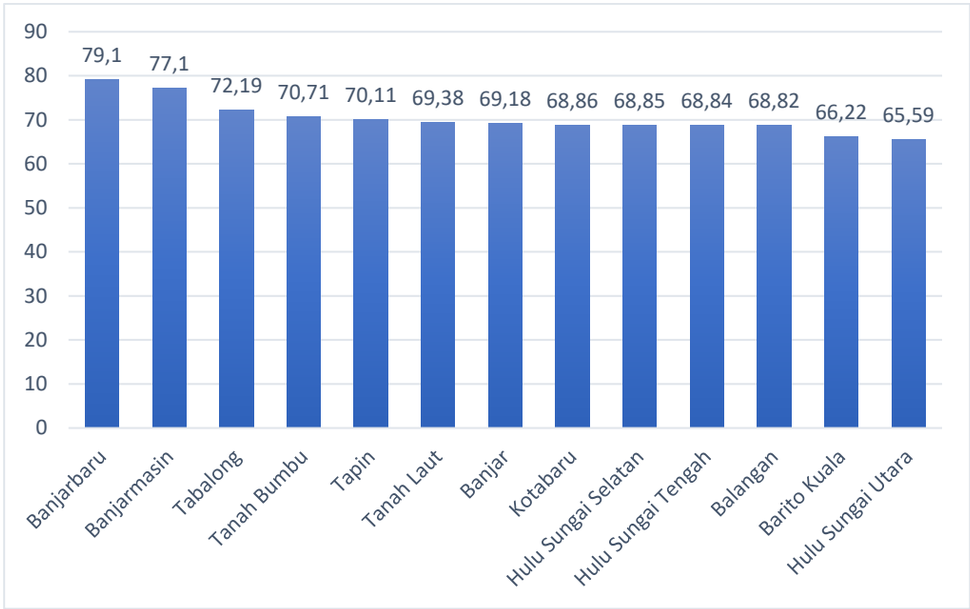

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020

Terlihat pada gambar 2.18, IPM Kabupaten Balangan berada pada posisi ke 11 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, namun hanya selisih 0,02 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peningkatan angka ini tentunya tidak terlepas dari perkembangan semua indikator penyusunnya. Angka harapan hidup

saat lahir di Kabupaten Balangan sebesar 67,72 tahun, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana AHH pada tahun 2019 hanya sebesar 67,59 tahun. Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, hal ini bisa diartikan bahwa terjadi peningkatan taraf kesehatan masyarakat, meskipun masih lebih rendah dibanding angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang mencapai 68,66 tahun.

Tabel 2.19
Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Balangan Tahun2016-2020

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	RATA RATA LAMA SEKOLAH	PENGELUARAN/ PERKAPITA (dalam ribu rupiah)
2016	67.07	11.77	6.71	10,953
2017	67.19	12.07	7.03	11,186
2018	67.37	12.36	7.04	11,442
2019	67,59	12,37	7,27	11,557
2020	67,72	12,46	7,55	11,452

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2020

Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan angka harapan lama sekolah, dapat diketahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah Kabupaten Balangan mencapai 12,46, Ini berarti secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,46 tahun (sekitar kelas 3 SLTA). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) yang hanya mencapai 12,37 tahun.

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2020 sebesar 7,55 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP/sederajat atau masih belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Indeks pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/*PPP). Rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2020 yaitu sekitar 11,45 juta rupiah. Angka ini lebih rendah dari keadaan tahun sebelumnya yang mencapai 11,56 juta rupiah di tahun 2019. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak pandemi Covid -19.

Berdasarkan hal tersebut maka indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Balangan sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada Tabel 2.28. Jika dilihat dari ketiga indeks tersebut dapat dilihat bahwa nilai indeks Kabupaten Balangan dibawah nilai indeks provinsi Kalimantan Selatan. Nilai indeks pendidikan yang agak jauh nilainya dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Kalimantan Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan nilai IPM di masa mendatang.

Tabel 2.20
Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pengeluaran
Tahun 2016-2019

TAHUN	INDEKS KESEHATAN		INDEKS PENDIDIKAN		INDEKS PENGELUARAN	
	BALANGAN	KALSEL	BALANGAN	KALSEL	BALANGAN	KALSEL
2016	72.42	73.72	55.06	60.44	72.92	73.89
2017	72.60	73.88	56.96	61.24	73.56	74.67
2018	72.88	74.20	57.80	61.39	74.25	75.86
2019	73.22	74.60	58.59	62.11	74.56	76.35

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan BPS Kalimantan Selatan, 2020

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatankerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentasependuduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten

Balangan.Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yangtersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Berdasarkan tabel 2.21, TPAK Kabupaten Balangan dari tahun 2017 -2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin berkurang pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Balangan. Penurunan TPAK di kabupaten Balangan kemungkinan juga dapat disebabkan karena angka penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya.

Sedangkan untuk TPAK Kabupaten Balangan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 berdasarkan berdasarkan Berita resmi statistik BPS Kalimantan selatan, publikasi Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan Agustus 2020 telah mengalami kenaikan menjadi 76,20 persen. Artinya pada tahun 2020 di antara 100 penduduk usia kerja, terdapat 76 hingga 77 orang merupakan angkatan kerja. Sisanya, 23,80 persen bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga.

Tabel 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan
Tahun 2016 – 2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	-	79,03	75,67	69,63	76,50

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Balangan memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2017 sebesar 1,90 persen, meningkat menjadi 2,28 persen ditahun 2019 dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,46 persen.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan IV tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	1,90	2,24	2.28	2,46

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan

G. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Bagian terbesar penduduk yang ada di Kabupaten Balangan adalah etnis Dayak dan etnis Banjar. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama yaitu: 1) nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat; 2) kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat; dan 3) peran pemerintah daerah. Pelestarian nilai-nilai budaya sangat perlu dilakukan secara harmoni dan terintegrasi, tidak hanya melalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukan budaya Banjar sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung secara baik dan berakar berbasis kearifan lokal di masyarakat.

Pembangunan bidang kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan di masyarakat luas dalam pelestarian nilai-nilai luhur dalam perilaku kehidupan masyarakat dan menjadi satu modal kekuatan pembangunan. Pengembangan dan pelestarian seni budaya dan olah raga terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Balangan melalui pembinaan serta peran aktif dalam menyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian khususnya kesenian daerah dan olahraga baik yang dilakukan di daerah maupun luar daerah. Perkembangan

kesenian bisa dilihat dari aktivitas pertunjukan kesenian yang ada di Kabupaten Balangan, sementara itu untuk perkembangan olah raga dapat dilihat dari jumlah *club* olahraga yang aktif dan terdaftar di Kabupaten Balangan. Peran pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Balangan dapat dilihat dari Jumlah gedung olah raga dan gedung kesenian yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat.

Di Kabupaten Balangan terdapat 21 gedung olahraga yang terdiri dari 19 gedung olahraga bulutangkis dan 2 gedung olahraga futsal yang tersebar di kecamatan/desa di Kabupaten Balangan. Jumlah atlet yang dimiliki oleh kabupaten Balangan sebanyak 2,376 orang. Jumlah atlet terbanyak adalah cabang olahraga sepakbola sebesar 35 persen diikuti oleh cabang olah raga bulu tangkis sebanyak 9 %, cabang olah raga Basket sebanyak 7 %. Dari persentase jumlah atlet tampak bahwa cabang olahraga terbanyak atletnya adalah untuk cabang olahraga lapangan, sehingga pengembangan olahraga membutuhkan fasilitas arena lapangan atau gedung olahraga.

Tabel 2.23
Gedung Olahraga di Kabupaten Balangan

No.	GEDUNG OLAHRAGA	ALAMAT / KECAMATAN
1	FUTSAL BSR	PARINGIN
2	FUTSAL RIZKAN	PARINGIN SELATAN
3	BULU TANGKIS	PARINGIN
4	BULU TANGKIS	TANAH HABANG
5	BULU TANGKIS	LAMPIHONG
6	BULU TANGKIS	LAJAR
7	BULU TANGKIS	MURUNG JAMBU
8	BULU TANGKIS	HARAPAN BARU
9	BULU TANGKIS	BARUH BAHINU
10	BULU TANGKIS	BATUMANDI
11	BULU TANGKIS	MUARA JAYA
12	BULU TANGKIS	PULANTAN
13	BULU TANGKIS	AWAYAN
14	BULU TANGKIS	HALONG
15	BULU TANGKIS	SURYATAMA
16	BULU TANGKIS	LASUNG BATU
17	BULU TANGKIS	DAHAI
18	BULU TANGKIS	JUAI
19	BULU TANGKIS	BUNTU KARAU

20	BULU TANGKIS	BABAYU
21	BULU TANGKIS	TEBING TINGGI

Sumber: Dispora Kabupaten Balangan, 2021

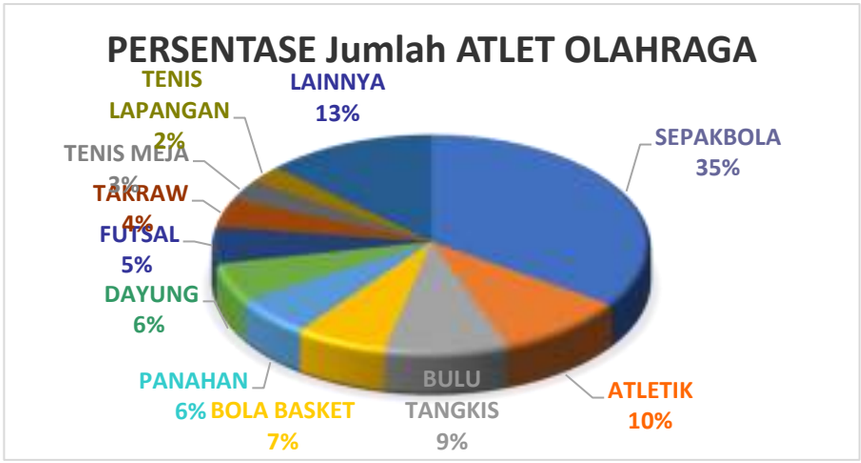

Sumber: Dispora Kabupaten Balangan

Gambar 2.19
Persentase Jumlah Atlet Menurut Cabang Olahraga di Kabupaten Balangan

H. Pelayanan Publik

Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (*public service*), selain tugas pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Meski demikian sering kali pelayanan publik dikeluhkan masyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pelayanan.Ukurankeberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah menjadikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu indikator dalam RPJMD.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 2.24
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai IKM	-	80,71	79,71	84,59	82,35

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas IKM Kabupaten Balangan untuk tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu terjadi penurunan sebesar 2,24 atau dari 84,59 menjadi 82,35 dengan kualitas mutu B. Terkait IKM tersebut didapatkan dari rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di 30 SKPD yang melaksanakan pelayanan. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dari 30 SKPD tersebut didapatkan nilai IKM terendah pada Dinas Sosial sebesar 72,50 dengan kualitas mutu C, sedangkan nilai IKM tertinggi di Puskesmas Uren Kecamatan Tebing Tinggi dengan nilai 94,13 dengan kualitas mutu A. Nilai ini didapat dari hasil kuesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan di 30 SKPD dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB no.14 Tahun 2017. Walaupun terjadi penurunan nilai IKM di tahun 2020 namun masih tetap dalam kualitas mutu B. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga tetap dapat bertahan dengan kualitas mutu B antara lain memperbaiki fasilitas dan sarana pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), inovasi pelayanan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia, meningkatkan arahan dan dorongan yang diberikan kepada unit penyelenggara pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

I. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* Tahun 2015-2019. Perolehan nilai Indeks Reformsi Birokrasi Pemda Balangan Tahun 2019 sebesar 48.09 yang merupakan angka realisasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan melalui aplikasi PMPRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia IRB Kabupaten Balangan adalah 51,84 atau kategori CC dngan rincian total komponen pengungkit (A) 20,35 dan total komponen hasil (B) 31,49.

Masih rendahnya IRB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dikarenakan

a) Perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang dituangkan dalam bentuk Road Map RB lebih banyak hanya sebagai pemenuhan syarat dokumen dan belum menjadi acuan dalam pelaksanaannya
b) Road Map RB belum memberikan arahan perbaikan yang jelas mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan indikator keberhasilannya, serta keterkaitan perbaikan antara area perubahan.
c) Belum terdapat upaya menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui *agent of change* ataupun *role model*
d) Internalisasi pelaksanaan RB oleh tim RB belum secara optimal dilakukan keseluruh perangkat daerah
e) Pemantauan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan secara efektif secara berkala
f) Evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala dan belum dilaksanakan identifikasi meneyluruh terhadap peraturan perundangan yang tidak harmonis untuk mewujudkan peraturan daerah yang sesuai kebutuhan *stakeholder*.
g) Belum terlihat kesesuaian atara struktur organisasi dengan kinerja organisasi sesuai mandate dan tujuan organisasi dan belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
h) Belum mengembangkan indicator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi sebagai pertimbangan member *reward* dan *punishment*
i) Peta proses bisnis belum disusun dan ditetapkan berdasarkan keterkaitan proses mewujudkan kinerja
j) Kebijakan tentang SPIP belum terlihat implementasinya dalam SOP, penempatan SDM, manajemen risiko dan lain-lain
k) Belum seluruh unit pelayanan publik merupakan system pelayanan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir kontak antara petugas dan pengguna layanan

l) Perbaikan kualitas layanan public belum didukung dengan dengan perbaikan proses bisnis dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang perbaikan layanan tersebut
m) SOP pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil survey kepuasan masyarakat belum dipublikasikan serta belum dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas pelayanan
n) Sistem pengendalian internal dilingkungan pemerintah Kabupaten Balangan belum berjalan efektif di seluruh perangkat daerah

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Balangan terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan antara lain :

a) Melakukan reviu atas rencana aksi penerapan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya.
b) Mengintensifkan peran *agent of change* atau *role model* untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan
c) Melakukan sosialisasi dan internalisasi secara massif tentang kebijakan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Balangan kepada seluruh pegawai perangkat daerah secara merata
d) Melakukan kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Kabupaten Balangan dengan berfokus pada penyederhanaan prosedur serta dengan tetap memperhatikan pengendalian atas pelaksanaannya
e) Melakukan reviu struktur organisasi yang baru ditetapkan dalam mewujudkan kinerja organisasi dan memastikan setiap level organisasi sampai individu memiliki kontribusi kinerja yang jelas sesuai peran dan levelnya dalam pencapaian sasaran organisasi
f) Setiap unit kerja yang memberikan pelayanan public agar melakukan reviu atas pelaksanaan standar pelayanan maupu SOP pelayanan
g) Menetapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodik.
h) Mendorong penerapan *e-govermment* secara merata dalam manajemen pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang bersifat transaksional.

i) Memperkuat penerapan system integritas dengan membuat kebijakan terkait penanganan gratifikasi, whistle Blowing Sistem (WBS) dan benturan kepentingan serta mengimplentasikan kebijakannya tentang SPIP ke dalam SOP, penempatan SDM, manajemen risiko dan lainnya.

j) Merancang mikenisme pemberian reward and punishment serta pemberian kompensasi terkait pelayanan, serta menindaklanjuti hasil survey kepauasan masyarakat dengan menempatkan hasil survey serta tindak lanjutnya, sehingga dapat diakses masyarakat.

k) Mendorong pemerintah Kabupaten Balangan untuk membangun unit kerja zona integritas dan meningkatkan peran inspektorat dalam mengawal pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah kabupaten Balangan

J. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata peningkatansebesar 0,09%, pada tahun 2016 sebesar Rp1.331,59Miliar menjadi Rp 1.171,17Miliar pada tahun 2020.

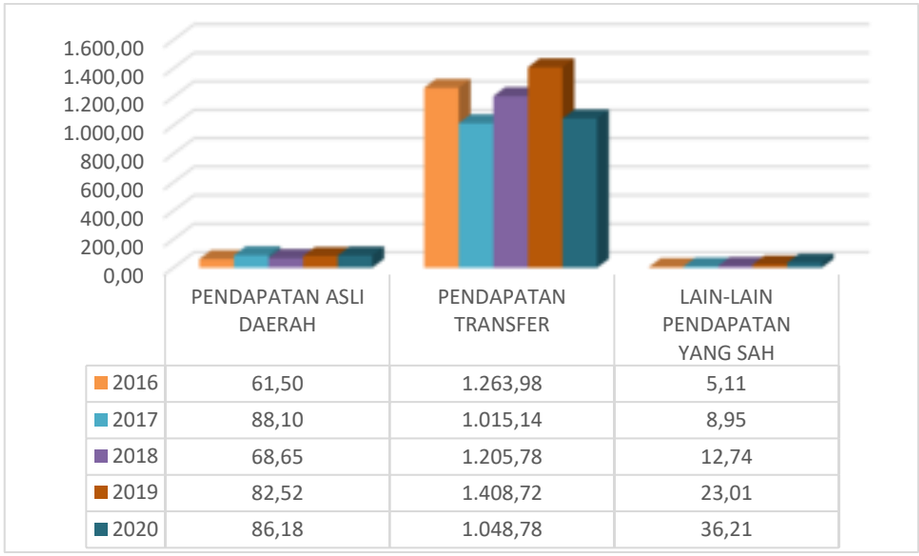

	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
2016	61,50	1.263,98	5,11
2017	88,10	1.015,14	8,95
2018	68,65	1.205,78	12,74
2019	82,52	1.408,72	23,01
2020	86,18	1.048,78	36,21

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021

Gambar 2.20
Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan 2016-2020

Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode dimaksud tumbuh rata-rata 13,78%. PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. 61,50 miliar tumbuh menjadi sebesar Rp 86,17 miliar pada tahun 2020 dengan pertumbuhan terendah sebesar -22,07 persen pada tahun 2017-2018 disebabkan penurunan pada pos

Pendapatan Retribusi Daerah dan penurunan cukup signifikan pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun dimaksud.

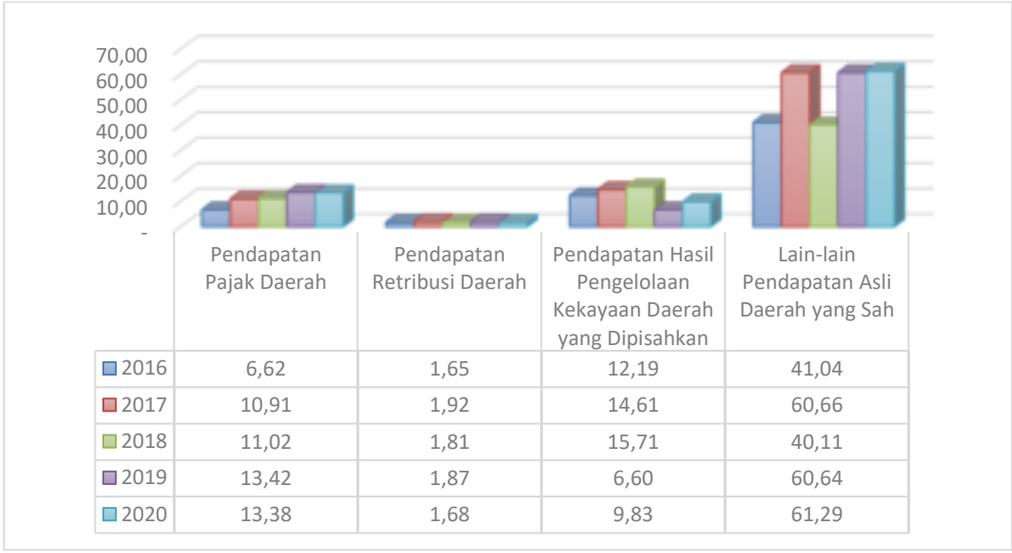

	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2016	6,62	1,65	12,19	41,04
2017	10,91	1,92	14,61	60,66
2018	11,02	1,81	15,71	40,11
2019	13,42	1,87	6,60	60,64
2020	13,38	1,68	9,83	61,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021

Gambar 2.21
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 2016-2020

Dana Perimbangan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Hasil Pajak, Dana Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu ini perkembangan dana perimbangan mengalami fluktuasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk diprediksi pencapaiannya. Dana Perimbangan tumbuh rata-rata -8,40% selama periode ini dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2019-2020 sebesar -32,75%.

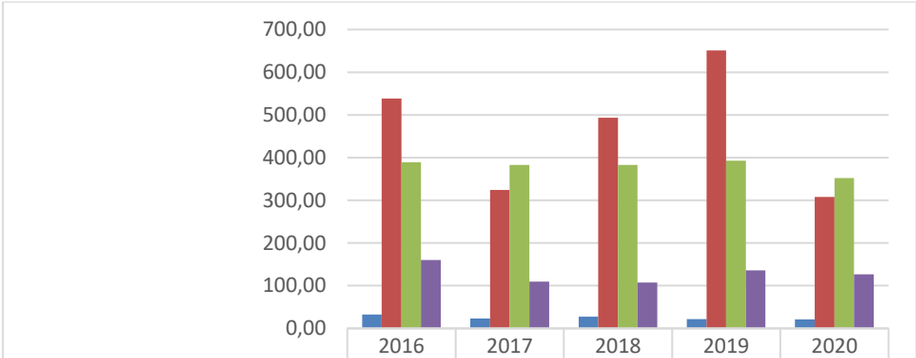

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Bagi Hasil Pajak	32,66	23,20	27,86	21,52	21,09
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	538,68	324,37	493,66	651,45	308,10
Dana Alokasi Umum	389,43	382,59	382,59	392,67	352,41
Dana Alokasi Khusus	160,35	109,48	107,14	135,95	126,35

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021

Gambar 2.22
Dana Perimbangan Kabupaten Balangan 2016-2020

Dana Transfer juga bersumberdari Transfer pemerintah pusat lainnya di KabupatenBalanganhanyaberupa Dana Penyesuaian, selainitu juga bersumberdari dana Transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama periode ini tumbuh rata-rata 8,81% dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018-2019 sebesar 24,63%. SumberPendapatandaerah yang bersumberdariLain-Lain Pendapatan Yang Sah tumbuh rata-rata 32,88% selama periode ini. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp 5,11Miliar tumbuh menjadi Rp 36,21Miliar pada tahun 2020.

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan

Gambar 2.23
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Balangan 2016-2020

K. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas mandiri. Berdasarkan table diatas Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Balangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 adalah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akutansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standard umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prisip akutansi yang berlaku dan konsisten.

Harapannya WTP ini akan selalu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan ini sudah dibuktikan dari upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mempertahankan Opini BPK dengan WTP 8 (delapan) tahun berturut-turut.

L. Predikat SAKIP

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen yang terdiri atas perencanaan kinerja dengan bobot 35, pengukuran kinerja dengan bobot 20, pelaporan kinerja evaluasi dengan bobot 15, evaluasi kinerja dengan bobot 10 dan pencapaian kinerja 20.

Untuk memberikan informasi terkait kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dicapai atau yang seharusnya tercapai dan sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya maka Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan menyusun LAKIP Kabupaten Balangan setiap tahunnya.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh adanya komitmen Bupati Balangan dan jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan untuk selalu menanamkan SAKIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara baik dalam konteks individu maupun organisasi (SKPD), disamping itu juga menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2018 yang disampaikan pihak Kemenpan RB dan Inspektorat Propinsi Kalimantan Selatan pada bulan Januari tahun 2020 di Propinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten Balangan juga berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan melalui beberapa upaya perbaikan terhadap dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD) yang didampingi oleh Kemenpan RB, Provinsi maupun Tim Evaluator Inspektorat Provinsi. Kegiatan meliputi penentuan Indikator tujuan, penajaman sasaran dan Indikator kinerjanya yang lebih SMART, penajaman Indikator Kinerja Utama SKPD sampai level Eselon IV dan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka penguatan SAKIP adalah

a) Merumuskan pengukuran kinerja dalam APLIKASI SAKIP berbasis IT.
b) Memperkuat Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten dengan mencoba mengajukan formasi Auditor pada tahun selanjutnya dan melaksanakan pembelajaran baik melalui bimtek maupun workshop dengan Inspektorat Provinsi yang sudah memiliki evaluator yang handal.
c) Melakukan review dan pengembangan indikator kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.
d) Melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Roadmap Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi RB Tahun 2019.

Tabel 2.25
Capaian Predikat LAKIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	55,63 (CC)	56,83 (CC)	62,64 (B)	65,45 (B)	66,04 (B)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2020

Capaian indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Balangan dari tahun ketahun mengalami peningkatan nilai dan

kategori. Capaian pada Tahun 2016 adalah 55,63 (CC) dan Tahun 2020 66,04 (B), berarti telah terjadi peningkatan yang signifikan. Ini bermakna bahwa nilai hasil evaluasi SAKIP didasarkan pada penilaian SAKIP Tahun 2020 yang diserahkan pada bulan Januari Tahun 2021. Nilai 66,04 adalah nilai yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Balangan tahun 2019 oleh Inspektorat Propinsi Kalimantan Selatan dan berdasarkan rekomendasi Kementrian PAN RB. Nilai 66,04 masuk kategori predikat B.

M. Nilai EKPPD

Kinerja kepala daerah menjadi sorotan masyarakat dalam menjawab akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Nilai EKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 hingga tanggal 17 Juli 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi LPPD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan Validasi Terhadap Hasil EPPD Tim Daerah Atas LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Se-Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 2 September 2020 Nilai EKPPD Kabupaten Balangan tahun 2019 adalah 3,5620. Sedangkan nilai EKPPD tahun 2016 adalah 3,1393, tahun 2017 adalah 3,0671, tahun 2018 adalah 3,2946.

Nilai EKPPD tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bagian Pemerintahan untuk melakukan verifikasi data IKK yang dikumpul oleh SKPD tepat waktu dan tepat regulasi. Pola pengumpulan data dan pengecekan kebenaran data dukung telah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan sesuai dengan SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan EKPPD mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

N. Tingkat Maturitas SPIP

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Capaian tingkat maturitas SPIP Kabupaten Balangan sejak Tahun 2016-2020 dapat dicermati pada 2.26.

Tabel 2.26
Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat maturitas SPIP Pemda Tahun 2020 pada posisi level 3 dengan nilai 3,023 atau Terdefinisi. Level Maturitas tersebut merupakan hasil QA (*Quality Assurance*) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan oleh BPKP Pusat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 2 oktober 2018. Pelaksanaan QA atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah oleh BPKP minimal 3 tahun sekali. Dalam rangka penguatan Implementasi SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Hasil penjaminan mutu hasil QA pada tahun 2020 Inspektorat Balangan telah melaksanakan Asistensi

Penyusunan Profil Risiko seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Capaian Maturitas SPIP Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan capaian kabupaten kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan bisa dikategorikan cukup membanggakan karena pada saat pelaksanaan QA atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkup kerja Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Hasil QA oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-1612/D3/02/2018 tanggal 1 Oktober 2018 bahwa terdapat 5 Pemerintah Daerah yang telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yaitu Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah kabupaten Tabalong dan Pemerintah Hulu Sungai Utara.

Atas hasil penjaminan mutu hasil QA yang belum mencapai 100 % dan perbedaan skor maturitas SPIP antara tim assessor dan tim QA , maka upaya yang harus dilakukan oleh Kabupaten Balangan sesuai dengan saran dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut

a) Menyusun daftar risiko dan rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan pada seluruh OPD sehingga dapat menjadi acuan untuk memperkuat lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
b) Melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut
c) Melakukan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, online, realtime sehingga dapat memberikan informasibagi pimpinan (dashboard pimpinan) secara update dan efektif untuk pengambilan keputusan.
d) Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi *area of improvement* (AOI).
e) Melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur

dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

f) Membuat database dokumen atas hasil penilaian maturitas SPIP yang telah dilaksanakan agar dapat dijadikan referensi bagi pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dimasa yang akan datang.

g) Memperbaiki materi dan skor maturitas dalam laporan hasil *Assesment* sesuai hasil QA.

Manfaat atau dampak Maturitas SPIP level 3 bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a) SPIP level 3 mendukung penyajian laporan keuangan yang handal.
b) SPIP level 3 mendukung pencapaian tujuan program kegiatan yang tercantum dalam RPJMD RKPD dan DPA secara efektif.
c) Meningkatkan pengamanan aset daerah.
d) Modal utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
e) Meningkatkan implementasi manajemen risiko pada seluruh SKPD.
f) SPIP menjadi salah satu point penilaian opini WTP dimana pada lembar opini tersebut ada frasa kalimat bahwa SPI telah memadai.

Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan Maturitas SPIP Kabupaten Balangan antara lain :

a) Pemerintah Kabupaten Balangan sudah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.
b) Pemerintah Kabupaten Balangan sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur kode etik/aturan perilaku pegawai negeri sipil.
c) Kabupaten Balangan sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen berbasis kinerja serta pengamanan aset dan informasi, kepada seluruh level pimpinan unit organisasi.
d) Kabupaten Balangan sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala efektivitas struktur organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan / Hambatan dalam pelaksanaan SPIP di Kabupaten Balangan

a) Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
b) Pimpinan SKPD belum melakukan pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) secara berkala dan terdokumentasi.
c) Kabupaten Balangan belum memiliki sistem yang dapat melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala atas persepsi pegawai terkait kepemimpinan yang kondusif.
d) Kabupaten Balangan belum memiliki sistem secara otomatis melakukan pemantauan efektifitas struktur organisasi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka yang dimaksud dengan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal.

Pada tahun 2020 tercatat jumlah 4.819 anak di usia 5-6 tahun dan 3.221 yang sudah medapatkan pelayanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau cakupan layanan sekitar 66,84%. Dan masih terdapat 14 desa dari 157 desa dan kelurahan di Kabupaten Balangan yang masih belum memiliki PAUD.

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK di Kabupaten Balangan pada jenjang PAUD mengalami peningkatan menjadi 71,77, sedangkan jenjang SD/MI/Paket A menjadi 108,35 dan SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 86,12.

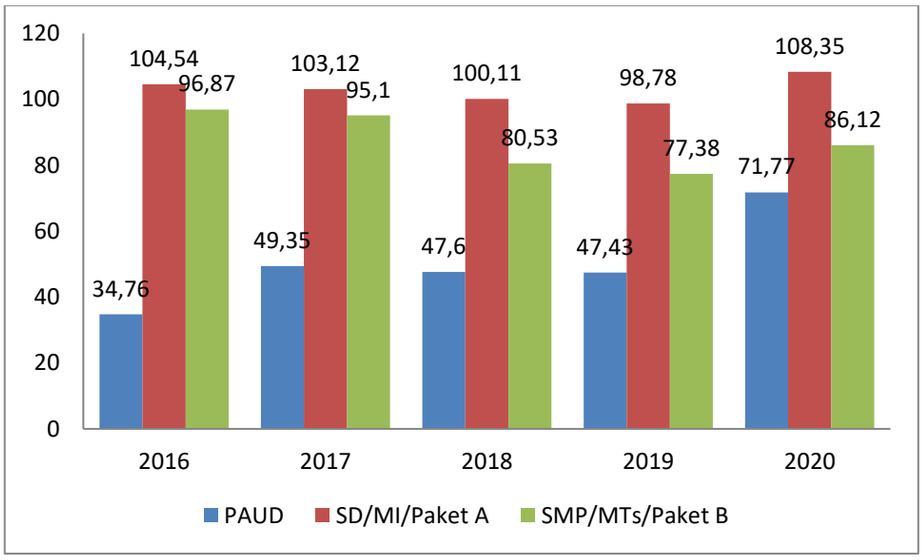

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.24
Perkembangan APK Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B) turut diperhitungkan. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Angka partisipasi murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2020 sebesar 99,27%, sedangkan APM jenjang SMP/MTs 76,20% dan APM jenjang SMA/SMK 50,77%. Perkembangan APM Kabupaten Balangan dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

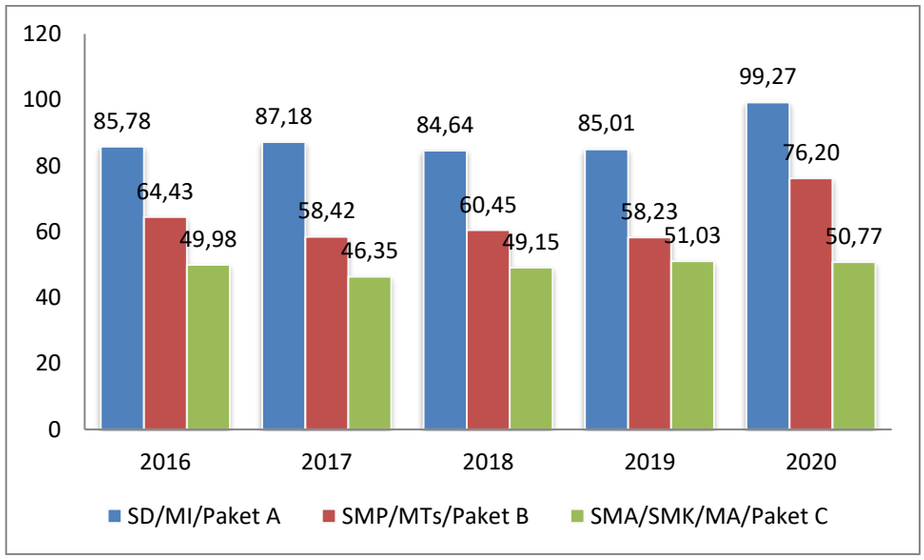

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.25
Perkembangan APM Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

Sedangkan untuk ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	209	208	208	209	211
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14500	14246	14631	14933	15164
1.3	Rasio	1:69	1:68	1:70	1:71	1:73 (729.038)
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	42	42	42	42	42
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6716	7304	7100	7258	6985
2.3	Rasio	1:160	1:174	1:169	1:173	1:166 (11.663.095)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah. Berdasarkan tabel, rasio ketersediaan sekolah terhadap murid SD/MI sebesar 71 atau sepersepuluh ribu (729.038) yang artinya bahwa satu sekolah dapat menampung 71 siswa atau sepersepuluh ribu (729.038) siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki rasio ketersediaan sebesar 166 atau sepersepuluh ribu (1.663.095) dimana satu sekolah dapat menampung 166 siswa atau sepersepuluh ribu (1.663.095) siswa.

Tabel 2.28
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1811	1791	1786	1761	1733
1.2	Jumlah Murid	14846	14817	15085	14949	1543
1.3	Rasio	1:8	1:8	1:8	1:8	1:9 (1144,4)
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	642	621	614	601	605
2.2	Jumlah Murid	6017	5977	5840	5616	5780
2.3	Rasio	1:9	1:10	1:10	1:9	1:10 (1047,7)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru, sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Rasio ketersediaan guru di Kabupaten Balangan terhadap murid SD/MI sebesar 9 atau sepersepuluh ribu (873,8) siswa yang artinya bahwa setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 9 murid atau

sepersepuluh ribu (87.380) siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki rasio ketersediaan sebesar 10 atau sepersepuluh ribu (95.537) siswa dimana satu guru mengampu 10 siswa atau sepersepuluh ribu (95.537) siswa.

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Melek Huruf
di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	58,285	59,415	65,494	65.831	99.111
2	Jumlah penduduk usai 15 tahun ke atas	59,323	59,775	65,779	66.116	98.396
3	Angka Melek Huruf	98.25	99.40	99.57	99,57	99,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan tahun 2020

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 99,71 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hal ini karena adanya kebijakan-kebijakan dalam penuntasan keaksaraan fungsional. Terdapat 0,29 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf. Kedepannya akan tetap melaksanakan kegiatan lebih intensif dalam penuntasan buta huruf melalui kegiatan keaksaraan fungsional khususnya pada daerah-daerah terpencil.

4) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Untuk penghitungan ini termasuk pendidikan Non Formal (Paket A, dan Paket B). Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Balangan pada tahun 2020 untuk kelompok umur 7-12 tahun (APS SD/MI) mencapai 90,09 persen dimana terdapat 9,91 persen penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah di luar Kabupaten Balangan atau belum mendapat akses pendidikan khususnya yang bermukim di daerah terpencil.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 thn	12.438	12.420	12.313	12.694	13.661
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14.500	14.246	14.631	14.933	15.164
1.3	APS SD/MI	93,62	95,09	91,70	91,22	90,09
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 thn	4.327	4.267	4.292	4.226	5.089
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.716	7.304	7.100	7.258	6.985
2.3	APS SMP/MTs	90,29	84,08	84,94	65,97	72,86

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

Pada kelompok umur 13-15 tahun, capaian Angka Partisipasi Sekolah sebesar 83,87 meningkat dari tahun 2019. Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum serta makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Dilihat dari kelompok umur di Kabupaten Balangan kelompok umur 7-12 tahun merupakan kelompok umur dengan peluang lebih besar dalam mengakses pendidikan serta kelompok umur dengan anak usia sekolah terbanyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

5) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah.

Pada tahun 2020 angka putus sekolah pada SMP/MTs dan SMA/SMK mengalami penurunan yaitu dari 0,07 dan 0,04 persen pada tahun 2019 menjadi 0,00 persen di tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada murid yang putus sekolah. Sedangkan pada SD/MI meningkat dari 0,06 menjadi 0,5 persen, ini disebabkan banyak anak putus sekolah yang terjadi di daerah terpencil karena faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut bekerja/berkebun membantu orang tua, sedangkan kebunnya selalu berpindah atau tidak menetap.

Persoalan putus sekolah ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah, karena diharapkan semua anak di Kabupaten Balangan terpenuhi kebutuhannya akan Pendidikan sesuai standar pelayanan minimal Pendidikan serta mencapai wajib belajar 12 tahun.

6) Angka Melanjutkan (AM)

Pada tahun 2020, angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami kenaikan dari 80,16 persen di tahun 2019 menjadi 83,48 persen, begitu juga yang dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2019 dari 97,12 menjadi 97,92. Sedangkan untuk jenjang SD/MI terjadi penurunan persentase angka putus sekolah dari 0,06 tahun 2019 menjadi 0,5.

Berikut rekapitulasi capaian indikator Pendidikan Kabupaten Balangan dari tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.31
Rekapitulasi Capaian Indikator Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1. Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.2	Angka partisipasi kasar	34,76	49,35	47,6	70,27	71,77

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	100	100	100	100	100
1.4	Angka Partisipasi Murni :					
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85,78	87,18	84,64	85,01	99,27
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	64,43	58,42	60,45	58,23	76,20
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	49,98	46,35	49,15	51,03	50,77
1.5	Angka partisipasi sekolah :					
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	93,62	95,09	91,7	91,22	89,83
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	90,29	84,08	84,94	65,97	83,87
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	58,88	54,37	56,3	57,36	54,19
1.6	Angka Putus Sekolah :					
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	0,08	0,04	0,06	0,5
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,31	0,37	0,15	0,07	0
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,22	0,02	0,04	0,04	0
1.7	Angka Kelulusan:					
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,51	97,01	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM):					
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,52	88,74	86,39	80,16	83.48
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	107,07	95,38	98,65	97,12	97.92

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.9	Fasilitas Pendidikan:					
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100%
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100%
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	118.31	116.47	115.04	114,67	114,23
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	35.44	30.26	30.56	30.72	31,34
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1175,77	1159,95	1163,86	1148,55	1143,80
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	984,9	918,2	856,26	882,1	885.01
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	95,90 %	93,81 %	94,49 %	91,54 %	92,23 %
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	97,75	97,78	98,76	98,77	99.78
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.47 %	99.60 %	99.69 %	99.70 %	99.67 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Balangan antara lain angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan, fasilitas pendidikan, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru serta angka melek huruf.

Berdasarkan peraturan SPM yang baru yaitu PP Nomor 2 tahun 2018, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a) pendidikan anak usia dini;
b) pendidikan dasar; dan
c) pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
b) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
c) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Tahun 2020 Dinas Pendidikan melaksanakan kembali pendataan dan inventarisir atas warga belajar yang putus sekolah melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahap selanjutnya nama-nama anak yang diduga suspect Anak Tidak Sekolah dilihat NIK nya pada aplikasi SPM kemudian ditelusuri dan diverifikasi pada aplikasi Manajemen Dapodik, kalau dari hasil penelusuran ada namanya berarti anak itu bukan Anak Tidak Sekolah. Sementara perolehan nama yang ditemukan adalah sebanyak 51 orang atau 1,3% orang anak dari data suspect yang diperkirakan untuk Kabupaten Balangan sebanyak 3.915 turun dari tahun 2019 yaitu sebanyak

5.674. Untuk data pada bidang kesetaraan masih dilakukan pendataan dengan menyebar angket pada masyarakat dengan bekerjasama dengan desa, sedangkan capaian pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Capaian Pelayanan Dasar Pendidikan
Kabupaten Balangan

No	Jenjang pendidikan	Jumlah penduduk	Jumlah murid perjenjang	Persentase penerima layanan
1	PAUD (5-6 tahun)	4819	3.207	66,55
2	Dasar (7-15 tahun)	22.149	18.750	84,65
3	Kesetaraan (7-18 tahun)	29.488	23.665	80,36

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

B. Urusan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, berikut adalah capaian indikator Kesehatan Kabupaten Balangan.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kesehatan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2. Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13,3	18	16,5	16,3	7
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	2336	2267	2240	2209	2253
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2,9	2,2	3,1	2,2	1,3
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8,9	12,7	11,1	11,3	7
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	214	176	178	181	89
2.6	Rasio posyandu	10	14	16	24	19,95

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk					
2.7.1	Rasio puskesmas	9	9	9	9,48	9,08
2.7.2	Rasio poliklinik	-	-	-	-	2,27
2.7.3	Rasio puskesmas pembantu	17	16	16	16,59	14,38
2.8	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,78	0,78	0,78	0,79	0,75
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	-	0,74	0,5	0,36	0,43
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk					
2.10.1	Dokter gigi	3,19	0,28	0,3	0,28	0,46
2.10.2	Bidan	162,51	2,11	2,08	0,99	1,51
2.10.3	Perawat	168,88	2	2	0,69	1,04
2.10.4	Perawat gigi	15,14	0,45	0,5	0,69	0,62
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	84,1	88,3	111	123	101
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80	82	79	80	82
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87,3	86,6	85,49	94,27	78,2
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
2.15	Prevalensi Stunting	-	-	34,3	26,7	25,7
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	81,02	79,67	90,1	89,2	82
2.17	Non polio AFP rate per 100.000 pddk	0	2	1	2	0
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	-	821	1,032	1,529	759
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	100%	100%	100%	100%
2.20	Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	58	137	386	189	294
2.21	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	46,87	86,82	302,73	143,8	224
2.22	Jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	178	179	386	189	294
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	78%	94,6%	96%	90%	89%
2.24	Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	149	44	104	165	63
2.25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
2.26	Penderita diare yang ditangani	2.221	2.437	1.447	1.378	1.510

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.27	Angka kejadian Malaria	231,01	76,86	80,31	63,15	42,67
2.28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0	0,003	0,008	0.47	0,09
2.29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
2.30	Cakupan kunjungan bayi	92	81,2	-	76,3	81,7
2.31	jumlah puskesmas	12	12	12	12	12
2.32	jumlah puskesmas pembantu	22	21	21	21	18
2.33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	67	68	68	70	73
2.34	Cakupan pelayanan nifas	93	78	76	78	81
2.35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan pelayanan anak balita	54	52,6	51	61,7	76
2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100
2.38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	97	82	85	94,27	15,13
2.39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100
2.40	Persentase Keluarga yang Melaksanakan PHBS	-	-	35,59	33	43

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, 2020

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat.

1). Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di suatu wilayah menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor

penyebab kematian bayi diantaranya tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi orang tua bayi. Pada tahun 2020 angka kematian bayi adalah sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 15 bayi. Kasus tertinggi AKB di Kabupaten Balangan dengan kasus BBLR sebanyak 6 kasus, asfiksia 4 kasus dan kasus lain-lain seperti kelainan konginetal (kelainan jantung bawaaan).

AKB pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya menekan AKB, di antaranya adalah:

a) Kelengkapan alat, khususnya untuk penanganan bayi di RSUD Balangan masih terbatas. Sehingga untuk kasus lainnya yang memerlukan alat yang canggih seperti kelainan konginetal, kelainan jantung diperlukan rujukan ke rumah sakit umum lain yang fasilitasnya lebih lengkap. Serta ruang Perinatologi RSUD yang masih terbatas dalam menangani bayi dengan komplikasi juga sangat berpengaruh dalam upaya mengurangi kematian karena tanpa didukung sarana prasarana yang lengkap maka penanganan bayi komplikasi tidak dapat ditangani dengan komprehensif dan pada akhirnya kematian tidak dapat dicegah.
b) Kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh kasus BBLR, namun tidak semua murni karena kasus dengan BBLR sendiri, melainkan disertai dari faktor ibu, yaitu ibu mengalami kekurangan gizi (KEK), anemia dan infeksi. Selain itu, Asfiksia, usia ibu dan usia kehamilan ibu juga menjadi salah satu penyebab kematian bayi.
c) Faktor kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan, persalinan maupun pola asuh bayi juga memberikan kontribusi terhadap kematian bayi.
d) Tumpang tindih SDM yang memegang program.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kematian bayi antara lain:

a) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil yang mengalami KEK dengan harapan tidak melahirkan BBLR yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian bayi di Kabupaten Balangan.
b) Mengadakan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Dengan adanya kelas ibu hamil dan balita tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan untuk

ibu hamil dan keluarga dalam merawat kehamilan, persiapan persalinan serta pola asuh yang benar untuk tumbuh kembang anak.

c) Peningkatan pengetahuan bidan serta ibu hamil dan keluarga dalam mengetahui komplikasi ibu hamil karena komplikasi pada ibu hamil sebagai salah satu penyebab kematian bayi terutama di masa neonatal, sehingga perlu adanya update ilmu dan keterampilan karena bidan sebagai garda terdepan dalam menanganani kasus-kasus komplikasi maternal dan neonatal. Pada tahun 2020 mengadakan Oreintasi Neonatal Essensial dan pembelajaran kasus kematian BBLR oleh dokter Spesialis Anak. Selain itu, pendidikan berkala tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak sangat diperlukan.
d) Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) baik tingkat puskesmas maupun kabupaten. Adanya kegiatan AMP atau penulusuran terhadap sebab terjadinya kematian bayi di Kabupaten Balangan maka diharapkan tidak ada lagi kematian bayi dengan kasus yang sama.
e) Melaksanakan pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi baik di puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit sehingga dapat mencegah kematian bayi akibat penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemberian vitamin A dosis tinggi sesuai usia untuk usia dibawah 59 bulan setiap bulan februari dan agustus pada tahun berjalan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahun tubuh terhadap penyakit dan mencegah rabun senja bahkan kebutaan akibat kekurangan vitamin A dan pemberian pelayanan kepada balita di posyandu balita untuk memantau tumbuh kembang balita serta pelayanan kesehatan balita.
f) Penyusunan formasi SDM sesuai jenis tenaga yang diperlukan dan distribusi SDM di seluruh wilayah kerja Puskesmas sehingga tidak ada SDM kesehatan yang merangkap tugas.
g) Meningkatkan pelayanan dan kualitas fasilitas kesehatan.
h) Edukasi pilihan KB untuk yang menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, dan menghentikan kehamilan (dapat dengan menggunakan tokoh agama/tokoh masyarakat sebagai role model dan model di media edukasi).

2). Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI atau Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukan jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas pada 100.000 KH dalam suatu

kurun waktu tertentu pada saat ibu hamil, melahirkan dan pada saat nifas (42 hari setelah melahirkan). AKI di tahun 2020 sebesar 88,7/100.000 KH atau sebanyak 2 orang yang disebabkan oleh Ibu Hamil PEB 1 orang di rumah sakit, 1 orang Lain-lain (Hypertyroid) di rumah.

Permasalahan dalam menekan angka kematian ibu di antaranya adalah (1) masih kurangnya puskesmas yang mampu PONED serta Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terutama untuk daerah terpencil yang aksesnya jauh dari RSUD. Rumah tunggu persalinan yang ada di Kabupaten Balangan berjumlah 2 buah rumah tunggu di wilayah kerja Puskesmas Paringin dan wilayah kerja Puskesmas Tebing Tinggi yang digunakan untuk peristirahatan ibu hamil risiko tinggi dan keluarganya yang akan melahirkan di fasilitas kesehatan terdekat atau rumah sakit sehingga apabila waktunya melahirkan ibu hamil yang risiko tinggi tidak jauh lagi ke rumah sakit sehingga mendapatkan penanganan sedini mungkin agar kematian ibu dapat dicegah. (2) Masih banyaknya ibu hamil yang anemia yaitu 489 orang dan ibu hamil KEK 380 orang ibu hamil merupakan kehamilan yang berisiko terjadinya perdarahan saat persalinan dan kekurangan Gizi Kronis. (3) Kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas serta risiko tinggi ibu hamil dan bersalin karena di Kabupaten Balangan tidak semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan dan tidak semua persalinan di fasilitas kesehatan. (4) Masih adanya persalinan yang ditolong oleh paraji tahun 2020 berjumlah 20 orang karena masih kuatnya sosial budaya masyarakat dapat memicu kematian ibu antara lain komplikasi persalinan seperti perdarahan. (5) Tahun 2020 terjadi pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan misalnya kurangnya kunjungan dokter spesialis ke puskesmas untuk mendeteksi faktor risiko. (6) Tumpang tindih SDM yang memegang program. (7) Preeklamsia/eklamsia; pola makan ibu hamil; serta komplikasi penyakit penyerta.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kematian ibu diantaranya (1) penambahan jumlah poskesdes, dengan penambahan 4 buah poskesdes baru dan 3 buah penambahan ruang 4 buah, rehab 5 buah agar seluruh desa memiliki poskesdes jadi total poskesdes / polindes 126 buah, sehingga kedepannya poskesdes merata di kabupaten Balangan, dengan adanya poskesdes akan memudahkan akses ibu hamil, bersalin dan nifas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan apabila ada risiko tinggi maka sedini

mungkin dapat diintervensi, pada tahun 2020 juga ada penambahan bidan PTT daerah sebanyak 12 orang dan pengadaan partus set buah 103 buah serta oksigen 74 buah. Selain itu, renovasi faskes pelayanan kesehatan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan juga diperlukan (2) Pada tahun 2020 dilaksanakan kelas ibu hamil sebanyak 55 kelas, namun walapun sudah ada kelas ibu hamil di Kabupaten Balangan namun tidak dapat maksimal meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarganya karena kelas ibu hamil yang dibentuk dari ribuan sasaran ibu hamil karena keterbatasan anggaran dan situasi pandemic sehingga terbatas dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. (3) Selain peningkatan pengetahuan ibu hamil pada tahun 2020 di adakan Orientasi Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dan PUS, Orientasi Kohort Ibu, Bayi dan Balita terintergrasi PPIA, Pembelajaran kasus kematian Ibu dan Bayi, Orientasi ANC sesuai standar. (4) Penyusunan formasi SDM sesuai jenis tenaga yang diperlukan dan distribusi SDM di seluruh wilayah kerja Puskesmas.

Adanya BPJS yang dapat digunakan untuk ibu hamil, ibu bersalin dan nifas agar memeriksakan dirinya dan bersalin ke fasilitas kesehatan, sehingga tidak ada lagi ibu yang tidak memeriksakan dirinya karena alasan keterbatasan finansial. Mengadakan pengkajian kasus–kasus kematian ibu mulai dari tingkat puskesmas sampai tingkat kabupaten dengan tim manajemen, pengaji, dan tim komunitas pelayanan Sp.OG juga merupakan upaya untuk menurunkan kematian ibu, karena dengan adanya pengajian kasus Audit Maternal Perinatal (AMP) dapat dimanfaatkan untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian ataupun morbiditas yang berakar pada pasien dan keluarga, petugas kesehatan manajemen pelayanan serta kebijakan pelayanan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pengelola program KIA di kabupaten dan pemberi pelayanan di tingkat dasar (puskesmas dan jajarannya) dan di tingkat rujukan dapat menetapkan prioritas untuk mengatasi faktor yang berpengaruh tersebut. PERDA KIBBLA (Kesehatan Ibu bayi dan Balita) pada tahun 2017 dan berlanjut ke tahun 2020 sebagai dasar kemitraan bidan dan dukun bayi dimana di dalam pasal 31 berbunyi tenaga pertolongan persalinan tradisional dilarang memberi pertolongan persalinan dan ayat selanjutnya berbunyi tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk non medis lainya kepada bayi baru lahir sehingga kematian ibu karena keterlambatan penanganan persalinan dengan komplikasi dapat di minimalisir sehingga tidak terjadi kematian ibu. Pemeriksaan terhadap ibu hamil sesegera mungkin sebelum

usia kehamilan 12 minggu dan pemeriksaan ibu hamil sesuai standar baik di puskesmas dan jaringannya sehingga apabila ditemukan kelainan atau risiko pada pada ibu akan cepat terdeteksi. Pemberian vaksin Tetanus Toksoid (TT) kepada Wanita Usia Subur dan ibu hamil untuk mencegah infeksi baik pada ibu nifas minimal 2 kali selama nifas dan pemberian vitamin A untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terkena infeksi yang menyebabkan kematian ibu.

3). Prevalensi stunting

Prevalensi stunting digunakan untuk mengukur penurunan angka kejadian stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik–pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E- PPGBM) Balita pendek dan sangat pendek tahun 2020 sebesar 25,7 %, dari 8536 balita yang di entry di aplikasi E-PPGBM terdapat 2.201 balita yang pendek dan sangat pendek, hal ini memberikan gambaran masalah gizi yang bersifat kronis. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit.

Beberapa faktor risiko yang melandasi tingginya stunting antara lain: SDM yang menangani stunting masih merangkap dengan tugas lain; Masyarakat belum mengetahui frekuensi minpemeriksaan kesehatan pemantauan tumbuh kembang; Pelayanan kesehatan balita masih kurang; sarana dan prasarana masih ada yang belum memadai; pernikahan dini yang tinggi; pola makan kurang baik; pengadaan sumber pangan masih kurang.

Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya dan berdasarkan data World Bank, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; serta (d) Peningkatan akses pangan bergizi. (e) Pemenuhan SDM kesehatan (f) Edukasi kepada masyarakat dan pendekatan tokoh agama/masyarakat/adat (g) Renovasi dan pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan (h) menurunkan pernikahan dini.

4). Balita Gizi Buruk

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan adalah 100% dengan total kasus 16 orang selama tahun 2020, ini menurun dari tahun sebelumnya di mana tahun 2019 ada 21 kasus, yang di maksud Balita Gizi buruk mendapat perawatan ini adalah anak 0-59 bulan memiliki tanda klinis gizi buruk dan atau indeks berat badan per Panjang badan (BB/PB) nilai score nya kurang – 3 SD atau Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 11 cm pada balita 6 – 59 bulan yang di rawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana kasus gizi buruk.

Cakupan kunjungan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna ada syarat-syarat tertentu, untuk mendapatkan 1 cakupan pelayanan bayi minimal 4 kali yaitu 1 kali selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir, cakupan yang di dapat tahun 2020 adalah 81,7%. Kunjungan pelayanan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi serta peningkatan hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang.

5). Kasus TBC

Pada tahun 2020 jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC adalah sebanyak 294 penemuan kasus TBC, dengan angka prevalensi sebesar 224 /100.000 penduduk. Sebanyak 294 kasus tuberkolosis ini ditemukan atau terdeteksi melalui program DOTS baik di Puskesmas atau di Rumah Sakit. Semua penderita yang ditemukan diberikan penanganan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan Rumah Sakit diantaranya dilakukan pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium dan diberikan edukasi tentang

penyakit TBC. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah sebesar 89% dari jumlah 294 kasus tuberkolosis. Pada tahun 2020 tidak ada kematian akibat tuberkolosis atau angka *Case Fatality Rate* sebesar 0%.

6). Cakupan desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Pada tahun 2020 cakupan desa/kelurahan UCI adalah sebesar 78,2% dan presentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak adalah sebesar 82%. Turunnya cakupan desa UCI dan anak usia satu yang diimunisasi campak dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dan adanya berita atau informasi yang tidak benar terkait vaksin yang mengakibatkan terjadi penurunan Persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak.

7). Fasilitas kesehatan

Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu untuk kegiatan pelayanan terpadu untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, penanggulangan diare dan gizi (melakukan penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita). Posyandu diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatan di bawah bimbingan Puskesmas. Posyandu merupakan suatu kegiatan perwujudan peran serta masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1000 balita. Rasio Posyandu per satuan balita digunakan untuk mengukur ketersediaan Posyandu berdasarkan jumlah balita yang ada. Semakin besar nilai rasio ini, makin tinggi tingkat kemampuan dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan. Rasio posyandu Kabupaten Balangan Tahun 2020 sebesar 19,95 dimana terdapat 202 posyandu yang melayani 10.121 balita. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio jumlah posyandu mengalami penurunan.

Puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan

kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain penyediaan berbagai fasilitas kesehatan seperti : rumah sakit, puskesmas, tenaga medis (dokter, perawat, bidan) dan lain-lain. Di Kabupaten Balangan terdapat 1 Rumah Sakit, 12 Puskesmas dan 19 Puskesmas Pembantu, dengan rasio per 100.000 penduduk seperti tercantum pada table di atas.

Adapun jumlah rasio puksesmas tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk ditahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 3 poliklinik yaitu poliklinik di Balangan Coal, Polres Balangan dan BNNK. Dan untuk rasio puskesmas pembantu tahun 2020 lebih rendah di bandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan jumlah puskesmas pembantu yang aktif tahun 2019 berjumlah 21 puksesmas pembantu sedangkan di tahun 2020 hanya berjumlah 19 puskesmas pembantu yang aktif. Pada tahun 2020 jumlah poskesdes di Kabupaten Balangan adalah 139. Terdapat 19 desa yang belum memiliki poskesdes.

8). Tenaga Kesehatan

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Balangan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat menjalani aktifitas kehidupan. Rasio dokter per jumlah penduduk merupakan jumlah dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Rasio Dokter Umum dan Dokter Gigi terhadap jumlah penduduk masih belum sesuai dari tahun ke tahun. Sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi di Puskesmas sudah sesuai dengan kategori Puskesmas. Ada perbedaan Antara metode perhitungan tenaga kesehatan secara rasio dengan standar ketenagaan minimal sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, karena Dokter Umum dan Dokter Gigi dengan status ASN masih kurang, pemenuhan Dokter Umum dan Dokter Gigi di Puskesmas juga melalui tenaga kontrak.

Dari Rasio jumlah Penduduk, tenaga kesehatan Bidan dan Perawat sudah terpenuhi, Namun dari metode perhitungan tenaga kesehatan secara analisis beban kerja masih kurang, terutama tenaga bidan, khususnya bidan desa. Masih ada beberapa desa yang belum memiliki bidan desa. Selain itu tenaga bidan yang ada sebagian besar adalah tenaga kontrak.

9). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Sedangkan Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Pilar STBM ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Adapun 5 Pilar STBM yang dimaksud adalah sebagai berikut

1) Stop Buang Air Besar Sembarangan, kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
2) Cuci Tangan Pakai Sabun, perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga, melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Kegiatan STBM di Kabupaten Balangan dimulai tahun 2008 dengan lebih memfokuskan pada pilar satu yaitu stop Buang Air Besar sembarangan, sampai tahun 2020 jumlah desa yang sudah dinyatakan ODF 81 desa (51,92%). Tahun 2020 dalam upaya peningkatan progress desa mencapai SBS terdapat beberapa

kendala. Tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 sehingga upaya sosialisasi dan pemicuan terkendala dalam hal pengumpulan orang banyak. Pada beberapa desa yang tadinya sudah ODF kembali dikatagorikan tidak ODF dikarenakan adanya pembangunan tempat tinggal masyarakat baru yang tanpa disertai pembangunan jamban keluarga. Begitu pula yang terjadi pada dana desa sebagai pendukung langsung pembangunan Jamban di desa. Banyak dana desa yang mendapat pengurangan untuk penangulangan Covid-19, ada juga dana desa yang sebelumnya sudah dianggarkan untuk pembangunan jamban di desa terpaksa dialihkan ke kegiatan untuk penanggulangan Covid-19. Untuk desa yang melaksanakan upaya STBM secara keseluruhan (lima pilar STBM) sampai tahun 2020 baru 41 Desa (26,6%), ini dikarenakan kabupaten balangan memang masih memfokuskan pada pilar 1 yakni stop buang air besar sembarangan, namun upaya untuk melaksanakan kelima pilar STBM itu tetap terus sosialisasikan dan dilaksanakan.

10). Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Penyakit ini dapat menyebar cepat keberbagai Negara termasuk Indonesia bahkan sampai ke Provinsi Kalimantan Selatan dan menyebar pula di kabupaten Balangan. Kasus pertama konfirmasi Covid-19 terjadi pada bulan April yang berasal dari cluster GOWA sebanyak 2 orang. Denagan adanya kasus tersebut tim Covid 19 dari Puskesmas dan Dinas kesehatan aktif melakukan kegiatan pelacakan dan screnning kasus-kasus ODP, PDP dan OTG. Pada bulan Mei proses pelacakan terus dilakukan secara aktif hingga sampai Desember 2020 ditemukan kasus konfirmasi 1.135 kasus dengan kasus sembuh 1.098 dan meninggal 18 kasus.

Untuk mendapatkan kasus terkonfirmasi, maka harus dilakukan pemeriksaan *swab* berupa RT-PCR yang hanya bisa dilakukan pemeriksaan di BBTKLPP Banjarbaru, sehingga tim PCR dari tiap-tiap Puskesmas dan Dinas Kesehatan memeriksa 1 (satu) kali dalam seminggu dan dikumpulkan kemudian diantar ke BBTKLPP. Dikarenakan terkendela dengan jarak yang lumayan jauh, sehingga pengiriman sampel hanya bisa 1 (satu) kali dalam seminggu. Jika menemukan kasus terkonfirmasi, maka Tim Surveilans di Puskesmas aktif melakukan pemantauan dan pelacakan kontak erat. Kasus konfirmasi Covid-19

tanpa gejala dan gejala ringan dilakukan karantina khusus di tempat karantina dan yang bergejala sedang dan berat dirawat di RS bahkan dirujuk ke RS rujukan Covid-19. Kabupaten Balangan pada awalnya memiliki dua (2) karantina di SKB dan BLK serta satu (1) ruang isolasi di RSUD Balangan, namun sejak keluarnya Permenkes nomor: HK.01.07/menkes/413/2020 per 13 juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19), yang mana pasien tanpa gejala dan gejala sedang boleh melakukan karantina mandiri di rumah. Sejak saat itu banyak pasien terkonfirmasi memilih untuk karantina mandiri, sehingga tempat karantina dikurangi hanya 1 tempat saja yaitu di SKB.

Sampai saat ini Tim Surveilans tetap aktif melakukan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) untuk terus dapat menemukan kasus guna pemutusan transmisi penularan. Kendala dan hambatan dalam penanganan Covid-19 di kabupaten Balangan, yaitu (1) masih terbatasnya petugas di lapangan dalam pemantauan Covid-19 terutama dalam memantau pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri, (2) masih banyak masyarakat bahkan tokoh masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 sehingga terkendala dalam 3T (Tracing, Testing dan Treatment) dan Masih ada penolakan dari masyarakat untuk dilakukan 3T sehingga target mingguan untuk tracing sulit dicapai. (3) Masih kurang disiplinnya masyarakat dalam mengikuti aturan saat isolasi mandiri.

11). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Adapun data kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal tercantum pada tabel 2.34.

Tabel 2.34
Capaian Indikator SPM Kesehatan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	67	68	68	70	73,2
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	69	75,55	74,88	76,43	80,11
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84,42	79,66	79,3	81,73	85,26
4	Pelayanan kesehatan balita	54	52,6	51	61,72	95,13
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	97	82	85	96,03	15,01
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	16	15	38	12

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	49,9	41,39	41,3	69,74	93,6
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	-	100	75	151	29,7
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	-	100	93	120,28	49
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	-	100	100	125	173
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	38	17
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	0	100	100	100	87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota.

Setiap ibu hamil di Kabupaten Balangan mendapatkan pelayanan a*ntenatal care* sesuai standar. Pelayanan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester pertama dan kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasalitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pelayanan yang dilakukan pada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T.

Target untuk pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2020 di Kabupaten Balangan sesuai SPM adalah 100% pencapaian tahun 2020 capaian cakupannya 73,2%. Berbagai faktor mempengaruhi rendahnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar, masih ada desa yang tidak memiliki poskesdes padahal poskesdes merupakan akses terdekat bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya terutama desa yang jauh dari puskesmas, masih ada desa yang tidak memiliki bidan, sasaran yang digunakan adalah sasaran proyeksi sehingga pembaginya lebih tinggi dari jumlah ibu hamil yang ada, situasi pandemic mengakibatkan terjadi penurunan kunjungan masyarakat ke

fasilitas dan penurunan kunjungan petugas ke masyarakat serta terjadi perubahan mekanisme pelayanan.

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasalitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register baik persalinan normal maupun komplikasi. Target untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin di fasilitas tahun 2020 sesuai SPM di Kabupaten Balangan adalah 100%, pencapaian tahun 2020 adalah sebesar 80,11%. Berbagai faktor mempengaruhi rendahnya capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain sasaran proyeksi lebih tinggi dari ibu bersalin yang ada, kurangnya pengetahuan ibu bersalin dan keluarga akan pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga apabila persalinan berisiko yang menyebabkan kematian dapat terdeteksi dan diintervensi secara dini sesuai kewenangan, masih ada desa yang belum memiliki poskesdes padahal poskesdes sebagai akses terdekat ibu untuk bersalin yang aman sehingga ibu memilih bersalin dirumahnya, masih ada desa yang tidak memiliki bidan, masih adanya persalinan yang ditolong di dukun kampung atau paraji tanpa bermitra dengan tenaga kesehatan khususnya bidan.

Upaya yang sudah dilaksanakan pada kegiatan pertolongan persalinan bagi ibu hamil antara lain (a) Menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kecamatan Paringin dan Puskesmas Tebing Tinggi yang bertujuan untuk mendekatkan ibu hamil normal dan keluarganya yang akan bersalin yang aksesnya jauh dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan. (b) Pertemuan AMP tingkat puskesmas maupun kabupaten untuk menelusuri sebab kematian ibu di Kabupaten Balangan agar kedepannya tidak terjadi lagi kematian ibu dengan sebab yang sama yang dihadiri oleh seluruh Bidan Koordinator, Bidan Desa, Kepala Puskesmas, Kepala Ruang Bersalin RSUD, Kepala NICU RSUD, Kepala Ruang Anak, Ketua IBI, Ketua IDI dan Spesialis Kandungan, Spesialis Anak, dan Spesialis anak sebagai engkaji kasus. (c) Pertemuan petugas klinik KB yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan KB aktif terutama untuk ibu dengan 4 kategori (terlalu tua, muda, dekat dan banyak anak untuk hamil) yang akan berisiko apabila ibu hamil terhadap kehamilan dan persalinannya. (d) Jaminan biaya persalinan untuk seluruh ibu hamil melalui BPJS, agar ibu bersalin yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai persalinan dengan tenaga kesehatan tetap dapat bersalin di fasilitas kesehatan yang di tolong oleh tenaga kesehatan. (e) Kemitraan bidan dan dukun melahirkan / paraji untuk meningkatkan

agar persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan terutama oleh bidan. (f) Sosialisasi RTK, (g) Pengadaan bahan bakar minyak dan sewa mobil untuk rujukan ibu hamil atau bersalin dari RTK ke RSUD. Kemudian, (h) Koordinasi dengan IGF Dinas kesehatan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan obat - obat dan untuk ibu bersalin, (i) Bimbingan teknis kebidan puskesmas dan bidan di desa untuk meningkatkan pengetahun dan pemahaman tentang SPM dan (j) Pembelajaran Kasus Kematian bersama Dokter Spesialis Obstetri.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari yang dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter dan atau dokter spesialis anak. Target untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2020 di Kabupaten Balangan adalah 100% sesuai SPM, pencapaian tahun 2020 sebesar 85,26%. Berbagai faktor mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir antara lain sasaran proyeksi lebih tinggi dari bayi baru lahir yang ada, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir sehingga bayi yang berisiko dan dapat menyebabkan kematian dapat terdeteksi dan diintervensi secara dini sesuai kewenangan, masih ada pelayanan yang dilakukan diluar wilayah yang tidak terlaporkan, masih ada desa yang belum memiliki poskesdes padahal poskesdes sebagai akses terdekat untuk memeriksakan kesehatan bayi baru lahir dan masih ada desa yang belum memiliki bidan di desa.

Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak berusia 12-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat. Target untuk pelayanan kesehatan balita tahun 2020 di Kabupaten Balangan adalah 100% sesuai SPM, pencapaian tahun 2020 sebesar 95,13% ini meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 61,7%. Berbagai faktor mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan balita antara lain sasaran proyeksi lebih tinggi dari balita riil yang ada, karena kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan balita sehingga tidak lagi membawa balitanya kepuskesmas maupun posyandu apabila sudah mendapatkan imunisai lengkap padahal balita tersebut masih memerlukan pemantauan kesehatannya

Untuk pencapaian pelayanan balita ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu penimbangan 8 kali minimal setahun (pemantauan pertumbuhan), 2 kali pemberian vitamin A dan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali setahun. Situasi pandemi terjadi penurunan kunjungan masyarakat ke fasilitas dan penurunan kunjungan petugas ke masyarakat dan terjadi perubahan mekanisme pelayanan dan di karenakan situasi pandemi, dimana adanya penundaan kegiatan posyandu yang baru diperbolehkan sekitar bulan Agustus dengan tetap menjaga protokol kesehatan, namun tidak semua desa berani dengan serta merta melaksanakan posyandu, sehingga berpengaruh pada pencapaian tingkat partisipasi masyarakat dan cakupan penimbangan posyandu.

Selama masa pandemi, sebagian besar sekolah menerapkan pembelajaran dari rumah (*daring*) yang membuat sektor pendidikan membuat terobosan-terobosan menyesuaikan kondisi di lapangan dikarenakan akses internet tidak merata di beberapa daerah sehingga beberapa sekolah melakukan inovasi pola pembelajaran agar siswa didik tetap mendapatkan hak belajarnya. Ada yang menggunakan sistem bergiliran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ada pula yang menggunakan sistem guru kunjung. Untuk pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasarpun juga mengikuti kebijakan dan kondisi di lapangan. Pembinaan UKS dilakukan oleh pengelola UKS dan Pengelola PKPR kepada guru-guru dengan harapan dapat disampaikan kepada anak muridnya terutama terkait KIE protokol kesehatan. Penjaringan kesehatan juga dilaksanakan dua metode yaitu

a) Secara Offline (luring)

Penjaringan dilakukan secara bergiliran menyesuaikan jadwal hadir siswa didik di beberapa sekolah yang melaksanakan tatap muka secara terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

b) Secara Online (daring)

Penjaringan dilakukan dengan mengisi google form yang dibuat berdasarkan panduan dari Kemenkes. Link kemudian di share pengelola kepada guru. Peserta didik mengisi form dengan mendapatkan panduan dari guru dan pengeloala di Puskesmas.

Pencapaian SPM Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 15,01%, hal ini dikarenakan penjaringan hanya dilakukan pada kelas 1 dan kelas 7. Hal ini juga dikarenakan refocusing anggaran untuk penjaringan. Sehingga penjaringan ke semua sasaran tidak bisa terlaksana dengan baik.

Skrining kesehatan pada usia produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Skrining Kesehatan Penyakit Tidak Menular meliputi wawancara riwayat kesehatan, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat pada penduduk yang memiliki faktor risiko juga diberikan konseling. Sasaran skrining kesehatan sebagai upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dilakukan di Pos Binaan Terpadu (Posbindu) dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada seluruh penduduk usia 15-59 tahun satu kali dalam satu tahun untuk setiap orang. Deteksi dini kanker leher rahim dan pemeriksaan payudara juga dilakukan pada penduduk wanita usia 30-50 tahun. Pada tahun 2020 sasaran skrining kesehatan pada usia produktif Kabupaten Balangan adalah 82.986 jiwa dan sasaran deteksi dini kanker leher rahim dan pemeriksaan payudara klinis adalah 4.817 orang. Sampai pada bulan Desember 2020 skrining kesehatan pada usia produktif hanya mencapai 7.717 jiwa (9,30%), deteksi dini kanker leher rahim dan pemeriksaan payudara klinis hanya 584 orang (12%). Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif antara lain:

a) Belum maksimalnya pembentukkan Posbindu PTM di Desa. Hal ini disebabakan oleh keterbatasan anggaran APBD yang digunakan untuk penyediaan alat ukur posbindu kit yang digunakan dalam pelaksanaan Posbindu PTM. Sampai pada tahun 2020 Posbindu PTM di Kabupaten Balangan berjumlah 109 buah (69%).
b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular ke Posbindu PTM. Tidak semua Desa dapat melaksanakan Posbindu PTM dengan menggunakan Anggaran Dana Desa.
c) Belum terlaksananya Posbindu PTM di Sekolah untuk pelayanan skrining kesehatan pada usia remaja, karena keterbatasan logistik dan Posbindu Kit yang digunakan untuk melakukan skrining.
d) Sebagian besar peserta Posbindu PTM di Desa adalah penduduk usia 25 tahun ke atas.
e) Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Posbindu PTM kurang bermanfaat karena tidak adanya pengobatan bagi peserta Posbindu PTM yang memiliki faktor risiko penyakit tidak menular.

f) Sebagian besar masyarakat masih belum memahami tentang bahaya kanker serviks.

g) Untuk masyarakat desa terpencil, selain kurang mendapatkan informasi, mereka juga kesulitan untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan setempat sehingga sangat sulit untuk mengikuti pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS).

h) Kondisi pandemi Covid-19 merupakan salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).

Pelayanan skrining kesehatan usia 60 tahun ke atas sesuai standar diberikan di puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan minimal 1 kali setahun oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi maupun kader posyandu Lansia atau posbindu. Apabila ada usia lanjut yang memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini. lingkup skrining adalah Pengukuran Tinggi badan, Berat badan, lingkar perut, Pengukuran Tekanan Darah, Pemeriksaan gula darah, Pemeriksaan kolesterol, Pemeriksaan gangguan mental, Pemeriksaan gangguan kognitif, Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, Anamnesis perilaku berisiko. Target SPM untuk pelayanan kesehatan usia lanjut adalah 100%, untuk pencapaian tahun 2020 adalah sebesar 93,7 %. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan mutu layanan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut (60 tahun ke atas). Pencapaian pelayanan lansia belum 100% dikarenakan situasi pandemi terjadi penurunan kunjungan masyarakat ke fasilitas dan penurunan kunjungan petugas ke masyarakat.

Pelayanan usia lanjut dengan sasaran 7457 orang, memiliki permasalahan diantaranya jumlah posyandu untuk usia lanjut hanya 115 buah (73%) dari 157 desa di Kabupaten Balangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi, padahal posyandu tersebut merupakan ujung tombak atau akses terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut yang tempat tinggalnya jauh dari puskesmas. Selain itu juga karena jumlah Lansia KIT hanya ada 17 buah dari 115 posyandu, buku lansia belum memenuhi semua sasaran lansia, selain di pengaruhi dari faktor sarana dan prasarana juga dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan untuk usia lanjut seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga gizi, yang mana dari tenaga kesehatan` tersebut yang sudah dilatih untuk tim posyandu usia lanjut hanya berjumlah 13 orang.

Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk 15 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan Hipertensi sesuai standar meliputi monitoring takanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan farmakologis. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. Jika tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi makan penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi atau orang dengan keluhan hipertensi sesuai standar adalah 100 %. Dengan perhitungan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%. Capaian target pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 adalah 4.897 penderita (30 %). Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya Posbindu PTM sehingga pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif antara lain:

a) Kondisi pandemi yang sedang kita hadapi menyebabkan kegiatan-kegiatan program tidak dapat terlaksana secara optimal.
b) Tingginya angka pasien terkonfirmasi covid-19 di Kabupaten Balangan, menyebabkan semua kegiatan yang penyelenggaraanya membutuhkan akses ke Desa dan megumpulkan masyarakat Desa harus dihentikan.
c) Keterbatasan sarana dan prasarana serta APD yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan juga menjadi kendala tersendiri, sehingga pelayanan kesehatan di posbindu PTM tidak dapat dilaksanakan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

a) Melakukan sosialisasi/penyuluhan kesehatan tentang hipertensi.
b) Melaksanakan senam di Posbindu PTM.
c) Memberikan konseling perorangan pada saat pelaksanaan Posbindu PTM.

d) Melaksanakan Posbindu PTM dengan jadwal berbeda dan bergiliran dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Penduduk dengan Diabetes Melitus (DM) memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya. Target pelayanan kesehatan kepada penyandang DM sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/kota adalah 100 persen. Dengan perhitungan persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Capaian target pelayanan kesehatan penderita DM di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 adalah 2.085 penderita (49%). Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya Posbindu PTM sehingga pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif antara lain:

a) Kondisi pandemi yang sedang kita hadapi menyebabkan kegiatan-kegiatan program tidak dapat terlaksana secara optimal.
b) Tingginya angka pasien terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Balangan, menyebabkan semua kegiatan yang penyelenggaraanya membutuhkan akses ke Desa dan megumpulkan masyarakat Desa harus dihentikan.
c) Keterbatasan sarana dan prasarana serta APD yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan juga menjadi kendala tersendiri, sehingga pelayanan kesehatan di posbindu PTM tidak dapat dilaksanakan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain

a) Melakukan sosialisasi/penyuluhan kesehatan tentang Diabetes Melitus.
b) Melaksanakan senam di Posbindu PTM.
c) Memberikan konseling perorangan pada saat pelaksanaan Posbindu PTM.
d) Melaksanakan Posbindu PTM dengan jadwal berbeda dan bergiliran dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Pelayanan Kesehatan pada ODGJ sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan Kesehatan jiwa dan edukasi. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten` dalam memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2020 jumlah kasus ODGJ yang ditangani dan dilayani berjumlah 319 kasus dari jumlah target 184 kasus (173%). Dengan demikian, jumlah kasus ODGJ di Kabupaten Balangan bertambah.

Faktor penyebab meningkatnya kasus ODGJ:

a) Masalah sosial ekonomi dan faktor lingkungan.
b) Kurangnya dukungan dari keluarga penderita sehingga proses pengendalian dan penyembuhan menjadi terhambat.
c) Kurangnya kerjasama dari keluarga penderita dalam penanganan masalah kesehatan jiwa penderita.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

a) Pemantapan sistem pemantauan serta penanganan pasien dengan gangguan kesehatan jiwa pada pengelola program kesehatan jiwa di Puskesmas dan berintegrasi dengan SKPD terkait lainnya.
b) Mensukseskan Program Provinsi bebas pasung.
c) Membuat nota kesepahaman antara Dinkes Kabupaten, Dinas Sosial, Setda menindaklanjuti nota kesepahaman tiga Kementerian dan dua lembaga tentang pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang Disabilitas Mental orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
d) Skrining untuk pasien jiwa.
e) Peningkatan kapasitas petugas dalam deteksi dini gangguan jiwa dimasyarakat.
f) Pembentukan kader dalam deteksi dini gangguan jiwa di masyarakat.
g) Sosialisasi TPKJM di Kabupaten Balangan.

Setiap orang dengan terduga Tuberkulosis di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayan kesehatan sesuai standar, sebagai bentuk upaya Pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis salah satunya adalah dengan penemuan secara aktif melalui kegiatan deteksi dini/skrining TB. Pemenuhan standar pelayanan kesehatan terhadap orang terduga tuberkulosis merupakan kewajiban Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga tuberkulosis di wilayah kerjanya yang memenuhi mutu

pelayanan dasar dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan terhadap orang terduga Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan terduga Tuberkulosis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangan di FKTP (puskesmas dan jaringan) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta.

Pelayanan orang dengan terduga Tuberkulosis diberikan sesuai dengan Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimum yang meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi.

Pelaksanaan penemuan kasus dini/*screening* orang dengan terduga Tuberkulosis dengan target 100% dan penemuan kasus baru Tuberkulosis dengan target 81% serta target keberhasilan pengobatan sebesar 95%. Kegiatan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis tahun 2020 berdasarkan estimasi orang terduga Tuberkulosis sebanyak 2.489 dan estimasi Penemuan kasus Tuberkulosis sebanyak 460 kasus. Upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Balangan dalam mendukung strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 dengan indikator yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan diantara melaksanakan skrining dan penemuan dini penyakit Tuberkulosis baik dalam gedung maupun diluar gedung. Penemuan orang dengan terduga Tuberkulosis pada sampai bulan Desember sebanyak 413 orang (17%). Berbagai upaya terus ditingkatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan orang terduga TB dan penemuan penderita Tuberkulosis Sampai triwulan 4 sebanyak 294 (CDR: 64%).

Berdasarkan data tersebut terjadinya penurunan angka penemuan terduga TB yang sangat signifikan yang sehingga capaian program tidak sesuai target yang diharapkan yaitu sebesar 100%. Berbagai persoalan maupun kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang menjadikan situasi atau perubahan kondisi dimana adanya pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat seperti pembatasan berkumpul, pembatasan aktivitas maupun jaga jarak. Dalam rangka social distancing melakukan penundaan pelaksanaan kegiatan pengumpulan massa dan pelibatan komunitas dalam jumlah yang banyak seperti investigasi kontak, pelacakan kasus, skrining TB, dll. Pada kondisi awal ini juga menimbulkan persoalan lain seperti adanya persepsi masyarakat yaitu dapat mencovidkan pasien yang datang ke fasyankes, petugas takut melakukan kontak langsung dalam melakukan pelacakan/

pemeriksaan kontak dan skrining. Beberapa upaya lain tidak bisa dilaksanakan secara optimal seperti Penyuluhan, sosialisasi maupun koordinasi.

Setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), waria/transgender, penggunaan napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pelayanan edukasi dan skrining HIV. Pemerintah Kabupaten Balangan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang yang berisiko teinfeksi HIV yang memenuhi mutu pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan orang dengan berisiko terinfeksi HIV sesuai kewenangannya yang diberikan di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta.

Dalam pemenuhan capaian target kinerja SPM pada tahun 2020 sebesar 100% dengan jumlah sasaran sebanyak 2.399 orang. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terkena infeksi HIV melalui berbagai upaya dan kegiatan dengan melaksanakan deteksi dini/ skrining dan konseling terhadap kelompok atau yang berisiko terinfeksi HIV pada periode Januari - Desember 2020 sebanyak 2.162 orang (82%). Dalam situasi pandemik Covid-19 serta penanggulangannya dan upaya pengendalian HIV AIDS dilaksanakan serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya termasuk pemeriksaan/ skrining HIV AIDS terhadap orang/ kelompok berisiko diantaranya ibu hamil, pasien TB, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), waria/transgender, penggunaan napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) serta upaya-upaya kesehatan lainnya. Pemeriksaan/ skrining HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV adalah salah satu indikator SPM dari 12 indikator SPM lainnya yang harus dicapai sebesar 100%. Dari data capaian pemeriksaan/ skrining menggambarkan bahwa terjadinya penurunan cakupan skrining/ pemeriksaan HIV tahun 2020 pada orang/ kelompok sasaran hampir 16,4% dibandingkan dengan capaian pemeriksaan/ skrining pada tahun sebelumnya sebesar 98,4%. Terjadinya penurunan capaian akibat berbagai persoalan pada masa pandemi Covid-19 diantaranya jumlah kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan sangat berkurang, adanya persepsi masyarakat bahwa datang ke fasilitas kesehatan dapat dicovidkan, adanya aturan pembatasan mengumpulkan massa, pembatasan aktivitas masyarakat maupun adanya petugas yang takut kontak langsung dengan sasaran sehingga pelaksanaan pemeriksaan/ skrining maupun upaya pengendalian HIV lainnya tidak berjalan secara optimal.

Dalam rangka pencapaian target kinerja SPM berbagai upaya dan strategi terus tetap dilakukan walaupun masih dalam situasi pandemik Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di fasilitas Kesehatan baik pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung. Dalam meminimalisir persoalan dan optimalisasi upaya dimaksud Dinas Kesehatan dan jejaringnya dapat melakukan strategi lain untuk terlaksananya pemeriksaan/ skrining HIV dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan didukung sumber daya yang memadai serta upaya lainnya dengan memanfaatkan modalitas kampanye melalui saluran komunikasi (Daring) dan tidak mengumpulkan massa, misalnya melalui radio, baliho, media sosial dan media cetak.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan penataan ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum *trend* panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan secara kontinyu.

Sampai dengan tahun 2020, panjang jalan Kabupaten Balangan adalah 672,253 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi mantap. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2020 hanya 324,722 km atau 48,30% yang kondisinya mantap, sedangkan 74,390 km atau 11,06% kondisinya rusak ringan dan 273,141 km atau 40,63% dalam kondisi rusak berat. Panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa menjadi lebih rendah. Namun panjang jalan dalam kondisi rusak berat juga masih tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, untuk itu pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala guna menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,174 meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,4170. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, upaya peningkatan kualitas jalan perlu

terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Balangan, terdapat di beberapa ruas saja terutama di sepanjang jalan yang tersedia. Pada tahun 2018, drainase berkondisi baik tercatat sebesar 83,91% kemudian meningkat menjadi 86,90% di tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 88,23% di tahun 2020. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. Kabupaten Balangan yang memiliki sejumlah areal persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2020, jaringan irigasi kewenangankabupatendengan kondisi baik tercatat sebesar 21,53%.

Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2020, sebanyak 78,65% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum layak, menurun dari 95,45% di tahun 2019. Penurunan angka ini dikarenakan adanya revisi perhitungan capaian SR dari PDAM berdasarkan Audit BKPK tahun 2020, dimana 1 SR awalnya adalah 6 jiwa menjadi 3,8 jiwa saja. Capain ini menunjukkan besarnya penduduk yang terlayani oleh jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang disediakan oleh PDAM dan program Pamsimas. Sementara untuk akses sanitasi terjadi peningkatan dimana pada tahun 2019 80,45 % meningkat menjadi 91,88 % di tahun 2020. Peningkatan ini mewakili penggambaran semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan perlunya akses sanitasi yang baik untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Namun capaian akses sanitasi yang tinggi ini masih dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu akses aman, layak dan tidak layak. Untuk akses aman masih sangat rendah, yaitu 0,49%, akses layak sebesar 12,13% dan akses tidak layak sebesar 79,26%. Sehingga masih banyak yang harus dilakukan guna meningkatkan akses tidak layak menjadi akses layak dan akses layak menjadi aman. Dan yang harus menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang melakukan praktek BABS yaitu sebesar 4,51% atau 5.719 jiwa.

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi

sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Terdapat lima tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul – simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat yaitu (1) PHBS di Rumah tangga; (2) PHBS di Sekolah; (3) PHBS di Tempat kerja; (4) PHBS di Sarana kesehatan; (5) PHBS di Tempat umum. Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. (1) Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan; (2) Pemberian ASI eksklusif; (3) Menimbang bayi dan balita secara berkala; (4) Cuci tangan dengan sabun dan air bersih; (5) Menggunakan air bersih; (6) Menggunakan jamban sehat; (7) Memberantas jentik nyamuk; (8) Konsumsi buah dan sayur; (9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari; (10) Tidak merokok di dalam rumah.

Pada tahun 2020 persentase keluarga yang melaksanakan PHBS adalah pada tahun 2020 sebesar 43%. Permasalahan yang dihadapi adalah perubahan perilaku tidak serta merta dapat berubah dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama karena merubah kebiasaan tidak dapat dilakukan dengan sekali sosialisasi/edukasi/kegiatan ada beberapa kegiatan yang mendukung pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Tidak semua puskesmas dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, disebabkan ada dua puskesmas yang tidak memiliki tenaga promosi kesehatan, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana di wilayah puskesmas tersebut. Refocusing anggaran juga menjadi salah satu permasalahan yang ada

Dengan semua permasalahan yang ada, terdapat upaya yang mendukung tercapainya pelaksanaan program ini. Karena program ini lebih mengarah ke perubahan perilaku, jadi pelaksanaan kegiatan seperti penjaringan kesehatan dan survei PHBS terus dilaksanakan. Sehingga perlunya upaya untuk dilakukan penyuluhan secara terus menerus baik penyuluhan pun dilakukan secara terus menerus, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Sosialisasi/kampanye/edukasi mengenai informasi kesehatan selalu disampaikan

dalam berbagai media seperti spanduk, baliho, leaflet dan juga berbagai media sosial.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kabupaten Balangan	638,966	672,253	672,253	672,253	672,253
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,174	0,306	0,337	0,379	0,417
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0051	0,0053	0,0052	0,0051	0,0050
4	Kondisi Jalan (km) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat	 111,369 110,972 4,304 412,321	 205,515 48,630 24,440 393,268	 226,418 44,608 74,390 326,837	 254,634 44,608 74,390 298,621	 280,114 44,608 74,390 273,141
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	34,80	37,81	40,32	44,51	48,30
6	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	17,42	30,57	33,68	37,87	41,67
7	Persentase irigasi kabupaten dlm kondisi baik	-	-	46,99	46,99	21,53
8	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	-	-	17,77
9	Persentase penduduk berakses air minum	61,92	83,23	94,76	95,45	78,65
10	Persentase akses sanitasi	76.35	77.38	79.41	80.45	91,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2021

Penyediaan RTH Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas jumlah RTH publik yang tersedia di kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian dibagi luasan

RTH publik. Luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan Kabupaten Balangan adalah 2.650 Ha dengan kebutuhan RTH publik adalah sebesar 529,978 Ha.

Sampai dengan tahun 2020, luasan RTH Publik yang dikelola baru sebesar 103,667 Ha atau 3,91%. Dengan penambahan luas RTH pada tahun 2019 sebesar 1,7 Ha. Di satu sisi, keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga dapat terjamin. Keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Balangan untuk melaksanakan aktivitas sosial serta ekonomi. Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi oleh pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global.

Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Balangan No. 24 tahun 2013 terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 96% pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan sehingga program dan kegiatan yang masuk dalam program jangka menengah dari tahun 2013-2019 telah terlaksana dan terealisasi. Sehingga didapatkan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 96%.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.0034	0.0366	0.0366	0.03912	0.039112
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	3,50%	3,65%	3,66%	3,67%	3,91%
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	85 %	80%	NA	NA	85 %
4	Ketaatan terhadap RTRW	85 %	92%	94%	96 %	96 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	84,39	85,24	85,24	89,00	90,27
2	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%)	NA	NA	67.68	87.87	96,37
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	NA	NA	0.01	0.002	0,001
4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	50	59.09	63.64	72.73	84,00
5	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	7.2%	7.7%	8.0%	3.01 %	10,39 %
6	Persentase penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60%	65%	70%	80%	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Pada tahun 2020 terdata 4.231 unit rumah tidak layak huni atau 9,72% dari 39.896 total unit rumah yang ada di Kabupaten Balangan, sehingga cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2020 sebesar 90,27%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN.

Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2020 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 96,37%. Kawasan kumuh ini tersebar di tiga kelurahan dan penanganannya sudah mencapai 34,02 ha dari total Kawasan kumuh Kabupaten Balangan yaitu, 35,28 ha. Sehingga hanya menyisakan 1,28 ha kawasan umuh yang akandiselesaikan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2020 ini juga,muncullagikawasankumuhbaru

yang meliputi 8 (delapan) lokasi di 3 (tiga) wilayah kecamatandenganluas 12,354 ha (SK Kumuh tahun 2020). Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh Kembali.

Untuk capaian luas lahan bersertifikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang pada tahun 2020 capaiannya adalah 10,39% dibandingkan 3.01 % pada tahun 2020.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai misi pembangunan. Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan organisasi kepemudaan. Untuk menciptakan Kabupaten Balangan yang kondusif maka salah satunya adanya petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat. Sampai tahun 2020 di Kabupaten Balangan terdapat 2.355 anggota Linmas dan semuanya terlatih. Upaya lainnya yang dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Balangan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Penyelesaian pelanggaran K3 tahun 2019 sebanyak 32 pelanggaran dan tahun 2020 terjadi penurunan pelanggaran yaitu hanya sebanyak 29 pelanggaran dan seluruh pelanggaran K3 telah terselesaikan dengan efektif. Jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran administrasi kependudukan, pelanggaran pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Adapun tindak lanjut dari pelanggaran berupa non yustisi (berupa surat teguran dan surat pernyataan) serta dipersidangkan di Pengadilan Negeri Paringin. Gambaran capaian indikator K3 dapat dicermati pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	-	2.355	2.355	2.355
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	-	7 (100%)	32 (100%)	29 (100%)
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	30 Desa	40 Desa	78 Desa	189 Desa	61 Desa
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
5.5	Persentase Penegakan PERDA	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Terjadinya penurunan pelanggaran K3 ditahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan keberhasilan penyelesaian pelanggaran K3 ini membuktikan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat cukup kondusif, Satpol PP selaku SKPD pemangku indikator ini berhasil melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan pelanggaran trantibmas degan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan kinerja indikator ini adalah jumlah personil SATPOL PP yang cukup memadai yang terdiri dari 36 orang PNS dan 137 orang Non PNS merupakan salah satu faktor kunci keberhasiilan, karena dengan memadainya jumlah ASN SATPOL PP maka pola pembagian tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan pencegahan pelanggaran Trantibmas dapat ditekan dan ini membuktikan tingkat kesadaran hukum masyarakat cukup tinggi, terlaksananya sosialisasi dan pembekalan terhadap Satlinmas di masing-masing desa oleh Satpol PP sehingga dengan meningkatnya kompetensi Satlinmas di desa dapat menjadi pioner penegak keamanan dan ketertiban di desa dan anggota Satlinmas yang dilatih akan dapat melakukan sharing atau tukar menukar ilmu dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada berkurangnya angka pelanggaran Trantibmas, kesadaran hukum masyarakat cukup tinggi, pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP cukup berhasil yakni dari sisi pembinaan represive (pencegahan pelanggaran), pembinaan masyarakat

yang dilakukan oleh Satpol PP juga melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan TNI.

Selain upaya tersebut di atas untuk menciptakan Balangan yang kondusif juga dilakukan upaya melalui instrumen Peraturan Daerah (PERDA). Jumlah pelanggaran PERDA tahun 2019 di Kabupaten Balangan sebanyak 76 pelanggaran PERDA dan jumlah penyelesaian penegakan PERDA sebanyak 76 penyelesaian penegakan atau persentase penegakan PERDA 100%. Tahun 2020 terjadi penurunan pelangaran PERDA yaitu hanya 29 pelanggaran PERDA dengan persentase penegakan PERDA 100%. Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menciptakan Kabupaten Balangan yang kondusif maka tidak hanya penegakan PERDA namun juga penegakan Perbup. Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Balangan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Langkah Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Balangan dengan memberikan teguran lisan, tertulis maupun kerja sosial bagi yang melanggar. Upaya penegakan pelanggaran Covid-19 di Kabupaten Balangan berkesesuaian dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah. Upaya penegakan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 di Kabupaten Balangan sebanyak 497 pelanggaran.

Hal yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ialah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 42 kejadian. Hal itu terjadi karena maraknya pembakaran hutan dan lahan untuk areal perkebunan baru serta tingginya tingkat kebakaran pemukiman sebanyak 19 kali disebabkan karena kelalaian manusia itu sendiri. Tingkat waktu tanggap Respone Time Rate 15 Menit tertangani semua kejadian kebakaran. Kebakaran Hutan (KARHUTLA) di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 160 kejadian kebakaran pada tahun 2019. Dengan adanya peraturan tentang larangan membakar hutan di tahun 2020 sehingga kebakaran ditahun ini mengalami penurunan, menjadi 42 kejadian. Tingkat waktu tanggap atau *Response Time Rate* 15 menit dari lokasi kantor menuju lokasi kejadian sebagian tertangani dengan cepat karena jarak yang

ditempuh tidak terlalu jauh, sedangkan jarak yang lumayan jauh tidak tertangani dengan cepat di tempat kejadian kebakaran tersebut dikarenakan titik *hotspot* ada yang tidak terjangkau dan lain-lain. Kendala yang dialami saat ini adalah kurangnya fasilitas kendaraan untuk menuju lokasi yang sulit dijangkau (jalan sempit) dan baju *safety* untuk anggota TRC. Anggota TRC selalu siap siaga turun kelapangan untuk memantau daerah yang rentan terjadi kebakaran hutan, contohnya di Desa Tapau Banua Hanyar di Lahan Gambut Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong, selain kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman ditahun 2020 ini sebanyak 19 kali. Tingkat waktu tanggap respon rata-rata sekitar 15 menit setiap kejadian. Bencana banjir yang pernah terjadi tahun 2020 mengakibatkan penduduk terdampak sejumlah 4.940 KK dengan 15.786 jiwa, dan terjadi di wilayah kecamatan-kecamatan: Halong, Juai, Tebing Tinggi, Awayan, Paringin Selatan, Paringin dan Lampihong.

F. Urusan Sosial

Data capaian indikator sosial Kabupaten Balangan Tahun 20217-2020 menunjukan presentase kenaikan pada tahun 2019, namun tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19, dapat di lihat pada tabel 2.39.

Tabel 2.39
Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
6. Sosial					
6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan social	28.28%	14.10%	65.84%	40.95%
6.2	Persentase PPKS yang tertangani	28.28%	14.10%	65.84%	40.95%
6.3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	19.75%	52.95%	53.01%	20.66%
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.811%	33.00%	13.60%	149.80%
6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Jumlah PPKS	42,211	18,458	18,286	47,523
6.5	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	19.76	52.96	53.01	20.66
	Rantra/BPNT	6,083	5,995	6,082	6,214
	PKH	2,257	3,780	3,612	3,604
	Total Rantra+PKH	8,340	9,775	9,694	9,818

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.40
Capaian Indikator SPM Sosial
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial					
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		-	-	-	-
		Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	19.75 %	52.95 %	53.01 %	20.66 %
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial					
		Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	1.13%	3.60%	0.08%
2	Penanggulangan korban bencana					
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana					
		Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	1.811 %	33.00 %	13.60 %	149.80 %
	b. Evaluasi korban bencana					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2017	2018	2019	2020
		Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	-	-
3	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial					
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota		-	-	-	-
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Balangan, 2021

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada 26 jenis PPKS namun yang ditangani di Kabupaten Balangan hanya sembilan Jenis PPKS berjumlah 47.523 PPKS terdiri dari: Anak terlantar 177 orang, Anak berlawanan dengan hukum 14 orang, Lanjut Usia 3.325 orang, Penyandang Disabilitas 951 orang, Korban bencana Alam 721 KK, Korban Bencana Sosial 17 KK Perumpuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 1.079 orang, Fakir miskin 36.841 jiwa dan komunitas Adat Terpencil (KAT) 4.398 Jiwa.

Indikator Angka penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun 2020 menargetkan sebesar 35 % dengan Realisasi 40,95 % dengan capaian 117 % kategori capaian sangat berhasil, PPKS di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 47.523 PPKS sedangkan PPKS yang terlayani sebanyak 19.446 PPKS atau 40,95 % sebagai berikut :

a) Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh namun di Kabupaten Balangan Anak terlantar berjumlah 177 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orang tuannya atau keluarganya, Tahun 2020 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan sebanyak

35 orang dikirim untuk mengikuti pendidikan pelatiahan keterampilan melalui Panti Sosial Bina remaja (PSBR) atau dengan capaian 19,77 %.

b) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berrjumlah 14 orang dan didampingi oleh Dinas Sosial untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut berupa pelecehan sexsual, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dan penggunaan narkoba.

c) Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di Kabupaten Balangan Lanjut usia terlantar berjumlah 3.325 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan berupa pemberian kebutuhan dasar berupa sembako kepada 800 orang, mendapatkan bantuan alat kebutuhan dasar berupa alat bantu lansia sebanyak 88 orang dari dan APBD, jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan berjumlah 888 orang atau 26,70 % dari jumlah lansia ini sifanya hanya bantuan konsuntif saja.

d) Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma di Kabupaten Balangan berjumlah 951 orang, yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial dari Kabupaten Balangan sebanyak 99 orang, diberikan sembako sebanyak 80 orang dari Dana APBD, Disabilitas yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 sebanyak 179 orang atau 18,82 %.

e) Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor dan puting beliung dikabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 721 Kepala Keluarga dengan 2.489 jiwa dan semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan berupa kebutuhan pokok sehari – hari.

f) Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2020

berjumlah sebanyak 17 Kepala keluarga dengan 52 jiwa semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas sosial Kabupaten Balangan.

g) Perempuan rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohannya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalani kesulitan unutk menjalankan peranan sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 1.079 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebanyak 40 orang diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dana APBD yang masing – masing mendapatkan bantuan beurupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- sehingga pada tahun 2020 Perumpuan rawan social ekonomi yang mendapatkan pelayanan sebanyak 40 orang atau 3,70 %.

h) Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fakir miskin diKabupaten Balangan berjumlah 36.841 jiwa atau 11.518 Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dari dinas sosial pada Tahun 2020 berupa sebanyak 6.214 Rumah Tangga mendapatkan Sembako, 3.604 Rumah Tangga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan 6.702 Rumah Tangga mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada keluarga Fakir Miskin yang terdampak Pendemi Covid 19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Dana APBN). Sedangkan dari dana APBD 40 kepala keluarga mendapatkan Bantuan Rehab Rumah yang sifatnya menunjang kehidupan orang atau keluarga agar bisa menjalani kehidupan yang layak, sedangkan sifatnya meningkatkan produktifitas, pemberian Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBe) sebanyak 45 kelompok atau sebanyak 450 kepala keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD sebanyak 767 Keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (APBN) sebanyak 6.702 Kepala Keluarga dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Fakir Miskin yang terdampak pendemi Covid- 19 sebanyak 100 Kepala Keluarga berupa tambahan modal usaha sebesar Rp 2.500.000,- dengan demikian Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan dari Dinas Sosial pada Tahun 2020 sebanyak 17.467 Rumah Tangga atau 47,41 %.

i) Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, diKabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong di Desa Binuang Santang yaitu Libaru Sungkai dan Desa Marajai dan Kecamatan Tebing Tinggi Desa Ajung yang berjumlah sekitar 4.398 jiwa atau 1.272 Kepala keluarga Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu berupa pembinaan keterampilan kepada warga komunitas adat terpencil pada tahun 2020 kepada sebanyak 80 Kepala keluarga atau 6,28%.

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena pada tahun 2020 pada dasarnya Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Balangan dipangkas untuk penanganan korban yang terdampak Pandemi Covid – 19 namun pengurangan Anggaran tersebut digunakan untuk membantu korban terdampak Pandemi Covid – 19 berupa Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) baik dari APBD Kabupaten Balangan maupun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Permasalahan /Hambatan pada pelaksanaan sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas penyandang masalah kesejahteraan (PPKS) keterbatasan dari sumber daya manusia yang membidangi kesejahteraan sosial kurang seimbang dengan banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimana peran dari Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) organisasi sosial, karang taruna, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat diharapkan keaktifanya dalam hal pembinaan dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Balangan, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan sifatnya hanya memberikan untuk kebutuhan hidup (konsumtif). Solusi/Strategi Pemecahan masalah untuk mencapai sasaran memberikan pelatihan – pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) karang taruna, Organisasi Sosial, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan agar lebih mantap dalam melaksanakan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lebih merata dan memproritaskan program kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan produktifitas

supaya penyandang masalah kesejahteran sosial (PPKS) bisa mandiri, dari pada yang bersifat konsumtif tidak akan berkembang dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi lain terkait pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna mencapai sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek Investasi PMDA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Tabel 2.41
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	-	-	-	1,654	3,174
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	6	5	9	8	89
3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	1,16 : 1	42,22 : 1	206,75 : 1	35,66 : 1

Sumber : Disnakertrans - BLK Kabupaten Balangan, 2021

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 89 PMDN berjumlah sebanyak 3.174 orang, capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan PMDN mengalami peningkatan disebabkan jumlah PMDN yang meningkat. Jumlah PMDN pada tahun 2020 di Kabupaten Balangan mencapai 89 perusahaan berbeda dari tahun tahun sebelumnya. Sedangkan beberapa capaian indikator urusan tenaga kerja dapat dilihat pada table 2.42 berikut.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tenaga Kerja					
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	10	4	4	9
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	10	4	4	4
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	1,881	1,690	2,989	453
1.4	Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	3,095	3,005	2,931	5,898
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	-	-	-	-
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	-	15	15	18	7
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	-	-	-	-	-
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	352	160	592	544	192
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	120	420	300	60	128
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	120	120	-	350	32
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	1519/228	2136/277	1942/247	3566/818	705/81
		6,66 : 1	7,71 : 1	7,86 : 1	4,36 : 1	8,7 : 1

Sumber : Disnakertrans – BLK Kabupaten Balangan, 2021

Angka sengketa pengusaha-pekerja untuk tahun 2020 berjumlah sembilan kasus/sengketa, dengan rincian sebagai berikut: enam Kasus dari PT. BUMA, 1 Kasus dari PT. SIS, 1 Kasus dari PT. KJP, dan 1 Kasus dari PT. Aulia Artamia Alika. Sengketa terjadi karena adanya Efisiensi, pelanggaran yang dilakukan karyawan, karyawan merasa jenuh dan meminta pensiun serta indisipliner karyawan. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) berjumlah empat kasus yang berhasil di mediasi oleh mediator dengan perincian

sebagai berikut: dua Kasus dari PT. BUMA, satu Kasus dari PT. KJP dan satu Kasus dari PT. Aulia Artamia Alika.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, berdasarkan hasil laporan perusahaan di Kabupaten Balangan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online pada *www.wajiblapor.kemnaker.go.id* terdapat 3.289 orang karyawan perusahaan yang, didaftarkan oleh perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020, pegawai non ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan juga didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ada sebanyak 2.609 orang pegawai Non ASN yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdaftar pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga jumlah kepesertaan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebanyak 5.898 peserta.

Besaran pemeriksaan perusahaan pada tahun 2020, terkendala wabah virus Covid-19. Anggaran yang dialokasikan untuk pemeriksaan dan monitoring ke perusahaan berkurang karena kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan wabah virus Covid-19. Kebijakan perusahaan untuk tidak menerima kunjungan dari luar lingkungan perusahaan juga menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga pemeriksaan perusahaan pada tahun 2020 dilaksanakan berkerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan. Terdapat tujuh perusahaan di Kabupaten Balangan yang bisa dimonitor oleh Pengawas Ketenagakerjaan, yaitu : PT. Kurnia Junjung Perkasa, PT. Sapta Indera Sejati Sera, PT. Kerabat Putera Balangan, PT. Bakti Putra Meratus, PT. Laskar Semesta Alam, PT. Semesta Centramas dan PT. Paramitha Cipta Sarana. Perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban berupa menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online. Pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan untuk karyawan telah dipenuhi.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi untuk tahun 2020 sebanyak 192 orang, dengan 12 paket pelatihan. Dan pelatihan berbasis kompetensi ini di danai oleh APBN. Adapun pelatihan berbasis kompetensi ini antara lain: Pelatihan Las Listrik, Pelatihan Otomotif Roda 2, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Desain Grafis, Pelatihan Basic Office dan Pelatihan Instalasi Penerangan. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

berbasis masyarakat untuk tahun 2020 sebanyak 128 orang, dengan delapan paket pelatihan. Dan pelatihan berbasis masyarakat ini di danai oleh APBD. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan untuk tahun 2020 sebanyak 32 orang dengan satu paket pelatihan kewirausahaan yaitu tatarias kecantikan. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini didapat berdasarkan tenaga kerja terdaftar AK 1.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.43
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	80,6%	81,2%	80,8%	80,2%	94,88%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	12%	12%	16%	16%
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	19,4%	18,8%	19,1%	19,8%	5,12%
2.4	Rasio KDRT	0.009%	0,02%	0,009%	0,01%	0,01%
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,38%	71,31%	68,33%	57,12%	44,85%
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	100%	100%	100%	100%
2.13	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	100%	100%	100%	100%
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0.98	0.99	0.99	1.01	-
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0.99	1.01	1.02	1.01	-
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1.00	1.03	1.05	0.99	-
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0.98	1,60	1.15	-	-
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	-	0.86	0,97	0,99	0,96

Sumber : DPPPA Kabupaten Balangan, 2020

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah *trend* peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Balangan pada tahun 2020 belum mencapai 30% yaitu hanya 16% (empat orang), namun telah meningkat dibandingkan tahun 2018 (pemilu sebelumnya).

Adapun partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Balangan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,68%. Angka ini merupakan selisih dari tahun 2019 yaitu sebesar 19,8% menjadi 5,12% di tahun 2020. Hal ini mungkin karena kebijakan perusahaan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja ataupun karena pengaruh dampak pandemi Covid-19 di negara Indonesia pada umumnya dan Balangan pada khususnya serta masih ada beberapa perusahaan yang belum melaporkan data terpilah jumlah pekerja ke SKPD terkait.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2020 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu yaitu terdapat 16 kasus yang terdiri dari sembilan kasus anak dan tujuh kasus perempuan. Kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak tujuh kasus dari sembilan kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari tujuh kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit sebanyak sembilan korban, yang terdiri dari pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan yaitu sebanyak 16 yang merupakan layanan pemulihan dari gangguan baik kondisi fisik, psikis maupun sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, layanan ini berupa konseling terhadap korban, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Dari beberapa korban hanya ada delapan korban yang mendapatkan layanan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan. Sedangkan untuk yang lain diselesaikan secara damai dengan mediasi. Cakupan reintegrasi social sebanyak satu korban, dengan mencarikan orangtua / keluarga pengganti yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Persoalan dalam penanganan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu hanya dilakukan oleh sumber daya yang ada. Sedangkan untuk penanganan korban yang mengalami trauma berat diperlukan psikolog. Pada saat ini Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga ahli psikolog, sehingga selama ini untuk penanganan korban kekerasan harus dibawa ke psikolog di Kabupaten lain.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IPG	92,59%	92,61%	92,31%	92,32%	92,12%
2	IDG	65,50%	65,53%	65,79%	65,97%	69,55%

3	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD kabupaten	-	-	4,8%	7,25%	12,35%
4	Persentase perkawinan usia anak	-	-	0,7%	1%	1,48%

Sumber : DPPPA Kabupaten Balangan, 2021

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Indeks pembangunan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IPG tahun 2019, capaian IPG pada tahun 2019 sebesar 92,12 yang menurun dari tahun sebelumya sebesar 0,2%. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah laki-laki di tahun 2020 meningkat lebih banyak dari tahun sebelumnya dibandingkan perempuan yaitu 0,33% untuk laki-laki dan 0,18% untuk perempuan. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita laki-laki di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 151.000,- dibandingkan perempuan yang hanya meningkat Rp. 108.000,-. Pengeluaran perkapita ini merupakan pendekatan pendapatan masyarakat yang artinya jika pengeluaran semakin bertambah maka sejalan dengan penambahan pendapatan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang

kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks pemberdayaan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IDG tahun 2019, capaian IDG pada tahun 2020 sebesar 69,55% yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,58%. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan politik semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibandingkan tahun sebelumnya. Program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender perlu terus didorong guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya dapat diselenggarakan secara lebih setara

Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD kabupaten pada tahun 2020 adalah sebesar 12,35%.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Persentase perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dimana persentase perkawinan usia anak pada tahun 2020 adalah sebesar 1,48 %. Dari 1.820 orang yang melaksanakan

perkawinan, terdapat 27 orang usia anak berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Perkawinan usia anak tertinggi berada di Kecamatan Lampihong sebanyak tujuh orang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan upaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.

C. Urusan Pangan

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Sementara itu, Ketahanan Pangan menurut UU tersebut didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Capaian ketersediaan pangan Kabupaten Balangan pada tahun 2017 - 2020 cukup baik. Hampir semua komoditi mengalami surplus, yang berarti ketersediaan produksinya melebihi kebutuhan per tahun di Kabupaten Balangan. Komoditi yang mengalami surplus terbesar adalah Beras dan Jagung. Hanya satu komoditi yang mengalami defisit yaitu Kacang Kedelai. Untuk komoditi Daging Sapi yang pada tahun 2019 mengalami kekurangan pada tahun 2020 sudah mencukupi kebutuhan di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.45
Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2020

No.	Komoditi	Ketersediaan Produksi (Ton)				Kebutuhan Tahun (Ton)				Surplus/ Defisit (Ton)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Beras	135.297	117.345	96.558	103.633	16.947	13.980	14.450	14.643	118.350	103.365	82.108	88.990
2	Gula Pasir*	1.500	1.238	1.253	1.248	1.469	1.176	1.216	1.232	31	62	37	16
3	Minyak Goreng*	1.268	1.256	1.255	1.315	1.243	1.202	1.242	1.259	25	54	13	56
4	Bawang Merah*	305	452	453	471	267	417	431	437	38	35	22	34
6	Cabai Merah/rawit	182	14.321	15.125	15.432	156	13.980	14.450	14.643	26	341	675	789
8	Daging Sapi	207	276	207	248	133	228	236	239	74	48	(29)	9
9	Daging Ayam	1.088	1.121	1.088	1.410	916	903	934	946	172	218	154	464
10	Telur Ayam Ras	800	1.032	1.268	1.281	865	898	929	941	(65)	134	339	340
11	Jagung	20.739	54.068	94.683	16.374	175,75	162,87	194,25	896,33	20.563,25	53.905,13	94.488,75	15.477,67
12	Kacang Kedelai	404	7.809,45	325,54	306,70	439,37	712,25	712,25	479	(35,37)	7.097,2	(386,71)	(172,3)
13	Kacang Hijau	33	33,48	37,30	93	213,41	369,76	12,75		(180,41)	(336,28)	24,55	
14	Kacang Tanah	392	392,11	293,90	199,07	464,48	497,26	129,5		(72,48)	(105,15)	164,4	
15	Ubi Kayu	3.403	3.403	5.963	2.396	539,80	513,68	1.359,75		2.863,2	2.889,32	4.603,25	
16	Ubi Jalar	915	915	915	275	62,77	63,75	777		852,23	851,25	138	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, 2021

D. Urusan Bidang Pertanahan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaran urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Tanah
2. Kegiatan Inventarisasi, Penatagunaan Tanah dan Penegasan Batas Tanah Milik Daerah:
   a. Memfasilitasi sertifikasi lahan milik Pemkab. Balangan sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan. Persentase luasan lahan yang bersertifikat dibandingkan dengan luasan lahan yang seharusnya bersertifikat dalam daerah di Kabupaten adalah sebesar 7%, atau seluas 69.339.970 m² dari 985.503.630 m².
   b. Pemasangan patok dan papan nama dan juga dilaksanakan pemasangan pagar batas tanah di beberapa lahan/tanah milik Pemerintah Kabupaten Balangan terutama yang telah selesai sertifikatnya dan hasil pengadaan tanah tahun sebelumnya dalam rangka pengamanan aset tanah milik daerah.

3. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan
   a. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan aset-aset tanah, khususnya tanah sekolah (SDN & SMP) dan layanan kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi administrasi surat menyurat tanah serta tinjauan fisik bidang tanah masing-masing aset.
      - Jumlah objek/bidang tanah diinventarisasi serta tinjauan lapangan sebanyak : 264 bidang tanah
      - Dapat dilanjutkan ke sertifikasi tanah : 26 bidang tanah
      - Terdapat permasalahan : 238 bidang tanah
      - Uraian permasalahan :

        Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten terkait penanganan permasalahan pertanahan di antaranya adalah tidak adanya bukti dukung terkait surat menyurat asli asal usul perolehan tanah, tanda batas pasti atas luasan tanah yang tercatat, dan tidak adanya tanda kepemilikan/papan nama aset daerah atas tanah yang tercatat sebagai aset daerah sehingga menimbulkan pemasalahan

dengan warga masyarakat, dan masih tidak validnya informasi yang tersaji dalam buku Inventaris Barang khususnya Tanah.

E. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	45,56	53,33	47,39	40,83	53,33
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	86,29	91,64	93,67	93,33	91,17
3	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	46,32	45,39	51,84	52,76	56,45
4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	-	13	1	13	19
5	Timbunan sampah yang tertangani	85,41	90,16	111,67	173,53	175,46
6	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	8%	10%	10%	10%	2,65%
7	Persentase cakupan area pelayanan	26,26%	27,63%	33%	-	65%
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	17	8	28	1	2
9	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	1	1	1	1	1
10	Persentase jumlah sampah yang dikelola	26,26%	27,63%	33%	50,82%	72,55%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2021

Indeks kualitas air di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 adalah 53,33 naik dari 40,83 di tahun 2019 dan 47,39 di tahun 2018, indikasi ini menggambarkan ada peningkatan kualitas air di tahun 2020 setelah sebelumnya menunjukan penurunan kualitas air di tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan kualitas udara menunjukkan *trend* menurun, pada tahun 2020 tercatat sebesar 91,17 menurun dari tahun 2019 sebesar 93,33. Dari data kualitas udara yang ada menunjukan kontinuitas penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 kualitas udara tercatat 93,67 lebih tinggi dari kualitas udara pada tahun 2019.

Peningkatan angka terjadi pada persentase jumlah sampah yang tertangani yang cukup signifikan meningkat dari 50,82 % di tahun 2019 menjadi 72,55 % di tahun 2020. Peningkatan ini terjadi salah satunya karena masifnya pembuangan sampah yang berasal dari desa-desa di seluruh kabupaten Balangan ke TPA Batu Merah. Masifnya pembuangan sampah ini sayangnya tidak diikuti gerakan 3R sebagai upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang sampah (*recycle*). Persoalan ini bila dibiarkan akan membuat tempat penampungan sampah di TPA Batu Merah akan cepat penuh sebelum waktunya,sehingga menimbulkan ancaman TPA batu Merah yang tak lagi bisa beroperasi karena kelebihan kapasitas. Tanpa menafikan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pembuangan sampah pada tempatnya, persoalan masifnya pembuangan sampah dari desa-desa di Kabupaten Balangan yang akan menyebabkan *lifetime* (umur operasi) TPA Batu Merah yang lebih pendek dari pada seharusnya harus segera dicarikan solusinya, karena dengan penuhnya TPA Batu Merah akan membuat Kabupaten Balangan membangun TPA yang baru dan itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit yang cukup menguras anggaran APBD Kabupaten Balangan.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.47
Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	87.749	0,98	87.912	0,96	89.820	0,98	91.997	0,98
		89.591		91.117		92.085		93.659	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	1.242	0,55	1.272	0,57	1.340	0,61	1.326	0,59
		2.273		2.240		2.209		2.253	
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	343	0,21	458	0,28	542	0,33	595	0,36
		1.650		1.639		1.650		1.648	
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	tidak ada		tidak ada		tidak ada		tidak ada	
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,94%		96,48%		97,54%		98,23%	
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	42,46%		48,05%		53,32%		55,16%	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, 2021

Secara umum capaian indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan. Meskipun beberapa indikator mengalami peningkatan capaian, namun sebenarnya capaian tersebut masih belum maksimal. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk terus mengalami peningkatan namun belum semua penduduk wajib KTP telah ber-KTP. Masih adanya penduduk yang belum ber-KTP disebabkan berbagai hal, diantaranya adanya penduduk wajib KTP pemula (baru memasuki usia 17 tahun), penduduk tersebut berada di luar daerah, tempat tinggal penduduk sangat jauh dari tempat perekaman KTP dan, sebagian penduduk masih memiliki anggapan bahwa KTP bukan dokumen yang penting.

Rasio bayi berakte kelahiran masih sangat rendah. Mulai tahun 2017 hingga tahun 2020 belum ada peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2020 Rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,59 yang berarti dari jumlah bayi lahir di tahun 2020 hanya 59% yang telah memiliki akta kelahiran. Hal ini

menunjukkan bahwa bayi yang belum memiliki akta kelahiran tersebut juga belum terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Balangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan harus bekerja lebih keras agar Rasio bayi berakte kelahiran meningkat. Beberapa cara untuk meningkatkan Rasio bayi berakte kelahiran yang bisa dilakukan di masa yang akan datang antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan bayi yang baru lahir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secepat mungkin dan menjalin kerjasama dengan tempat persalinan (rumah sakit, Puskesmas, bidan) agar bayi yang baru lahir langsung didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rasio pasangan berakte nikah adalah menggambarkan jumlah penduduk non muslim berstatus kawin memiliki akta kawin dengan jumlah penduduk non muslim berstatus kawin. Rendahnya Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Balangan menjadi tugas berat yang harus dituntaskan secara bersama-sama antar sektor. Beberapa penyebab rendahnya Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Balangan yaitu rendahnya kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan akta kawin bagi penduduk yang telah tinggal bersama antara lelaki dewasa dengan perempuan dewasa, masih banyaknya penduduk non muslim yang kawin hanya melaporkan kepada ketua adat tanpa melaporkan kepada pemuka agama dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Database kependudukan skala provinsi tidak tersedia di Kabupaten Balangan. KTP Nasional berbasis NIK sudah diterapkan sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus mengalami peningkatan namun tidak mencapai 100%. Salah satu penyebab belum mencapai 100% adalah adanya penambahan wajib KTP pemula (penduduk baru memasuki usia 17 tahun) hampir setiap harinya. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus melanjutkan kegiatan pelayanan perekaman KTP di sekolah-sekolah. Cakupan penerbitan akta kelahiran dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan meskipun masih jauh dari 100%. Rendahnya Cakupan penerbitan akta kelahiran ini disebabkan adanya dua macam proses penerbitan, yaitu secara manual dan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penerbitan akta kelahiran melalui SIAK dimulai tahun 2011 sehingga akta yang diterbitkan sebelum tahun tersebut atau secara manual masih banyak yang

belum dimasukkan ke dalam database SIAK. Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memulai untuk mengumpulkan fotokopi akta kelahiran para siswa sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat untuk dimasukkan ke dalam database kependudukan. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada SIAK agar mendekati jumlah sebenarnya penduduk yang telah memiliki akta kelahiran.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.48
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target	Target	Capaian	Capaian	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
			2019	2020	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
30	Indeks Desa Membangun (%)	0	0,6486	0.6810	0,6313	0.6395	0.7151

Sumber : Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, 2021

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk guna penguatan ekonomi desa. Indeks Desa Membangun juga didukung seiring terbentuknya Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2004 yang memberikan ruang guna terciptanya desa yang mandiri dan (Indeks Desa Membangun Kementerian Desa & Daerah Tertinggal, Kemendesa 2015). Indeks Desa Membangun memiliki sejumlah klasifikasi status desa yang mengkategorikan perkembangan pembangunan sebuah desa, di antaranya Desa Sangat Tertinggal IDM ≤ 0,4907, Desa Tertinggal 0,4907 < IDM ≤ 0,5989, Desa Berkembang 0,5989 < IDM ≤ 0,7072, Desa Maju 0,7072 < IDM ≤ 0,8155, Desa Mandiri IDM > 0,8155 (Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun, Kemendesa 2019).

Tabel 2.49
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Balangan

Tahun: 2017

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	3	15	3	21
631102	HALONG	0	0	1	11	12	24
631103	AWAYAN	0	0	2	20	1	23
631104	BATU MANDI	0	0	8	10	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	1	23	3	27
631106	PARINGIN	0	0	2	11	1	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	0	1	9	5	15
631108	TEBING TINGGI	0	0	0	10,00	2	12
	Jumlah	0	0	18	109	27	154

Tahun: 2018

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	6	13	1	20
631102	HALONG	0	0	7	12	5	24
631103	AWAYAN	0	0	11	12	0	23
631104	BATU MANDI	0	3	12	3	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	4	22	1	27
631106	PARINGIN	0	0	3	11	0	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	0	3	12	0	15
631108	TEBING TINGGI	0	0,00	5	7,00	0	12
	Jumlah	0	3	51	92	7	153

Tahun: 2019

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	13	7	0	20
631102	HALONG	0	3	14	7	0	24
631103	AWAYAN	0	1	22	0	0	23
631104	BATU MANDI	0	3	13	2	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	24	3	0	27
631106	PARINGIN	0	0	14	0	0	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	2	8	5	0	15
631108	TEBING TINGGI	0	0	8	4	0	12
	Jumlah	0	9	116	28	0	153

Tahun: 2020

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	18	2	1	21
631102	HALONG	0	4	14	6	0	24
631103	AWAYAN	0	1	22	0	0	23
631104	BATU MANDI	0	4	13	1	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	26	1	0	27
631106	PARINGIN	0	0	14	0	0	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	3	11	1	0	15
631108	TEBING TINGGI	0	0	9	3	0	12
	Jumlah	0	12	127	14	1	154

Desa maju meningkat dari 3 desa pada tahun 2019 menjadi 12 desa pada tahun 2020, demikian pula dengan desa berkembang meningkat dari 116 desa

menjadi 127 desa, desa tertinggal dari 28 desa menjadi 14 desa. Namun pada tahun 2020 terdapat 1 desa sangat tertinggal, yaitu Desa Wonorejo. Desa ini pada tahun 2019 tidak dimasukkan dalam verifikasi IDM manual karena sudah tidak ada kegiatan apapun di desa tersebut dan dianggap sudah bergabung dengan desa Sumber Rejeky. Namun dalam verifikasi IDM 2020 via aplikasi, desa tersebut statusnya masih sebagai desa di Kabupaten balangan karena penghapusan dan penggabungannya belum di sahkan oleh Kemendagri.

Keberhasilan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Balangan terlihat dari kenaikan nilai IDM dari Tahun 2019 (0,6313) dengan status IDM Berkembang di tahun 2020 menjadi (0,6395) dengan status IDM Berkembang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja indikator IDM dapat disimak pada paparan berikut ini:

a) Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan pelatihan keterampilan manajemen BUMDES, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK, Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
b) Adanya dukungan Pemerintah Pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan pengucuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya.
c) Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
d) Adanya kebijakan kepala daerah untuk menyelenggarakan pendampingan kepada desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dengan dana bersumber dari APBD Kabupaten Balangan.
e) Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

f) Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM dapat dilihat melalui komponen indeks komposit tersebut yaitu (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah. (3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
   a) Peningkatan pelayanan sosial dasar seperti meningkatnya kinerja kader posyandu dalam memberikan layanan yang berdampak pada meningkatnya presentasi warga memperoleh layanan kesehatan serta BPJS.
   b) Meningkatanya sarana dan prasarana kesehatan di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat.
   c) Meningkatnya PAUD sebagai lembaga pendidikan usia dini di desa.
   d) Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi.
   e) Tersedianya akses informasi berupa layanan internet di desa.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
   a) Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yaitu BUMDES.
   b) Keragaman produksi masyarakat seperti UP2K, UMKM, UPPKS yang dilaksanakan oleh PKK Desa, Dinas Perindustrian koperasi UMKM, dinas perdagangan serta perusahaan.
3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

IKL menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan yang berimbas pada penurunan bencana dan penanganan bencana. Berikut data IKLH Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta IKL Kabupaten Balangan Tahun 2020 diuraikan pada tabel 2.55 di bawah ini:

Tabel 2.50
IKLH Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan

Lokasi	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	65,73	66,46	71,67	66,55	70,27
Prov. Kalimantan Selatan	59,07	69,38	68,78	57,51	68,43
Kabupaten Balangan	58,06	61,65	63,05	61,35	68,06

Sumber : Satu Data Banua

Secara nasional IKLH telah ada kenaikan 7,14 yakni dari Tahun 2013 (66,13), dan Tahun 2020 (70,27), sedangkan IKLH Provinsi Kalimantan Selatan ada kenaikan 12,57 yakni dari Tahun 2013 (55,86), Tahun 2020 (68,43), sementara itu untuk IKL Kabupaten Balangan pada Tahun 2020 (68,06) juga mengalami kenaikan dari tahun 2019 (61,35), meskipun masih di bawah provinsi dan nasional.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa data yang merupakan indikator pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) seperti tercantum pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,42	1,36	1,29	1,23	1,17
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,336	2,667	2,240	2,35	2,35
8.6	Rasio Akseptor KB	-	70%	70%	80%	80%
8.7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	-	77,25%	79,21%	80,74%	81.21%
8.8	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	-	-	23	23,37	24,71
8.9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	0,012%	0,023 %	0,013 %	0,010 %	0,008 %
8.10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,38%	6,2%	8,80%	8,60%	6.41%
8.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7,80%	6,7%	10,27%	11,41 %	7,60%
8.12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	77,25%	79,21%	80,74%	81.21%
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	88.22%	86.64%	84.55%	84.12%	58,02%
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	57.73%	40.68%	56.18%	55.93%	51.12%
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	61.46%	62.44%	62.13%	61.58%	36.58%
8.16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	25%	25%	38%	62.50%
8.17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	26%	24%	24%	24%	28%

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8.18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	47,9%	43,89%	41,88%	47,94%	60,32%
8.19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
8.20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	60%	80%	100%	100%	100%
8.21	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
8.22	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%
8.23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	98.77%	99.13%	98.86%	99.17%	95.22%
8.24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	46,62%	48,11%	48,78%	51%	47.26%

Sumber : DPPKB Kabupaten Balangan, 2020

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah setiap tahunnya. Kegunaannnya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2020 adalah sebesar 1,17%, namun walaupun dari tahun ke tahun terjadi penurunan tetap harus mendapatkan perhatian. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat akan menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar penduduk, seperti sandang, pangan, papan dan pekerjaan serta pendapatan rakyat. Tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan negara.

TFR Kabupaten Balangan cenderung tapi masih berada di angka 2,35. Angka TFR yang ditargetkan di Indonesia adalah 2,1, sehingga masih diperlukan upaya untuk menurunkan TFR dengan mengoptimalkan program yang dimiliki pihak terkait.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB atau yang disebut akseptor menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB dari tiap tahun semakin meningkat ini menunjukkan jumlah akseptor yang semakin baik yaitu >80% dari 1.000 pasangan usia subur merupakan akseptor KB aktif.

Tingkat kesertaan ber-KB dilihat dari proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi (tingkat prevalensi) di Kabupaten Balangan terlihat perkembangan yang makin meningkat. Untuk tahun 2020 menunjukkan tingkat prevalensi tercatat sebesar 81,21%. Tingkat kesertaan ber KB dilihat dari proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi (ditunjukkandari data CPR) di Kabupaten Balangan terlihat perkembangan yang makin meningkat. Dari jenis kontrasepsi yang dipakai para Pasangan Usia Subur masih banyak menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Pendek yakni pil (81,15%) dan suntik KB 3 Bulan (16,83%). Adanya peserta KB yang berhenti dan langsung di angggap “Drop Out” (DO) tampak semakin tinggi. Sebetulnya mereka tidak seluruhnya drop out, tapi karena umur peserta KB yang masih muda dan masih ingin mempunyai anak, sehingga semakin banyak yang akan berhenti sementara menjadi peserta KB, namun juga semakin besar akan kembali lagi setelah mempunyai anak. Sedangkan rendahnya pemakaian dan kesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti Metode Operatif Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), IUD dan Implan. MOP masih dianggap tabu oleh masyarakat Kabupaten Balangan, sehingga perlu kerjasama dengan lintas sektor terkait upaya peningkatan kesertaan KB MKJP ini. Sebaliknya dengan MKJP MOW, yang belakangan ini minat masyarakat terutama PUS yang sudah memiliki anak lebih dari 4 cukup banyak namun tidak terpenuhi (*unmeet need*) dikarenakan KB ini memerlukan tindakan yang khusus dan pelaksanaannya pun di faskes lanjutan/FKTL hal sangat dibutuhkan dukungan dari lintas sektor, kerjasama dari BPJS dan program terkait upaya peningkatan kesertaan KB tersebut.

Data ASFR dan PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun juga semakin berkurang. Data ini menunjukkan bahwa wanita yang mengalami pernikahan dini dan hamil di usia terlalu muda juga berkurang.

Unmeet Need yang lebih dikenal dengan pasangan usia subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi keinginannya. *Unmeet need* merupakan pasangan usia subur yang sedang hamil, pasangan usia subur yang ingin anak segera (IAS), yang ingin menunda anak (IAT) dan pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi (TIAL). Pasangan usia subur yang ingin menunda anak dan tidak ingin anak lagi merupakan sasaran program KB untuk menjadi akseptor aktif tetapi lebih memilih untuk tidak menggunakan program KB untuk pemenuhannya. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan juga

manfaat menggunakan kontrasepsi modern sehingga berpengaruh pada keputusan suami, lebih ingin menggunakan cara tradisional, ataupun takut efek samping. Cakupan PUS *Unmeet need* tahun ini terlihat menurun karena himbauan pemerintah terhadap ibu hamil maupun yang akan melakukan program untuk kehamilan untuk menunda kehamilan selama masih terjadi pandemi. Walau begitu pengaruh keputusan suami serta cara tradisional yang dianggap lebih aman justru menjadi pilihan tersendiri bagi PUS. Data *Unmeet need* semakin menurun sehingga menggambarkan kebutuhan akseptor KB sudah mulai terpenuhi.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan salah satu pilihan bagi pasangan usia subur dalam mengikuti program KB. Dengan menggunakan MKJP, akseptor dapat menjalani program KB dengan aman dan nyaman dalam jangka waktu tiga sampai delapan tahun. Kontap merupakan bagian dari MKJP yaitu Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP). Pasangan usia subur yang lebih memilih Kontap dengan kasus tertentu biasanya memiliki diagnosis dari dokter spesialis kandungan dimana diharuskan menggunakan MOW. Sedangkan untuk alasan khusus pada PUS yang termasuk pra-KS dan KS 1 dengan jumlah anak lebih dari tiga orang akan disarankan oleh PKB bersama dengan Bidan Klinik KB kecamatan terkait untuk menjadi akseptor Kontap untuk suami sebagai bentuk partisipasi akseptor pria.

Persentase akseptor MKJP tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh resistensi masyarakat terhadap alat kontrasepsi modern dan Pandemi yang dimulai pada awal tahun 2020. Resistensi masyarakat terhadap program KB diatasidengan tetap memberikan edukasi dan informasi yang akurat dengan berbagai media dan sosialiasi kesehatan reproduksi untuk pasangan usia subur. Dengan luasnya media informasi dari berbagai sumber yang tidak dikenal sumbernya justru menjadi acuan masyarakat sebagai informasi yang dipercaya. Hal inilah yang membuat angka MKJP naik turun setiap tahunnya. Diharapkan dengan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, sosialisasi tentang alat kontrasepsi serta untung ruginya juga testimoni dari akseptor MKJP yang sudah menjadi peserta aktif merupakan cara yang paling mudah untuk menyampaikan tentang MKJP kepada pasangan usia subur khususnya. Walau demikian, keputusan tetapdikembalikan kepada pasangan tersebut untuk menggunakan MKJP atau non MKJP.

Alasan lain adalah kondisi pandemi yang menyebabkan masyarakat menunda untuk datang kefasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan untuk

menggunakan MKJP. Dengan berubahnya tatanan hidup yang disebut dengan *New Normal*, jumlah akseptor yang dilayani oleh klinik KB kecamatan menjadi terbatas baik jumlah pasien yang dilayani maupun jam pelayanan fasilitas kesehatan. Adapun dengan fasilitas kesehatan yang tidak dapat beroperasi sementara karena pandemi juga menyulitkan akseptor untuk mendapatkan pelayanan. Karena Klinik KB yang sulit untuk melayani akseptor, sehingga pelayanan MKJP menjadi terbatas. Sedangkan untuk pelayanan akseptor KB non MKJP seperti Pil, suntik dan kondom dapat diberikan oleh jejaring fasilitas kesehatan di desa masing-masing. Angka keberlangsungan penggunaan kontrasepsi cenderung meningkat. Hal ini cukup baik untuk mendukungkeberhasilan program KB.

Seluruh fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang ada di Kabupaten Balangan sudah bekerjasama dengan BPJS dan mampu memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standar pelayanan. 12 fasilitas kesehatan di delapan kecamatan yang memiliki Klinik KB yaitu Puskesmas Paringin, Puskesmas Paringin Selatan, Puskesmas Batumandi, Puskesmas Lokbatu, Puskesmas Awayan, Puskesmas Tebing Tinggi, Puskesmas Uren, Puskesmas Halong, Puskesmas Pirsus II, Puskesmas Juai, Puskesmas Lampihong, Puskesmas Tanah Habang dan 1 fasilitas kesehatan rujukan yaitu RSUD Balangan. Semua klinik KB sudah memiliki bidan penanggung jawab Program KB dengan fasilitas yang sesuai standar pelayanan.

Kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKB merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pencapaian peserta KB Baru serta pembinaan peserta KB Aktif. Hal ini dikarenakan kelompok BKB bisa menjadi sarana untuk melakukan advokasi dan KIE tentang Program Bangga Kencana. Pencapaian anggota BKB ber-KB pada akhir tahun 2019 sebesar 84,12%, sedangkan ditahun 2020 pencapaian anggota BKB ber-KB sebesar 58,02%. Dari data yang ada dapat dilihat terjadi penurunan. Penyebab ini bisa terjadi dikarenakan masa awal Covid-19 dan aturan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 ketika pertemuan dilaksanakan. Adanya aturan adaptasi baru membuat para anggota BKB banyak yang tidak memakai alat kontrasepsi, Hal ini bisa dilihat juga dari data *drop out* tahun 2019 sebesar 1.086 dan *drop out* 2020 sebesar 5.814. Selain itu pula berdasarkan data dukung yaitu dari jumlah ibu hamil 2019 sebesar 1.004 dan tahun 2020 sebesar 1.040.

Selain dari anggota BKB yang ber-KB, anggota BKR juga perlu diperhatikan dalam peningkatan pencapaian Peserta KB baru serta pembinaan Peserta KB Aktif. Hal ini dikarenakan kelompok BKR juga bisa menjadi sarana untuk melakukan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana. Pencapaian anggota BKR yang ber-KB pada akhir tahun 2019 sebesar 55,93% sedangkan ditahun 2020 sebesar 51,12%. dapat dilihat dari data terjadi penurunan angka presentasi. Hal ini terjadi akibat masa awal Covid-19 dan aturan adaptasi kebiasaan baru dimana kegiatan pertemuan dikurangi atau tidak boleh dilakukan sama sekali sehingga minat anggota BKR untuk memakai alat kontrasepsi menurun.

Kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKL juga perlu diperhatikan selain pada kelompok BKB dan BKR. Hal ini dikarenakan selain melakukan penyuluhan terhadap keluarga BKL dapat pula menjadi sarana melakukan sosialisasi dan advokasi Pogram Bangga Kencana. Pencapaian anggota BKL yang ber-KB tahun 2019 sebesar 61,58% dan tahun 2020 sebesar 36,58%. Dari data tersebut dapat dilihat terjadi penurunan di tahun 2020, hal ini terjadi akibat masa awal Covid-19 dan aturan adaptasi kebiasaan baru. Kegiatan BKL di sini bersinergi dengan kegiatan posyandu lansia, dimana dalam masa Covid-19 para lansia (60 tahun) dihimbau untuk tidak mengikuti perkumpulan banyak orang. Karena lansia merupakan individu yang mudah terserang Covid-19.

Pencapaian kelompok kegiatan yang melakukan delapan fungsi keluarga tahun 2019 sebesar 99,17% dan tahun 2020 sebesar 95,22%. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah kelompok kegiatan tahun 2019 sebesar 353 kelompok sedangkan tahun 2020 sebesar 330 kelompok. Dari data di atas dapat terlihat penurunan terjadi akibat jumlah kelompok kegiatan yang menurun. Berkurangnya jumlah kelompok kegiatan disebabkan banyaknya kelompok yang tidak aktif akibat dampak Covid-19.

Pencapaian keluarga yang memahami tumbuh kembang balita tahun 2019 sebesar 51% sedangkan tahun 2020 sebesar 47,26%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota yang ada pada kegiatan kelompok BKB tahun 2019 sebesar 4.279 sedangkan tahun 2020 sebesar 4187. Dari jumlah anggota kelompok dapat terlihat pula keluarga yang memahami tumbuh kembang anak. Karena dalam kegiatan BKB yang dipantau adalah tumbuh kembang anak melalui kartu KKA.

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) adalah sekelompok keluarga yang berminat menjadi Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

lewat berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif. Adapun sasaran dari kelompok UPPKS ini adalah:

a) Para peserta KB khususnya keluarga prasejahtera & keluarga sejahtera I.
b) Keluarga yg belum menjadi peserta KB.
c) Peserta KB Pria.
d) Remaja serta masyarakat sekitarnya yang berminat untuk ikut mengembangkan kegiatan kelompok UPPKS tersebut.

UPPKS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan, baik dari keluarga peserta KB yang bersangkutan maupun dari seluruh anggota kelompoknya. Dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, diharapkan kesertaan dan kesinambungan ber-KB secara tidak langsung dapat ditingkatkan. Capaian untuk cakupan keanggotaan kelompok UPPKS ini setiap tahunnya selalu bertambah dari tahun ketahun, dimana dari tahun 2015 anggotanya hanya 191 orang dan pada tahun 2020 jumlah anggotanya sudah mencapai 494 orang dengan peserta yang ber KB mandiri berjumlah 298 orang (60,32 %), ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang jumlah anggota kelompok UPPKS hanya ada 198 orang dengan peserta yang ber KB mandiri hanya 128 orang (47,94 %).

Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) satu Petugas di setiap dua Desa/Kelurahan masih belum mencukupi. Untuk tahun 2020 terdapat penambahan PLKB sebanyak tiga orang sehingga jumlah PKB tahun 2020 menjadi 22 orang tetapi masih tidak mencukupi kebutuhan yang seharusnya karena untuk kabupaten Balangan yang memiliki 157 desa seharusnya PKB kita berjumlah 78 orang, sedangkan yang dimiliki saat ini hanya 22 orang sehingga untuk satu orang PLKB harus bertugas sekitar tujuh sampai 11 desa.

I. Urusan Perhubungan

Pada urusan perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kabupaten Balangan adalah belum jaringan transportasi, trayek angkutan umum dan angkutan umum itu sendiri. Kondisi ini mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan angka kecelakaan lalu-lintas meningkat dan kepadatan lalu-lintas yang tinggi pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan infrastruktur penting yang diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah.

Infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah dan mendorong perkembangan suatu wilayah. Transportasi merupakan fasilitas yang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Transportasi mempengaruhi aktivitas sehari-hari dari masyarakat karena mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung hampir semua aktivitas seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, kelancaran bekerja dan lainnya. Transportasi darat merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih luas yaitu sistem transportasi. Jika kondisi ini tidak diantisipasi sejak dini akan menjadikan perkembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah berkembang secara alami tanpa konsep yang jelas.

Kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan keberadaan sistem, sarana dan prasara transportasi di wilayah tersebut. Dalam kaitannya dengan kondisi Kabupaten Balangan dapat dicermati bahwa secara umum kondisi transportasi Kabupaten Balangan kurang mampu merespon dinamika perkembangan wilayah sehingga pada tahap tertentu kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan wilayah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan dengan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. Pembenahan sektor transportasi perlu dilakukan, salah satunya ialah perlu pembangunan sistem transportasi Angkutan umum (angkutan pedesaan) guna memperbaiki layanan angkutan di Kabupaten Balangan saat ini.

Kabupaten Balangan merupakan wilayah yang strategis dalam sektor ekonomi karena berada di perlintasan antar Kabupaten dan antar Provinsi. Hal ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam area sekelilingnya. Sebagai kota yang mempunyai peran besar dalam menopang perekonomian tingkat regional, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pergerakan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi di Wilayah Kabupaten Balangan. Adapun perkembangan capaian indikator urusan perhubungan tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah uji KIR angkutan umum	672	704	1.040	1.210	1.423
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0,37	0,127	0,120	0,118
3	Pemasangan Rambu-rambu	19.56%	35.53%	42.03%	42.84%	42.84%
4	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	199.680	164.383	137.748	130.872	29.669

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, 2021

Hal-hal lain yang menyangkut urusan perhubungan bisa dilihat dari analisa sebagai berikut:

a) Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan telah diberlakukannya bukti lulus uji yang baru yaitu *smartcard/blueE* (Bukti Lulus Uji Elektronik) serta adanya tambahan kendaraan yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor dari Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena Kabupaten tersebut tidak dapat melaksanakan pelayanan uji berkala dikarenakan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terakreditasi.
b) Layanan angkutan umum hingga tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan Tahun 2020 angkutan umum gratis yang rencananya akan dioperasionalkan dengan rute trayek Paringin - Juai - Halong tidak dapat terlaksana. Karena armada angkutan umum gratis untuk masyarakat digunakan sebagai sarana transportasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 sampai selesai.
c) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum.
d) Jumlah sebesar 98,92% merupakan total jumlah kepemilikan KIR angkutan pribadi (plat hitam), dan angkutan umum (plat kuning).
e) Pada tahun 2020 tidak ada pemasangan rambu rambu dikarenakan kegiatan tersebut dihapus dalam rangka Rasionalisasi dan efisiensi anggaran untuk penanganan Covid-19, jadi capaiannya masih sama dengan tahun 2019.
f) Pada tahun 2020 jumlah orang/barang yang melalui terminal menurun, hal

ini disebabkan karena adanya pandemi wabah Covid-19 dimana Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya banyak orang yang diharuskan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan banyak yang memilih menghindari bepergian.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.53
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kecamatan	61.54	69.34	68.94	75.83	53,26
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75	80	85	90	60,70
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	12	28.89	31.779	83,35
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	20.16	16.03	68.94	75.834	13,24
5	Jumlah Rumah tangga menggunakan TV	-	-	-	-	61,29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, 2021

Persentase penduduk yang menggunakan Hp di kabupaten Balangan mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu 53,26%. Begitu pula dengan cakupan layanan telekomunikasi yang turun menjadi 60,70% serta proporsi rumah tangga yang menggunakan computer pribadi hanya 13,24%, sedangkan rumah tangga yang memiliki akses internet naik menjadi 83,35%. Perubahan data yang signifikan ini disebabkan data tersebut didapatkan melalui sensus yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 berdasarkan rekomendasi dari BPS Kabupaten Balangan, sementara data tahun sebelumnya berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh BPS.

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Saat ini koperasi masih menjadi andalan bagi usaha mikro untuk menyediakan permodalan. Meskipun demikian tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas keberadaaan maupun keaktifan koperasi di Kabupaten Balangan. Jumlah koperasi aktif di lima tahun terakhir masih berada di antara 65 sd 69 unit dengan persentasi koperasi aktif 62,73%. Hal tersebut dikarenakan rumitnya

proses pendirian koperasi itu sendiri, minimnya faktor permodalan dan ketidakmampuan koperasi menawarkan nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat juga menjadi penyebab rendahnya minat anggota aktif berkoperasi, sehingga pergerakan koperasi menjadi tidak dinamis. Permasalahan lainnya di sektor usaha kecil menengah pada tahun 2020 adalah dari 11.335 usaha yang ada di Kabupaten Balangan hanya 18 dengan kategori usaha menengah, 100 usaha kecil dan sisanya 11.217 adalah usaha mikro. Kelemahan dari usaha mikro adalah akses permodalan ke lembaga keuangan sangat rendah demikian juga dengan akses pemasaran (Akses dan volume Pemasaran).

Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dari 4.838 usaha pada tahun 2019 menjadi 11.217 pada tahun 2020 atau dari 94,41% menjadi 98,95% ini tidak terlepas dari dampak pandemi covid-19 dan adanya bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro. Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Perindustrian
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
11.1	Jumlah koperasi aktif (unit)	65	67	67	69	69
11.2	Jumlah koperasi (unit)	107	108	108	110	110
11.3	Persentase Koperasi aktif	60,74%	62,03%	62,03%	62,73%	62,73%
11.4	Jumlah Usaha Mikro (unit)	3.756	4.058	4.248	4.838	11.217
11.5	Jumlah UMKM (unit)	3.756	4.058	4.581	5.124	11.335
11.6	Persentase usaha mikro dan kecil	100%	100%	92,73%	94,41%	98,95%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan, 2021

L. Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal dan investasi memperlihatkan peran yang penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda *(multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2020 melalui dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2020 sebanyak 89 pelaku usaha (sumber NSWI per Januari 2020) dengan nilai rencana investasi sebesar Rp.1.651.394.241.459. Tahun 2020 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, tahun 2019 jumlah investor berskala nasional (PMDN) sebanyak 111. Penurunan ini disebabkan karena adanya dampak pandemi yang terjadi sehingga berpengaruh kepada calon investor yang akan menanamkan modal mereka. Untuk jumlah investasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2019, karena tahun 2019 masih manual dalam merekap jumlah pelaku usaha dan rencana investasi (modal usaha) sehingga untuk setiap pelaku usaha yang menanamkan modalnya hanya terbaca satu perusahaan/pelaku usaha untuk rencana investasinya bukan per ijin usaha (KBLI), sedangkan pada tahun 2020 untuk perekapan jumlah pelaku usaha dan modal usaha dilakukan secara otomatis di aplikasi NSWI yang mana setiap pelaku usaha/perusahaan yang terdaftar akan otomatis di rekap modal usaha (rencana investasi) nya berdasarkan ijin usaha (KBLI) sehingga hal ini menyebabkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap rencana investasi di Kabupaten Balangan pada tahun 2020.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Penanaman Modal
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	6	5	9	111	89
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	10.064.321.000	23.593.444.000	27.397.000.000	93.125.000.000	1.651.394.241.459
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	1,16 : 1	42,22 : 1	17,07 : 1	35,66 : 1
12.4	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	9.396.100.000	42.882.712.314	27.988.279.555	216.466.328.218
12.5	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (persentase)	-	-	356.39%	-34.73%	673.41%

Sumber: DPMPTS Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.56
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2017	Ijin Prinsip	6	6	12
2018	Ijin Prinsip	4	5	9
2019	NIB	186	0	186
2020	NIB	89	0	89

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.57
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	6	10.064.321.000	-	-
2017	5	23.593.444.000	5	9.396.100.000
2018	9	27.397.000.000	7	42.882.712.314
2019	41/ 111	57.580.000.000 93.125.000.000	24	27.988.279.555
2020	67/89	120.378.000.000 1.651.394.241.459	29	216.466.328.218

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Balangan, 2021

Untuk rasio tenaga kerja, pada tahun 2020 sebesar 36 : 1 artinya setiap 1 perusahaan menyerap tenaga kerja sebanyak 35 orang. Tahun 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2019 rasio tenaga kerja hanya sebesar 17 : 1. Peningkatan ini disebabkan salah satunya adanya perusahaan yang pada tahun 2019 masih pada tahap kontruksi dan pada tahun 2020 sudah memasuki tahap produksi sehingga memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp.216.466.328.218,-, jika dibandingkan dengan tahun 2019 Rp.27.988.279.555,- maka tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 673,41%. Nilai peningkatan realisasi investasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung di antaranya: adanya penjualan aset perusahaan untuk membayar tenaga kerja karena adanya penambahan tenaga kerja, adanya pembebasan lahan untuk kegiatan produksi baru. Pada tahun 2020, jumlah proyek (pelaku usaha) yang wajib menyampaikan LKPM sesuai dengan Perka BKPM nomor 7

tahun 2017 sebanyak 67 pelaku usaha dengan jumlah investasi sebesar Rp.120.378.000.000, sedangkan pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM pada aplikasi LKPM online sebanyak 29 pelaku usaha dengan jumlah realisasi investasi Rp.216.466.328.218,-.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
13. Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	99,15%	99,15%	99,15%	96,62%
13.2	Persentase wirausaha muda	100%	100%	50%	70%	96,80%
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	-	-	-	8	7
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	-	-	-	7	8
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	-	-	65	45	63
13.6	Jumlah atlet berprestasi	2	2	69	91	19
13.7	Jumlah prestasi olahraga	8	12	3	10	10

Sumber : Dispora Kabupaten Balangan, 2021

Persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 96,62%, untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial dihitung jumlah Pemuda umur 16 sampai 30 tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten dibagi jumlah umur Pemuda 16 sampai 30 tahun di kabupaten kota sehingga didapatkan angka Persentase organisasi pemuda yang aktif 96,62%, terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Persentase wirausaha muda 96,80% untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi Mandiri di perlukan data jumlah Pemuda umur 16 sampai 30 tahun yang berwirausaha di kabupaten dibagi jumlah Pemuda umur 16 sampai 30 tahun di kabupaten data tersebut juga didapat dari sumber SKPD lain setelah dihitung dapat diketahui hasilnya yakni 96,8% terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Cakupan pembinaan olahraga 7 Pembinaan pada tahun 2020 berjumlah 8 (delapan) Cabang Olahraga di antaranya: Sepak Bola, Bola Volly, Basket, Sepak Takraw, Pencak Silat, Tenis Meja, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis. Pembinaan tersebut dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2020, seiring dengan adanya wabah penyakit Covid-19 yang menyebar seluruh dunia termasuk Indonesia, maka dalam penanggulangan Covid-19 tersebut semua daerah yang ada di Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Balangan mengalami pengurangan anggaran atau pengalihan anggaran kepenanggulangan Covid-19 tersebut, sehingga anggaran khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Bidang Prestasi yang menangani POPDA mengalami pengurangan yang seharusnya delapan cabor yang dibina menjadi empat cabor pembinaan dari Bulan April sampai dengan Oktober 2020. Pengiriman altet POPDA hanya empat cabor di antaranya: Tenis Meja, Pencak Silat, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis. Hal yang sama juga terjadi pada ketersedian pendanaan pelatih.

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi delapan, cakupan Pelatih yang bersertifikasi tahun 2020 adalah delapan orang, hal ini terjadi penambahan satu orang dari tahun 2019 sebelumnya yaitu Pelatih yang bersertifikasi. Cakupan pembinaan atlet muda 63, pembinaan pada tahun 2020 berjumlah delapan Cabang Olahraga di antaranya: Sepak Bola, Bola Volly, Basket, Sepak Takraw, Pencak Silat, Tenis Meja, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis. Pembinaan tersebut dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2020, seiring dengan adanya wabah penyakit Covid-19 yang menyebar seluruh dunia termasuk Indonesia, maka dalam penanggulangan Covid-19 tersebut semua daerah yang ada di Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Balangan mengalami pengurangan anggaran atau pengalihan anggaran.

Jumlah atlet berprestasi 19 orang dengan rincian dari cabang olahraga Pencak Silat memeperoleh lima medali perunggu, Tenis Lapangan memperoleh satu medali perunggu, Silat Budaya memperoleh satu medali perunggu, SOIna memperoleh satu medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga beberapa event, lomba baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional yang tidak dapat diikuti sehingga capaian target tidak dapat terpenuhi.

Indikator Jumlah prestasi olahraga dinyatakan kurang berhasil karena dari capaian tahun 2020 adalah tiga prestasi atau 23,% dan pada tahun 2019

terrealisasi adalah 10 prestasi dari target 14 prestasi atau 71,42%, adapun cabang olahraga yang mendapat prestasi (medali) sejumlah 10 yang terdiri dari: Pencak Silat lima medali perunggu, Tenis Lapangan satu medali perunggu, Silat Budaya satu medali perunggu, SOIna satu medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu.

N. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik. Hasil dari statistik dasar ini merupakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga untuk mendapatkan beberapa data, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPS. Produk statistik yang merupakan hasil kerjasama dengan BPS adalah IPM, Indek Pembangunan Gender (IPG), Indeks Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Gini, Inflasi, dan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), sedangkan statistik sektoral juga telah dilakukan oleh beberapa instansi di Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh data baik untuk keperluan perencanaan pembangunan maupun untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik sektoral ini antara lain termuat dalam buku Indeks Williamson, buku penduduk pertengahan tahun, dan buku sistem informasi pembangunan daerah.

Diakui bahwa tuntutan data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi seluruhnya, namun secara bertahap tata kelola dan pemenuhan kebutuhan data lebih baik harus diupayakan. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2020

No.	Bidang urusan/indikator	Tahun 2020
14	Statistik	
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada
14.2	Buku “Balangan Dalam Angka”	Ada
14.3	Buku PDRB	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, 2021

O. Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksinya sistem jaringan di Kabupaten Balangan, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah.

Government-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia, disingkat Gov-CSIRT Indonesia merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 570 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.

Tabel 2.60
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten BalanganTahun 2016-2020

No	Indikator	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, 2021

P. Urusan Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran dari kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran Pemerintah Daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaiman terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
16.	Kebudayaan				
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	17	8	17	1
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7	8	8	10
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	4	5	5	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, 2021

Penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya dilaksanakan satu kali yaitu gelar seni budaya, sedangkan untuk kegiatan lainnya ditiadakan karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terdapat 10 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, delapan di antaranya dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Makam Kandang Haji, Rumah Palimbangan Desa Riwa, Rumah Batu Desa Muara Ninian, Makam Datu Martika, Kawasan Lama Lampihong, Makam Raksasina Singa Jaya, Makam Tumenggung Jalil dan Benteng Tundakan, sedangkan dua dikelola oleh pusat yaitu Mesjid syuhada Desa Hujan Mas dan Rumah Bubungan Tinggi Desa Tarangan. Persoalan dalam pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya adalah perlunya

pemeliharaan fisik untuk menjaga cagar budaya dari kerusakan ataupun kepunahan.

Tabel 2.62
Capaian Indikator SPM Kesenian
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun			
			2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian					
		Cakupan Kajian Seni 50%	27	40	26,66	20
		Cakupan Fasilitasi Seni 30%	57	57	33,33	0
		Cakupan Gelar Seni 75%	75	75	50	25
		Misi Kesenian 100%	100	100	100	0
2	Sarana dan Prasarana					
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	42,85	42,85	42,85	42,85
		Cakupan Tempat 100%	100	100	100	100
		Cakupan Organisasi 34%	0	66,66	66,66	66,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan tahun 2021

Cakupan kajian seni pada tahun 2020 hanya 20% berupa dokumentasi (bentuk buku/katalog), Penyerapan narasumber (setiap ada kegiatan SDM daerah yang menjadi narasumber), Inventarisasi (penyimpanan alat- alat kesenian). Untuk Cakupan Fasilitasi Seni, cakupan misi kesenian dan Cakupan Gelar Seni tidak memenuhi standar, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga untuk kegiatan kesenian ditiadakan. Cakupan Organisasi yang dimiliki Kabupaten Balangan adalah organisasi struktural yang menangani kesenian dan Lembaga/Dewan Kesenian Balangan. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian di Kabupaten Balangan adalah sarjana seni, seniman dan insan media masa.

Q. Urusan Perpustakaan

Misi Perpustakaan pada tingkat Kabupaten/Kota menyediakan materi perpustakaan dan akses informasi bagi semua anggota masyarakat untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, literasi informasi dan rekreasi (Badan Standarisasi Nasional, 2009). Guna meningkatkan kinerja dan kemajuan Perpustakaan di Kabupaten Balangan terdapat Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 08 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota yang cakupannya mampu mendukung kerja tersebut. Cakupan tersebut diantaranya standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengelolaan perpustakaan.

Jumlah pengunjung Perpustakaan Tahun 2020 berjumlah 16.751 kunjungan yang merupakan akumulasi dari jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan kecamatan sebanyak enam buah, Pojok Baca yang berada dibawah Dinas Perpustakaan sebanyak delapan buah dan Mobil Perpustakaan Keliling yang melayani sekolah-sekolah di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Perpustakaan
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
17. Perpustakaan					
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	44.890	45.911	48.505	16.751
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	26.067 Eks	29.429 Eks	30.617 Eks	38.328 Eks
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	10.000	10.000	10.000	10.000
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	3.740,40	3.825,90	4.042,10	1.396,00
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9.416 Judul	10.433 Judul	10.476 Judul	23.109 Judul
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	4	3	3	2

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Balangan, 2021

Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah adalah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah yang sumbernya dari pengadaan buku dari bidang Akuisisi dan hibah dari PERPUSNAS, BAPUSTARDA, SKPD lingkup

Pemerintah Kabupaten Balangan maupun dari individu. Rasio Perpustakaan persatuan penduduk dimana untuk satu buah perpustakaan melayani 10.000 orang penduduk di Kabupaten Balangan, hal ini karena masih terbatasnya jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Balangan. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun merupakan jumlah semua kunjungan yang berada di perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Pojok Baca dan Mobil Pusling kemudian di bagi 12 bulan, terjadi penurunan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurangnya pengunjung yang berkunjung ke Perpustakaan, ditambah lagi Perpustakaan Keliling tidak bisa dilaksanakan karena Kebijakan Pemerintah untuk meliburkan anak-anak sekolah.

Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan merupakan jumlah judul buku yang ada di Perpustakaan yang sumbernya dari pengadaan buku dari bidang Akuisisi dan hibah dari PERPUSNAS, BAPUSTARDA, SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan maupun dari individu. Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat untuk Dinas Perpustakaan adalah sebanyak dua orang pustakawan.

R. Urusan Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku, pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kendala yang dihadapi adalah masih kurang pahamnya petugas kearsipan atau arsiparis tentang kearsipan sehingga pengelolaan arsip masih belum sesuai dengan standar baku kearsipan, dapat di lihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kearsipan
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	31,71	48,78	65,85	80,44

Sumber : Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan, 2021

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan wisata baik oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan asing di semua objek wisata daritahun 2016 – 2020 adalah 56.961 orang, 6.700 orang pada tahun 2016, 7.329 pada tahun 2017, 9.375 pada tahun 2018, 11.960 pada tahun 2019 dan 20.139 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah wisatawan ini perlu disertai dengan penyediaan sarana prasarana dan amenitas yang memadai agar mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan waktu kunjungan wisata. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan juga sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan *lenght of stay* wisatawan yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Kabupaten Balangan sangat potensial dengan wisata alam dan wisata budayanya. Namun tantangannya adalah keberadaan sebagian besar objek wisata alam terbilang cukup jauh dari pusat Kota dengan akses yang masih kurang memadai, hal ini menyebabkan wisata alam menjadi kurang berkembang, sedangkan wisata budaya juga hanya dikunjungi saat ada *event* tertentu saja, seperti Festival Pesona Dayak Meratus dan Festival buah khas Balangan.

Festival pesona dayak meratus merupakan salah satu *annual event* atau acara tahunan yang pada umumya diselenggarakan selama 3-5 hari dan dilaksanakan di Desa Wisata Budaya Wadian Tambai, Kecamatan Halong. Festival yang sudah popular di kalangan masyarakat Kabupaten Balangan hingga Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menarik banyak pengunjung hingga peserta yang berpartisipasi. Dengan adanya homestay yang juga telah disediakan masyarakat sekitar, pengunjung semakin banyak datang dan menetap selama acara berlangsung hingga selesai. Hal ini yang menyebabkan lama kunjungan wisatawan berkisar satu sampai dengan lima hari. *Event-event* menarik lainnya ke depannya perlu direncanakan secara menyeluruh dengan skala yang lebih besar agar dapat mengundang minat pengunjung lebih banyak lagi ke Kabupaten Balangan. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada menurunnya lama kunjungan wisata dari 4-5 hari menjadi 1-2 hari saja. Penurunan lama kunjungan wisata tentunya berdampak juga pada menurunnya persentase pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Pada tahun 2020 sub sektor penyumbang PAD

pariwisata dari sektor pajak hotel dan rumah makan menurun dari 1,20% menjadi 0,97% dengan besaran masing-masing Rp.7.714.500 dan Rp.155.738.354,-.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Pariwisata
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.1	Jumlah Kunjungan wisata (jiwa)	7.329	9.375	11.960	20.139
1.2	Lama kunjungan Wisata	1 s.d 2 hari	1 s.d 2 hari	4 s.d 5 hari	1 s.d 2 hari
1.3	PAD Sektor Pariwisata	1,01%	1,4%	1,20%	0,97%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.66
Distribusi Persentase PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	00.38	00.36	00.34	00.32	00.32

Sumber: BPS Kab. Balangan, 2021

B. Urusan Pertanian

Pada tabel 2.67 menjelaskan target dan realisasi PDRB Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Balangan.

Tabel 2.67
Target dan Realisasi PDRB Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12.40	12.50	12.75	13.00	13.39	12.36	11.79	11.71	11.71	12.14*
2	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani	97.52	98.00	98.00	98.50	98.65	97.52	96.69	95.40	95.31	105.37

Dari target dan realisasi tersebut capaian kontribusi sektor pertanian pada PDRB mengalami kecenderungan yang terus menurun dari tahun 2016 sebesar 99,68% menjadi 90,66% pada tahun 2020 dan nilai tukar petani hanya tercapai target

pada tahun 2016 dan 2020. Data lengkap tentang capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan nilai tukar petani pada tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel 2.68.

Tabel 2.68
Capaian Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	99.68	94.32	91.84	90.08	90.66
2	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani	100.00	98.66	97.35	96.76	106.81

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Sumberdaya manusia di sektor pertanian adalah salah satu isu utama dalam pembangunan sektor pertanian di suatu daerah. Jumlah petani di suatu daerah sangat tergantung pada struktur ekonomi di daerah tersebut. Apabila suatu daerah dominan di sektor pertanian, maka jumlah petani di daerah tersebut cenderung lebih banyak. Tabel 2.74 memperlihatkan jumlah petani di Kabupaten Balangan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah petani di Kabupaten Balangan sebanyak 30.193 orang yang tersebar di delapan kecamatan. Petani terbanyak ada di Kecamatan Lampihong yang berjumlah sebanyak 5.197 orang sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 1.904 orang.

Tabel 2.69
Jumlah Petani di Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan 2020

Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)
Awayan	3.674
Batu mandi	4.209
Halong	4.779
Juai	4.445
Lampihong	5.197
Paringin	2.495
Paringin Selatan	3.490
Tebing Tinggi	1.904
Jumlah	30.193

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Sebagian besar petani berusia antara 25-64 tahun. Di Kabupaten Balangan, proporsi petani yang berusia 35-54 tahun jumlahnya paling banyak yaitu 58,19 %, lalu diikuti oleh petani yang berusia > 55 tahun yaitu 22,74 % dan < 34 tahun sebesar 19,07 %. Hampir sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan, proporsi petani yang berusia 25-64 tahun lebih tinggi daripada petani yang berusia <25 dan >65 tahun. Berdasarkan klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya menurut Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15-64 tahun, dan berdasarkan batas kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yaitu berusia 15-64 Tahun. Sehingga diketahui bahwa kelompok usia petani di Balangan dari 15-55 tahun adalah petani usia produktif.

1. Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, luas panen masing-masing komoditi tanaman pangan tersebut dari tahun 2015 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan luas panen pada hampir semua jenis tanaman pangan kecuali padi sawah dan kacang hijau yang mengalami peningkatan luas panen. Data lengkap dapat di lihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan 2016-2020 (Ha)

No	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	35.184	36.413	39.726	35.746	43.256
2	Padi Gogo	5.158	5.158	10.158	11.593	5.200
3	Jagung	2.252	5.276	13.635	18.917	2.896
4	Kedelai	5.392	356	6.875	278	270
5	Kacang Tanah	325	325	325	325	165
6	Kacang Hijau	33	36	36	36	100
7	Ubi Kayu	250	250	250	250	176
8	Ubi Jalar	100	100	100	100	30

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.71 menunjukkan produksi masing-masing komoditi tanaman pangan di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa: produksi padi sawah dan kacang hijau meningkat selama periode tersebut, sedangkan produksi padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar menurun. Sementara itu untuk produksi tanaman pangan dapat disimak pada tabel 2.71 berikut:

Tabel 2.71
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020 (Ton)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	183.683	201.798	206.557,8	155.903,71	196.240,77
2	Padi Gogo	22.121,3	15.094,2	33.342,59	41.498,65	15.626,10
3	Jagung	10.129,5	23.535	61.357,5	107.447,9	18.581,93
4	Kedelai	6.470,4	427,2	8.250	352,8	324
5	Kacang Tanah	412,75	412,75	412,75	309,37	209,55
6	Kacang Hijau	32	36	36	40,11	100,00
7	Ubi Kayu	3.550	3.550	3.550	6.220	2.499,2
8	Ubi Jalar	1.040	1.040	1.040	3.086,57	312,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan

Dari tabel 2.76 ini terlihat bahwa produktivitas padi sawah, jagung, dan kacang tanah meningkat selama periode tersebut, sedangkan produktivitas padi gogo, kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar menurun. Dari tiga tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi produksi jagung dan kacang tanah karena mampu menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang semakin sedikit atau tetap. Luas panen, produksi dan produktivitas padi gogo, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan selama periode tersebut. Penurunan luas panen harus menjadi perhatian karena bisa jadi disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi di Kabupaten Balangan.

Data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di setiap kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.72. Luas panen padi sawah terbesar terdapat pada Kecamatan Awayan, Batu Mandi dan Lampihong.

Komoditas padi gogo, luas panen terbesar pada Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi. Untuk komoditas jagung, luas panen terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Untuk komoditas Kedelai, luas panen terbesar ada di kecamatan Juai.

Tabel 2.72
Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020 (Ton/Ha)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	5,2	5,5	5,2	4,4	4,5
2	Padi Gogo	4,2	2,9	3,2	3,6	3,0
3	Jagung	4,5	4,5	4,5	5,7	6,4
4	Kedelai	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2
5	Kacang Tanah	1,3	1,3	1,3	1,0	1,2
6	Kacang Hijau	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
7	Ubi Kayu	14,2	14,2	14,2	24,9	14,2
8	Ubi Jalar	10,4	10,4	10,4	30,9	10,4

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Balangan

Tabel 2.73
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawah
Di Setiap Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Gogo			Jagung			Kedelai		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Awayan	7.906	33.910,00	42,89	537	1.611,00	30,00	-	-	-	-	-	-
2	Batu mandi	7.500	34.780,60	46,37	20	60,00	30,00	-	-	-	-	-	-
3	Halong	3.293	15.181,89	46,10	2.577	7.731,00	30,00	2.801	18.581,93	66,34	20	24,0	12,00
4	Juai	7.375	37.658,30	51,06	234	702,00	30,00	60	361,46	60,24	250	300	12,00
5	Lampihong	7.464	34.601,63	46,36	281	843,00	30,00	10	60,00	60,00	-	-	-
6	Paringin	3.332	16.607,39	49,84	306	918,00	30,00	-	-	-	-	-	-
7	Paringin Selatan	3.591	14.277,46	39,76	-	-	-	15	90,20	60,13	-	-	-
8	Tebing Tinggi	2.795	9.223,50	33,00	1.245	3.761,10	30,20	10	60,2	60,20	-	-	-
Jumlah		43.256	196.240,77	355,38	5.200	15.626,10	210,20	2.896	18.581,93	306,91	270	324	24

Notasi: (1) Luas Panen (Ha); (2) Produksi (Kwintal); (3) Produktivitas (2):(1);

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Balangan

Tabel 2.74
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
Di Setiap Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Kacang Tanah			Kacang Hijau			Ubi Kayu			Ubi Jalar		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Awayan	4	5,08	12,70	-	-	-	23	326,6	142	5	52	104
2	Batu mandi	-	-	-	-	-	-	54	766,8	142	2	20,8	104
3	Halong	48	60,96	12,70	-	-	-	4	56,8	142	2	20,80	104
4	Juai	27	34,29	12,70	-	-	-	4	56,8	142	3	31,20	104
5	Lampihong	19	24,13	12,70	-	-	-	59	837,8	142	6	62,40	104
6	Paringin	19	24,13	12,70	-	-	-	12	170,4	142	4	41,60	104
7	Paringin Selatan	26	33,02	12,70	-	-	-	15	213,0	142	4	41,60	104
8	Tebing Tinggi	22	27,94	12,70	100	100	10	5	71,0	142	4	41,60	104
Jumlah		165	209,55	88,90	100	100	10	176	2.499,2	1.136	30	312,00	832

Notasi: (1) Luas Panen (Ha); (2) Produksi (Kwintal); (3) Produktivitas (2):(1);
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Balangan

2. Hortikultura

Hortikultura terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah bawang daun, petsai, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam serta petai. Tabel 2.75 berikut menunjukkan luas panen komoditi sayuran tersebut dari tahun 2018 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen semua jenis sayuran mengalami fluktuasi, ada yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun ada juga yang meningkat. Luas panen yang terus meningkat yaitu sayur buncis. Luas panen yang mengalami penurunan yaitu bayam, jamur, ketimun, dan terong.

Tabel 2.75
Luas Panen, Produksi, Produktivitas Sayuran di Kabupaten Balangan
Tahun 2018-2020

No.	Jenis Sayuran	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Bawang Merah	4	15	3,75	0,5	50	100	2	100	50
2	Bayam	30	1506	50,2	23	1220	53,04	14	11,5	8,21
3	Buncis	16	1120	70	19,5	1365	70	20	1620	81
4	Cabai Besar	74	4990	67,43	84,5	6200	73,37	83	5255	63,31
5	Cabai Rawit	130	8810	67,77	159	10450,5	65,73	146	8273	56,66
6	Jamur	3	150	50	0	0	0	0	0	0
7	Kacang Panjang	57	3420	60	68	3650,5	53,68	55	2216	40,29
8	Kangkung	34	3810	112,06	20,5	1910	93,17	21,5	332	15,44
9	Ketimun	50	6410	128,2	49,5	5915,5	119,51	41,5	4570	110,12
10	Lobak/Labu Siam	3	90	30	25,75	10601	411,69	0	0	0
11	Petsai/sawi	1,5	60	40	9	360	40	0	0	0
12	Terong	66	4660	70,61	56,5	4320	76,46	51	3940	77,25
13	Tomat	42	6490	154,52	51	7510	147,25	49	7002	142,89

Notasi: (1) Luas Panen (Ha); (2) Produksi (Kwintal); (3) Produktivitas (2):(1);

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.75 menunjukkan produksi masing-masing komoditi sayuran di Kabupaten Balangan dari tahun 2018 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa produksi bawang merah dan buncis meningkat selama periode tersebut, sedangkan produksi bayam, jamur, kangkung, ketimun dan terong menurun. Produksi yang mengalami fluktuasi yaitu cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, lobak, petsai/sawi dan tomat.

Tabel 2.75 berikut menunjukkan produktivitas masing-masing komoditi sayuran di Kabupaten Balangan dari tahun 2018 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa produktivitas buncis dan terong meningkat selama periode tersebut, sedangkan produksi jamur, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun dan tomat menurun. Produktivitas yang mengalami fluktuasi yaitu bawang merah, bayam, cabai besar, lobak, dan petsai/sawi. Dengan demikian, dari tiga tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi produksi adalah terong karena meskipun luas panen dan produksinya menurun namun produktivitasnya meningkat.

Sementara itu, jenis buah-buahan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, manggis, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak serta sukun. Tabel 2.76 berikut menunjukkan luas panen dan produktivitas komoditi buah-buahan tersebut pada tahun 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen terbesar adalah buah pisang sebesar 456,07 Ha. Produksi terbesar yaitu buah pisang, nangka/cempedak dan durian masing-masing 271.127 kwintal, 27.845 kwintal dan 24.620 kuital. Produktivitas terbesar yaitu buah alpukat, durian dan sawo yaitu masing-masing sebesar 1,25 kwintal/ha, 1,08 kwintal/ha dan 1,04 kwintal/ha.

Tabel 2.76
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan
di Kabupaten Balangan 2020

No	Jenis Buah Buahan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)	Produktivitas (Kwintal/Ha)
1	Alpukat	65	65	1,25
2	Belimbing	3,6	624	0,69
3	Duku/Langsat	89,8	6.436	0,71
4	Durian	227	24.620	1,08
5	Jambu Biji	10,6	3.557	0,66

6	Jambu Air	3,56	7,3	0,79
7	Jeruk Siam/Keprok	35,42	14.171	0,91
8	Jeruk Besar	0,02	214	0,97
9	Mangga	38,61	3.861	0,77
10	Manggis	8,08	1.010	0,71
11	Nangka/Cempedak	171	27.845	0,80
12	Nenas	2,82	236	0,05
13	Pepaya	2,84	1.562	0,45
14	Pisang	456,07	271.127	0,59
15	Rambutan	69,13	22.382	0,32
16	Salak	6,72	2.228	0,13
17	Sawo	11,32	4.711,8	1,04
18	Sirsak	13,83	1.264,16	0,45
19	Sukun	3,66	571,9	0,71
20	Melinjo	0,68	38	0,55
21	Petai	3	668	0,73
22	Jengkol	21,36	4.272	0,60
23	Semangka	5	40	8

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Jenis tanaman obat-obatan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit. Tabel 2.81. berikut menunjukkan luas panen, Produksi dan Produktivitas tanaman obat tersebut dari tahun 2018 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen jahe dan laos/lengkuas selama periode tersebut meningkat, sedangkan produksi kencur dan kunyit selama periode tersebut menurun. Produksi Jahe, kencur dan kunyit meningkat di tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019. Sedangkan produksi laos/lengkoas menurun di tahun 2020. Tabel ini juga memperlihatkan bahwa produktivitas jahe dan kencur meningkat selama periode tersebut, sedangkan produktivitas laos/lengkuas dan kunyit menurun. Kecamatan Halong merupakan tempat dimana tanaman obat-obatan banyak dibudidayakan.

Tabel 2.77
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat
di Kabupaten Balangan 2018-2020

No.	Jenis Tanaman Obat	Luas Panen (Ha)			Produksi (Kwintal)			Produktivitas (Kwintal/Ha)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Jahe	18,65	3,013	48,016	64.95	9,039	147,5	3,48	3,00	3,07
2	Laos/Lengkuas	5,726	3,807	14,72	32.178	60,021	43,0	5,62	15,77	2,92
3	Kencur	242	1,61	4,46	724	3,22	133,86	2,99	2,00	3
4	Kunyit	222	2,603	4,7	664	75,309	124,85	2,99	28,93	2,65

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.83 menunjukan data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman obat-obatan di setiap kecamatan tahun 2020. Luas panen tanaman obat-obatan baik jahe, loas/lengkuas, kencur dan kunyit yang terbesar di Kecamatan Halong dan Paringin Selatan.

Tabel 2.78
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Semua Tanaman Obat-Obatan
Di Setiap Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jahe			Laos / Lengkuas			Kencur			Kunyit		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Awayan	1.5	45	3	2	60	30	1.5	30	20	2.5	50	2
2	Batu mandi	0.37	12.1	3.2	0.4	11.25	28	0.53	14.72	2.7	0.5		2
3	Halong	52.5	127.5	2.4	10	225	2.2	6	18	2.3	0.9	3.4	2.6
4	Juai	1	2	2	0.2	12	2.5	0.1	1	1			
5	Lampihong	4	12	3	2	6	3	4	11.5	2	7	15	2
6	Paringin	5	15	3	2	6	3	5	12	2			
7	Paringin Selatan	25	7	28	26	66	2.5	20	33	1.6	17	38	2.2
8	Tebing Tinggi	15	50	3.3	10	20	2	5	3	0.6	2	3	1.5
Jumlah		104,37	270.6	47.9	52.6	406.25	73.2	42.13	123.22	32.2	29.9	109.4	12.3

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

3. Peternakan

Gambaran kondisipeternakan di KabupatenBalanganperiode 2016-2020 dapatdilihat pada tabelberikut:

Tabel 2.79
Jumlah dan Produksi Hewan Ternak Besar dan Kecil
di Kabupaten Balangan, 2016-2020

Tahun	Ternak Besar (Ekor)		Ternak Kecil (Ekor)		Produksi (Kg)	
	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Sapi	Kambing
2016	2.043	5	509	170	222.133	11.157
2017	2.084	4	552	66	235.894	11.329
2018	2.051	3	584	59	153.331	9.292
2019	2.110	6	620	54	115.544	4.553
2020	1.953	7	674	58	105.278	4.553

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.79 menunjukkan banyaknya ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa jumlah ternak di Kabupaten Balangan yang meningkat adalah sapi dan kambing. Peningkatan jumlah hewan ternak ternyata tidak sejalan dengan peningkatan jumlah daging yang dihasilkan. Hal ini disebabkan jumlah daging bukan dari ternak yang dipelihara di Kabupaten Balangan. Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Balangan belum berfungsi sebagaimanamestinya. Akibatnya ternak besar dan kecil dijual keluar Kabupaten Balangan.

Selama periode 2016-2020, jumlah ternak kambing meningkat namun produksi dagingnya justru menurun.Jumlah sapi selama periode 2016-2019 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah ternak sapi menurunkarena pemotongan ternak sapi cukup tinggi terutama pada hari besar umat Islamyaknihari raya qurban dan maulid Nabisertaadanyapembatasan impor sapi yang dilakukan pemerintah. Konsumsi masyarakat terhadap daging sapi justru meningkat setiap tahun dan kebutuhan masih tetap tinggi sehingga sapi lokal banyak yang dijual dan dipotong.

Peternak di Kabupaten Balangan juga mengusahakan unggasyakniayam buras, ayam ras pedaging, dan itik. Gambaran jumlahternak dan produksiunggas di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2020 diuraikan pada Tabel 2.80 berikut:

Tabel 2.80
JumlahTernak dan Produksi Unggas
di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Unggas (Ekor)			Produksi Daging (Kg)		
	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik
2016	63.050	1.031.800	28.099	-	573.042	56.973
2017	67.152	1.071.000	28.449	-	660.800	63.525
2018	47.897	1.669.700	28.814	-	888.048	62.165
2019	42.300	1.771.275	197.410	100.267	1.509.584	170.506
2020	40.826	1.820.793	107.576	59.610	1.629.484	123.776

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.80 menunjukkan jumlah ternak ayam buras meningkat dari tahun 2016 ke 2017 sebanyak 4.102 ekor. Sejak 2018, jumlah ternak mengalami penurunan hingga tersisa sebanyak 40.826 ekor pada tahun 2020. Jumlah produksinya menunjukkan hal yang sama yakni adanya penurunan sebesar 50.653 ekor dari tahun 2019 ke 2020. Jumlah ternak dan produksi ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Jumlah ternak dan produksi itik meningkat sampai tahun 2019 namun menurun di tahun 2020.

4. Perkebunan

Kondisi perkebunan di Kabupaten Balangan periode 2016-2020 diuraikan pada Tabel 2.86 dan Tabel 2.87. Berdasarkan Tabel 2.86, luas areal tanaman perkebunan sepanjang tahun pengamatan cenderung fluktuatif kecuali kelapa sawit, lada, dan kapuk yang luas areal tanamannya meningkat. Produksi di sector perkebunan periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan produksi pada tanaman karet, kelapa sawit, dan lada meningkat. Sedangkan produksi kelapa, kopi, sagu, kemiri, aren dan purun menunjukkan penurunan pada periode yang sama. Pada tahun 2020 produksi karet, kelapa sawit, lada, sagu, kemiri, pinang, dan aren menurun, sedangkan produksi kelapa, kopi, dan purun meningkat dibandingkan pada tahun 2019.Produktivitas tanaman di sektorper kebunan pada tahun 2015-2019 untuk komoditas karet, kelapa sawit, sagu, kemiri, pinang dan

aren meningkat selama periode tersebut, sedangkan produktivitas tanaman kelapa, kopi, lada, kapuk dan purun menurun. Namun pada tahun 2020 produktivitas karet, kelapa sawit, kopi, lada, sagu, kemiri, pinang, dan aren menurun, hanya produktivitas kelapa yang meningkat dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.81
Luas Areal, Produksi, dan ProduktivitasTanaman Perkebunan
di Kabupaten BalanganTahun 2016-2020

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas (Ton/Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	37.555	37.919	38.035	37.915	37.454	24.959	26.742	28.232	31.994	30.959	0,66	0,71	0,74	0,84	0,83
2	Kelapa	825	827	855	589	591	244	299	447	150	263	0,30	0,36	0,52	0,25	0,45
3	Kelapa Sawit	356	469	578	1.055	1.055	70	350	447	1.359	311	0,20	0,75	0,77	1,29	0,29
4	Kopi	630	631	631	207	526	60	61	61	19	28	0,10	0,10	0,10	0,09	0,05
5	Lada	10	9	9	17	25	2	2	3	4	2.2	0,20	0,22	0,33	0,24	0,09
6	Sagu	434	445	437	365	365	108	109	112	102	59	0,25	0,24	0,26	0,28	0,16
7	Kemiri	204	219	204	118	118	81	88	81	68	39	0,40	0,40	0,40	0,58	0,33
8	Pinang	41	40	60	54	54	5	6	8	8	4	0,12	0,15	0,13	0,15	0,07
9	Kapuk	19	19	19	25	25	3	4	5	5	5	0,16	0,21	0,26	0,20	0,2
10	Aren	727	733	745	559	559	422	548	558	538	294	0,58	0,75	0,75	0,96	0,53
11	Purun	46	45	39	27	27	2	3	2	0,6	1	0,04	0,07	0,05	0,02	0,04

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.82
Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Per Kecamatan di KabupatenBalanganTahun 2020

Komoditas/Kecamatan		Awayan	Batu mandi	Halong	Juai	Lampihong	Paringin	Paringin Selatan	Tebing Tinggi	Jumlah
Karet	Luas Areal (Ha)	7.286	6.740	4.951	3.264	2.182	5.616	3.002	4.413	37.454
	Produksi (Ton)	6.058	5.055	3.541	2.521	1.726	5.552	2.813	3.693	30.959
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,83	0,75	0,71	0,77	0,79	0,98	0,93	0,83	6,59
Kelapa	Luas Areal (Ha)	113	108	61	40	83	51	29	106	591
	Produksi (Ton)	67	34	28	21,6	47	25	11	51	263
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,59	0,31	0,45	0,54	0,56	0.49	0,37	0,48	3,79
Kelapa Sawit	Luas Areal (Ha)	57	599	113	45	119	15	22	85	1.055
	Produksi (Ton)	97	41,5	108	47	33	26	20,6	0	311
	Produktivitas (Ton/Ha)	170	0,06	0,95	1,04	0,27	1,73	0,93	0	6,68
Kopi	Luas Areal (Ha)	124	79	66	15	71	20	12	139	526
	Produksi (Ton)	7	7	7	1,4	6	1,8	1	4,5	28
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,05	0,09	0,1	0,93	0,08	0,9	0,08	0,32	2,55
Lada	Luas Areal (Ha)	2	1	12	3	2	1	2	2	25
	Produksi (Ton)	0,4	0,4	0,8	0,4	0,2	0,4	0,9	0,4	2,2
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,2	0,4	0,06	0,13	0,1	0,4	0,45	0,2	1,94
Sagu	Luas Areal (Ha)	133	56	22	13	57	15	18	51	365
	Produksi (Ton)	19	12	4	2,4	13	2,4	4	7	59
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,14	0,21	0,18	0,18	0,22	0,16	0,22	0,13	1,44
Kemiri	Luas Areal (Ha)	18	11	20	13	17	8	4	27	118
	Produksi (Ton)	7	4	8	16	3	0.8	0.6	11	39
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,39	0,36	0,4	1,23	0,17	0,8	0,15	0,41	3,91
Pinang	Luas Areal (Ha)	7	7	5	8	8	5	7	7	54
	Produksi (Ton)	0,5	1	0,6	1	1	0,4	1,3	1	6,8
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,07	0,14	0,12	0,12	0,12	0,08	0,18	0,14	0,97
Kapuk	Luas Areal (Ha)	2	5	3	4	4	1	3	3	25
	Produksi (Ton)	0,7	1,7	1	0,3	0,7	0,2	0,3	1	5
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,35	0,34	0,33	0,07	0,17	0,2	0,1	0,33	1,84
Aren	Luas Areal (Ha)	114	53	47	42	117	70	33	83	559
	Produksi (Ton)	82	45	23	26	71,4	35	13	70	294
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,72	0,85	0,49	0,62	0,61	0,5	0,39	0,84	5,02
Purun	Luas Areal (Ha)	0	9	2	4	7	2	3	0	27
	Produksi (Ton)	0	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0	1
	Produktivitas (Ton/Ha)	0	0,03	0,05	0,02	0,04	0,05	0,03	0	0,22

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021

C. Urusan Perdagangan

Capaian indikator perdagangan Kabupaten BalanganTahun 2016-2020 dijelaskan pada Tabel 2.83 Ekspor barang dan jasa Kabupaten Balangan didominasi oleh eksporkomoditipertambanganterutamauntuk pasar luar negeri. Dalamperiode 2016-2020 terjadi peningkatan nilai ekspor tetapi sejak tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga komoditi batubara di pasar internasional.

Menurunnyakinerjaeksporberdampakterhadappenurunannilai surplus eksporbarang dan jasKabupatenBalangan pada tahun 2019 dan 2020. Penurunanekspor dan tingkat surplus perdaganganbarang dan jasatersebutmenggambarkanbahwaperekonomianKabupatenBalangansangatterkaitdengansituasiperekonomian global. Jika terjadipelemahanpermintaan dunia makanilaieksporKabupatenBalangan juga akanmengalamitekanan. Karena itusektorperdaganganperludilakukandiversifikasiyaknipenguatan pada eksporkomoditi non tambang.

Tabel 2.83
Capaian Indikator Perdagangan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ekspor Barang dan Jasa (triliun rupiah)	14,43	17,55	20,50	19,05	
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	4	4	4	4
3.	Net Ekspor barang dan Jasa (triliun rupiah)	4,57	4,83	5,01	4,76	

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

Adapun sektor perdagangan retail di Kabupaten Balangan sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi dan daya beli masyarakat. Khusus perdagangan retail di pasar tradisional telah ada 4 (empat) kelompok pedagang yaitu:

1) Persatuan Pedagang Pasar Modern Adaro;
2) Persatuan Pedagang Pasar Paringin;
3) Persatuan Pedagang Pasar Batumandi; dan,
4) Persatuan Pedagang Pasar Halong.

Adanya kelompok pedagang di pasar tradisional tersebut cukup penting untuk memperjuangkan kepentingan usaha sektor informal yang pada umumnya memiliki penghasilan yang relative rendah.Kelompok pedagang informal ini juga

berguna untuk menyerap tenaga kerja karena pedagang informal tidak membutuhkan modal tetap yang besar, seperti sewa toko dan karyawan toko.

D. Urusan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sektor industri selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2016 – 2020 rata-rata memberi kontribusi sebesar 1,95%. Tahun 2020 sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 1,98% dari PDRB dengan Pertambangan atau sebesar 4,88% tanpa Pertambangan. Padahal sektor Industri juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mengganti peran sektor Pertambangan di masa mendatang.

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan peran sektor industri dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri yang merupakan Rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan Industri Kabupaten Balangan. Dalam RPIK dijelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan adalah tumbuh dan berkembangnya industry yang berbasis sumber daya Lokal dan menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi. Dalam RPIK sendiri dibuat sasaran pembangunan industri salah satunya adalah peran sektor industri terhadap PDRB ditahun 2020 sebesar 4,1 % dengan pertambangan atau 16,3 % tanpa Pertambangan. Namun sampai saat ini sasarannya belum memenuhi target. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri antara lain disebabkan karena belum adanya pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis SDA, kualitas SDM Industri yang dimiliki terutama penguasaan teknologi belum optimal, dan belum tersedianya sarana-dan prasarana industri (Kawasan Industri) yang dapat menarik minat investor.

Adapun data perkembangan perindustrian di Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.84
Capaian Indikator Perindustrian
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	41	41	43	65	72
6.2	Jumlah usaha industri kecil dan rumah tangga (unit)	1.602	1.920	2.046	2.445	2.587
6.3	Pertumbuhan Industri (%)	51,85	19,85	6,56	19,5	5,8
6.4	Kontribusi sektor industri PDRB harga berlaku (%)	1,91	1,99	1,93	1,94	1,98

Sumber: BPS 2020 dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2020

Berdasarkan data cakupan bina kelompok pengrajin memperlihatkan tren positif meningkat walaupun tidak signifikan selama 4 tahun, pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang lumayan sebanyak 22 kelompok pengrajin dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan 7 kelompok pengrajin. Peningkatan tersebut karena meningkatnya minat masyarakat untuk mengaktifkan kembali usaha hasil hutan berupa Bambu Tirik dan Bamban untuk dijadikan kerajinan anyaman yang bernilai Ekonomis. Begitu pula dengan jumlah usaha industri yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hanya sebatas usaha kecil dan rumah tangga. pada tahun 2020 jumlah IKM sebesar 2.587 unit dengan pertumbuhan in dustri yang menurun dari tahun 2019 yaitu 5,8%

Kehidupan global saat ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas, inovasi, pemanfaatan teknologi dan informasi. Perubahan tersebut telah mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Proses inovasipun menjadi sangat cepat bahkan cenderung revolusioner karena dukungan perkembangan teknologi. Maka strategi untuk memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Potensi ekonomi lokal yang mampu menjawab fenomena tersebut dan memperlihatkan perkembangan pesat di Kabupaten Balangan adalah industri kain Sasirangan. Produk kain yang dihasilkan merupakan hasil karya cipta yang mengangkat lokalitas, keunikan dan memiliki nilai jual. Kesiapan untuk berkompetisi di pasar global masih diperlukan, salah satu yang utama adalah

meningkatkan daya saing produk dengan kemampuan berinovasi dalam segala proses dari hulu hingga ke hilirnya. Perkembangan usaha Sasirangan di Kabupaten Balangan diharapkan mampu meningkatkan perannya dan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Pendekatan sistem klaster sangat tepat diterapkan pada program pengembangan UKM Sasirangan di Balangan karena pendekatan ini memiliki kekuatan yang terbentuk dari kelompok usaha yang berkaitan, baik secara geografis berada di wilayah yang berdekatan, terhubung dan saling melengkapi dalam proses produksi. Pendekatan klaster ini dapat mendorong UKM Sasirangan di Balangan memiliki orientasi pasar global sehingga keinginan untuk meraih daya saing semakin kuat

Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini ratio di Kabupaten Balangan. Kendala yang dihadapi para pelaku IKM di Kabupaten Balangan adalah tidak terlepas dari permodalan, bahan baku, pengemasan dan pemasaran. Dukungan dan peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

E. Urusan Transmigrasi

Tabel 2.85
Capaian Indikator Transmigrasi
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Transmigrasi					
1	Persentase Transmigran Swakarsa	16.5	16.5	16.5	16.5	17,54

Sumber : Disnakertrans – BLK Kabupaten Balangan, 2021

Pada dasarnya jumlah KK transmigrasi swakarsa tidak mengalami penambahan, persentasi bertambah dikarenakan adanya pengurangan jumlah Total KK transmigrasi yang ada di kawasan transmigrasi, dalam artian jumlah KK yang ada dikawasan transmigrasi tidak sama antara tahun sebelum tahun 2020 dengan tahun 2020.

Penyebab Jumlah KK transmigrasi swakarsa tidak mengalami penambahan, dikarenakan terkendala regulasi Antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dikarenakan untuk mendatangkan transmigrasi baru harus membangun permukiman transmigrasi baru, tentu dana yang diperlukan sangatlah besar dikarenakan harus menyediakan sarana dan prasarana berupa fasilitas pendukung jaminan hidup warga transmigrasi,hal tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga perlu bantuan selain dari dana pemerntah daerah yakni dana dari pemerintah pusat, hal tersebut sementara tidak didapatkan dikarenakan ada beberapa sebab yakni

a) Salah satu syarat agar pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian desa, PDT dan Transmigrasi RI adalah pemerintah daerah harus memiliki Kawasan Transmigrasi, tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengusulkan Penetapan Kawasan Transmigrasi dan telah disetujui oleh pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah memiliki Kawasan Transmigrasi Tahun 2018.
b) Dikarenakan adanya pemangkasan dana Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI maka yang dipriotaskan untuk mendapatkan kucuran dana pusat, Kawasan Transmigrasi

F. Urusan Perikanan

Rumah tangga perikanan tangkap/budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Berikut gambaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.86
Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Balangan
Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Budi Daya	Tang kap	Budi daya	Tang kap	Budi Daya	Tang kap	Budi daya	Tang kap	Budi Daya	Tang kap
1	Paringin Selatan	409	591	454	591	504	591	560	591	570	591
2	Paringin	358	587	398	587	442	587	491	587	501	587
3	Lampihong	509	913	565	913	628	913	698	913	758	913
4	Batumandi	417	527	463	527	514	527	571	527	591	527
5	Awayan	397	369	441	369	490	369	544	369	604	369
6	Tebing Tinggi	177	228	197	228	219	228	243	228	243	228
7	Juai	215	434	239	434	266	434	296	434	286	434
8	Halong	401	366	446	366	495	366	550	366	560	366
Jumlah		2.883	4.015	3.203	4.015	3.558	4.015	3.953	4.015	4,113	4,015

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Balangan, 2021

Di bidang perikanan, Kabupaten Balangan hanya mengandalkan budidaya dan penangkapan di perairan umum karena lokasinya tidak bersinggungan dengan laut dan secara kewenangan kabupaten tak lagi mengelola wilayah laut menurut UU No. 23 Tahun 2014. Budidaya perikanan budidaya darat berupa kolam, keramba dan bioflok. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah rumah tangga perikanan budidaya mencapai 2.883 orang dan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 4.113 orang. Jika dirinci menurut kecamatan, maka rumah tangga perikanan budidaya di Kecamatan Lampihong adalah yang paling banyak jumlahnya. Rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2020 jumlahnya tidak mengalami peningkatan, yaitu 4.015 orang. Jika dirinci menurut kecamatan, maka rumah tangga perikanan tangkap terbanyak juga ada di Kecamatan Lampihong.

Sementara itu, produksi perikanan di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 – 2020 berfluktuatif (lihat Tabel 2.95). Pada tahun 2016, produksi perikanan di Kabupaten Balangan mencapai 1.730 ton, lalu pada tahun 2017 turun

menjadi 1.626 ton. Tahun 2018 meningkat sedikit menjadi 1.628 ton, pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.645 ton dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.836 ton. Kecamatan Lampihong menghasilkan ikan paling banyak pada tahun 2020, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi adalah yang paling sedikit.

Jumlah produksi perikanan paling banyak dihasilkan oleh perikanan tangkap, dengan perkembangan yang cukup linier, dengan kontribusi terbesar berasal dari ikan gabus dan sepat siam. Sementara perikanan budidaya paling banyak dihasilkan oleh ikan nila dan mas, dengan sistem pembudidayaan yang paling besar dengan kolam (55.700 m2) dan keramba (5.562 m2).

Jika dirinci produksi menurut tempat pemeliharaan/penangkapan, maka sebagian besar ikan yang dihasilkan di Kabupaten Balangan berasal dari keramba. Produksi ikan di keramba tahun 2020 mencapai 589 ton, dari kolam jumlah produksi mencapai 267 ton dan dari bioflok hanya 27 ton (Tabel 2.95). Jenis ikan yang dipelihara dari lokasi budidaya kolam yaitu ikan nila, mas, patin, lele dan gurame. Untuk keramba yang komoditas ikan yang dihasilkan yaitu nila, mas, gurame jelawat dan bawal tawar. Sedangkan bioflok untuk jenis ikan lele, nila, patin dan papuyu/betok.

Tabel 2.87
Produksi Perikanan (ton) menurut Tempat Pemeliharaan di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Tahun														Jumlah
		2016		2017			2018			2019			2020			
		Klm	Krb	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	
1	Juai	18	7	16	6	-	17	6	-	18	6	-	25	9	-	128
2	Lampihong	21	369	20	286	-	20	332	-	21	336	-	27	452	-	1.882
3	Paringin	7	11	6	10	12	6	10	16	7	11	17	10	65	9	197
4	Paringin Selatan	23	82	22	29	25	22	32	30	24	34	32	44	49	9	457
5	Tebing Tinggi	24	-	20	-	-	22	-	-	23	-	-	28	-	-	117
6	Awayan	11	17	10	10		17	10	-	18	11	-	28	14	-	146
7	Batumandi	16	-	15	-	15	15	-	15	19	-	16	22	-	9	143
8	Halong	61	-	51	-	-	58	-	-	61	-	-	84	-	-	315

No	Kecamatan	Tahun													Jumlah
		2016		2017			2018			2019			2020			
		Klm	Krb	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	
Jumlah		181	484	161	341	52	179	391	60	191	398	65	267	589	27	3.386
Total Budidaya		665		554			630			654			884			3.386
Total Penangkapan		1.064		1.072			998			991			952			5.077
Total Produksi		1.730		1.626			1.628			1.645			1.836			8.464

Keterangan: Klm: Kolam, Krb: Keramba, Biof: Bioflok
Sumber: Dinas Perikanan Kab. Balangan, 2021

Produksi ikan dari penangkapan di perairan umum jumlahnya lebih besar daripada yang dari budidaya. Produksi penangkapan pada tahun 2016 mencapai 1.064 ton dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 1.072 ton. Namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terus mengalami penurunan produksi yaitu 998 ton, 991 ton dan 952 ton. Hal ini terjadi karena terjadi penyempitan wilayah tangkapan akibat pembukaan lahan. Disamping itu, penangkapan ikan bukan menjadi mata pencaharian utama bagi RTP tangkap, namun hanya sambilan. Lokasi tangkap nelayan yaitu di perairan rawa dan sungai di Kabupaten Balangan.

Adapun alat tangkap yang digunakan dalam penangkapan ikan yaitu pancing berjoran, jaring insang, anco, jala tebar dan bubu. Beberapa nelayan penangkap ada yang memiliki lebih dari 1 alat tangkap, menyesuaikan dengan target tangkapan. Jumlah nelayan dengan alat tangkap yang beroperasi di perairan umum Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.96. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan gabus, sepat siam, betok, seluang, sepat rawa, baung dan nilam.

Tabel 2.88
Jumlah Nelayan (orang) berdasarkan Alat Tangkap yang Beroperasi di Perairan Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Alat Tangkap	Jenis Perairan	
		Rawa	Sungai
1	Pancing Berjoran	1.130	1.220
2	Jaring Insang	185	370
3	Anco	378	0
4	Jala Tebar	357	340
5	Bubu	72	0
Jumlah		2.122	1.930

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Balangan, 2021

Luas areal budidaya perikanan di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik kolam, karamba maupun bak bioflok. Penambahan areal yang cukup signifikan yaitu jenis kolam. Di akhir tahun 2020 kolam mencapai 57.800 m2.. Sebelumnya total luas kolam ikan yang ada di tahun pada tahun 2019 sebesar 55.700 m2 kemudian 2018 hanya sebesar 13.500 m2, dan pada tahun 2017 dan 2016 berukuran 13.300 m2 dan 9.200 m2 (Tabel 2.97)

Tabel 2.89
Luas Areal Budidaya Perikanan (m2) di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016		2017		
		Klm	Krb	Klm	Krb	Biof
1	Lampihong	400	3.858	600	4.026	-
2	Batumandi	900	-	4.300	-	24
3	Awayan	1.300	111	1.300	111	-
4	Tebing Tinggi	900	-	900	-	-
5	Paringin	500	486	800	606	33
6	Paringin Selatan	600	243	600	339	24
7	Juai	1.800	96	1.800	168	-
8	Halong	2.800	36	3.000	36	-
Jumlah		9.200	4.830	13.300	5.286	81

No	Kecamatan	Tahun								
		2018			2019			2020		
		Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof
1	Lampihong	600	4.116	-	1.600	4.116	-	1,600	4,413	-
2	Batumandi	4.300	-	24	24.300	-	24	24,300	-	32
3	Awayan	1.300	111	-	11.300	111	-	12,800	111	36
4	Tebing Tinggi	900	-	-	900	-	-	900	-	-
5	Paringin	800	636	51	1.800	720	51	1,800	720	51
6	Paringin Selatan	600	339	144	1.600	381	168	1,800	381	168
7	Juai	2.000	198	-	1.200	198	-	1,200	198	-
8	Halong	3.000	36	-	13.000	36	-	13,400	36	48
Jumlah		13.500	5.436	219	55.700	5.562	243	57,800	5,859	335

Keterangan: Klm: Kolam, Krb: Keramba, Biof: Bioflok
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Balangan, 2021

Untuk menunjang ketersediaan benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan memiliki ada 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yakni :

a) UPTD Balai Benih Hamparaya
b) UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau
c) Pos Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan di Lampihong

UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau di Kecamatan Batumandi berdiri diatas lahan seluas ± 3,45 hektar (2,5 Ha + 0,95 Ha). Saat ini BBI Gunung Manau mengembangkan komoditas Nila, Patin Siam, Mas, Lele Sangkuriang, Papuyu dan Baung. Pada tahun 2016 produksi sebesar 1.017.520 ekor benih, melebihi target sebanyak 1.000.000 ekor benih. Sejak 2017 hingga 2019, produksi yang dihasilkan tidak bisa memenuhi target. Pada tahun 2020 produksi benih ikan mengalami peningkatan sebesar 1.347.826 ekor benih, namun masih belum

mencapai target sebanyak 1.600.000 benih. Perkembangan produksi benih ikan di BBI Gunung Manau serta kontribusi PAD tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90
Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)
Gunung Manau Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

NO	KOMODITAS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	NILA	86.600	91.000	235.421	77.840	221847
2	PATIN SIAM	747.590	82.225	169.000	87.580	357485
3	LELE SANGKURIANG	81.430	115.425	105.405	108.400	636965
4	PAPUYU	80.650	40.200	16.560	43.580	98359
5	BAUNG	21.250	-	2.640	1.000	33170
JUMLAH		1.017.520	328.850	529.026	359.600	1.347.826
TARGET		1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
PERSENTASE		101,7 %	27,4 %	37,70%	19,9 %	84,24%

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Balangan, 2021

Selain penangkapan dan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Balangan juga didukung dengan keberadaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR). Saat ini ada 23 kelompok pengolah dan 7 kelompok pemasar di Kabupaten Balangan. Bidang usaha pengolahan ikan yang dihasilkan yaitu bakso ikan, abon ikan, kerupuk ikan, roti isi abon ikan, nugget ikan, empek-empek, amplang patin, resoles ikan, stik ikan, dan kerupuk udang (Tabel 2.99). Sedangkan pemasar yaitu pedagang ikan yang menampung hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya.

Tabel 2.91
Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR) Di Kabupaten Balangan Tahun 2020

No.	Nama Kelompok	Bidang Usaha	Kelompok Usaha	Jumlah Anggota	SK Badan Hukum
I.	Kecamatan Lampihong				
1	Ulam Sari	Abon dan Kepupuk Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
2	Karya Usaha Bersama	Abon dan Kepupuk Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
3	Tirta Jaya	Kerupuk Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
4	Berkah	Olahan Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
5	Cita Rasa	Amplang Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
6	Berkah Bersama	Amplang Ikan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
7	Hidayah	Kerupuk Udang	Pengolah	10 Orang	TIDAK
II.	Kecamatan Paringin Selatan				
1	Teratai	Bakso Ikan	Pengolah	8 Orang	ADA
2	Mawar	Nugget Ikan	Pengolah	9 Orang	ADA
3	Sejahtera I	Ikan olahan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
4	Sejahtera II	Abon olahan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
III.	Kecamatan Paringin				
1	Cipta Rasa	Bakso Ikan, Nugget Ikan,Mpek-mpek	Pengolah	10 Orang	ADA
2	An-Nisa	Ikan olahan	Pengolah	11 Orang	ADA
3	Melati	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
4	Hasil Usaha Bersama	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
5	Hasil Rezeki Bersama	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
6	Matahari Bersinar	Abon Ikan dan Sambal Sepat	Pengolah	10 Orang	TIDAK
IV.	Kecamatan Batumandi				
1	UKM Keluarga Sejahtera	Stik Ikan	Pengolah	11 Orang	ADA
2	Mawar	Olahan Ikan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
3	Jelawat	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
4	Haruan	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
V.	Kecamatan Juai				
1	Tirta sari	Bakso Ikan	Pengolah	15 Orang	ADA

No.	Nama Kelompok	Bidang Usaha	Kelompok Usaha	Jumlah Anggota	SK Badan Hukum
2	Kantil	Abon Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
3	Berlian	Pentol Ikan	Pengolah	17 Orang	ADA
4	Pelangi I	Kerupuk Ikan	Pengolah	15 Orang	
5	Pelangi II	Abon Ikan	Pengolah	15 Orang	
VI.	Kecamatan Awayan				
1	Sepakat	Nugget Ikan	Pengolah		ADA
2	Cahaya Indah	Kerupuk, Resolis Ikan	Pengolah		TIDAK
3	Sumber Rezeki	Pedagang Ikan	Pemasar		ADA
4	Budi Mulya	Pedagang Ikan	Pemasar		ADA

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Balangan, 2021

2.1.3.4 Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.92
Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1. Perencanaan Pembangunan						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	-			

Sumber : Bappeda Kabupaten Balangan, 2021

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atasbawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

B. Keuangan

Tabel 2.93
Capaian Indikator Keuangan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2. Keuangan						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	3.93%	16.74%	7.28%	10.74%	21,40%
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	3.93%	16.74%	7.28%	10.74%	21,40%
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	21.18%	20.38%	22.57%	20.18%	20,22%
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	13.10%	13.61%	12.42%	14.26%	20,87%
	Persentase belanja kesehatan (10%) tanpa memperhitungkan aloksi belanja Gaj	9.07%	9.72%	9.74%	10.39%	14.97%
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (BL : BTL)	53% : 47%	55 % : 45 %	56 % : 44 %	56 % : 44 %	49,44% : 50,56%
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Belanja bagi hasil ke pemerintah desa : Total APBD)	0,06%	0,06%	0,08%	0,08%	0,09%
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Belanja bagi hasil ke pemerintah desa: total PAD + Retribusi) Minimal 10% dari yang telah dianggarkan	10,00%	10,00%	10,00%	10,02	10,01%
2.9	Penetapan APBD (Murni/Perubahan)	29 Desember 2015 / 18 Oktober 2016	30 Desember 2016 / 13 September 2017	27 Desember 2017 / 16 Oktober 2018	28 Desember 2018 / 10 September 2019	17 Desember 2019 / 25 September 2020

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Balangan, 2021

Audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas mandiri. Berdasarkan table diatas Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Balangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 adalah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akutansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standard umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prisip akutansi yang berlaku dan konsisten.

Harapannya WTP ini akan selalu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan ini sudah dibuktikan dari upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mempertahankan Opini BPK dengan WTP 8 (delapan) tahun berturut-turut. Dalam rangka menjaga sustainable Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar lebih baik dan optimal ke depan maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan lagi berbagai upaya berikut

1) Melaksanakan kegiatan sensus aset untuk mengetahui aset yang dimiliki pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan pengunaanya sehingga aset bisa dijadikan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
2) Melakukan koordinasi/kerjasama dengan BPN untuk mempercepat proses penerbitan legalitas penguasaan atas tanah yang dimiliki pemerintah daerah.
3) Mempercepat proses legalitas standar operasional prosedur pengelolaan aset, sehingga bisa diinformasikan secara luas ke seluruh SKPD pengelola aset.
4) SILPA dapat diartikan dengan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. SILPA diberikan batasan sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan 0 (nol).

Tingginya persentase SILPA ditahun 2020 dimaknai dua hal, pertama bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang maksimal atau lebih sering kita kenal dengan kinerja birokrasi kurang maksimal, kedua perencanaan APBD disusun dengan

estimasi yang kurang matang sehingga antara target pendapatan dan belanja tidak balance.

Berdasarkan tabel diatas persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Balangan dari tahun 2016 sampai 2020 bersifat fluktuatif, sedangkan ditahun 2020 terjadi peningkatan SILPA yang signifikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,66% dari persentase SILPA sebesar 10,74% menjadi sebesar 21,40%. Tingginya persentase SILPA tahun 2020 terhadap APBD di Kabupaten Balangan diduga karena berbagai faktor antara lain,Meningkatnya realisasi penerimaan dana perimbangan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi menyumbang SILPA terbesar serta efesiensi belanja dan serapan anggaran yang belum maksimal antara lain karena faktor terjadinya pandemi covid-19 di Kabupaten Balangan sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD di kabupaten Balangan.

Diharapkan tahun 2021 persentase SILPA berada diposisi standar yang ideal. Berbagai strategi perlu dilakukan antara lain tahapan penyusunan APBD tahun 2022 paling lambat dilakukan minggu kedua bulan juli 2021 dengan penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD Kabupaten Balangan, pembahasan Raperda pada minggu kedua bulan agustus 2021 serta penetapan APBD perubahan 2021 tepat waktu, memaksimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian Renja 2021 untuk seluruh SKPD, sehingga pada akhirnya SILPA hanya berasal dari efisiensi kegiatan, SILPA hanya terjadi karena kegiatan yang dilakukan tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan SILPA sebagai akibat perubahan kebijakan pendapatan setelah APBD ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas persentase program dan kegiatan yang tidak terlaksana adalah 0%. Persentase 0% menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang ada di Renja tahun 2020 untuk masing-masing SKPD sudah dilaksanakan sesuai dengan Renja tahun 2020 untuk masing-masing SKPD.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20%. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu bentuknya adalah dengan mengalokasikan anggaran dari tahun 2016 -20120 diatas 20%.

Badan kesehatan dunia (WHO) telah memasang patokan bahwa alokasi anggaran kesehatan setiap Negara 15% dari total APBN sedangkan Undang-

Undang Kesehatan pada pasal 171 ayat 1 berbunyi pengalokasian anggaran kesehatan untuk kabupaten/kota minimal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji sebesar 10%. Alokasi anggaran kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu bentuknya adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran dari tahun ketahun hingga tahun 2020. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 untuk alokasi anggaran kesehatan tanpa memperhitungkan aloksi belanja gaji sudah diatas 10% dan hal ini sudah berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam sistem belanja pemerintah daerah dikenal dengan istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terakhir diatur dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada umumnya dibagi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Kabupaten Balangan tahun 2020 sebesar 10,1%. Belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa sudah melewati batas minimal 10% dari yang sudah dianggarkan. Besaran belanja langsung merupakan gambaran dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan masyarakat. Proporsi ideal belanja langsung dan tidak langsung minimal 60%:40%. Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Balangan di tahun 2020 sebesar 49,44% : 50,56% yang artinya proporsi tidak ideal. Persetase belanja langsung lebih rendah dari belanja tidak langsung di tahun 2020 dikarenakan adanya kewajiban daerah untuk menganggarkan ADD sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK serta adanya alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang penempatan belanjanya di BTL, persentase anggaran belanja untuk belanja pegawai pada apbd masih berkisar 30%, meningkatnya persentase BTL dikarenakan adanya perintah untuk melakukan Realokasi dan

Recofusing Anggaran untuk penangan Covid-19 yang dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 penetapan APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, artinya penetapan APBD tahun 2020 paling lambat 1 desember 2019. Berdasarkan tabel diatas penetapan APBD murni Kabupaten Balangan tertanggal 17 desember 2019. Tanggal penetapan APBD murni tersebut menggambarkan keterlambatan penetapannya selama 17 hari.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.94
Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	31.98 JP	48.44 JP	20 JP	20 JP	32,79 JP
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	21.70%	36.00%	30.50 %	35.59 %	21,97%
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktura	46.79%	48.32%	44.01	47.77 %	39,83%
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	24	38	38	39	31
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	120	168	165	165	150
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.274	2.058	1.994	1.822	1.752

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Balangan, 2021

Berdasarkan amanat Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam mewujudkan ASN yang profesional yang mampu mendukung pembangunan dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip antara lain kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya maka Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengikuti sertakan pegawai dalam mengikuti pendidikan dan

pelatihan secara rutin. Berdasarkan tabel diatas ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 adalah 21,97%, menurun sebesar 13,62% dari 35,59% di tahun 2019. Adapun pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2020 adalah sebesar 39,83% menurun sebesar 17,23% dibanding tahun 2019, dengan rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 32,79 JP dengan rincian di bawah ini

1) Pejabat ASN yang mengikuti PIM 7 orang
2) Diklat/pelatihan 38 orang x 55,36 JP
3) Diklat teknis 603 orang x 16 JP.
4) Jumlah JP Prajabatan 4 orang x 511 JP
5) PIM 7 orang x 830 JP
6) Diklat/pelatihan 38 orang x 55,36 JP
7) Diklat Teknis 603 orang x 16 JP

Dengan adanya ketentuan pada UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa setiap ASN harus mengikuti minimal 20 jam pelajaran, maka potensi pelaksanaan diklat untuk seluruh ASN Kabupaten Balangan menjadi cukup besar peluangnya. Dengan jumlah ASN Kabupaten Balangan sebanyak 2.949 orang tentunya pelaksanaan diklat khususnya diklat teknis dan diklat fungsional di tahun-tahun mendatang akan sangat padat. Namun selalu terbentur pada alokasi dana anggaran yang tersedia, untuk itu sangat diperlukan evaluasi program dan kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan agar target peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat tercapai. Selain masalah dana, Pelaksanaan Diklat juga tidak merata pada ASN Kabupaten Balangan namun suatu kaidah bahwa langkah paling utama dalam penyusunan program Diklat PNS Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). AKD memiliki memiliki kaitan yang sangat erat dengan perencanaan Diklat. Kebutuhan Diklat dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kompetansi yang diharapkan dengan tingkat kompetensi yang saat ini dimiliki oleh ANS.

Berdasarkan keputusan bupati Balangan nomor 188.45/665/Kum TAHUN 2020 tentang Peta Jabatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2020 menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan berjumlah 41 (empat puluh satu). Peta jabatan tersebut merupakan materi dasar

dalam penyusunan formasi, analisis beban kerja, evaluasi jabatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi dalam instansi pemerintah, dengan kategori pimpinan utama untuk tingkat pusat, pimpinan madya untuk tingkat provinsi dan pimpinan pratama untuk tingkat kabupaten / kota. Pimpinan tinggi itu setara dengan eselon II di Kabupaten/Kota yang menjadi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Terkait peta jabatan tersebut maka penting sekali penempatan pegawai berdasarkan *the right man on the right place* yang mana ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan bahwa penempatan ASN harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan ataupun kondisi kecacatan sehingga tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan telah dilakukan seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong yaitu Asesmen Kompetensi (*assessment center*) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, selain itu juga dilaksanakan kegiatan Asesmen Pemetaan Kompetensi Pegawai bagi Pejabat Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Kegiatan *asesmen* ini berkerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Balangan dengan Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi (PPAK) Universitas Lambung Mangkurat. Seleksi terbuka ini bertujan untuk memotret kemampuan manajerial seseorang sehingga dapat diketahui dan dipridiksi apakah seseorang kompeten dalam mengemban jabatan. Berdasarkan tabel diatas untuk jumlah jabatan pimpinan tinggi (esellon II) pada instansi pemerintah tahun 2020 sebanyak 31 formasi padahal kondisi ideal untuk Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah 39 formasi. Terkait masih jauhnya keterisian formasi jabatan pimpinan tinggi dari kondisi ideal maka dalam rangka meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Balangan mengangkat Penjabat Sementara (Pjs) dan Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan pimpinan tinggi pada formasi yang kosong.

Berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/665/KUM TAHUN 2020 menetapkan kebutuhan pemangku Jabatan Funsional Tertentu

(JFT) sebanyak 8.829 JFT. Berdasarkan tabel diatas untuk jumlah pemangku JFT pada instansi pemerintah di tahun 2020 hanya sebesar 1.752 JFT dan jumlah pemangku JFT mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2019 yaitu berkurang sebesar 70 jabatan fungsional tertentu. Penurunan jumlah pemangku JFT dikarenakan pensiun dan mutasi ke JFU serta mutasi ke pemangku jabatan struktural. Kekurangan JFT sebanyak 7.077 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan apabila tidak segera ditangani dengan baik, maka kekurangan ini akan menjadi kelemahan instansi yang pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal.

D. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.95
Capaian Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4. Penelitian dan pengembangan						
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		100 %	100 %	100 %	70%
4.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		100 %	100 %	100 %	100 %
4.3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Balitbangda Kabupaten Balangan, 2021

Dalam rangka percepatan pencapain tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Balangan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah disusun pengaturan tentang inovasi daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Terkait hal ini, Kabupaten Balangan mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya

upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan tabel persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan capaian sebesar 70%, maksud dari capaian tersebut adalah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebanyak 7 kajian dari 10 kajian yang ditargetkan dalam Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2020 .

Adapun tujuh hasil kajian kelitbangan yang ditindaklanjuti tersebut adalah sebagai berikut

1) Kajian *prevalensi stunting* di Kabupaten Balangan.
2) Kajian akademis pembentukan unit pelaksana teknis daerah kebun raya Kabupaten Balangan.
3) Kajian pengembanganpasar rakyat sebagai sumber perekonomianmasyarakat.
4) Kajian studi kelayakan kawasan terpadu spot center di Kabupaten Balangan.
5) Kajian studi angkutan masal Kabupaten Balangan.
6) Kajian pemanfaatan dan pengelolaan pangan alternative berbasis umbi maya (*amorphallus muelerri*) khas Kalimantan Selatan.
7) Kajian pembuatan pupuk organik berbentuk *granule/pellet* di Kabupaten Balangan.

Rendahnya capaian persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dikarenakan terbatasnya anggaran untuk dapat melaksanakan seluruh kajian yang ditargetkan dalam Renja tahun 2020 sebanyak 10 kajian.

Berdasarkan tabel persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Balangan untuk tahun 2020 sebesar 100% atau sebanyak 41 SKPD dari 41 jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Balangan. Terkait hal tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya upaya hasil pemikiran dengan memfasilitasi desiminasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang bersifat inovatif yang diterapkan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.

Berdasarkan tabel persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2020 untuk Kabupaten Balangan sebesar 100%. Maksud dari

capaian disini adalah dari 18 jumlah kajian inovasi yang diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ada 18 inovasi yang telah diterapkan oleh SKPD terkait dan terus berlanjut hingga sekarang. Kebijakan inovasi yang diterapkan sudah memenuhi kriteria dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang terdiri dari 2 aspek, 7 variabel dan 35 indikator sehingga Kabupaten Balangan mendapatkan penghargaan Innovation *Government Award* (IGA) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan predikat daerah sangat inovatif dengan skor nilai 1.616. Penghargaan yang didapatkan tersebut memberikan manfaat tidak hanya untuk Kabupaten Balangan namun juga memberikan kontribusi manfaat bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia sehingga berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 002.6/2866/Sy tentang Penilaian IDD dan Pemberian Penghargaan IGA Tahun 2020 menyatakan bahwa mengusulkan yang mendapatkan IGA ke Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) bidang inovasi daerah. Keberhasilan Kabupaten Balangan mendapatkan penghargaan IGA dari Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia tentunya sangat di pengaruhi oleh dukungan kepala daerah untuk inovasi serta adanya sinergisitas, koordinasi, sinkronisasi dan jejaring kekementrian terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Kalimantan Selatan, kabupaten/kota rujukan, dan seluruh SKPD terkait. Yang tidak kalah penting untuk mendukung keberhasilan inovasi kedepannya adalah pentingnya membangun sistem penjaringan inovasi terpadu dan didukung aplikasi isian IDD karena cara ini dirasakan menjadi solusi kerja yang efektif, efisien dan aman terutama masa pandemi Covid-19.

E. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Fes Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program- program

DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD.

Pada tahun 2020 data kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dengan menerbitkan dokumen-dokumen legislasi DPRD, yakni Peratutan Daerah sejumlah 3 buah dari 23 Raperda yang terdiri atas 2 Raperda Inisiatif Dewan, 17 Raperda Usulan dari Pemerintah Daerah, dan 3 Raperda Wajib.

F. Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkueren sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.

Tabel 2.96
Capaian Indikator Pengawasan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

NO	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5. Pengawasan						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	85%	92,54 %	84,41 %	87,82 %	90%
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	-	-	0,06%	0,19%	0,03 %
5.3	Jumlah temuan BPK	30	49	49	75	47

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, 2021

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung urusan pemerintah konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasaran Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pejabat daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk menindak lanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan diterima. Berdasarkan tabel diatas untuk persentase tindak lanjut temuan terus meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti berdasarkan berta acara rekonsiliasi dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2018 dari jumlah rekomendasi sebanyak 571 terdapat 482 rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti, tahun 2019 dari jumlah rekomendasi sebanyak 624 terdapat 548 rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti dan pada tahun 2020 yang dilaksanakan pada 14 sd 18 desember 2020 di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Banjarbaru dari jumlah rekomendasi sebanyak 703 terdapat 627 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Kepegawaian pada pasal 3 bahwa setiap ASN wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja. Berdasarkan tabel diatas untuk persentase pelanggaran pegawai bersipat fluktuatif. Persentase pelanggaran pegawai tahun 2020 sebesar 0,03%, maksud dari capaian tersebut adalah dari 2.949 jumlah seluruh ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan terdapat 1 orang ASN yang mendapatkan sanksi kepegawaian dengan jenis pelanggaran disiplin yaitu pelanggaran terhadap kewajiban tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja, dan memperoleh keputusan disiplin ringan.

Pada tahun 2020 dari hasil pemeriksaan BPKRI pada hari senin sampai dengan jumat tanggal 14-19 desember tahun 2020 bertempat di kantor BPKRI perwakilan Kalseldilaksanakan rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dimana terdapat 15 temuan dengan 47 rekomendasi

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi pangan rumah tangga di Kabupaten Balangan antara tahun 2016 hingga 2019 secara konsisten mengalami kenaikan dari angka 42,65% pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 50,38% pada tahun 2017, naik menjadi 54,13% pada tahun 2018 dan sampai akhirnya naik hingga 55,26% pada tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat di Kabupaten Balangan lebih memprioritaskan kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup atau kebutuhan fisiologi dibandingkan kebutuhan lain.

Masyarakat Kabupaten Balangan menjadikan makanan dan minuman jadi sebagai jenis konsumsi yang paling diminati, dengan tingkat pengeluaran sebesar 13.27% hingga 21.17%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding konsumsi utama masyarakat pada umumnya seperti padi-padian dan jenis pangan lain seperti umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang angkanya di bawah 7%. Hal ini menunjukan masyarakat Balangan cenderung memilih cara praktis dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini dapat disebabkan jumlah jam kerja masyarakat semakin tinggi, meningkatnya produksi dan ketersediaan makanan dan minuman jadi di tengah masyarakat kabupaten Balangan saat ini, serta gaya hidup masyarakat yang sudah mulai berubah.

Faktor gaya hidup juga berpengaruh pada peningkatan konsumsi tembakau dan sirih yang juga cenderung naik secara konsisten dari 4,63% pada tahun 2015 hingga 5,56% pada tahun 2019. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding jenis pangan lain seperti umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, susu dan buah-buahan.

Tabel 2.97
Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Balangan 2015-2019

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	x	x	x	40,800	39,076.36
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)	46.76	42.65	50.38	54,13	55,26
1	Padi-padian	6.96	5.97	5.73	6.08	6.34
2	Umbi-umbian	0.12	0.14	0.19	0.17	0.18
3	Ikan / udang / cumi / kerang	5.42	4.91	5.35	5.55	5.66
4	Daging	1.43	1.16	1.76	1.53	1.74
5	Telur dan Susu	2.98	2.45	2.89	2.68	3.2
6	Sayur-sayuran	2.3	2.28	2.64	2.7	2.89
7	Kacang-kacangan	0.69	0.48	0.56	0.73	0.83
8	Buah-buahan	2.43	2.17	1.93	3.16	3.09
9	Minyak dan Lemak	1.52	1.21	1.19	1.44	1.54
10	Bahan Minuman	1.65	1.66	1.76	1.68	1.95

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
11	Bumbu-bumbuan	1.13	0.9	0.79	1.07	0.96
12	Konsumsi Lainnya	1.38	1.38	1.37	1.46	1.5
13	Makanan dan Minuman Jadi	14.12	13.27	19.13	21.17	19.8
14	Tembakau dan sirih	4.63	4.67	5.09	4.73	5.56
Jumlah		46.76	42.65	50.38	54.15	55.24

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2020

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga

Perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi konsumsi non pangan tertinggi pada tahun 2015-2019 dengan kisaran angka rata-rata 17,61%. Peringkat kedua konsumsi non pangan tertinggi pada konsumsi barang tahan lama yang angka rata-ratanya konsumsinya 12,01%, disusul konsumsi aneka barang dan jasa yang angka rata-ratanya 11,21%. Secara umum konsumsi masyarakat di Kabupaten Balangan masih di area kebutuhan mendasar manusia pada umumnya yakni sandang, pangan dan papan.

Tabel 2.98
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Balangan 2015 – 2019

No	Kelompok	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Rata-rata Pengeluaran (Ribu Rp)	NA	NA	NA	80,647.33	73,811.67
B	Distribusi Pengeluaran (%)	53.21	57.36	49.62	45.87	44.73
1	Perumahan & Fasilitas Rumah tangga	21.55	3.65	19.4	21.35	22.08
2	Aneka Barang dan Jasa	8.96	19.05	9.82	9.32	8.89
3	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	2.3	9.9	3.16	3.07	3.03
4	Barang Tahan Lama	16.14	18.48	12.98	7.38	5.06
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	2.16	5.1	2.7	4.11	3.82

No	Kelompok	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	2.1	1.18	1.56	0.64	1.85
Jumlah		53.21	57.36	49.62	45.87	44.73

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2020

Secara umum, pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan persentasenya cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016, konsumsi non pangan di Kabupaten Balangan angkanya lebih tinggi dibandingkan konsumsi pangan. Artinya, pada tahun-tahun tersebut, masyarakat di Kabupaten Balangan tercukupi kebutuhan fisiologisnya sehingga mampu memberi porsi lebih pada konsumsi non pangannya. Namun, pada tahun 2017 angka konsumsi non pangan menurun dari 57,36% menjadi 49,62%, kemudian semakin turun ke angka 45,87% pada tahun 2018 dan 44,73% pada tahun 2019. Artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder.

C. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Secara umum, pengeluaran konsumsi non-pangan masyarakat Kabupaten Balangan persentasenya cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016, konsumsi non-pangan di Kabupaten Balangan angkanya lebih tinggi dibandingkan konsumsi pangan. Artinya, pada tahun-tahun tersebut, masyarakat di Kabupaten Balangan tercukupi kebutuhan fisiologisnya sehingga mampu memberi porsi lebih pada konsumsi non-pangan. Namun, pada tahun 2017 angka konsumsi non-pangan menurun dari 57,36% menjadi 49,62%, kemudian semakin turun ke angka 45,87% pada tahun 2018 dan 44,73% pada tahun 2019. Artinya pada tahun 2017 - 2019 masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Hal ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan saat ini sedang berada pada tren menurun, karena semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun.

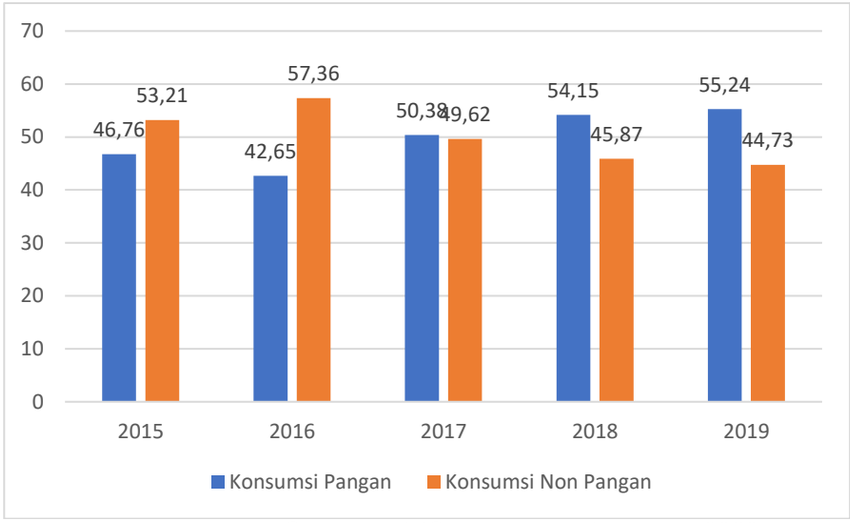

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.26
Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
Di Kabupaten Balangan 2015 – 2019

D. Upah Minimum

Upah minimum pekerja di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan pada tahun 2016, lalu setelah itu stagnan. Pada tahun 2016, sektor pertambangan batubara mengalami kenaikan dari Rp.1.905.000,- menjadi Rp.2.350.000,- atau naik 23,36%. Pada sektor industri makanan dan minuman mengalami kenaikan dari Rp.1.900.000,- menjadi Rp.2.300.000.- atau naik 21,05%. Kemudian pada sektor perbankan (bank swasta nasional dan pemerintah) kenaikan dari Rp.2.795.000,- menjadi Rp.3.228.225,- atau naik 15,50%.

Meskipun upah minimum naik signifikan, namun jumlahnya belum mampu melebihi rata-rata kebutuhan hidup minimum (KHM) para pekerja di Kabupaten Balangan yang berkisar antara Rp.2.341.674- hingga Rp.2.437.861,- (Kabupaten Balangan dalam angka tahun 2018).

Tabel 2.99
Upah Minimum Pekerja Di Kabupaten Balangan
berdasarkan Sektor Tahun 2015-2017

No	Kelompok	Tahun		
		2015	2016	2017
A	Upah Minimum (Rp.)			
1	Pertambangan batu bara	1,905,000	2,350,000	2,350,000
2	Industri Makanan dan Minuman	1,900,000	2,300,000	2,300,000
3	Perkebunan Kelapa Sawit	-	2,264,500	2,264,500
4	Bank Swasta Nasional dan	2,795,000	3,228,225	3,228,225

	Pemerintah			
5	Bank Perkreditan Rakyat	-	2,325,740	2,325,740
6	Pertanian Tanaman Lainnya	1,875,000	-	-
7	Perdagangan Besar	1,900,000	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Balangan

E. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (term of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan factor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas/breakeven. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.

Berdasarkan BPS Kabupaten Balangan, maka NTP Kalimantan Selatan dianggap mampu mewakili keadaan di kabupaten tempat komoditi sektor pertanian berasal. Nilainya dari tahun 2016 sampai dengan Januari 2021, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.100
Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan,
Januari - Desember dan rata-rata Tahun 2014 – 2020 dan Januari 2021
(2012=100)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	99,04	98,24	97,03	95,22	102.61	105,89
Februari	98,82	98,56	97,52	95,79	101,99	-
Maret	97,67	97,38	96,31	95,05	101,10	-
April	97,54	96,73	94,83	94,61	98,64	-
Mei	97,22	96,67	94,31	95,88	98,39	-
Juni	97,04	96,06	94,66	95,47	98,44	-
Juli	96,69	95,47	94,02	95,07	98,87	-
Agustus	96,22	95,89	94,40	94,94	99,64	-
September	96,86	96,09	95,46	95,00	100,91	-
Oktober	97,52	96,56	95,50	94,49	102,31	-
November	97,76	96,26	95,33	95,50	103,53	-
Desember	97,84	96,35	95,43	96,72	105,37	-
Rata - rata	97,52	96,69	95,40	95,31	105,37	105,89

Sumber : *BPS Kalsel, data diolah*

Tabel 2.101
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s.d. 2021
Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)			120,40	124,84	111.09	111,86
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)			126,21	130,98	105.43	105,64
3	Rasio	97,52	96,69	95,40	95,31	105.37	105,89

Pada Tahun 2020, rata-rata NTP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 105,37 atau naik 10,06 persen jika dibandingkan NTP pada Desember 2019 yang mencapai 95,31 persen. Selanjutnya pada Januari 2021, NTP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 105,89 atau naik 0,49 persen jika dibandingkan NTP pada Desember 2020 yang mencapai 105,37 persen. Kenaikan NTP ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,69 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani (Ib) hanya naik sebesar 0,20 persen. Dimana indeks konsumsi rumah tangga naik 0,26 persen dan indeks BPPBM naik 0,11 persen.

Berdasarkan data satu tahun terakhir terjadi peningkatan nilai NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

Sedangkan jika berdasar target NTP pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 sebesar 98,65 persen, dibandingkan perolehan nilai NTP Kalimantan Selatan sebesar 105,37 persen yang diasumsikan dapat mewakili nilai NTP Kabupaten Balangan, maka capaian kinerja RKPD 2020 adalah 106,81 persen.

NTP Subsektor	Des'20	Jan'21	Perubahan (%)
Tanaman Pangan (NTPP)	103,24	103,69	0,44
Hortikultura (NTPH)	97,16	100,12	3,04
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	112,55	113,02	0,41
Peternakan (NTPT)	99,64	99,63	-0,01
Perikanan (NTNP)	98,99	98,81	-0,18
✓ Nelayan (NTN)	98,90	98,61	-0,29
✓ Pembudidaya Ikan (NTPi)	99,33	99,57	0,24
NTP	**105,37**	**105,89**	**0,49**

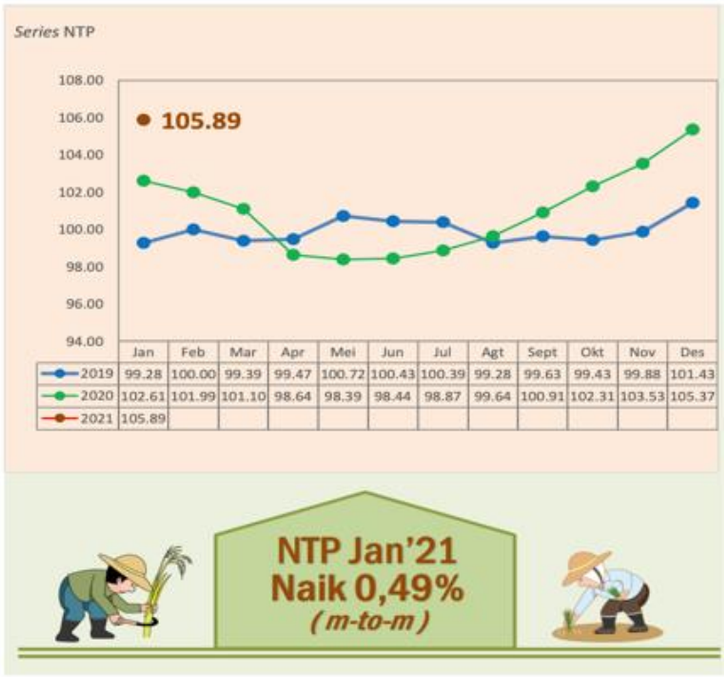

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
2019	99.28	100.00	99.39	99.47	100.72	100.43	100.39	99.28	99.63	99.43	99.88	101.43
2020	102.61	101.99	101.10	98.64	98.39	98.44	98.87	99.64	100.91	102.31	103.53	105.37
2021	105.89											

Gambar 2.27
Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan,
Januari 2020 – Januari 2021

2.1.4.2 Iklim Berinvestasi

A. Kemudahan Perijinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Balangan. Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS). Sistem

ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2019 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.102

Tabel 2.102
Produk Layanan OSS DPMPTSP Beserta Lama Waktu Pelayanan Kabupaten Balangan

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
1	Izin Usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
2	Izin Usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
3	Izin Usaha Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
4	Izin Usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
5	Pendaftaran usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
6	Pendaftaran usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
7	Pendaftaran usaha Budi Daya Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
8	Pendaftaran usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
9	Izin Usaha Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
10	Izin Usaha Kawasan Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
11	Izin Perluasan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
12	Izin UsahaJasa Penunjang Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
13	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
14	Izin Operasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
15	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
16	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
17	Izin Penyelenggaraan Saeana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
18	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
19	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
20	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
21	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
22	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Propinsi dan atau Antar Negara	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
23	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
24	Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
25	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
26	Izin Pelabuhan Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
27	Izin Usaha Angkutan Laut	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
28	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
29	Izin Usaha Angkutan Laut di Perairan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
30	Persetuan Kegiatan Kerja Keruk	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
31	Penetapan Terminal Khusus yang terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
32	Izin mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
33	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
34	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
35	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
36	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
37	Izn Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
38	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
39	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
40	Izin Toko Alat Kesehatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
41	Izin Mendirikan Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
42	Izin Operasional Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
43	Izin Operasional Klinik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
44	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
45	Izin Apotek	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
46	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
47	Izin Toko Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
48	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
49	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
50	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
51	Ijin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
52	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
53	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
54	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hutan Produksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
55	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
56	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
57	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
58	Izin Pembuangan Air Limbah	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
60	Izin Pelaksanaan Reklamasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
61	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
62	Surat Izin Penangkapan ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
63	Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
64	Tanda Daftar Bagi Pembudi daya ikan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
65	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
66	Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi Petambak garam kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
67	Buku Kapal Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
68	Ijin Usaha Jasa Kontruksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
69	Surat Ijin Peil Banjir	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
70	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
71	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
72	Pengesahan Pertelaan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
73	Sertifikat HMRS an Developer	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
74	Sertifikat Hak Milik HMRS atas Nama Pembeli	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
75	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
76	Izin Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
77	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
78	Izin Pembukaan Kantor cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
79	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
80	Surat Ijin Perdagangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
81	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
82	Tanda Daftar Gudang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

Sumber : DPMPST Kabupaten Balangan, 2020

B. Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan terus mengalami penambahan. Jika pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Balangan berjumlah 124.913 jiwa, di tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 132.103 jiwa. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2017 dengan penambahan penduduk sebanyak 2.599 jiwa, atau 2,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk harus terus dilakukan karena ledakan penduduk dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, yang tidak kalah penting, adalah menjaga rasio ketergantungan penduduk. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif. Usia penduduk tidak produktif berkisar antara 0-14 tahun, dan berusia 65 tahun ke atas. Keduanya disebut juga dengan penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun dan biasa disebut juga dengan penduduk angkatan kerja.

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Balangan sebesar 41 persen pada tahun 2020, artinya setia[p 100 orang yang berusian kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 41 ini tersusun oleh

rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 33.707 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 4.704. Rasio ketergantungan ini termasuk kategori tinggi terutama penduduk muda, namun ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Balangan di masa yang akan datang.

Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha. Disisi lain menjadi kewajiban pula bagi Pemerintah Kabupaten Balangan menyediakan fasilitas ramah lansia misalnya penyediaan posyandu lansia.

Tabel 2.103
Rasio Ketergantungan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

	Penduduk kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)
Tahun	Penduduk Usia < 15 th	Penduduk Usia > 15 th &< 65 th	Penduduk Usia > 65 th	
2016	33,413	87,589	3,911	42.61
2017	32,910	90,000	4,338	41.39
2018	34,124	90,954	4,878	42.88
2019	34,331	92,033	4,870	42.59
2020	33,707	93,692	4,704	41.00

Sumber : Buku Aggregat Kependidikan Kabupaten Balangan

b. Rasio Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk di Kabupaten Balangan sebagian besar mencari nafkah dengan mata pencaharian sebagai wirausahawan, baik yang berusaha sendiri, dibantu buruh tetap, dan dibantu buruh tidak tetap. Pada tahun 2018 jumlahnya berkisar 52,48%, kemudian naik 3,82% menjadi 56,3% pada tahun 2019.

Selain berwirausaha, penduduk Kabupaten Balangan juga ada yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan dan pekerja bebas serta pekerja keluarga. Jumlah penduduk yang bekerja pada kelompok ini pada tahun 2019 sebanyak 43,70%, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 47,52%. Penurunan jumlah kelompok pekerja berdampak baik terhadap peningkatan persentase penduduk yang berusaha /berwirausaha Artinya ada sekitar 4% kelompok pekerja yang berpindah menjadi wirausahawan pada tahun 2019.

Tabel 2.104
Rasio Penduduk Menurut Mata Pencaharian (%)

No	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1	Berusaha sendiri	30.56%	37.20%
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19.77%	17.16%
3	Berusaha dibantu buruh tetap	2.15%	1.94%
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	21.73%	25.79%
5	Pekerja bebas	4.15%	2.07%
6	Pekerja keluarga	21.64%	15.85%
	Total	100%	100%

Sumber : BPS Kab. Balangan

2.2 Pencapaian Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan

Tabel 2.114 memperlihatkan capaian Indikator Tujuan RPJMD tahun 2016-2021 di tahun 2020.

Tabel 2.105
Capaian Indikator Tujuan Dalam RKPD Kabupaten Balangan

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021 (akhir RPJMD)	Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020
1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.51	68,82	100,45
2	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.51	-2,47	-37,94
3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Indeks Kualitas Infrastruktur (%)	69.02	47,99	69.53
4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Nilai Tukar Petani	99	105,89	106,96
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62.25	68,06	109,33
5	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	4.59	5,32	84,10
		Indeks Gini Ratio	0.35	0,29	117,14
		Budaya Balangan yang terlestarikan (%)	100	100.00	100.00
6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	94.00	82,35	89.36

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021 (akhir RPJMD)	Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B=64,3		
		Indeks Desa Membangun (%)	0.7151	0.6395	89,42
7	Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Angka penyelesaian Pelanggaraan Trantibmas (%)	100	100	100
		Angka konflik sosial bernuansa SARA (%)	0	0	0

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Balangan

Terdapat 13 indikator tujuan yang mengukur keberhasilan Pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Balangan. Indikator tujuan yang belum mencapai target sebesar 80% adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan, yaitu -2,47% dari pertumbuhan ekonomi sebesar 6,51% yang ditargetkan ditahun 2021. Kondisi ini tidak terlepas dari:

- Dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya banyak aspek kegiatan perekonomian di Seluruh Dunia.
- Terjadinya penurunan produksi dari beberapa lapangan usaha lain, seperti industri pengolaha, perdagangan, transportasi dll.
- Penurunan produksi tambang batubara, berdasarkan data internal dari perusahaan tambang batubara yang melakukan aktivitas di wilayak Kabupaten Balangan menunjukkan adanya penurunan produksi hasil tambang batubara di tahun 2020. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini merupakan distributor terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Balangan, sehingga sedikit saja terjadi goncangan pada pertumbuhan lapangan usaha ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian total Kabupaten Balangan.

Indikator Kedua yang juga belum mencapai target RPJMD adalah Tingkat Kemiskinan. Target tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan sebesar 4,59%, sementara tahun 2020 tingkat kemiskinan masih sebesar 5,32% atau capaiannya sebesar 84,10%, sehingga perlu sinergi semua pihak untuk mencapai tingkat kemiskinan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Selanjutnya adalah indikator indeks kepuasan masyarakat dan indeks desa membangun dengan capaian 89,36% dan 89,42%. Untuk meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat perlu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain memperbaiki fasilitas dan sarana pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), inovasi pelayanan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia, meningkatkan arahan dan dorongan yang diberikan kepada unit penyelenggara pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat. Demikian pula dengan indeks desa membangun, perlunya keseriusan dalam mendorong faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM melalui komponen indeks komposit yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana.

Yang cukup menggembirakan adalah Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan dimana nilainya sudah melebihi dari target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, bahkan merupakan persentase pertumbuhan tertinggi se provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 6,3%. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

Demikian juga dengan indeks *gini ratio* yang nilainya dibawah 0,4, atau termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan sedang. Pada tahun 2020 *gini ratio* Kabupaten Balangan mengalami penurunan atau peningkatan capaian menjadi 0,29 dari target 0,35 tahun 2021. Dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan, maka indeks Gini Kabupaten Balangan lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pedoman Teknis dari Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah itu sendiri merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Struktur APBD terdiri dari; pendapatan daerah meliputi; semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah meliputi; semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan Pembiayaan meliputi; semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Asli Daerah	61.498.585.082,42	88.095.992.054,13	68.649.415.232,67	82.522.528.225,07	86.176.610.153,81	-0,95
Pendapatan Pajak Daerah	6.620.693.597,00	10.910.153.810,36	11.015.165.463,00	13.420.168.379,00	13.378.574.067,00	12,46
Pendapatan Retribusi Daerah	1.650.843.904,72	1.919.401.286,00	1.806.629.386,00	1.865.673.675,00	1.675.985.562,00	-5,95
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.191.994.189,00	14.609.202.938,00	15.713.201.757,00	6.596.245.516,00	9.827.731.257,00	-16,39
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41.035.053.391,70	60.657.234.019,77	40.114.418.626,67	60.640.440.655,07	61.294.319.267,81	8,94
Pendapatan Transfer	1.263.983.583.466,00	1.015.138.767.329,00	1.205.782.007.938,00	1.408.720.240.239,00	1.048.781.967.969,00	1,48
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.121.123.170.258,00	839.643.057.433,00	1.011.249.833.332,00	1.201.580.033.289,00	807.955.454.028,00	-19,99
Dana Bagi Hasil Pajak	32.659.084.777,00	23.198.948.355,00	27.858.480.903,00	21.517.651.852,00	21.092.476.251,00	-10,50
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	538.676.673.705,00	324.367.332.705,00	493.657.955.805,00	651.448.518.564,00	308.097.303.689,00	-16,65
Dana Alokasi Umum	389.434.433.000,00	382.593.322.000,00	382.593.322.000,00	392.667.124.000,00	352.411.306.000,00	1,83
Dana Alokasikhusus	160.352.978.776,00	109.483.454.373,00	107.140.074.624,00	135.946.738.873,00	126.354.368.088,00	5,33
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	97.090.791.000,00	123.977.454.200,00	132.295.595.000,00	129.576.750.400,00	180.919.681.500,00	21,98
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
Dana Penyesuaian	97.090.791.000,00	123.977.454.200,00	132.295.595.000,00	129.576.750.400,00	180.919.681.500,00	21,98
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	45.769.622.208,00	51.518.255.696,00	62.236.579.606,00	77.563.456.550,00	59.906.832.441,00	-0,52
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.769.622.208,00	51.518.255.696,00	62.236.579.606,00	77.563.456.550,00	59.906.832.441,00	-0,52
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.111.671.840,00	8.954.501.429,00	12.741.560.000,00	23.005.955.503,00	36.212.413.345,00	-132,61

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Hibah	-	550.000.000,00	12.741.560.000,00	23.005.955.503,00	18.000.810.000,00	42,50
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	
Jumlah Pendapatan	1.330.593.840.388,42	1.112.189.260.812,13	1.287.172.983.170,67	1.514.248.723.967,07	1.171.170.991.467,81	-132,08
Belanja Operasi	619.015.980.371,50	728.609.326.250,00	772.116.583.279,00	848.121.420.300,00	837.610.461.850,71	9,28
Belanja Pegawai	331.399.347.395,00	321.494.780.613,00	330.613.895.148,00	343.730.393.485,00	379.657.162.332,00	5,91
Belanja Barang	264.535.053.642,50	378.863.760.043,00	371.664.213.086,00	420.688.850.012,00	372.416.851.683,71	12,70
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	19.780.279.334,00	23.203.705.594,00	62.374.500.045,00	78.127.756.803,00	81.202.547.835,00	34,99
Belanja Bantuan Sosial	3.301.300.000,00	5.047.080.000,00	7.463.975.000,00	5.574.420.000,00	4.333.900.000,00	21,02
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
Belanja Modal	343.751.487.372,16	327.285.305.393,00	265.499.579.724,35	298.392.115.083,53	273.404.524.924,00	-0,40
Tanah	4.748.540.000,00	20.725.978.022,00	14.129.864.811,00	7.949.691.000,00	902.599.000,00	261,03
Peralatan Dan Mesin	36.617.864.409,00	43.421.866.266,00	45.750.018.539,00	50.657.647.520,00	51.241.769.111,00	10,38
Gedung Dan Bangunan	45.301.800.270,00	62.374.441.835,00	68.618.440.557,62	52.864.332.300,00	79.756.919.590,00	12,93
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	256.684.593.393,16	200.081.194.870,00	136.015.253.316,73	186.482.389.803,53	140.356.046.223,00	-3,77
Aset Tetap Lainnya	14.958.500,00	432.974.400,00	814.741.500,00	78.711.460,00	40.000.000,00	529,65
Aset Lainnya	383.730.800,00	248.850.000,00	171.261.000,00	359.343.000,00	1.107.191.000,00	82,29
BELANJA TAK TERDUGA	187.454.000,00	-	19.800.000,00	981.745.000,00	40.850.531.490,00	
Belanja Tak Terduga	187.454.000,00	-	19.800.000,00	981.745.000,00	40.850.531.490,00	
Jumlah Belanja						6,85

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
	962.954.921.743,66	1.055.894.631.643,00	1.037.635.963.003,35	1.147.495.280.383,53	1.151.865.518.264,71	
SURPLUS/ DEFISIT	367.638.918.644,76	56.294.629.169,13	249.537.020.167,32	366.753.443.583,54	19.305.473.203,10	8,32
Transfer/ Bagi Hasil	788.993.625,00	882.496.000,00	1.093.026.500,00	1.248.605.000,00	1.333.842.103,00	14,19
Bagi Hasil Pajak	639.872.550,00	710.822.000,00	931.008.500,00	1.071.926.700,00	1.167.940.423,00	16,54
Bagi Hasil Retribusi	149.121.075,00	171.674.000,00	162.018.000,00	176.678.300,00	165.901.680,00	3,11
Transfer Bantuan Keuangan	175.488.542.631,00	196.906.209.156,00	188.032.262.456,00	207.856.042.700,00	194.004.813.260,00	14,91
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	174.955.479.975,00	196.373.146.500,00	187.499.199.800,00	207.185.464.200,00	194.004.813.260,00	15,04
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	533.062.656,00	533.062.656,00	533.062.656,00	670.578.500,00	-	
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	175.488.542.631,00	196.906.209.156,00	188.032.262.456,00	207.856.042.700,00	194.004.813.260,00	14,91
JUMLAH TRANSFER	176.277.536.256,00	197.788.705.156,00	189.125.288.956,00	209.104.647.700,00	195.338.655.363,00	15,10
SURPLUS/ DEFISIT	191.361.382.388,76	(141.494.075.986,87)	60.411.731.211,32	157.648.795.883,54	(176.033.182.159,90)	170,45
-						
Penerimaan Pembiayaan	49.342.205.384,00	240.730.087.772,76	99.266.935.580,89	159.691.436.792,21	317.260.758.730,75	88,54
Penggunaan Silpa	49.264.080.384,00	240.703.587.772,76	99.258.273.580,89	159.678.666.792,21	317.246.508.730,75	88,67
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	78.125.000,00	26.500.000,00	8.662.000,00	12.770.000,00	14.250.000,00	-14,88
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Penerimaan Dari Sisa UYHD Tahun Lalu	-	-	-	-	-	
Penerimaan Piutang Fihak Ketiga	-	-	-	-	-	
Penerimaan Atas Investasi Permanen	-	-	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Pengembalian Dana DPPID	-	-	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO	49.342.205.384,00	240.730.087.772,76	99.266.935.580,89	159.691.436.792,21	317.260.758.730,75	106,12
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	240.703.587.772,76	99.236.011.785,89	159.678.666.792,21	317.340.232.675,75	141.227.576.570,85	86,79

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

a. Pendapatan Daerah

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah diperlukan untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD, dalam struktur APBD Kabupaten Balangan secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi; semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Analisisnya meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam periode 2016-2020 secara umum adalah sebagai berikut :

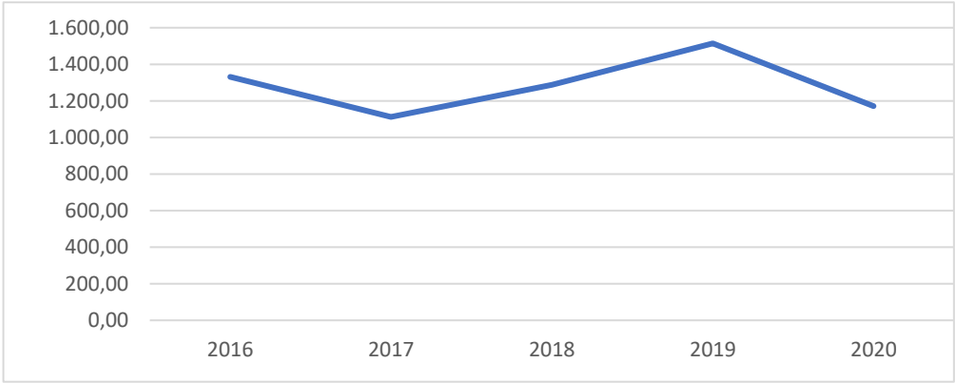

Sumber : BKD Kapubaten Balangan

Gambar 3.1.
Realisasai Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Pendapatan daerah Kabupaten Balangan sepanjang periode 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan rata-rata angka pertumbuhan sebesar 6,67% pertumbuhan tertinggi di tahun 2016 sebesar 39,03% dan terendah di tahun 2020 sebesar -22,66%. Jika dilihat dari komponen pembentuk Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi terbesar dari Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Transfer dengan rata-rata kontribusi 92,51%,

Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi 6,14% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata kontribusi 1,36% masing-masing komponen pembentuk Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.2.

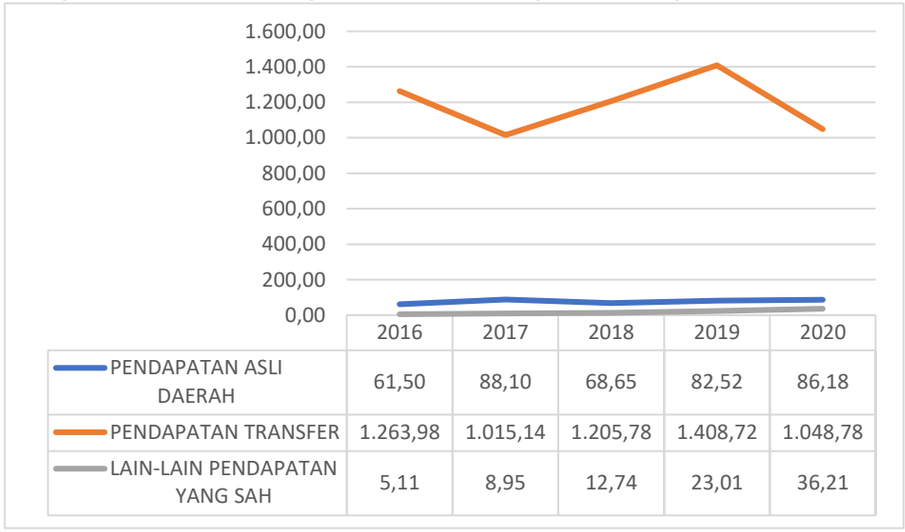

	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH	61,50	88,10	68,65	82,52	86,18
PENDAPATAN TRANSFER	1.263,98	1.015,14	1.205,78	1.408,72	1.048,78
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5,11	8,95	12,74	23,01	36,21

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

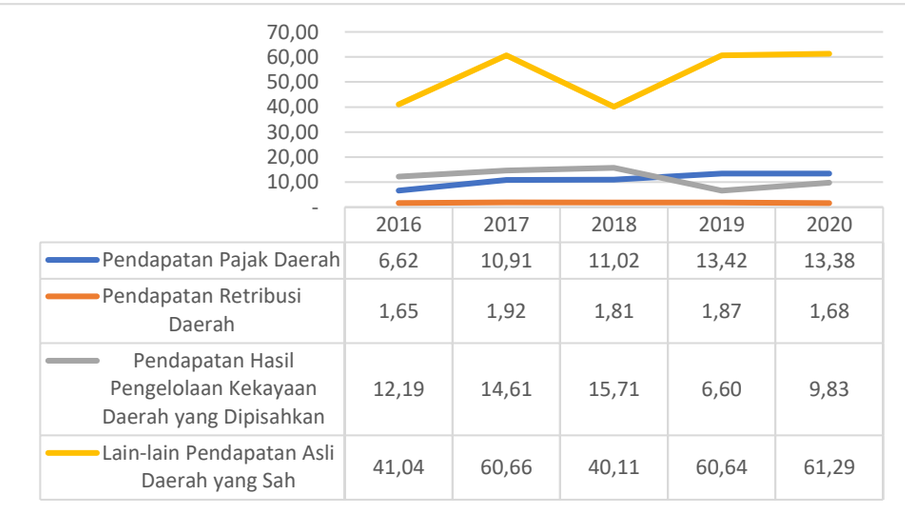

	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Pajak Daerah	6,62	10,91	11,02	13,42	13,38
Pendapatan Retribusi Daerah	1,65	1,92	1,81	1,87	1,68
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,19	14,61	15,71	6,60	9,83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41,04	60,66	40,11	60,64	61,29

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Dana Transfer terdiri dari: (1) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, (2) transfer pemerintah pusat lainnya, dan (3) transfer pemerintah provinsi.

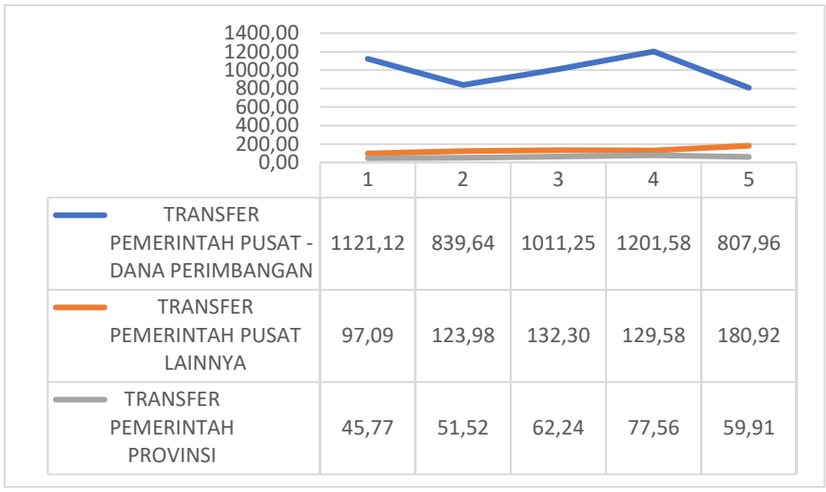

	1	2	3	4	5
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1121,12	839,64	1011,25	1201,58	807,96
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	97,09	123,98	132,30	129,58	180,92
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	45,77	51,52	62,24	77,56	59,91

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.4
Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari (1) Pendapatan hibah, (2) Pendapatan Dana Darurat, dan (3) Pendapatan Lainnya.

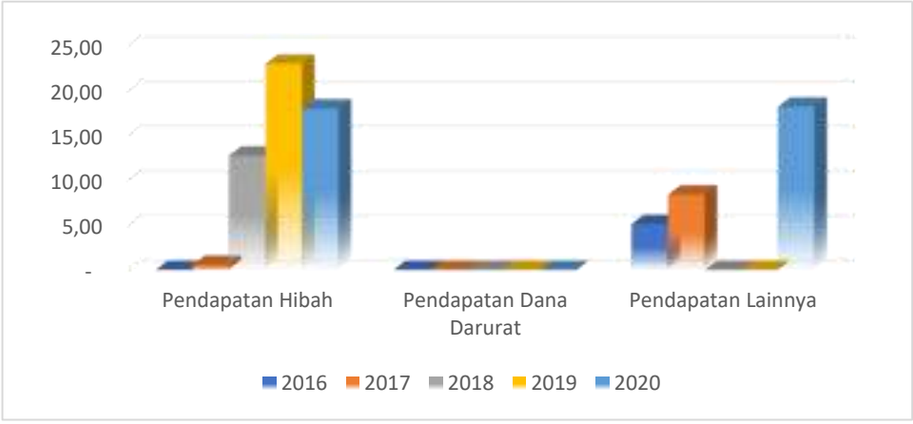

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.5
Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

b. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Balangan menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020.

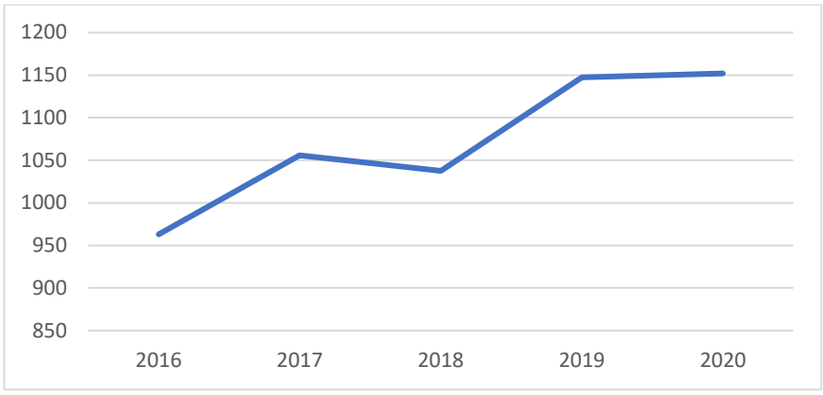

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.6
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020
(dalam Miliar Rupiah)

Selama periode ini Belanja Daerah Kabupaten Balangan mengalami kecendrungan meningkat dengan rata-rata pertahun sebesar 6,85%. Pada tahun 2016 total Belanja Daerah sebesar Rp962,95 Miliar meningkat menjadi sebesar Rp1.151,87 Miliar pada tahun 2020.

Belanja Daerah dikelompokkan dalam empat jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 9,28% dari Rp.619,92 Miliar menjadi Rp.837,61 Miliar. Belanja modal mengalami rata-rata penurunan pertahun sebesar (-0,40%) dari Rp.343,75 Miliar menjadi Rp.273,40Miliar. Belanja tak terduga mengalami dari Rp.0,19 Miliar menjadi Rp.40,85 Miliar. Belanja Transfer rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 15,10% dari Rp.176,27 Miliar menjadi Rp.195,34 Miliar.

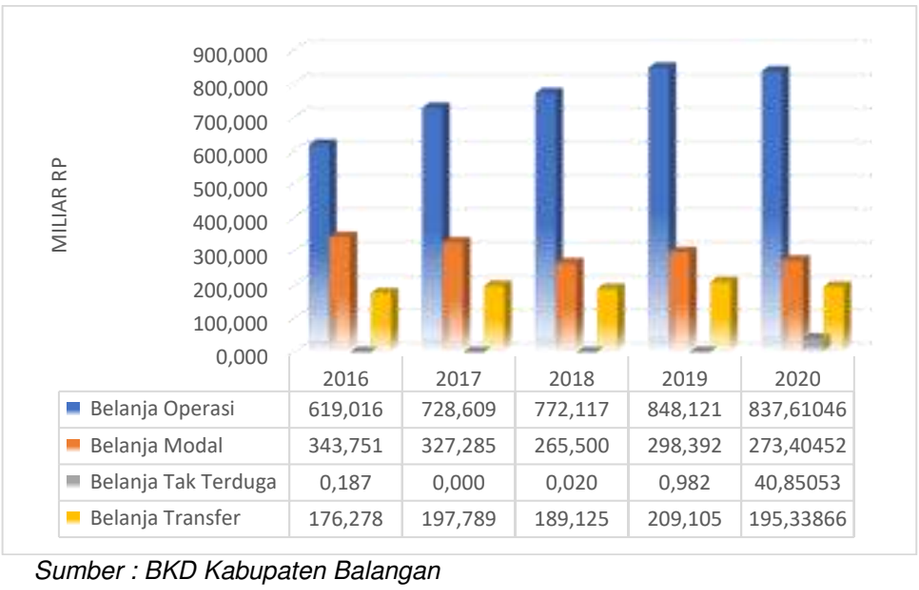

	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Operasi	619,016	728,609	772,117	848,121	837,61046
Belanja Modal	343,751	327,285	265,500	298,392	273,40452
Belanja Tak Terduga	0,187	0,000	0,020	0,982	40,85053
Belanja Transfer	176,278	197,789	189,125	209,105	195,33866

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.7
Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga,
dan Belanja Transfer Kabupaten Balangan 2016-2019

Belanja Daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Operasional meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.

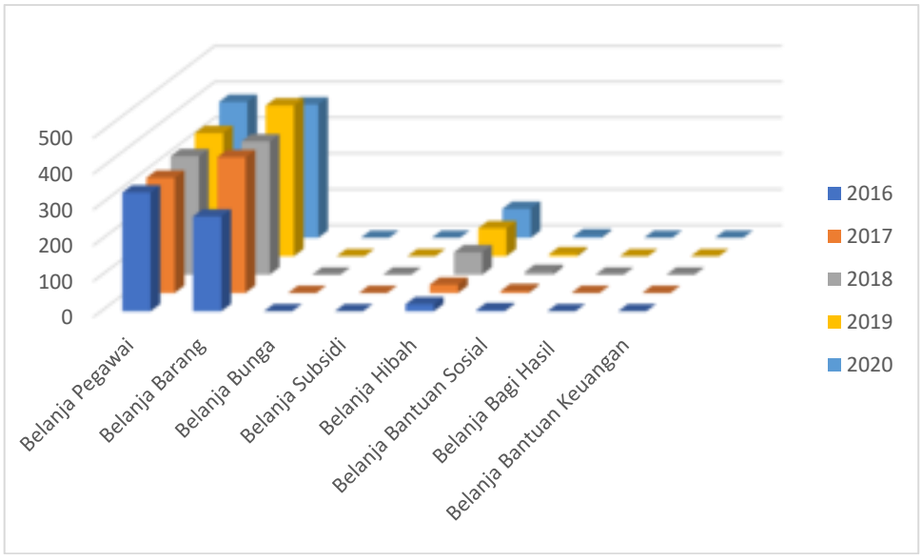

Gambar 3.8
Belanja Operasional Kabupaten Balangan 2016-2020
Sumber: BKD Kabupaten Balangan

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap lainnya.

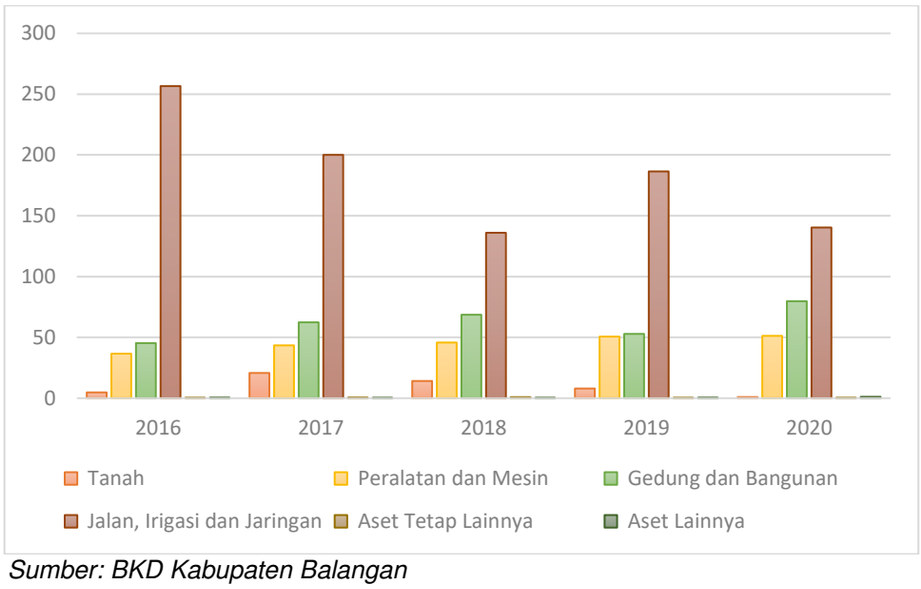

Sumber: BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.9
Belanja Modal Kabupaten Balangan 2016-2020

Belanja Transfer meliputi; Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

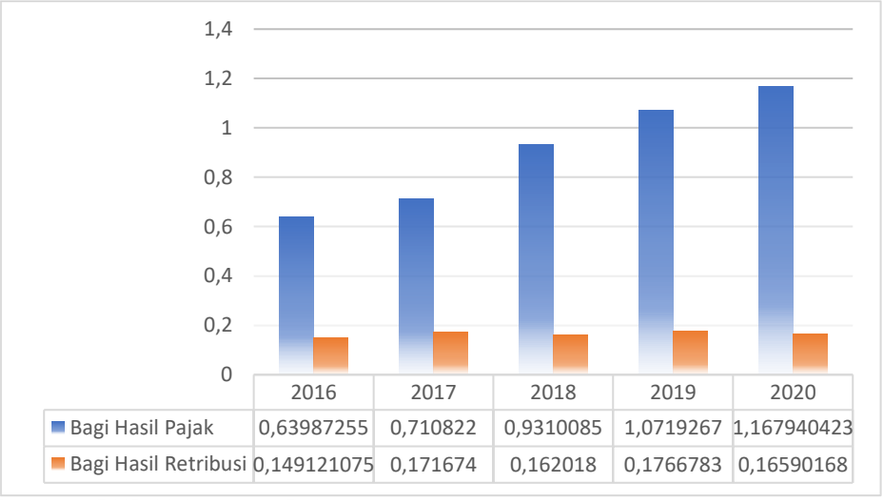

	2016	2017	2018	2019	2020
Bagi Hasil Pajak	0,63987255	0,710822	0,9310085	1,0719267	1,167940423
Bagi Hasil Retribusi	0,149121075	0,171674	0,162018	0,1766783	0,16590168

Sumber: BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.10
Belanja Transfer Kabupaten Balangan 2016-2020

c. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Balangan selama periode ini hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi).

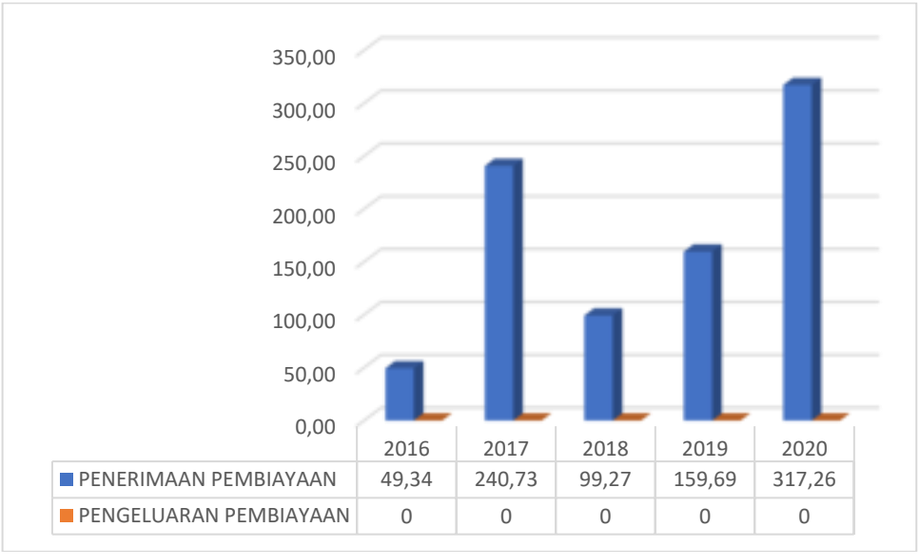

	2016	2017	2018	2019	2020
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49,34	240,73	99,27	159,69	317,26
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0

Sumber: BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.11
Pembiayaan Kabupaten Balangan 2016-2020

Proporsi SiLPA mendominasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 99,99% selama periode ini meskipun tumbuh sangat fluktuatif dengan rata-rata 88,79% dari total Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp317,26Miliar. Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah, misalnya dalam rangka Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Selama periode ini tidak ada Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan untuk tujuan-tujuan dimaksud.

3.1. 2. Neraca Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel 3.2.

1. Aset pemerintah daerah Kabupaten Balangan selama periode tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhannya sebesar 9,65%, total Aset tahun 2016 sebesar Rp.2.218,17Miliar dan tahun 2020 menjadi Rp.2.545,53Miliar. Aset lancar pemerintah Kabupaten Balangan rata-rata pertumbuhan sebesar 53,06%, menunjukan kondisi yang fluktuatif tahun 2016 Rp.255,45Miliar tahun 2020 menjadi Rp.212,27Miliar. Trend Investasi cenderung negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,57%.
2. Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Balangan selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 252,23%, tahun 2016 Rp.4,56Miliar menjadi Rp.164,08Miliar tahun 2020, yang semuanya merupakan kewajiban jangka pendek.

3. Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Balangan selama tahun 2016-2020 meningkat dari Rp.2.213,60Miliar tahun 2016 menjadi Rp.2.381,45Miliar tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,28%.

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Balangan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan pada Tabel 3.2. Ada 2 rasio liquiditas yang disampaikan yakni *current* dan *quick ratio*, *current ratio* memberikan informasi tentang kemampuan aktiva dalam menutup utang lancar, sedang *quick ratio* memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan.

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional, belanja modal atau belanja tak terduga dan belanja transfer secara optimal.

Rasio liquiditas menunjukkan menurunnya kemampuan aktiva dalam menutup hutang lancar baik yang ditunjukkan oleh (current ratio) tahun 2016 sebesar 53,35 : 1 turun menjadi 1,30 : 1 tahun 2020, dan jika dilihat dari quick ratio sebagai ukuran yang lebih riil untuk mengetahui kesanggupan menutup hutang lancar karena sudah dikurangi persediaan juga menunjukkan kondisi yang sama dari 56,87 : 1 menjadi 1,22 : 1 di Tahun 2020. Hal ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk lebih mengukur tingkat keamanan (margin of safety) dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Aset						
2	Aset Lancar						
3	Kas Di Kas Daerah	233.575,65	83.196,29	145.406,59	211.046,43	121.452,97	84,85
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	
5	Kas Di Bendahara Penerimaan	50,66	6,27	13,73	0,00	0,00	
6	Kas Di Bendahara Puskesmas (FKTP)	511,17	338,24	1.247,60	529,39	518,86	28,52
7	Kas Di Bendahara BLUD	6.567,20	13.183,55	11.054,94	16.777,06	18.051,22	51,61
8	Kas Di Bendahara BOS	1.951,99	2.496,31	1.955,80	4.703,00	1.204,52	87,64
9	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	84.284,35	0,00	
10	Kas Lainnya	9,12	0,00	0,00	36,54	36,54	
11	Piutang Pajak	2.741,29	2.055,29	1.984,84	2.189,88	2.071,33	-5,31
12	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	-1.001,08	-1.208,17	
13	Piutang Pajak Netto	0,00	0,00	0,00	1.188,80	863,16	
14	Piutang Retribusi	55,87	46,42	77,78	72,30	63,86	-4,09
15	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	-33,27	-45,99	
16	Piutang Retribusi Netto	0,00	0,00	0,00	39,02	17,87	
17	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.943,37	6.635,53	10.691,20	8.555,93	2.156,27	41,57
18	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	-42,78	-10,78	
19	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	8.513,15	2.145,49	
20	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	766,95	3.915,03	34.180,83	
21	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	0,00	0,00	0,00	3.915,03	34.180,83	
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	11.424,56	15.069,78	29.666,08	23.657,75	22.300,07	18,93

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
27	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00	0,00	-118,29	0,00	
28	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Netto	0,00	0,00	0,00	23.539,46	22.300,07	
29	Piutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Piutang Lainnya	0,00	51,76	29,90	0,00	0,00	
31	Penyisihan Piutang	-1.132,41	-880,86	-1.117,43	0,00	0,00	
32	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Persediaan	6.756,32	7.529,77	10.166,72	11.443,09	11.502,31	18,15
34	Jumlah Aset Lancar	266.454,80	129.728,37	211.944,71	366.015,32	212.274,81	53,06
35	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Dana Bergulir	630,85	630,85	630,85	630,85	673,30	1,35
38	Penyisihan Dana Bergulir	-630,85	-630,85	-630,85	-630,85	-673,30	4,49
39	Dana Bergulir Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Dana Talangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	262,50	236,00	227,34	214,57	208,12	-9,06
42	Jumlah Investasi Non Permanen	262,50	236,00	227,34	214,57	208,12	-12,16
43	Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	221.082,67	212.595,08	205.443,45	201.626,98	197.609,09	-1,55
45	Jumlah Investasi Permanen	221.082,67	212.595,08	205.443,45	201.626,98	197.609,09	-1,55
46	Jumlah Investasi Jangka Panjang	221.345,17	212.831,08	205.670,79	201.841,55	197.817,21	-1,57
47	Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Tanah	398.235,75	464.790,07	474.646,10	489.395,64	488.482,31	29,66
49	Peralatan Dan Mesin	226.640,05	260.091,07	293.116,56	334.211,93	394.555,25	15,08
50	Gedung Dan Bangunan	743.366,02	791.820,60	844.342,93	828.499,69	920.201,82	4,70
51	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	1.164.214,57	1.345.629,14	1.481.551,45	1.665.463,20	1.823.269,19	14,53
52	Aset Tetap Lainnya	6.037,53	9.263,12	8.753,19	7.815,51	8.052,81	11,64
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.498,88	23.826,65	43.448,82	54.128,02	12.852,80	13,49
54	Akumulasi Penyusutan	-878.272,16	-1.048.566,47	-1.242.201,51	-1.426.601,17	-1.533.784,21	16,20
55	Jumlah Aset Tetap	1.674.720,64	1.846.854,18	1.903.657,53	1.952.912,81	2.113.629,97	9,92
56	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
57	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	
61	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	19,15	19,15	
62	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	
63	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Aset Tidak Berwujud	366,05	468,69	459,50	1.585,41	2.692,60	141,26
65	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00	0,00	-907,69	-1.389,56	
66	Aset Non Lancar Lainnya	179,19	200,19	14,33	0,00	0,00	
66	Aset Lain-Lain	71.544,69	35.700,88	52.543,84	68.082,28	62.272,79	45,40
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-16.439,20	-16.553,92	-30.869,94	-45.119,63	-41.788,40	
68	Jumlah Aset Lainnya	55.650,72	19.844,19	22.147,73	23.670,26	21.806,58	17,14
69	Total Aset	2.218.171,34	2.209.257,82	2.343.420,75	2.544.439,95	2.545.528,57	9,65
70							
71	Kewajiban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	1,10	19,80	0,00	0,00	0,98	
74	Utang Bunga Denda Dan Commitment Fee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Pendapatan Diterima Dimuka	129,31	176,86	291,44	243,81	103,45	
77	Utang Belanja	1.870,93	8.388,03	12.618,18	9.031,55	3.686,72	71,14
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.565,23	1.275,05	2.558,08	159.121,87	160.285,05	1267,59
79	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.566,57	9.859,74	15.467,70	168.397,22	164.076,19	252,23
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Total Kewajiban	4.566,57	9.859,74	15.467,70	168.397,22	164.076,19	252,23

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Ekuitas	2.213.602,20	2.199.398,08	2.327.953,06	2.376.042,73	2.381.452,38	8,28
88	Ekuitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Total Kewajiban Dan Ekuitas	2.218.168,77	2.209.257,82	2.343.420,75	2.544.439,95	2.545.528,57	9,65

Sumber : BKD Kabupaten Balangan (diolah)

Besarnya dana yang berasal dari utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, yang diukur melalui rasio solvabilitas di Kabupaten Balangan Tahun 2016 sebesar 0,003 : 1 naik menjadi 0,077 : 1 Tahun 2020, mengingat hampir semua kewajiban merupakan kewajiban jangka pendek, maka rasio solvabilitas jangka pendek tahun 2016 sebesar 0,017 : 1 naik menjadi sebesar 0,772 :1 tahun 2020, yang berarti bahwa dalam APBD Kabupaten Balangan aset lancarnya hampir setara dengan kewajiban jangka pendeknya, meskipun demikian jika dilihat dari keselurahan aset maka potensi untuk memenuhi total kewajiban masih sangat besar.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Aktivitas Belanja Daerah di Kabupaten Balangan tahun 2016 dibandingkan tahun 2020, menunjukkan peningkatan pada proporsi belanja operasional sebesar 7,88% dan proporsi belanja tak terduga sebesar 3,02%, sedangkan proporsi belanja modal dan belanja transfer menunjukan penurunan masing-masing -9,87% dan-1,02%. Proporsi Belanja Modal mengalami kecendrungan menurun selama periode tahun 2016-2020, dari 30,16% menjadi 20,29% tahun 2020, hal yang sama juga terjadi pada Belanja Transfer Tahun 2016 porsi Belanja sebesar 15,51% turun menjadi 14,49% Tahun 2020, sedangkan Belanja Operasional dalam belanja daerah menjadi unsur belanja daerah yang terbesar dengan porsi sebesar 54,31% pada tahun 2016 naik menjadi 62,19% pada tahun 2020, dan Belanja Tak Terduga Tahun 2016 sebesar 0,02% naik menjadi 3,03% Tahun 2020.

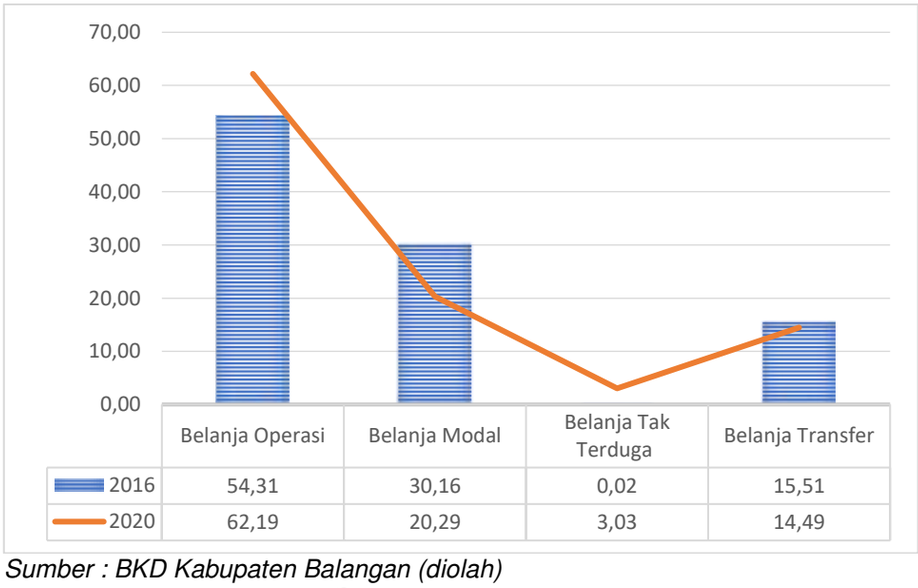

	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer
2016	54,31	30,16	0,02	15,51
2020	62,19	20,29	3,03	14,49

Sumber : BKD Kabupaten Balangan (diolah)

Gambar 3.12.
Porsi Belanja Kabupaten Balangan 2016-2020

Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Balangan terhadap porsi Belanja Operasonal cukup dominan meskipun mengalami kecenderungan menurun selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 dominasi Belanja Pegawai sebesar 53,54% menurun menjadi 45,33% tahun 2020 atau rata-rata menguasai sebesar 45,27% selama periode ini. Sementara itu apabila Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Belanja Kabupaten Balangan, maka dominasi porsi belanja ini selama periode dimaksud berada di kisaran 27,04%. Porsi ini juga mengalami kecendrungan menurun selama periode 2016-2020 dari 29,09% tahun 2016 menjadi 28,18% pada tahun 2020.

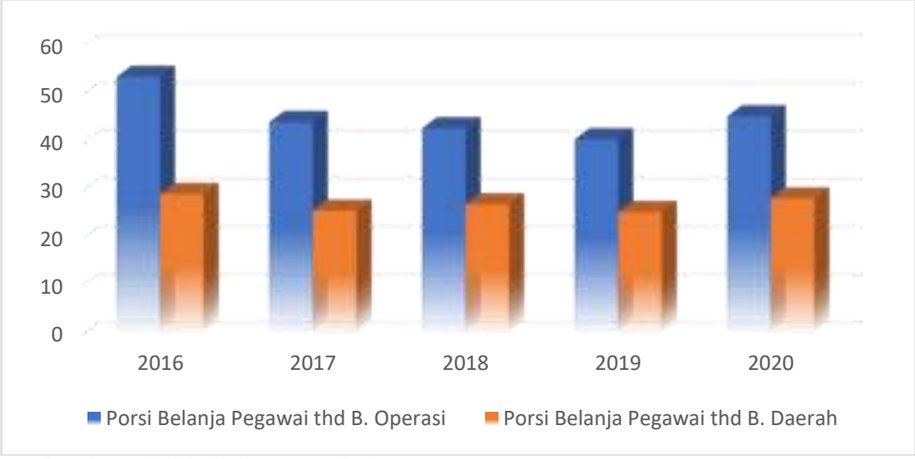

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Gambar 3.13.
Porsi Belanja Pegawai Kabupaten Balangan 2016-2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perhitungan defisit riil diperlukan untuk mengetahui besarnya kekurangan dari penerimaan daerah untuk menutupi belanja daerah, agar menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai. Defisit Riil di Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi variatif artinya ada terjadi defisit tahun 2017 dan 2020, sedangkan tahun lainnya terjadi surplus.

Tabel 3.3.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan (Rp. Miliar)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.330,59	1112,19	1287,17	1514,25	1171,17
2	Realisasi Belanja Daerah	1.139,23	1253,68	1226,76	1356,6	1347,2
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit Riil	191,36	(141,49)	60,41	157,65	(176,03)

Sumber: BKD Kabupaten Balangan (diolah)

Untuk menutup defisit diperlukan perencanaan penganggaran penutup defisit tersebut, penutup defisit di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Balangan

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	99,84	99,99	99,99	99,99	99,996
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	0,16	0,01	0,01	0,01	0,004
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: BKD Kabupaten Balangan (diolah)

Penutup defisit riil di Kabupaten Balangan berdasarkan komposisinya hanya ditutup oleh 2 komponen yakni SiLPA dan Penerimaan Kembali pinjaman kepada perusahaan daerah (Koperasi), yang proporsi terbesarnya bersumber dari SiLPA tahun 2016 sebesar 99,84% dan tahun 2020 naik menjadi 99,996%. Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada table 3.5.

Tabel 3.5.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Balangan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penggunaan SiLPA	49,26	240,70	99,26	159,68	317,25
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	0,08	0,03	0,01	0,01	0,01

Sumber: BKD Kabupaten Balangan (diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periode wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.6. Proyeksi APBD Kabupaten Balangan dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan 5 persen dan 10 persen di tahun 2024 dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2023.
2) Pendapatan Retribusi Daerah mengalami peningkatan 5 persen dan 10 persen di tahun 2024 dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2023.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan 5 persen dan 10 persen di tahun 2024 dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2023.
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar rata-rata 2 persen per tahun.
5) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami peningkatan 10 persen di tahun 2024 dengan dasar perhitungan APBD tahun 2021 (dengan pertimbangan ekonomi akan mulai membaik di tahun 2023, terutama fokus pada kestabilan harga Batubara di pasar global).
6) Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan 3 persen dan 5 persen di tahun 2024, dengan dasar perhitungan APBN 2021 (dengan pertimbangan Ekonomi akan mulai membaik di tahun 2023).
7) Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik dan Non Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan) mengalami peningkatan dengan perkiraan persentase rata-

rata peningkatan 2 persen pertahun, dasar perhitungan adalah tahun 2021.

8) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya mengalami peningkatan dengan perkiraan persentase rata-rata peningkatan 2 persen pertahun dan 5 persen di tahun 2024 dasar perhitungan adalah tahun 2021 (dengan pertimbangan Ekonomi akan mulai membaik di tahun 2023).
9) Pendapatan Lainnya (Dana Desa dan *Lumpsum Payment*) Asumsi dasar perhitungan TA. 2021 dengan adanya penyesuaian besaran TPP.
10) Belanja Hibah Asumsi dasar perhitungan TA. 2021 karena pada tahun 2020 dan 2024 ada Pemilu maka untuk tahun tersebut diluar asumsi rata-rata.
11) Bantuan Sosial Asumsi rata-rata naik 3 persen karena dasar perhitungan Bansos.
12) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 10 persen dari penerimaan pajak dan retribusi Daerah.
13) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (ADD APBD) 10 persen dari Dana perimbangan diluar dari belanja yang diatur secara khusus.
14) Belanja Tidak Terduga (untuk kondisi normal) tidak memperhitungkan adanya Pandemi atau kejadian luar biasa yang mengharuskan penangan secara khusus.
15) Belanja Pegawai pada belanja langsung yang bersifat wajib dan diatur secara khusus.
16) Belanja Modal di asumsikan minimal 25 persen dari APBD.
17) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (Silpa), ditargetkan rata-rata 7 persen.

Pendapatan daerah Kabupaten Balangan berdasarkan berbagai asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,48% untuk periode 2021-2026, pada tahun 2021 sebesar Rp.1.059,56Miliar menjadi Rp.1.383,54Miliar tahun 2026. Belanja daerah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,65% dari Rp.1.130,23Miliar tahun 2021 menjadi 1.480,39Miliar tahun 2026, Selama periode RPJMD ini diproyeksikan APBD Kabupaten Balangan mengalami defisit, pembiayaan untuk menutupi defisit ini diharapkan dari penerimaan kembali penyertaan modal pemerintah daerah.

Tabel 3.6.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2021-2026 Kabupaten Balangan

Kode	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.177.660.512.378,44**	**1.293.572.850.765,33**	**1.355.502.206.377,30**	**1.420.497.588.875,39**	**1.488.712.641.552,45**	**1.560.308.781.137,51**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**83.961.793.282,00**	**82.961.793.282,00**	**87.404.008.519,80**	**92.090.393.937,52**	**97.034.812.500,50**	**102.251.944.406,59**
4.1.01	Pajak Daerah	11.765.022.948,00	11.765.022.948,00	12.647.399.669,10	13.595.954.644,28	14.615.651.242,60	15.711.825.085,80
4.1.02	Retribusi Daerah	1.733.889.000,00	1.733.889.000,00	1.820.583.450,00	1.911.612.622,50	2.007.193.253,63	2.107.552.916,31
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.847.692.278,00	10.847.692.278,00	11.390.076.891,90	11.959.580.736,50	12.557.559.773,32	13.185.437.761,99
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.615.189.056,00	58.615.189.056,00	61.545.948.508,80	64.623.245.934,24	67.854.408.230,95	71.247.128.642,50
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.058.383.470.715,44**	**1.184.843.057.483,33**	**1.242.157.697.857,50**	**1.302.289.882.437,87**	**1.365.379.283.739,45**	**1.431.572.527.785,60**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	983.163.470.715,44	1.107.742.557.483,33	1.163.129.685.357,50	1.221.286.169.625,37	1.282.350.478.106,64	1.346.468.002.011,97
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.220.000.000,00	77.100.500.000,00	79.028.012.500,00	81.003.712.812,50	83.028.805.632,81	85.104.525.773,63
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**35.315.248.381,00**	**25.768.000.000,00**	**25.940.500.000,00**	**26.117.312.500,00**	**26.298.545.312,50**	**26.484.308.945,31**
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.500.000.000,00	6.900.000.000,00	7.072.500.000,00	7.249.312.500,00	7.430.545.312,50	7.616.308.945,31
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.815.248.381,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	**1.318.024.859.857,29**	**1.315.497.008.462,80**	**1.326.917.975.458,82**	**1.359.316.971.758,51**	**1.355.383.929.658,67**	**1.375.236.203.787,55**
5	**BELANJA**						
5.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**854.750.941.165,05**	**834.969.950.272,00**	**843.980.233.773,36**	**861.010.318.692,23**	**843.060.805.285,69**	**846.218.544.312,12**
5.1.01	Belanja Pegawai	395.455.996.937,94	418.628.438.272,00	420.721.580.463,36	422.825.188.365,68	424.939.314.307,51	427.064.010.879,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.415.085.273,11	383.428.262.000,00	385.345.403.310,00	387.272.130.326,55	389.208.490.978,18	391.154.533.433,07
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.304.844.758,00	27.913.250.000,00	32.913.250.000,00	45.913.000.000,00	23.913.000.000,00	23.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.575.014.196,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**258.756.214.498,72**	**277.429.651.906,00**	**278.767.598.053,70**	**289.009.352.461,29**	**301.842.882.089,25**	**315.297.267.886,11**

Kode	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.615.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.068.128.416,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.630.450.665,92	42.047.058.050,00	32.500.000.000,00	33.312.500.000,00	34.145.312.500,00	34.998.945.312,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	168.093.490.416,80	217.700.083.954,00	228.585.088.151,70	240.014.342.559,29	252.015.059.687,25	264.615.812.671,61
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	349.145.000,00	368.806.990,00	368.806.990,00	368.806.990,00	368.806.990,00	368.806.990,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**12.528.852.728,72**	**7.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.528.852.728,72	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**191.988.851.464,80**	**196.097.406.284,80**	**199.170.143.631,76**	**202.297.300.605,00**	**205.480.242.283,73**	**208.720.391.589,32**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.258.814.864,80	2.910.391.294,80	3.085.323.416,91	3.271.208.086,93	3.468.758.377,89	3.678.735.424,89
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	189.730.036.600,00	193.187.014.990,00	196.084.820.214,85	199.026.092.518,07	202.011.483.905,84	205.041.656.164,43
	Jumlah Belanja	**1.318.024.859.857,29**	**1.315.497.008.462,80**	**1.326.917.975.458,82**	**1.359.316.971.758,51**	**1.355.383.929.658,67**	**1.375.236.203.787,55**
	Total Surplus/(Defisit)	**(140.364.347.478,85)**	**(21.924.157.697,47)**	**28.584.230.918,48**	**61.180.617.116,88**	**133.328.711.893,79**	**185.072.577.349,96**
6	**PEMBIAYAAN**	**142.364.347.478,85**	**96.770.151.096,80**	**103.191.118.092,82**	**130.590.114.392,51**	**126.657.072.292,67**	**146.509.346.421,55**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**141.364.347.478,85**	**86.770.151.096,80**	**93.191.118.092,82**	**120.590.114.392,51**	**116.657.072.292,67**	**136.509.346.421,55**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.363.847.478,85	86.770.151.096,80	93.191.118.092,82	120.590.114.392,51	116.657.072.292,67	136.509.346.421,55
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**141.364.347.478,85**	**86.770.151.096,80**	**93.191.118.092,82**	**120.590.114.392,51**	**116.657.072.292,67**	**136.509.346.421,55**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**140.364.347.478,85**	**76.770.151.096,80**	**88.191.118.092,82**	**120.590.114.392,51**	**116.657.072.292,67**	**136.509.346.421,55**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0,00**	**54.845.993.399,33**	**116.775.349.011,30**	**181.770.731.509,39**	**249.985.784.186,45**	**321.581.923.771,51**
	TOTAL APBD	**1.319.024.859.857,29**	**1.325.497.008.462,80**	**1.331.917.975.458,82**	**1.359.316.971.758,51**	**1.355.383.929.658,67**	**1.375.236.203.787,55**

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah**,** diperlukan untuk mengetahui kerangka pendanaan yang tersedia dan untuk mendanai pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan, dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.177.660.512.378,44	1.293.572.850.765,33	1.355.502.206.377,30	1.420.497.588.875,39	1.488.712.641.552,45	1.560.308.781.137,51
2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa lebih riil perhitungan Anggaran	141.363.847.478,85	86.770.151.096,80	93.191.118.092,82	120.590.114.392,51	116.657.072.292,67	136.509.346.421,55
	Total Pendapatan	1.318.024.859.857,29	1.315.497.008.462,80	1.326.917.975.458,82	1.359.316.971.758,51	1.355.383.929.658,67	1.375.236.203.787,55
4	Belanja Operasional	854.750.941.165,05	834.969.950.272,00	843.980.233.773,36	861.010.318.692,23	843.060.805.285,69	846.218.544.312,12
5	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	463.273.918.692,24	480.527.058.190,80	482.937.741.685,46	498.306.653.066,29	512.323.124.372,98	529.017.659.475,43

Sumber : BKD Kabupaten Balangan

Kapasitas riil daerah Kabupaten Balangan menunjukan nilai yang positif yang berarti bahwa ada dana yang tersedia untuk mendanai pembangunan daerah yang secara persentase adalah sebesar rata-rata 36,08% dari total pendapatan yang merupakan sisa dari belanja operasional dan pengeluaran pembiayaan, dengan modal inilah Kabupaten Balangan bisa mendanai berbagai kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karenadampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan lima tahun mendatang.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan disajikan ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan, yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan bidang ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan sosial budaya.

4.1.1 Analisis Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Permasalahan Bidang Infrastruktur

Pemenuhan infrastruktur baik diperdesaan maupun diperkotaan di Kabupaten Balangan masih merupakan tantangan yang harus diselesaikandalam pembangunan daerah ke depan, hal ini didasari pada analisis tingkat pemenuhan infrastruktur wilayah dengan menggunakan metode indeks infrastruktur wilayah.

Hasil perhitungan indeks kualitas infrastruktur wilayah Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur publik dan permukiman (58.24). Rendahnya pemenuhan infrastruktur wilayah ini teridentifikasi dari masih rendahnya konektifitas wilayah dan antar wilayah, belum optimalnya penataan dan pemanfaatan ruang, rendahnya kuantitas dan kualitas saluran pengairan dan irigasi, belum terpenuhinya bangunan gedung pemerintah, rendahnya kualitas perumahan dan permukiman serta belum optimalnya pengelolaan persampahan.

a. Rendahnya konektifitas wilayah dan antar wilayah

   Saat ini permasalahan yang dihadapi Kabupaten Balangan adalah masih rendahnya konektifitas wilayah dan antar wilayah yang dapat dilihat dari rendahnya pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan, dan rendahnya kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat. Jalan yang menghubungkan wilayah dalam kabupaten dengan kondisi mantap tahun 2020 hanya 48,30% atau 324,722 km, sedangkan 74,390 km atau 11,06% kondisinya rusak ringan dan 273,141 km atau 40,63% dalam kondisi rusak berat. Sedangkan jalan (akses) yang menghubungkan antar wilayah Kabupaten Balangan dengan kabupaten berbatasan (Paser, Kotabaru dan HST) masih belum terkoneksi, hal ini merupakan tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan kerjasama, pengembangan wilayah dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah serta persiapan mendukung rencana Ibu Kota Negara (IKN).

   Pengembangan konektifitas antar wilayah ini harus menjadi prioritas, karena apabila dapat terwujud maka Kabupaten Balangan akan menjadi akses alternatif bagi daerah sekitar menuju ke Provinsi Kalimantan Timur maupun ke Kabupaten Kotabaru, khususnya yang berhubungan dengan transportasi laut. Rendahnya kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat dapat dilihat dari minimnya prasarana perlengkapan jalan yang hanya terpenuhi 22,91%, belum optimalnya sarana prasarana dan fungsi terminal angkutan umum dan perparkiran, serta belum adanya desa yang terlayani angkutan trayek di Kabupaten Balangan.

b. Belum optimalnya penataan dan pemanfaatan ruang

   Wajah kota balangan yang belum terbentuk dari sejak berdirinya Kabupaten Balangan hingga saat ini menjadikan Kabupaten Balangan seakan belum memiliki entitas sebagai ibukota kabupaten. Penataan kota yang belum

optimal hingga saat ini merupakan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dengan perencanaan yang matang, agar dapat menjadikan acuan dalam pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penataan Kota Paringin sebagai ibukota Kabupaten Balangan perlu dilaksanakan guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas. Keberadaan sungai yang melintasi Kabupaten Balangan merupakan sebuah asset apabila dimanfaatkan secara optimal.

Pada aspek tata ruang, penegakan tata ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan belum optimal, hal ini disebabkankurangnya ketersediaan informasi rencana detail tata ruang (RDTR) di seluruh kecamatandan masih rendahnya pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Balangan.

c. Rendahnya kuantitas dan kualitas saluran pengairan dan irigasi

   Masih rendahnya jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (21,53%) dan belum selesainya pembangunan jaringan irigasi bendung pitap menjadikan pola tanam di Kabupaten Balangan hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam setahun. Demikian pula dengan masih rendahnya infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten dalam kondisi baik yaitu 11,29%.

d. Belum terpenuhinya bangunan gedung pemerintah

   Masih adanya gedung pemerintah yang menunjang pelayanan masyarakat yang belum selesai dibangun maupun belum terbangun hingga tahun 2020, yaitu bangunan gedung untuk kebutuhan pelayanan masyarakat, pendidikan dan kesehatan dan bangunan gedung perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah yang meliputi pertahanan keamanan dan peradilan.

e. Rendahnya kualitas perumahan dan permukiman

   Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman dapat diidentifikasi dari masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung perumahan dan kawasan permukiman (air bersih layak, sanitasi aman, parasarana sarana utilitas umum perumahan, pengelolaan persampahan, kawasan kumuh) dan masih tingginya rumah tidak layak huni serta masih belum optimalnya cakupan layanan internet.

   Akses air bersih layak pada tahun 2020 baru mencapai 78,65% yang terdiri dari jaringan perpipaan (PDAM dan Pamsimas) dan non jaringan perpipaan,

kondisi ini disebabkan masih belum optimalnya jaringan pipa distribusi PDAM yang menyebabkan tingginya idle capacitydi beberapa wilayah kecamatan serta kurangnya kesadaran dan kemampuan finansial masyarakat dalam penggunaan air bersih yang aman bagi kesehatan.

Permasalahan sanitasi adalah masih adanya masyarakat Kabupaten Balangan yang melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS) yaitu sebesar 4,51% atau 5.719 jiwa dan masih rendahnya akses sanitasi aman yaitu hanya 0,49%. Meskipun persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah dasar dan layak mencapai 91,88%, namun tangka septiknya masih dalam kondisi yang tidak sesuai standar. Peningkatan kualitas akses air limbah aman ini dapat dicapai dengan peningkatan penggunaan septiptank kedap (sesuai standar) serta penyedotan lumpur tinja secara terjadual untuk diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Belum terpenuhinya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman (84,00%) seperti jalan, drainase, persampahan dan penerangan jalan.Disamping itu masih adanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang perlu di tangani, pada tahun 2020 ini muncul lagi kawasan kumuh baru yang meliputi 8 (delapan) lokasi di 3 (tiga) wilayah kecamatan dengan luas 12,354 ha (SK Kumuh tahun 2020), meskipun tidak luas namun perlu kegiatan penanganan serius agar tidak muncul kawasan kumuh baru lainnya. Pada umumnya permasalahan di Kawasan kumuh permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Balangan adalah tidak tersedianya sarana sanitasi yang memadai, kualitas jalan lingkungan dan drainase yang kurang baik, serta kualitas dan jarak antar rumah yang sangat rapat dan tidak teratur sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut.

Belum optimalnya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik di kawasan kumuh maupun di luar Kawasan kumuh, pada tahun 2020 terdata 4.231 unit rumah tidak layak huni atau 9,72% dari 39.896 total unit rumah yang ada di Kabupaten Balangan, Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat karena membutuhkan alokasi pendanaan yang cukup besar.

Selanjutnya permasalahan kualitas perumahan dan permukiman adalah pengelolaan persampahan, hingga tahun 2020 penanganan sampah mencapai 69,90% sedangkan pengurangan sampah masih sangat rendah

yaitu hanya 2,65%. Kondisi ini karena dimasa pandemi covid -19, seluruh bank sampah yang ada tidak berfungsi secara optimal dan juga masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk menerapkan metode Reduce Reuse, Recycle dalam mengurangi volume sampah serta masih kurangnya SDM dalam pengelolaan persampahan.

Hingga saat ini masih terdapat 14 desa di Kabupaten Balangan yang belum terjangkau akses internet, sedangkan kondisi saat ini memaksa masyarakat untuk dapat mengakses internet guna menunjang berbagai informasi di berbagai bidang.

2. Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup

Berdasarkan analisis data, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berada pada angka 68,06, masih dibawah IKLH provinsi Kalimantan Selatan 68,84. Rendahnya IKLH ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu belum efektifnya penataan dan pengendalian dampak lingkungan, belum optimalnya pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati.

a. Belum efektifnya penataan dan pengendalian dampak lingkungan

   Permasalahan penataan dan pengendalian dampak lingkungan dapat dilihat dari masih rendahnya penaatan terhadap dokumen lingkungan dan pengelolaan pengendalian lingkungan hidup (PPLH), kurangnya kegiatan pengendalian lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim dan gas rumah kaca (GRK), masih kurangnya kegiatan konservasi baik air udara dan lahan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta belum optimalnya pemantauan usaha/kegiatan yang berpotensi pencemaran lingkungan.

b. Belum optimalnya pengembangan kapasitas lingkungan hidup

   Permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan kapasitas lingkungan hidup adalah masih rendahnya kegiatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan dan reklamasi kegiatan pasca tambang, masih minimnya uji kualitas air, udara dan lahan yang dilakukan serta masih kurangnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

c. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati

Saat ini pengelolaan keanekaragaman hayati masih sebatas pada penataan dan belum mengarah pada pengembangan dan pembangunan. Luasan RTH publik masih sangat rendah yaknni 3,91% dari target yang syaratkan, yaitu 20% dari luas perkotaan.

Tabel 4.1
Permasalahan Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Balangan	Rendahnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Belum optimalnya Pembangunan dan peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan
		Rendahnya kapasitas dan prasarana transportasi darat
		Belum optimalnya penataan wajah kota
		Belum Optimalnya penegakan tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan
		Rendahnya pembangunan dan peningkatan kualitas saluran pengairan dan irigasi
		Belum terpenuhinya bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan
	Rendahnya kuantitas dankualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rendahnya Akses Sanitasi Aman
		Akses Terhadap Air Bersih masih di bawah 80%
		Masih Terdapat kawasan Permukiman Kumuh
		Belum terpenuhinya PSU perumahan
		Masih Terdapat Rumah Tidak Layak Huni
		Cakupan internet desa belum 100%
Kualitas Lingkungan Hidup Yang Masih Rendah	Kurang efektifnya penataan dan pengendalian dampak lingkungan	Masih rendahnya penaatan terhadap dokumen lingkungan dan PPLH
		kurangnya kegiatan pengendalian lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim dan gas rumah kaca (GRK),
		kurangnya kegiatan konservasi baik air udara dan lahan
		Belum optimalnya pemantauan usaha/kegiatan yang berpotensi pencemaran lingkungan
	Belum optimalnya pengembangan kapasitas lingkungan hidup	rendahnya kegiatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan
		Belum adanya pemantauan reklamasi kegiatan pasca tambang
		masih minimnya uji kualitas air, udara dan lahan
		kurangnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Rendahnya pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)
		Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4.1.2 Analisis Permasalahan Bidang Ekonomi

Data yang disajikan dalam Gambaran Umum pada Bab II mendasari hasil analisis permasalahan bidang perekonomian yang meliputi seluruh sektor ekonomi. Secara Makro Perekonomian Kabupaten Balangan jika dilihat dari postur ekonomi maka corak perekonomian Kabupaten Balangan masih agraris dimana

pada tahun 2019 72,38 % Share PDRB berasal dari sektor komoditas primer. PDRB Kabupaten Balangan masih sangat didukung oleh sektor komoditas pertambangan dan Pertanian yang rentan dengan risiko. Sektor pertambangan dan penggalian bukanlah sektor yang memiliki keberlanjutan jangka panjang, ketika bahan tambang telah habis maka selesai pula kemampuannya untuk menumbuhkan perekonomian.Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. *Share* subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Pada tahun 2019 sub sektor pertambangan menyumbang PDB sebesar 60,24 %.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) rata-rata kontribusi sektor non pertambangan terhadap PDRB kabupaten Balangan 37,76 %. Rendahnya kontribusi sektor non pertambangan disebabkan karena sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri dan pariwisata belum mampu menjadi sektor yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk kabupaten Balangan. Selain itu, investasi yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan sampai saat ini terjadi belum sesuai dengan harapan. Berikut permasalahan dari sektor perekonomian kabupaten Balangan:

1. Pertumbuhan kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Masih Rendah

Berdasarkan data pada BAB II diketahui bahwa proporsi usia petani di Kabupaten Balangan yang paling besar pada kelompok usia 35-54 tahun yaitu 58,19 %, lalu diikuti oleh petani yang berusia > 55 tahun yaitu 22,74 % dan < 34 tahun sebesar 19,07 %. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Balangan karena sebagian besar petani yang aktif bekerja saat ini termasuk golongan yang sudah tua. Dengan demikian, regenerasi petani harus dilakukan dengan segera karena proporsi petani yang berusia muda sangat kecil.Permasalahan kedua dari sektor pertanian adalah luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018, namun jika dilihat dari capaian target pertahun luas panen, produksi dan produktivitas sudah tercapai bahkan melebihi dari target. Produktivitas padi sawah dua tahun terakhir (2018-2019) menurun dari 5,5 ton/ha menjadi 4,4 ton/ha. Hal ini disebabkan oleh, antara lain: petani menanam padi sawah tidak serentak karena jaringan pengairan yang tidak maksimal dan tipologi lahan yang berbeda, kondisi iklim/cuaca dan peningkatan serangan OPT yang berdampak pada produksi dan

produkvitas padi sawah serta proses panen dan pascapanen masih kurang optimal sehingga terjadi kehilangan hasil panen atau padi yang terbuang saat panen maupun saat perontokan.Luas panen, produksi dan produktivitas padi gogo terus meningkat dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) tetapi produktivitas masih rendah yaitu 3,6 ton/ha (Produktivitas nasional 4-6 ton/ha). Hal ini disebabkan, antara lain :pertama, petani masih banyak menanam varietas lokal (karena adanya tradisi masyarakat dayak /kearifan lokal yang harus mereka lestarikan, setiap keluarga masyarakat dayak Balangan memiliki kewajiban menanam variertas lokal tertentu).

Kedua, kondisi wilayah untuk menanam padi gogo sehingga penanaman padi gogo hanya dilakukan 1x setahun (IP 100) dan orientasi petani dalam menanam padi gogo ini sebagian besar hanya untuk konsumsi keluarganya dan pemenuhan kewajiban persembahan saat kegiatan adat dayak (aruh ganal). Ketiga, proses panen dan pascapanen masih kurang optimal sehingga terjadi kehilangan hasil panen atau padi yang terbuang saat panen maupun saat perontokan.Selain padi sawah dan padi gogo, tanaman pangan yang mempunyai potensi besar di Kabupaten Balangan adalah jagung. Luas panen, produksi dan produktivitas jagung dari tahun 2015-2019 terus meningkat. Hal ini dikarenakan petani jagung di Kabupaten Balangan memiliki kepastian pasar sehingga ada kepastian produksi yang dihasilkan akan terjual. Akan tetapi, proses pasca panen jagung belum optimal yaitu sebagian petani masih ada yang menjual dalam bentuk tongkol (harga jual jagung bentuk tongkol lebih rendah dari jagung pipil) dan proses pengeringan kadar air jagung juga belum optimal. Kedua hal ini yang menjadi indikator dalam penentuan harga jual jagung di tingkat petani. Rendahnya produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman obat-obatan di Kabupaten Balangan disebabkan belum optimalnya teknik budidaya dan pemeliharaan baik tanaman hortikultura maupun obat-obatan; kurangnya pengetahuan petani tentang teknik budidaya hortikultura dan obat-obatan, kurangnya minat dan modal dalam budidaya hortikultura dan obat-obatan.

Selain itu masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan, karena petani hanya melaksanakan penanaman, panen dan langsung menjual hasil panen mereka ke pasar atau pengepul dan kurang berminat untuk melakukan pengolahan pasca panenMasih rendahnya pertambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung) seperti sapi, kambing, ayam buras dan itik. Hal ini

dikarenakan ternak di Kabupaten Balangan masih dalam tahap penambahan populasi ternak sehingga ternak tersebut tidak untuk produksi daging.

Selain itu, Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Balangan belum berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada kegiatan pemotongan hewan ternak di Kabupaten Balangan. SDM peternak di Kabupaten Balangan masih tradisional sehingga tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak masih rendah dalam pemeliharaan ternak.Karet adalah komoditas yang paling diunggulkan di Kabupaten Balangan, tetapi harga jual karet masih belum kompetitif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain harga karet sangat dipengaruhi K3 (Kadar Kering Karet) dan timbangannya, sedangkan K3 dan penimbangan ini pada umumnya ditentukan oleh pasar; kurang optimalnya penerapan bokar bersih karena pabrik/ pasar hanya mengedepankan pemenuhan bahan baku. Di Kabupaten Balangan, belum memiliki pabrik pengolahan karet (*Crumb Rubber Factory*) dan industri hilir karet, sehingga petani menjual ke luar wilayah yang dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan karena adanya tambahan biaya angkut. Selain itu,di Kabupaten Balangan, luas lahan tanaman karet yang sudah masuk umur tidak produktif dan rusak hampir 1.300 ha sehingga perlu menjadi perhatian daerah untuk membantu petani karet melakukan peremajaan tanaman karet.Selain karet, di Kabupaten Balangan, masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) tanaman aren sehingga masih rendahnya nilai tambah aren.

2. Permasalahan di Sektor Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan merupakan Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya dari hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*/FSVA) di Kabupaten Balangan tahun 2020 terdapat 29 desa dari 156 desa dan kelurahan (18,58%) yang termasuk desa rentan pangan (pada prioritas 1 – 3) dengan rincian; 5 desa dalam prioritas 1 (rentan tinggi), 11 desa prioritas 2 (rentan sedang) dan 13 desa prioritas 3 (rentan rendah). Sehingga dapat teridentifikasi beberapa permasalahan pangan antara lain:

a. Belum meratanya ketersediaan, konsumsi dan akses pangan. Hal tersebut disebabkan karena tingginya ketergantungan pangan beras dibandingkan pangan utama lainnya, proporsi konsumsi karbohidrat melebihi standar dan belum diimbangi dengan proporsi konsumsi pangan protein dan lemak;
b. Keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan;
c. Belum tersedianya sentra pemasaran hasil produksi pangan sehingga banyaknya hasil pangan dijual keluar daerah/luar kabupaten;
d. Kurang optimalnya diversifikasi pangan;
e. Terbatasnya SDM tenaga pemantau ketersediaan pangan dan sarana prasarananya;
f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan
g. Masih adanya desa rawan pangan yang dipengaruhi oleh belum optimalnya akses pendukung ketahanan pangan;
h. Masih terbatasnya ketersediaan teknologi pangan olahan;
i. Masih terbatasnya ketersediaan beberapa jenis bahan pangan yang menyebabkan harga bahan pangan sangat berfluktuatif.

3. Permasalahan di Sektor Perdagangan

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Rata-rata kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten Balangan selama periode 2015-2019 adalah sebesar 5,32 persen. Dalam RPJMD kabupaten Balangan 2015 – 2019 sektor perdagangan sudah dijadikan target untuk ditingkatkan kontribusinya pada PDRB yaitu sebesar 6,51 % ditahun 2021. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.Permasalahan yang terjadi pada sektor perdagangan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang saat ini tersedia di Kabupaten Balangan. Sampai saat ini Kabupaten Balangan belum memiliki Pasar Induk yang berfungsi sebagai sarana pemasaran hasil perkebunan, pertanian dan perikanan penduduk kabupaten Balangan. Terdapat 11 pasar Pemerintah Kabupaten Balangan yang tersebar di beberapa kecamatan. Tiga diantara merupakan pasar utama yaitu, pusat pertokoan Paringin, Pasar

Samping Abdullah S. Lewan dan Pasar Modern Adaro. Rata-rata kondisi pasar yang ada perlu perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, perlunya peningkatan kunjungan masyarakat ke Pasar tradisional. Saat ini hanya beberapa pasar saja yang dibuka tiap hari, sisanya pasar hanya dibuka 1 minggu sekali.

4. Permasalahan di sektor Industri

Selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2015 – 2019, sektor Industri rata-rata memberi kontribusi sebesar 1,90 %. Tahun 2019 sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 1,94 % dari PDRB dengan Pertambangan atau sebesar 4,88% tanpa Pertambangan. Padahal sektor Industri juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat menganti peran sektor Pertambangan di masa mendatang. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan peran sektor industri terlihat dari adanya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Balangan No 8 tahun 2019 mengenai Rencana Pembangunan Industri yang merupakan Rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan Industri Kabupaten Balangan. Dalam RPIK dijelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan adalah tumbuh dan berkembangnya industry yang berbasis sumber daya Lokal dan menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi. Dalam RPIK sendiri dibuat sasaran pembangunan industri salah satunya adalah peran sektor industri terhadap PDRB ditahun 2019 sebesar 4,1 % atau 16,3 % tanpa Pertambangan.

Namun sampai saat ini sasarannya belum memenuhi target. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri antara lain disebabkan karena belum adanya pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis SDA, kualitas SDM Industri yang dimiliki terutama penguasaan teknologi belum optimal, dan belum tersedianya sarana-dan prasarana industri (Kawasan Industri) yang dapat menarik minat investor.Permasalahan lainnya di sektor Industri adalah dari 5.124 usaha Industri yang ada di Kabupaten Balangan hanya 31 yang kategori industri menengah, 255 usaha kecil dan sisanya 4.838 adalah Industri mikro. Kelemahan dari Industri Mikro adalah akses permodalan ke lembaga keuangan sangat rendah demikian juga dengan akses pemasaran (Akses dan volume Pemasaran). Dimasa pandemi COVID 19 sektor UMKM seharusnya menjadi perhatian Pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk mengurangi beban masyarakat dan tingkat pengangguran. Koperasi yang menjadi andalan Usaha Mikro untuk menyediakan

permodalan dari tahun ketahun mengalami penurunan volume Usaha akibat banyaknya kredit macet.

5. Permasalahan di sektor Pariwisata

Sektor pariwisata sesungguhnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Kabupaten Balangan memiliki cukup banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Setiap objek wisata memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada yang termasuk kategori wisata religi, wisata alam, wisata kuliner, wisata minat khusus, ataupun situs sejarah/budaya. Namun demikian hingga saat ini tingkat kunjungan wisata ke Balangan masih relatif rendah. Berdasar data dilihat bahwa pertumbuhan kunjungan wisata telah cukup baik, namun demikian dilihat dari jumlahnya masih cukup kecil. Sebagian besar wisatawan merupakan wisatawan Lokal sedangkan minat wisatawan Mancanegara untuk berkunjung masih sangat rendah. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan sebesar 20.139 orang. Jika di rata rata dalam sehari kunjungan wisatawan hanya sekitar 55 orang saja. Tingkat kunjungan yang rendah berkaitan dengan belum dikelolanya sarana dan prasarana bidang pariwisata. Cukup banyak destinasi yang dimiliki, namun pengelolaannya belum mampu menarik wisatawan. Jika dikelola dengan baik maka industri Pariwisata mampu meningkat PAD dengan retribusi dan meningkatkan nilai PDRB dari sisi Perhotelan, makanan dan minuman bahkan industri pengolahan. Promosi pariwisata yang dilakukan juga belum efektif untuk mendatangkan wisatawan. Akibat dari belum berkembangnya pariwisata maka aktivitas ekonomi lokal yang berkaitan dengan pariwisata, misalnya permintaan terhadap produk lokal, dalam hal ini hasil industri pengolahan berbahan baku lokal (ekonomi kreatif) juga rendah.

6. Permasalahan Investasi Daerah Kabupaten Balangan

Permasalahan dibidang perekonomian lainnya adalah tingkat investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Balangan. Berdasarkan data dari Bab dua sebelumnya diketahui bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir sangat berfluktuasi. Tahun 2018 merupakan tahun dimana tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Balangan cukup tinggi, namun mengalami penurunan sebesar -36,56 ditahun 2019. Investasi yang berkualitas seharusnya memberikan dampak bagi kesejahteraan penduduk dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan. Investor sebaiknya

diarahkan untuk berinvestasi pada sektor dengan keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi yang akan menciptakan *multiplier* yang besar bagi perekonomian. Hingga saat ini aktivitas investasi di kabupaten Balangan tercatat mengarah ke dua sektor utama yakni Sektor Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). Sebagaimana di uraikan di atas kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multipliernya rendah).

Selain permasalahan kualitas investasi, permasalahan lainnya yang ada di bidang investasi adalah permasalahan kepastian hukum dan kemudahan perijinan. Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi di Kabupaten Balangan yang menyebabkan investor masih ragu jika berinvestasi di Kabupaten Balangan karena tidak adanya kepastian hukum. Untuk perijinan sendiri, hampir sebagian besar tidak ada biaya perijinan dan jangka waktu pembuatan perijinan maksimal lima hari, tergantung dari dinas teknisnya. Permasalahan berikutnya adalah Pemerintah Kabupaten Balangan Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka DPMPTSP perlu membuat Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Tabel 4.2.
Permasalahan Pembangunan Ekonomi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya dan kurang berkembangnya sektor ekonomi non tambang (ekonomi lokal)	Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian dan Perikanan masih rendah	Rendahnya regenerasi petani dari Petani tua ke Petani muda
		Menurunnya luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah
		Peningkatan Luas panen dan produksi padi gogo tetapi produktivitas masih lebih rendah dibanding padi sawah
		Rendahnya produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman obat-obatan di Kabupaten Balangan
		Rendahnya pertambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung) seperti sapi, kambing, ayam buras dan itik
		Harga jual karet masih belum kompetitif

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Jumlah dan Luas lahan tanaman karet yang sudah masuk umur tidak produktif sangat tinggi
		Rendahnya kualitas SDM (Pengetahuan dan Keterampilan) petani dan Peternak
		Penggunaan Teknologi tepat guna untuk bidang pertanian dan peternakan masih rendah
		Proses pasca panen jagung belum optimal membuat harga jagung masih rendah
	Ketersediaan pangan Yang Fluktuatif dan Infrastruktur Yang Rendah	Belum meratanya ketersediaan, konsumsi dan akses pangan
		Keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan
		Belum tersedianya sentra pemasaran hasil produksi pangan sehingga banyaknya hasil pangan dijual keluar daerah/luar kabupaten
		Kurang optimalnya diversifikasi pangan
		Terbatasnya SDM tenaga pemantau ketersediaan pangan dan sarana prasarananya
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan
		Masih adanya desa rawan pangan yang dipengaruhi oleh belum optimalnya akses pendukung ketahanan pangan
		Masih terbatasnya ketersediaan teknologi pangan olahan
		Masih terbatasnya ketersediaan beberapa jenis bahan pangan
	Peran Sektor Perdagangan Belum optimal	kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang saat ini tersedia di Kabupaten Balangan
		Belum tersedianya pasar agro sebagai sarana pemasaran Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Balangan
	Sektor Industri belum Memberikan Kontribusi Yang Besar Bagi PDRB Kabupaten Balangan	Pengembangan Sektor Industri saat ini belum berpedoman pada RPIK yang sudah ada
		belum adanya pengembangan/Pembangunan industri hulu dan industri antara berbasis SDA
		kualitas SDM Industri yang dimiliki terutama penguasaan teknologi belum optimal
		belum tersedianya sarana-dan prasarana industri (Kawasan Industri) yang dapat menarik minat investor.
		Lebih Banyak Usaha Mikro dibandingkan Usaha Kecil dan Menengah
		Akses Permodalan Kelembaga Keuangan masih rendah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Pemasaran Produk belum optimal
		Penurunan Volume Usaha Koperasi akibat adanya kredit macet
	Belum Berkembangkan Potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Balangan	Minat Wisatawan untuk berkunjung ke lokasi Pariwisata di Kabupaten Balangan Rendah rata-rata 55 wisatawan per hari
		Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Balangan (Akses Jalan,Pemeliharaan obyek wisata, Akomodasi dll)
		Belum Optimalnya Promosi yang dilakukan untuk menarik minat Pengunjung
	Pertumbuhan Investasi yang Berfluktuasi dan Kualitas Investasi yang belum optimal	Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multipliernya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
		belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi (Kepastian Hukum Investasi)
		Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing
		Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

4.1.3. Permasalahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan angka IPM yang dicapai, hingga saat ini IPM Kabupaten Balangan mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPM Propinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Balangan masih rendah baik dibidang pendidikan dan kesehatan. Permasalahan dibidang Pendidikan dan kesehatan diantaranya adalah belum terwujudnya SDM, sarana prasarana, fasilitas pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang kurang berkualitas

sehingga mengharuskan daerah harus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan. Penjabaran permasalahan dibidang pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Pendidikan.

Permasalahan di bidang pendidikan adalah kurangnya kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan yang disebabkan oleh beberapa factor yaitu :

a. Angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah masih rendah. Pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah Kabupaten Balangan adalah 12,46, Ini berarti secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,46 tahun (sekitar kelas 3 SLTA). Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2020 sebesar 7,55 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP/sederajat atau masih belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan masih dibawah angka Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai berdampak pada angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni, juga angka putus sekolah. Masih terdapat desa yang belum memiliki PAUD dan masih adanya kesulitan akses menuju sekolah pada desa terpencil.
c. Belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata.
d. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada tahun 2020 untuk guru TK/PAUD adalah 74,36%, guru SD adalah79,39% dan guru SMP adalah 96,04%.
e. Masih adanya angka putus sekolah. Beberapa kasus putus sekolah terjadi didaerah terpencil disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut bekerja/berkebun membantu orang tua, sedangkan kebunnya selalu berpindah atau tidak menetap.
f. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
g. Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun.
h. Belum optimalnya pendidikan kesetaraandalam melayani masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh masih

sedikitnya program kelompok belajar serta masih kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

2. Permasalahan Bidang kesehatan.

Permasalahan di bidang kesehatan adalah kurangnya kualitas kesehatan di Kabupaten Balangan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Usia harapan hidup masih rendah. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Balangan adalah 67,72 tahun, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana UHH pada tahun 2019 hanya sebesar 67,59 tahun,namun angka ini masih lebih rendah dibanding angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang mencapai 68,66 tahun.
b. Tingginya Angka Kematian Ibu dan angka kematian bayi. Kematian ibu merupakan isu nasional dan menjadi target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). AKI di tahun 2020 sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 2 orang. Pada tahun 2020 angka kematian bayi adalah sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 15 bayi.
c. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang. Beberapa permasalahan terkait sarana dan prasarana adalah :
    1) Masih terdapat desa yang belum memiliki poskesdes.
    2) Kurangnya puskesmas yang mampu PONED serta kurangnya Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terutama untuk daerah terpencil yang aksesnya jauh dari RSUD.
    3) Kurangnya peralatan di puskesmas dan poskesdes.
    4) Bangunan, luas ruangan serta sarana prasarana RSUD belum memenuhi standar.
d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian SPM kesehatan masih rendah.
e. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masih kurangnya dokter serta tenaga kesehatan lainnya termasuk masih adanya desa yang belum memiliki bidan.
f. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pada tahun 2020 cakupan rumahtangga berperilaku hidup bersih dan sehat baru sebesar 43%.
g. Tingginya prevalensi stunting. Berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik–pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E- PPGBM)

Balita pendek dan sangat pendek tahun 2020 sebesar 25.7 %, dari 8536 balita yang di entry di aplikasi E-PPGBM terdapat 2.201 balita yang pendek dan sangat pendek, hal ini memberikan gambaran masalah gizi yang bersifat kronis. Beberapa faktor risiko yang menyebabkan tingginya stunting antara lain petugas puskesmas yang menangani stunting masih merangkap dengan tugas lain,masyarakat belum mengetahui frekuensi minimal pemeriksaan kesehatan pemantauan tumbuh kembang,pelayanan kesehatan balita masih kurang, sarana dan prasarana masih ada yang belum memadai, pernikahan dini yang tinggi, pola makan kurang baik dan pengadaan sumber pangan masih kurang.

h. Pandemi covid-19. Situasi pandemic mengakibatkan terjadi penurunan kunjungan masyarakat ke fasilitas dan penurunan kunjungan petugas ke masyarakat serta terjadi perubahan mekanisme pelayanan.

i. Tingginya angka kelahiran remaja.Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) pada tahun 2020 adalah sebesar 24,71, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 23,37. Tingginya angka kelahiran remaja disebabkan oleh tingginya pernikahan usia anak.

Tabel 4.3.
Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kualitas SDM	Kualitas Pendidikan rendah	Rendahnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai
		Belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata.
		Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang
		Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan
		Masih adanya angka putus sekolah
		Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun
		Belum optimalnya pendidikan kesetaraan

	Derajat Kesehatan rendah	Usia harapan hidup masih rendah
		Masih tingginya AKI dan AKB
		sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar
		Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan
		Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
		Tingginya prevalensi stunting
		Covid 19 masih meningkat
		Tingginya angka kelahiran remaja

4.1.3 Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Globalisasi yang berkembang begitu pesat memengaruhi berbagai bidang kehidupan, salah satunya menyentuh bidang pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perencanaan terhadap perubahan. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkan adalah mengubah tata kehidupan dan penghidupan masyarakat ke status yang lebih baik dari sebelumnya.

Tata Kelola Pemerintahan menurut UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi,politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata kelola pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan organisasi/ lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Dalam proses pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Transparansi artinya adanya keterbukaan dari pemerintah terkait berbagai kebijakan/ program/kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan kepada publik. Begitu pula data dan informasi kegiatan pemerintahan dapat diakses oleh publik. Partisipasi artinya masyarakat dilibatkan secara aktif baik dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan. Masyarakat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pembangunan daerah.Sedangkan

akuntabilitas artinya pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan seluruh amanah yang diberikan publik dalam mengelola berbagai urusan publik dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara.Prinsip akuntabilitas ini dapat direpresentasikan dengan pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan urusan publk melalui laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Salah satu isu utama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah reformasi birokrasi.Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi ini dilakukan sebagai respon istematis dan komprehensif atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemeritahan daerah, sertameningkatkan kinerjanya. Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* Tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia IRB Kabupaten Balangan dengan perolehan nilai Indeks Reformsi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 sebesar 53,80 atau kategori CC dengan rincian total pengungkit 23,73 dan total komponen hasil 53,80, sedangkan tahun 2019 sebesar 51,84 atau kategori CC dengan rincian total komponen pengungkit (A) 20,35 dan total komponen hasil (B) 31,49. Walaupun angka ini mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2019 namun pencapaian IRB di Kabupaten balangan masih rendah.

Berdasar hasil penilaian tersebut, apabila dicermati lebih detail pada seluruh komponen penilaian, maka terdapat beberapa aspek yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Diantaranya adalah untuk manajemen perubahan belum optimal, penguatan peraturan perundang-undangan belum optimal, penataan penguatan organisasi/kelembagaan belum optimal, penguatan tatalaksana belum optimal, penataan sistem manajemen SDM-ASN belum optimal, penguatan akuntabilitas masih belum optimal, penguatan pengawasan belum optimal dan pelayanan publik yang belum optimal.

1. Manajemen perubahan belum optimal

Internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan oleh tim reformasi birokrasi belum secara optimal dilakukan keseluruh perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa perangkat daerah pada umumnya belum memahami dan bahkan belum mengimplementasikan penataan sebagaimana yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi. Hal ini mengakibatkan perubahan pola pikir dan dan budaya kerja diseluruh jajaran belum dapat dirasakan yang pada hakekatnya merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Terkait hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 tanggal 31 maret 2021 bahwa Kabupaten Balangan belum sepenuhnya penetapan *agen* perubahan didasarkan pada kebutuhan organisasi sehingga *agen* perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal.

1. Penguatan peraturan perundang-undangan belum optimal

Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan memberikan pelayanan. Di Kabupaten Balangan terkait penguatan peraturan perundang-undangan belum optimal dikarenakan faktor belum optimalnya SKPD terkait dalam mengidentifikasi produk hukum yang harus direvisi atau dideregulasi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada bupati, belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada bupati.

2. Penataan penguatan organisasi/kelembagaan belum optimal

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintahan yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal

dalam transformasi kelembagaan pemerintahan selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada siding paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua livel dan mengalihkan struktural dibawah dua livel tersebut menjadi jabatan fungsional. Terkait hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 tanggal 31 maret 2021 bahwa Kabupaten Balangan belum menerapkan secara menyeluruh tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 sampai dengan 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis Dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

3. Penguatan tatalaksana belum optimal

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Arsitektur SPBE nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memenfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indeks SPBE di Kabupaten Balangan tahun 2020 belum ada, sedangkan tahun 2019 adalah 1,82 dengan predikat SPBE cukup dengan rincian untuk domain 1 (kebijakan internal) SPBE 1,41, domain 2 (tata kelola SPBE) 1,00, domain 3 (layanan SPBE) 2,36. Belum optimalnya capaian SPBE di Kabupaten Balangan hingga tahun 2019 ada bebara faktor yang menghambat capaian

tersebut antara lain belum disahkannya Perda *E-Government,* belum terintegrasinya data penerapan *E-Government* di SKPD, kurangnya SDM E-Government yang berbasis TIK, terutama programer dan admin, kurangnya program dan aplikasi penunjang *E-Goverment* dan belum tersedianya anggaran yang memadai sehingga hal ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

4. Penataan sistem manajemen SDM-ASN belum optimal

Kementerian/lembaga/pemerintahan daerah dituntut untuk melaksanakan sistem merit sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisai yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Untuk mewujudkan ASN yang bersih, kompoten, dan melayani, setiap ASN wajib memiliki standar nilai kompetensi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural (bagi PPPK) agar sesuai dengan tuntutan jabatan dan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sistem merit, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2014, adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kecacatan. Sistem merit merupakan suatu bentuk apresiasi dari instansi kepada ASN atas hasil kerja yang baik dan memuaskan. Sistem ini dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat perilaku *nepotisme* dan *spoils system* dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Adapun prinsip dari sistem merit antara lain perencanaan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, tujuan perekrutan adalah mencari talenta terbaik. pengembangan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja, penilaian kerja berkelanjutan, promosi yang dinamis, apresiasi layak melalui sistem pensiun dan sistem kompensasi. Berdasarkan penilaian mandiri sistem merit di Kabupaten Balangan tahun 2020 dengan nilai 257 atau dengan kategori baik karena berada direntang 250-324. Walaupun sudah berada dikatagori baik namun pencapaian belumlah optimal hingga kategori sangat baik dengan nilai rentang 325-400. Kategori baik menggambarkan perlunya diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* dengan persyaratan tertentu dan pengawasan untuk mengatasi terjadinya *spoil system.*

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas SDM Aparatur di Kabupaten Balangan selain merit sistem adalah Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN). Indeks tersebut menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 bahwa komposisi persentase tiap dimensi dalam pengukuran IP-ASN adalah kualifikasi pendidikan (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), kedisiplinan (5%). Sedangkan untuk rentang (*range*) nilai dalam pengkategorian IP-ASN terbagi dalam sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (di bawah 60).

Berdasarkan hasil pengukuran, IP-ASN Kabupaten Balangan pada tahun 2019 adalah 62,35% dan mengalami peningkatan menjadi 67,06% pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IP-ASN Kabupaten Balangan walaupun terjadi peningkatan namun masih termasuk dalam kategori rendah. Dimensi kompetensi menjadi salah satu kontributor yang menyebabkan rendahnya IP-ASN Kabupaten Balangan. Dimensi tersebut memiliki capaian 19,75% pada tahun 2019 atau termasuk kategori sangat rendah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 24,05%, namun masih termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya capaian dimensi kompetensi tersebut menjadi pertanda adanya masalah dalam pengembangan kompetensi SDM aparatur yang ditempuh pemerintah daerah selama ini. Sementara Pengembangan SDM aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor yang berkesesuaian dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 70 ayat (1) dan (2) menyatakan dengan tegas bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dilakukan antara lain melalui melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 203 ayat (4) secara tersurat menegaskan hak pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun. Perintah peraturan perundangan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap jenjang pemerintahan, tidak terkecuali di tingkat pusat maupun daerah.

Pengembangan kompetensi pegawai dijadikan sebagai dasar pengembangan karir dan salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. Berdasarkan norma tersebut, karir seorang pegawai ASN dan pengangkatannya dalam suatu jabatan harus didasari atas pemenuhan kompetensi yang ditentukan

peraturan perundangan dan kebutuhan organisasi. Kompetensi dimaksud meliputi teknis/fungsional, manajerial, dan sosial cultural, sehingga keberadaan rencana pengembangan SDM aparatur yang jelas, terukur, dan terarah semakin menemukan urgensinya.

5. Penguatan akuntabilitas masih belum optimal

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terus mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diseluruh kementerian/lembaga/pemerintahan daerah. Kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah direpresentasikan dengan penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) dan hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berdasarkan penilaian Kementerian PAN RB menunjukkan bahwa penilaian evaluasi AKIP yang diperoleh Kabupaten Balangan dari tahun ketahun mengalami peningkatan nilai dan kategori. Capaian pada tahun 2016 adalah 55,63 (CC) dan tahun 2020 66,04 (B). Walaupun terjadi peningkatan capaian dari tahun ketahun namun capaian tersebut belumlah optimal karena masih kategori B. Capaian evaluasi AKIP ini berbanding terbalik dari audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dimana selama kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir dari tahun 2013-2020 selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akutansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prisip akutansi yang berlaku dan konsisten. Dari kedua penilaian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan yang sudah baik belum dapat diimbangi dengan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah, sehingga terjadi perbedaan penilaian yang bertolak belakang diantara kedua aspek tersebut

6. Penguatan pengawasan belum optimal

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi, maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara.

Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada posisi level 3 dengan nilai 3,023 atau terdefinisi. Level Maturitas tersebut merupakan hasil QA (*Quality Assurance*) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan oleh BPKP Pusat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pelaksanaan QA atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah oleh BPKP minimal 3 tahun sekali. Dalam rangka penguatan Implementasi SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari BPKP perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan hasil penjaminan mutu hasil QA pada tahun 2020 Inspektorat Balangan telah melaksanakan Asistensi Penyusunan Profil Risiko seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

7. Pelayanan publik belum optimal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Belum optimalnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah akan menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat dan mempengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam perolehan pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM Kabupaten Balangan untuk tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu terjadi penurunan sebesar 2,24 atau dari 84,59 menjadi 82,35 dengan kualitas mutu B. Terkait IKM tersebut didapatkan dari rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di 30 SKPD. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dari 30 SKPD tersebut didapatkan nilai IKM terendah pada Dinas Sosial sebesar 72,50 dengan kualitas mutu C, sedangkan nilai IKM tertinggi di Puskesmas Uren dan Kecamatan Tebing Tinggi dengan nilai 94,13 dengan kualitas mutu A. Nilai IKM ini didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan di 30 SKPD dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB no 14 Tahun 2017.

Adapun secara rata–rata dari hasil penilaian dari beberapa penyelenggara unit layanan yang mendapatkan hasil terendah berada pada unsur pelayanan U-9 yakni sarana dan prasarana dengan capaian 2,71. Rendahnya unsur pelayanan U-9 hal ini menggambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik masih perlu ditingkatkan dengan memperbaiki/mengembangkan fasilitas-fasilitas yan dimiliki sebagi upaya tetap menyediakan layanan yang baik pada masyarakat ditengah kondisi keuangan daerah yang menurun akibat pendapatan daerah yang menurun dan adanya rasionalisasi anggaran akibat wabah corona, dan untuk unsur pelayanan yang sudah baik diupayakan agar tetap dapat dipertahankan. Unsur lain lain yang mendapatkan hasil penilaian rendah adalah waktu penyelesaian dan prilaku pelaksana sehingga hal ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan dengan memperbaiki/ revisi SOP, standar pelayanan terkait waktu pelayanan, sedangkan untuk perilaku pelayanan agar memberikan bimbinga teknis tentang etika pelayanan, seperti menerapkan 3S (Senyum, Salam dan Sapa).

Secara rinci gambaran permasalahan tata kelola pemerintahan terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.4.
Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Tim reformasi birokrasi/kelompok

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Manajemen Perubahan Belum Optimal	kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal
		Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan
		Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal
		Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan output/outcome untuk kepentingan publik
		Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya
	Penguatan Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengidentifikasi Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati
		Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati
	Penataan Penguatan Organisasi/Kelembagaan Belum Optimal	Ada beberapa SKPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPD yang tugas fungsinya tumpang tindih
		Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan
		Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan
		Standard Operating Procedure(SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
		Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
		Belum optimalnya pengembangan *e-government*
		Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Penguatan Tatalaksana Belum Optimal	
	Penataan Sistem Manajemen SDM-ASN Belum Optimal	Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun
		Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur
		Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan
		Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal
		Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
		Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan
		Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal
		Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang
		Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal
		Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja
		Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya
		Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD
		Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya
		Belum sempurnanya casscading kinerja (pohokinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu)

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Penguatan Akuntabilitas Masih Belum Optimal	memiliki kontribusi yang jelas “siapa melakukan apa” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan
		Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD
	Penguatan Pengawasan Belum Optimal	Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal
		Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal
		Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	Pelayanan Publik Belum Optimal	Belum adanya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik
		Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik
		Kompetensi petugas pelayanan belum merata
		Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik
		Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

4.1.4 Permasalahan Bidang Sosial Budaya

1. Permasalahan Bidang Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), ialah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan

pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos No. 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jumlah PPKS di Balangan 47.523 PPKS meliputi sembilan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu Fakir Miskin, Anak Terlantar, Anak Berlawanan dengan Hukum, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pada tahun 2017 persentase PPKS yang memperoleh bantuan sebesar 28,28%, pada tahun 2018 sebesar 14,10%, pada tahun 2019 sebesar 65,48% dan pada tahun 2020 sebesar 40,95%.

Pada data tersebut terjadi kenaikan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan di tahun 2019 yakni sebesar 65,48%. Namun terjadi penurunan di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2020 merupakan awal pandemi Covid 19 terjadi di Indonesia, sehingga dampak tidak hanya terkait dengan keterbatasan pelayanan sosial berjalan kurang maksimal, terkait pergeseran anggaran untuk penanganan Covid 19 juga berpengaruh. Sehingga dari 47.523 PPKS, yang belum terlayani karena dampak Covid 19 sejumlah 28.062 PPKS. Terkait keterbatasan anggaran juga berdampak pada belum terpenuhinya jumlah pendamping sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang masih belum seimbang dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Balangan.

2. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat ditentukan melalui Indeks Desa Membangun yang merupakan indeks komposit dengan komposisi diantaranya (1) Indeks Ketahanan Sosial; (2) Indeks Ketahanan Ekonomi; serta (3) Indeks Ketahanan Lingkungan. Permasalahan yang ada dalam Indeks Ketahanan Sosial yaitu masih belum tersalurnya jaringan internet merata ke desa-desa, sehingga belum terlaksananya layanan internet desa. Kemudian berkaitan dengan Indeks Ketahanan Ekonomi, BUMDes merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah masyarakat desa untuk berkembang juga membangun desa dengan sistem berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini masih terkendala dari sisi peluang usaha yang tepat dan cocok untuk masing-masing desa.

Kemudian tenaga pendamping desa yang masih belum seimbang dengan

jumlah desa yang ada di Balangan, hal ini berkaitan dengan fokus yang diampu masing-masing pendamping. Harapannya, apabila jumlah pendamping desa terpenuhi maka fokus pencapaian pembangunan desa akan lebih optimal. Terkait dengan Indeks Ketahanan Lingkungan yang salah satunya, masyarakat memiliki kesigapan atau tanggap terhadap bencana. Mengasah masyarakat untuk sadar dan tanggap bencana masih kurang terlaksana maksimal, masyarakat hanya mendapatkan sosialisasi melalui program SKPD terkait. Perlu dioptimalisasi kembali *sense* masyarakat mengenai tanggap bencana yang sangat erat hubungannya dengan mitigasi bencana.

3. Permasalahan di Bidang Kebudayaan

Budaya sebagai suatu identitas masyarakat memiliki urgensi yang selayaknya dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya. Seperti yang telah dipaparkan pada Bab II sebelumnya, penyelenggaraan festival kesenian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 mencapai angka 17 festival yang telah diadakan, namun pada tahun 2020 hanya satu festival yang telah diadakan. Hal ini terkait dengan pandemic yang terjadi di Indonesia juga di Balangan pada 2020. Sehingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan resiko peningkatan kasus terpaksa ditunda. Sementara pada kegiatan pelestarian budaya bersifat benda, mengalami kendala yakni belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan di lapangan.

4. Permasalahan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki keterkaitan terhadap keamanan penduduk, situasi daerah yang kondusif, dan stabilitas daerah. Dari sisi ketentraman dan ketertiban umum, terdapat beberapa hal yang diukur. Yakni melalui angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mana apabila keduanya menurun mengarah ke hasil positif, serta kondisi daerah cenderung kondusif. Capaian Indikator angka pelanggaran Trantibmas Tahun 2020 sebesar 176,80% (LKIP Kabupaten Balangan, 2020). Tingkat pelanggaran pada tahun 2020 sejumlah 29 angka pelanggaran Perda dari target 125 angka pelanggaran, dengan persentase penegakan Perda 100% merupakan capaian yang positif dengan peringkat Sangat Tinggi. Capaian Angka

Konflik Sosial Bernuansa SARA pada tahun 2020 sebesar 100% dengan Angka Konflik nol. Keduanya sudah mencapai hasil yang baik, namun sangat perlu untuk dipertahankan. Hal ini menjadi penting, karena potensi konflik bernuansa sara bisa terjadi kapan saja. Capaian cakupan layanan bencana kebakaran pada tahun 2019 189 Desa, sementara tahun 2020 sejumlah 61 Desa. Antara tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 61 Desa yang mendapatkan pelayanan. Seperti pada pemaparan Bab II sebelumnya, penurunan tersebut terkait dengan adanya Perda tentang larangan pembakaran lahan sembarangan. Meskipun angka kejadian telah mengalami penurunan, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh tim TRC selaku tim lapangan bagian dari BPBD yang bertugas di lapangan. Diantaranya titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang jauh dari jangkauan dan masih kurangnya alat penunjang keselamatan tim yang bertugas di lapangan.

Tabel 4.5
Permasalahan Bidang Sosial Budaya

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Belum optimalnya PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Terbatasnya SDM pendamping sosial
		Belum maksimalnya TSKS di tingkat kecamatan
		Terbatasnya anggaran untuk kebutuhan pelayanan sosial
	Belum Optimalnya PPKS yang mendapat Bantuan Sosial	Terbatasnya anggaran untuk bantuan sosial
		Pergeseran anggaran sebagai dampak covid 19
		Belum maksimalnya pemanfaatan bantuan sosial
		Belum optimalnya pola pemanfaatan bantuan oleh PPKS
	Belum optimalnya tingkat ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Belum terpenuhinya posko terdekat penanganan KARHUTLA
		Belum terpenuhinya fasilitas penunjang lapangan
		Masih terdapat pelanggaran Perda
	Belum optimalnya Budaya Balangan yang terlestarikan	Rendahnya penyelenggaraan festival budaya
		Belum optimalnya pemeliharaan fisik cagar budaya
		Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan
Rendahnya Nilai Indeks Desa Membangun	Belum optimalnya pengelolaan BUMDes	Masih terdapat pengelolaan usaha BUMDes yang belum tepat sasaran
		Terbatasnya SDM pendamping desa
	Belum optimalnya IKS sebagai penunjang status desa	Belum optimalnya pelatihan mitigasi dan tanggap bencana di desa rawan bencana
		Belum terpenuhinya jaringan internet desa
		Belum selarasnya database status desa

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Isu Strategis Internal

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Dari analisis permasalahan didapatkan isu strategis dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup adalah Optimalisasi **Pembangunan Infrastruktur Wilayah** di Kabupaten Balangan, baik infrastruktur publik maupun infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan untuk isu strategis Lingkungan Hidup adalah masih Peningkatan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan**.

2. Isu Strategis Bidang Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Balangan sampai dengan saat ini masih bertumpu pada sektor pertambangan dimana pada masa mendatang pertumbuhannya akan mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya bahan baku batu bara yang ada di Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan **Transformasi struktural dalam perekonomian dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam** khususnya batu Bara menjadi sektor non Batu bara seperti pertanian, perkebunan , perikanan, sektor industri, sektor pariwisata dan perdagangan yang nilai tambahnya lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan arahan dari RPJMN dimana nawacita Presiden RI adalah melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya

saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari transformasi ekonomi sendiri adalah agar Struktur Ekonomi menjadi Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.Untuk melakukan transformasi ekonomi di Kabupaten Balangan maka diperlukan **Peningkatan kualitas Investasi.** Kualitas investasi yang baik adalah investasi yang dapatmendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah dengan menarik investasi untuk **hilirisasi sumber daya alam terutama untuk sektor pertanian dan perkebunan** dalam rangka meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian dan perkebunan**. Peningkatan Peran sektor Pertanian** dapat dilakukan melalui Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, obat-obatan, perkebunan dan peternakan, Pembuatan jaringan irigasi pertanian untuk menunjang pelaksanaan IP200 dan IP300, , Peningkatan mutu kualitas karet dan melakukan peremajaan (*replanting*) tanaman karet, Diversifikasi komoditi pertanian, Revitalisasi pengolahan hasil pertanian (sektor hilir = agroindustri) dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil olahan produk pertanian dan pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal dan terbarukan antara lain Pengembangan Pusat Agribisnis terutama untuk pasar-pasar domestik dan pasar regional.Selain itu **Daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu terus ditingkatkan** melalui kebijakan yang mendorong UMKM dapat meningkatkan perannya dalam perekonomian. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu diperlukan juga **Peran Koperasi dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM.**Hal lain yang juga perlu ditingkatkan adalah **Kinerja pariwisata serta ekonomi kreatif** di Kabupaten Balangan mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Balangan cukup besar. Seperti yang diketahui bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki *multiplier effect* yang cukup tinggi. Jika sektor pariwisata di suatu daerah meningkat bisa meningkatkan sektor ekonomi kreatif di daerah tersebut.Untuk **Peningkatan Ketahanan Pangan** sendiri dapat dilakukan melalui Meningkatkan diversifikasi penganekaragaman pangan, peningkatan SDM tentang pelatihan

tenaga pemantau ketersediaan dan konsumsi pangan serta sarana prasarana pendukung, peningkatan SDM bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku utama, koordinasi secara intensif dengan instansi terkait/stakeholder dalam rangka penanganan desa rawan pangan, Pengembangan teknologi diversifikasi pangan olahan dan Pemberdayaan Lumbung pangan, Toko Tani Indonesia dan Rumah Pangan Kita dalam penyediaan pangan sebagai antisipasi kelangkaan barang dan kenaikan harga.

3. Isu Strategis Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Isu strategis bidang pengembangan sumber daya manusia merupakan hasil analisa permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan yaitu perlunya **peningkatan kualitas sumber daya manusia** di Kabupaten Balangan. Pada bidang pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan sehingga perlunya peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pada bidang kesehatan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga perlunya upaya peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Poskesdes. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Balangan juga fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, AKB, Stunting dan pemberantasan penyakit. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan PHBS serta menurunkan angka kelahiran remaja.

4. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan

Dari analisis permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Balangan didapatkan isu strategis **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan**. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu aspek manajemen perubahan yang belum optimal yang mana belum sepenuhnya penetapan *agen* perubahan didasarkan pada kebutuhan organisasi sehingga *agen* perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal. Aspek

peraturan perundang-undangan yang belum optimal juga menjadi pemicu tata kelola pemerintahan di Kabupaten Balangan belum optimal yang mana peta keterkaitan antara kebijakan pusat, pemerintah kabupaten dan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun, sehingga identifikasi yang menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum dilakukan secara optimal.

Selain aspek diatas aspek pelayanan publik yang belum optimal juga sebagai aspek yang menyebabkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Balangan, padahal salah satu tugas pemerintah daerah adalah sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat untuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai IKM 82,35 dengan kualitas mutu B. Aspek penataan sistem manajemen SDM-ASN yang belum optimal juga tidak kalah penting menjadikan tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Berdasarkan penilaian mandiri sistem merit di Kabupaten Balangan tahun 2020 dengan nilai 257 atau dengan kategori baik karena berada direntang 250-324. Walaupun sudah berada dikatagori baik namun pencapaian belumlah optimal hingga kategori sangat baik dengan nilai rentang 325-400. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh.

Aspek penguatan tatalaksana belum sepenuhnya optimal seperti belum adanya *grand design* pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder* yang belum terintegrasi. Dari aspek pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih lemah dimana penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas seperti penanganan gratifikasi, *whistleblowing system*, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan pengendalian internal pemerintah belum berjalan secara efektif pada tingkat pemerintah kabupaten dan perangkat daerah. Aspek penguatan akuntabilitas masih belum optimal dimana capaian SAKIP tahun 2020 hanya 66,04 dengan kategori B sehingga menjadikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Balangan tidak optimal.

5. Isu Strategis Sosial Budaya

Melalui pemetaan permasalahan, didapatkan isu strategis di bidang sosial budaya, yaitu **Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan dalam berbagai aspek.** Pada aspek sosial, masih **rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)** yang mengampu pelayanan sosial. Hal ini berdampak kepada belum optimalnya pelayanan sosial pada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan. Kurang aktifnya SDM yang berada di tingkat kecamatan juga berpengaruh pada belum optimalnya pelayanan sosial PPKS. Terkait PPKS yang mendapatkan bantuan sosial masih mengalami hambatan di sisi anggaran, sebagai dampak pandemi Covid 19. Selain itu isu pemanfaatan bantuan sosial oleh PPKS masih belum optimal.

Selama ini PPKS masih memanfaatkan bantuan secara konsumtif sehingga keberdayaan PPKS masih minim. Menurunkan angka kemiskinan tidak hanya memberikan bantuan, namun bagaimana membuat masyarakat yang masuk dalam kelompok PPKS ini menjadi berdaya. Upaya peningkatan persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial akan lebih optimal apabila terlebih dulu memberdayakan dan membekali dengan kemampuan lebih mendalam serta terintegrasi antara SKPD, tenaga pendamping sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Sehingga pemerintah daerah tidak hanya memberi ‘ikan’ saja, namun dapat membekali dengan ‘kail’ agar masyarakat yang termasuk pada kelompok PPKS dapat mandiri dan lebih sejahtera.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat dan desa, terukur dan terintegrasi melalui indeks komposit dari Indeks Desa Membangun (IDM). Terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan (IKE/L). Melalui pemetaan masalah ditemukan sejumlah hambatan, yaitu **belum selarasnya database status desa dan belum optimalnya pelatihan masyarakat tentang mitigasi dan siaga bencana**. Pada aspek Indeks Ketahanan Ekonomi, BUMDes menjadi implementasi oleh masyarakat desa dalam perwujudan ketahanan ekonomi. Beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Balangan masih memiliki hambatan yaitu belum tepatnya peluang usaha yang memiliki kekuatan berkelanjutan.

Pada aspek Ketentraman dan Ketertiban umum erat kaitannya dengan kondisi daerah yang stabil dan kondusif. Kabupaten Balangan pada tahun 2019 memiliki angka pelanggaran paling tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2020

dengan tingkat penyelesaiannya 100%. Masih adanya angka pelanggaran merupakan salah satu faktor pemicu yang mampu menyebabkan angka konflik sosial bernuansa SARA apabila tidak tertangani dengan baik. Upaya pengawasan dan monitoring secara berlanjut serta konsisten menjadi dasar karena konflik bisa memiliki titik kritis sewaktu-waktu apabila pemerintah daerah lengah dalam hal ini. Selain pengawasan dan monitoring secara kontinu, perlu **tindakan preventif** diantaranya deteksi dini wilayah rawan konflik, sosialisasi nilai-nilai inklusivitas ditengah masyarakat, dan pembinaan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan.

Pada aspek kebudayaan, Kabupaten Balangan sejauh ini masih memiliki kendala **belum optimalnya perawatan cagar budaya, dan belum optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan** secara berkala dikarenakan pandemic Covid 19. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan perawatan cagar budaya Balangan, dengan menggali dari sisi *value* apabila cagar budaya tersebut lestari dan dapat memiliki nilai tambah salah satunya menarik potensi wisata edukasi. Kemudian terkait pengembangan seni dan budaya Balangan yang terkendala pandemi Covid 19, sangat diperlukan upaya serta terobosan penyesuaian normal baru.

6. Isu Strategis Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Balangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200). Secara umum Kabupaten Balangan masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam memenuhi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang sudah dan belum mencapai target nasional.

Hasil pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 84 indikator (38,18%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 42 indikator (19%), tidak ada data sebanyak 91 indikator (41,36%), dan indikator di luar wilayah kajian sebanyak 3 indikator (1,36%). Indikator TPB yang telah

dilaksanakan dan belum memenuhi target nasional dan indikator TPB yang tidak ada data akan menjadi prioritas dalam penentuan skenario RPJMD Kabupten Balangan 2021 – 2026.

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana. Alternatif dan Rekomendasi yang akan dintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri atas (1) Indikator TPB yang terkait DDDTL sejumlah 11 indikator; dan (2) indikator yang tidak terkait DDDTL sejumlah 43 indikator.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Balangan, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Proritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; 3) Pendidikan Berkualitas, 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8) Kesehatan

4.3. Isu Strategis Eksternal

4.3.1 Isu Internasional

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ S*ustainable Develoment Goals (SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Komponen SDGs terdiri dari: 1) tanpa kemiskinan, 2) tanpa kelaparan, 3) kehidupan sehat dan sejahtera, 4) pendidikan berkualitas, 5) kesetaraan gender, 6) air bersih dan sanitasi layak, 7) energi bersih dan terjangkau 8) pekerjaan layak

dan pertumbuhan ekonomi 9) industri, inovasi dan infrastruktur, 10) berkurangnya kesenjangan, 11) kota pemukiman berkelanjutan, 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13) penanganan perubahan iklim, 14) ekosistem lautan, 15) ekosistem daratan, 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Balangan dalam segala kegiatan, rencana dan program Pembangunan untuk melaksanakan komitmen terhadap pencapaian SDGs.

Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan, dari 220 indikator dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda, Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 84 indikator, belum mencapai target 42 indikator, tidak ada data sebanyak 91 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator.

Capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan terkait pada 28 unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Capaian Tujuan Pembagunan Berkelanjutan (TPB)/ *Suistainable Development Goals* (SDGs)

No.	SKPD	Mencapai Target	Belum mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
1	Sekretariat Daerah	0	0	15	0	15
2	BPBD	4	1	9	0	14
3	BPDASHK Barito	0	0	1	0	1
4	BPS Balangan	10	1	1	0	12
5	Disdukcapil	3	0	2	0	5
6	Dinas Kesehatan	21	7	12	0	40
7	Dinas Ketahanan Pangan	1	3	0	0	4
8	Dinas Lingkungan Hidup	5	2	3	0	10
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	2	0	0	5

No.	SKPD	Mencapai Target	Belum mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
10	Dinas Pendidikan	2	9	3	0	14
11	Dinas Perhubungan	0	0	0	3	3
12	Dinas Pertanian	1	0	0	0	1
13	DinasPUPR	0	0	20	0	20
14	Dinas Sosial	2	4	3	0	9
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	1	3	0	9
16	Inspektorat	1	0	0	0	1
17	Kepolisian RI Resort Balangan	3	0	3	0	6
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	0	5	0	10
19	Dinas Perdagangan	1	0	0	0	1
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	0	0	0	1
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	5	1	0	10
22	BNK	0	1	0	0	1
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	4	3	0	13
24	Dinas Koperasi dan UMKM	1	1	2	0	4
25	Dinas Pariwisata	1	1	3	0	5
26	Balitbangda	1	0	0	0	1
27	Badan Keuangan Daerah	3	0	1	0	4
28	Bappeda	0	0	1	0	1
	Total	84	42	91	3	220

Sumber : Dokumen KLHS Kab. Balangan, 2020

2. New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan)

Berkaitan dengan goal 11 SDGs yang terfokus pada penanganan tantangan perkotaan dalam menciptakan kesempatan dan kemakmuran tanpa menghabiskan lahan dan sumber daya, serta Harmonisasi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi kabupaten Balangan yang dicanangkan kedalam Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera seirama dengan konsep New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) yang merupakan komitmen bersama dari hasil Konferensi PBB mengenai Pembangunan Perumahan dan Perkotaan yang Berkelanjutan atau dikenal dengan Konferensi Habitat yang ke III yang diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016.

Setiap pembangunan pasti akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitar. Agenda menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan pembangunannya memberikan ancaman berupa pencemaran air, udara dan mengurangi tutupan lahan sehingga akan menurunkan kualitas lingkungan hidup sekitar, sehingga dalam melaksanakan pembangunan agenda baru perkotaan akan tetap memastikan keberlanjutan lingkungan hidup yang melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya.

Dalam mendukung New Urban Agenda pemerintah Kabupaten Balangan akan melaksanakan beberapa kegiatan diataranya penanganan kawasan permukiman kumuh khususnya pada wilayah perkotaan, pembangunan perumahan yang terjangkau, penyediaan sarana air minum dan sanitasi, penyediaan ruang publik, fasilitas sosial dan penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

New Urban Agenda juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi regional dan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih kabupaten Balangan merupakan kabupaten perbatasan langsung dengan Kalimantan Timur yang menjadi rencana ibu kota Negara Republik Indonesia.

3. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era Industry 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman.

Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine-to-machine*, komunikasi *human-tomachine*, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Beberapa dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Peran SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada *high skill* serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan *low/middle* ke level *high skill.* Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Balangan seharusnya mulai menyiapkan SDM yang berkualitas dalan menghadapi revolusi industri 4.0.

4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City dan Smart Services

Perkembangan teknologi informasi komunikasi sangat memungkinkan pengembangan *smart city* dan *smart services*. Kota Cerdas (*smart city*) adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Kota Cerdas (*smart city*) cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya, Kota Cerdas (smart city) didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu,A., dkk dalam Schaffers,2010:3). Kota Cerdas (*smart city*) mempunyai 6 dimensi, yaitu *Smart Government, Smart Economy, Smart Live, Smart Living, Smart People, dan Smart Mobility.*

Dasar hukum *Smart City* sendiri adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Presiden tentang Satu Data

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih.Diharapkan ke depannya Pemerintah Kabupaten Balangan juga mempersiapkan diri untuk menjadi *Smart City.*

5. Dampak Pandemi Covid 19

Dunia saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi pandemi global. Berawal dari kota Wuhan, China, virus yang kemudian dikenal dengan nama covid-19 ini menyebar tidak hanya ke seantero negeri, tetapi seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu pun negara yang terbebas dari ganasnya virus corona ini.

Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik *(physical distancing)* maupun sosial *(social distancing)* bahkan melakukan *lockdown* (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Bukan hanya sekadar imbauan tetapi peraturan dan larangan keras untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dampak negatif penyebaran virus corona tak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi juga dunia usaha baik skala kecil, menengah, maupun besar. Pada semester I tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi COVID19. Penanggulangannya memerlukan pembatasan fisik (*physical distancing)* dan pembatasan sosial (*social distancing*) yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan penurunan aktivitas (kontraksi) sosial dan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2020 tercatat terkontraksi 2,61% (yoy), turun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,18% (yoy). Dari sisi penawaran, kontraksi pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari sektor pertambangan didorong penurunan demand global sejalan dengan Pandemi COVID-19. Sektor PHR terkontraksi sejalan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terbatas akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Industri pengolahan terkontraksi sejalan penurunan permintaan CPO baik global maupun domestik.

Sementara itu sektor pertanian terkontraksi sejalan dengan penurunan kinerja produksi Tandan Buah Segar (TBS) sebagai dampak dari cuaca kering di tahun sebelumnya serta penurunan kualitas sadapan karet. Di sisi lain, kinerja produksi komoditas tabama, khususnya padi mengalami peningkatan sejalan pola seasonal musim panen dan menahan laju kontraksi sektor pertanian lebih dalam.

Dari sisi permintaan, kontraksi pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari penurunan konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. PSBB tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Kementerian Kesehatan, dan paling sedikit meliputi peliburan

sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB di Kalimantan Selatan diawali oleh di Kota Banjarmasin pada 24 April – 31 Mei 2020, diikuti oleh Kab Banjar, Kab. Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru. Penerapan PSBB membatasi mobilitas masyarakat, yang juga berakibat akan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan momen HBKN Ramadan dan Idul Fitri tidak dapat mendorong konsumsi sebagaimana pada pola historis tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa, yang merupakan sumber pertumbuhan utama di Kalimantan Selatan, pada triwulan II 2020 terpantau mengalami kontraksi tipis. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan mitra dagang utama, sebagai akibat pandemi COVID-19. Kedua komoditas ekspor utama Kalimantan Selatan, yaitu batu bara dan CPO, terpantau mengalami kontraksi. Penurunan ekspor batu bara disebabkan oleh pengetatan impor batu bara oleh pemerintah Tiongkok dan Lockdown di India yang menurunkan kebutuhan impor batu bara. Selain itu, Harga Batu bara Acuan (HBA) Kementerian ESDM menunjukkan penurunan pada triwulan II 2020. Harga komoditas pada triwulan II 2020 tercatat sebesar USD59,95/ton , lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar USD66,63/ton.

Kontraksi perekonomian Kalimantan Selatan akibat COVID-19 akan “terdistribusi” di kabupaten kota sesuai ciri khasnya masing-masing. Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten Penyumbang komoditas ekspor utama yaitu batu bara dan karet sangat terimbas karena adanya COVID 19. Imbas dari Penurunan Permintaan Batu Bara dan penurunan harga batu bara akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja disektor batu bara (Peningkatan Pengangguran) dan kontraksi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan jumlah kemiskinan. Hal ini perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

4.3.2 Isu Strategis Nasional

Dari tingkat nasional hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah sinkronisasi dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan

   Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law,* terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.3.3 Isu Strategis Regional dan Rencana Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan kabupaten Balangan tidak terpisahkan terhadap isu regional di kawasan pulau Kalimantan.Adanya Forum Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK).

RKRP2RK merupakan forum kerjasama antar provinsi di Kalimantan, antara lain Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang bertujuan untuk menjadi wadah kerjasama untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk Kalimantan, dengan lingkup kerjasama antara lain:

1) Koordinasi dan kerjasama regional untuk mempercepat pembangunan Kalimantan;
2) Membangun daya saing ekonomi Kalimantan; dan

3) Membangun dan mempercepat penguatan konektivitas, kedaulatan pangan, energy, kemaritiman dan kawasan perbatasan, serta industry dan pariwisata regional Kalimantan secara terpadu, efektif dan efesien.

Diharapkan dari arah kebijakan pembangunan kabupaten Balangan dari bidang Infrastruktur dan kewilayahan, ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia akan memberikan dampak percepatan pembangunan di kabupaten Balangan, Khususnya terkait rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru dan Penajam Paser Utara.

Rencana ini tentunya menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Balangan ke depannya, apabila dapat dibangun akses dari Kabupaten Balangan menuju Kabupaten Kotabaru atau Penajam Paser Utara melalui konektifitas terhadap rencana jalan tol.

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wialyah administrative Kabupaten Penajam Paser Uta dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai Ibu Kota Negara baru Kalimantan Timur dari sisi selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Posisi strategis Kalimantan Selatan dalam Perekonomian kawasan Kalimantan dan calon Ibu Kota Baru harus melakukan inovasi dan terobosan untuk menggerakkan perekonomian dan tidak hanya bergantung dari barang komoditas seperti kelapa sawit, batu bara dan barang komoditas lainnya, tetapi sudah mengoptimalkan potensi industri yang dimilkinya serta bisa mengantisipasi kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Dengan potensi yang dimilikinya Kalsel dan khususnya kabupaten Balangan, potensi yang dimiliki harus terus berkembang, tidak tergantung semata-mata kekayaan alam saja, tapi juga sudah harus mengembangkan potensi daerah lainnya, melakukan industrialisasi hasil perkebunan, pertanian dan pariwisata, sehingga nantinya tidak hanya sebagai daerah penyangga tapi juga sebagai etalase Indonesia baru.

Selaras dengan RPJMN 2020 – 2024, arah kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, Kalimantan selatan sebagai provinsi penyangga pangan dan pertanian Ibu Kota Negara baru.

4.3.4. Isu Strategis Provinsi

Isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Selatan dalam lima tahun mendatang yaitu: :

1) Ekonomi melambat

   Keterkaitan eksploitasi sumber daya mineral dan perekonomian daerah sangat erat terutama di provinsi Kalimantan Selatan mengingat dominasi struktur ekonomi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang paling tinggi. Jika melihat salah satu tujuan pembangunanberkelanjutan, maka perubahan struktur perekonomian Kalimantan Selatan adalah pergeseran dominasi sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua sekaligus sektor yang mengeksploitasi sumber daya alam terbarukan.

2) Sumber Daya Manusia

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

3) Lingkungan Hidup

   Namun Tidak dapat dipungkiri, pertambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dinilai berdasarkan kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan/hutan. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

4) Sarana Prasarana dan Energi

   Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi

capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil batubara di Indonesia. Namun dalam pemanfaatannya, batubara belum menjadi salah satu sumber energinatran Selatan. Konsep membangun sejatinya perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Hal ini merupakan amanat menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 disertai Peraturan menteri ESDM No. 25 tahun 2013, tentang pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mickro hidro, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogass, dan sampah kota.

5) Pandemi Covid-19

Pada Awal Tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami penyebaran pandemic Novel Corona Virus-2019 (Covid-19). Pandemik ini menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan resesi di seluruh dunia. Dampak negatif yang menjadi permasalahan nasional bahkan global yaitu terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada

sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya pengangguran karena banyak pekerja pada perusahaan yang dirumahkan dan di PHK, meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan serta menurunnya kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian.

6) Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian regional melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

7) Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN)

Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN), maka Kalimantan Selatan akan menjadi gerbang atau daerah penyangga, untuk itu berbagai sarana dan prasarana penunjang akan disiapkan dalam mendukung IKN tersebut.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) **Misi** yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Penjelasan arahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
b. Pembangunan Infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
c. Penyederhanaan Regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law,* terutama menerbitkan 2 undang-

undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
e. Transformasi Ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

5.1. Visi

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA,
MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Ketiga pokok visi tersebut pada dasarnya merujuk pada kondisi akhir tercapainya Balangan yang Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera pada hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "Kabupaten yang lebih Maju dan Sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menuju masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada dibawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera. Perumusan visi Kabupaten Balangan lima tahun kedepan diuraikan ke dalam tabel, dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1
Perumusan Visi Kabupaten Balangan 2021-2026

No	Masalah	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Belum Terwujudnya Pembangunan Pedesaan yang Ideal serta belum maksimalnya Konektivitas di setiap Desa Kabupaten Balangan	Membangun Desa	Membangun desa, menata kota menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera
2	Belum Terwujudnya Sentra Daerah Perkotaan di Kabupaten Balangan	Menata Kota	
3	Belum Tercapainya standar IPM yang diharapkan di Kabupaten Balangan	Maju dan Sejahtera	

Adapun penjelasan tentang visi Kabupaten Balangan lima tahun ke depan, diuraikan ke dalam tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2
Penjelasan Visi Kabupaten Balangan 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera	Membangun Desa	Membangun Desa adalah Mengembangkan Kawasan Pedesaan dan Konektivitas di Kabupaten Balangan
	Menata Kota	Menata kota adalah Menata Kawasan Perkotaan di Kabupaten Balangan
	Maju dan Sejahtera	Mewujudkan dan Meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan

5.2. Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
   Misi ini dilandasi oleh kondisi Balangan terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif

   Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

   Misi ini dilandasi oleh kondisi kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

   Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

   Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan angka konflik sosial bernuansa SARA, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Perumusan Misi Kabupaten Balangan lima tahun kedepan dengan memperhatikan hal-hal pembangunan daerah, yang dijabarkan ke dalam tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel 5.3
Perumusan Misi Kabupaten Balangan

No	Masalah	Pokok-Pokok Misi	Pernyataan Misi
1	Belum terwujudnya infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan	Insfrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Misi I: Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan
2	Belum terwujudnya perekonomian daerah masih didominasi sector pertambangan, sedangkan sector pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian,perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Perekonomiaan Berbasis pertanian,perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Misi II: Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian,perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif
3	Belum terwujudnya SDM, sarana prasarana, fasilitas pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang kurang berkualitas sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Pendidikan dan Kesehatan	Misi III: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4	Belum terwujudnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Pemerintahan	Misi IV: Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5	Belum terwujudnya angka PPKS yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan angka konflik sosial bernuansa SARA, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.	Sosial, Budaya dan Agama	Misi V: Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Penjelasan tentang misi tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Jabaran Visi Kabupaten Balangan 2021-2026

Misi	Penjelasan Misi
Misi I : Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan
Misi II : Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Perekonomian daerah masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif
Misi III : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
Misi IV : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
Misi V : Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Masih rendahnya angka PPKS yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan angka konflik sosial bernuansa SARA, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Adapun keterkaitan prioritas pembangunan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten Balangan tertuang dalam penjabaran pada uraian sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 pada tabel 5.5 berikut:

Tabel. 5.5
Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.	Nawa Cita Tahun 2020-2024	Prioritas Daerah Prov.Kalsel Tahun 2021-2026	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan (Nawacita 3)	Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Kawasan Perekonomian	Infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing (Nawacita 2)	Transformasi Struktur Ekonomi	Ekonomi Kerakyatan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif
3	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (Nawacita 4)			
4	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (Nawacita 1)	Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan Penanganan Masalah Sosial	Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
5	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya (Nawacita 8)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Terutama Kemudahan dalam Perizinan Berinvestasi	Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
6	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan (Nawacita 9)			
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga (Nawacita 7)	Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan Penanganan Masalah Sosial	kehidupan sosial, budaya, dan agama yang kondusif	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif
8	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (Nawacita 5)			

No.	Nawa Cita Tahun 2020-2024	Prioritas Daerah Prov.Kalsel Tahun 2021-2026	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026
9	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya (Nawacita 6)			

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2021 tersaji pada Tabel 5.6. berikut:

Tabel. 5.6
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
VISI: “Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera"

No.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KONDISI AWAL RPJMD (2020)	KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir (2026)
													2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Indeks Infrastruktur Wilayah	58,24%	85,82%	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik	31,73	33,99	37,81	41,58	45,73	49,42	52,71	52,71 %
								2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman	26,51	30,12	30,87	31,42	32,06	32,75	33,11	33,11
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	69,38	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air	53,33	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6	50,6
										4	Indeks Kualitas Udara	91,18	90,94	91,05	91,16	91,27	91,38	91,49	91,49
										5	Indeks Kualitas Lahan	50,61	52,3	53,99	55,67	57,36	59,05	60,74	60,74
2	Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	3	Pertumbuhan Ekonomi	-2,47	3,25 - 3,5	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	12,23 %	12,64 %	12,89 %	13,14 %	13,39 %	13,64 %	13,89 %	13,89 %
										7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	5,96%	6,10%	6,30%	6,40%	6,50%	6,60%	6,70%	6,70%

No.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KONDISI AWAL RPJMD (2020)	KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir (2026)
													2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38%	0,40%	0,42%	0,44%	0,46%	0,48%	0,50%	0,50%
										9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	216,47 M	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	290,09 M	1.546 M
		4	Menurunnya Angka Penganggura n Terbuka	4	Angka Penganggura n Terbuka	2,46%	2,30%	5	Menurunnya angka penganggura n terbuka	10	Angka Penganggura n Terbuka	2,46%	2,46%	2,43%	2,40%	2,37%	2,34%	2,30%	2,30%
3	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	5	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas	5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,55	9,17	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,55	7,82	8,09	8,36	8,63	8,9	9,17	9,17
				6	Angka Harapan Lama Sekolah	12,46	13,24			12	Angka Harapan Lama Sekolah	12,46	12,59	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,24
				7	Usia Harapan Hidup	67,72	68,92	7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup	67,72	67,92	68,12	68,32	68,52	68,72	68,92	68,92
										14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	89	221	177	176	132	131	130	130
										15	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	7	15	14	13	12	11	10	10
										16	Prevalensi Stunting	25,70 %	21%	18,40 %	17%	16%	15%	14%	14%
										17	Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	24,71	23	21	20,58	20,32	20,03	19,32	19,32

No.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KONDISI AWAL RPJMD (2020)	KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir (2026)
													2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi	53,8	65,8	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	NILAI SAKIP	66,04 (B)	68,40 (B)	70,40 (BB)	72,40 (BB)	74,40 (BB)	76,40 (BB)	78,20 (BB)	78,20 (BB)
										19	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
										20	Nilai EKPPD	3,5620	3,5750	3,5850	3,5900	3,5930	3,5970	3,6000	3,6000
										21	Indeks Pelayanan Publik	03:01 (-B)	3.40 (-B)	3.51 (B)	3.80 (B)	4.01 (-A)	4.91 (A)	4.91 (A)	4.91 (A)
										22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,53	82,55	83,6	83,7	84	84,5	85	85
5	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	7	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	9	Angka Kemiskinan	5,32	4,9 - 4,7	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23	Angka Kemiskinan	5,32	5,4 - 5,2	5,3 - 5,0	5,2 - 5,0	5,1 - 4,9	5,0 - 4,8	4,9 - 4,7	4,9 - 4,7
										24	Angka PPKS yang tertangani	40,95 %	46,95 %	52,95 %	58,95 %	64,95 %	70,95 %	76,95 %	76,95 %
				10	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	10	Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif	25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0	0	0
				11	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										27	Indeks Resiko Bencana	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89
				12	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48%	100%	12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48%	52%	58%	68%	81%	87%	100%	100%

No.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KONDISI AWAL RPJMD (2020)	KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir (2026)
													2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		8	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	13	Indeks Desa membangun	0,6395	0,6995	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun	0,6395	0,6495	0,6595	0,6695	0,6795	0,6895	0,6995	0,6995

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024. RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD.

Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.1.

Gambar 5.1.
Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

a. RPJMD – RPJMN

RPJMD Kabupaten Balangan memiliki korelasi dengan RPJMN tahun 2020-2024, dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMN yang didukung pada visi dan misi pembangunan RPJMD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 5.7
Hubungan RPJMD – RPJMN

No	RPJMD Tahun 2021-2026	RPJMN Tahun 2020-2024
	Visi	
1.	Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong
	Misi	
1.	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Membangun Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
2.	Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	

b. RPJMD – RPJPD Kabupaten Balangan

RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 berkorelasi terhadap RPJPD tahun 2005-2025, dalam tahapan pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Korelasi tersebut dapat dilihat dalam visi dan misi pembangunan RPJPD yang didukung pada visi dan misi pembangunan RPJMD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 5.8
Hubungan RPJMD – RPJPD

No	RPJMD Tahun 2021-2026	RPJPD
	Visi	
1.	Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Balangan Yang Mandiri Dengan Berlandaskan Otonomi Daerah
	Misi	
1.	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi daerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdaya saing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakat balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat
2.	Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif	Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah

		yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh Sumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal.
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi daerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdaya saing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakat balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat
4.	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, melalui peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan, dan gerakan sadar hukum ditengah masyarakat.
5.	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	

c. RPJMD - RTRW Kabupaten Balangan

RPJMD Kabupaten Balangan berkorelasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Peraturan Daerah Tahun 2013 terhadap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Korelasi tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RTRW yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJMD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.9
Hubungan RPJMD – RTRW

No	RPJMD Tahun 2021-2026	RTRW
	Visi	
1.	Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Terwujudnya ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
	IndikasisProgram Utama 2024 Arah Pemanfaatan Ruang RTRW PJM II dan III	**Indikasi Rencana Program RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2024.**
1.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi. • Perwujudan Jaringan Jalan Kabupaten. • Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten. • Penyediaan Sarana Angkutan Jalan • Peningkatan Prasarana Lalu lintas Jalan Raya. • Intensifikasi Ketertiban Lalu Lintas melalui Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).	**Peningkatan Infrastruktur Jalan sarana Transportasi**: • Peningkatan Proporsi Panjang. • Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik. • Peningkatan Proporsi jembatan dalam kondisi baik. • Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Angkutan Darat. • Peningkatan Pelayanan Ijin Trayek • Peningkatan Prosentase Kendaraan Angkutan yang Memiliki Uji Kelayakan Peningkatan Persentase Jalan memiliki Rambu sesuai Standar. • Peningkatan Persentase Lokasi Titik Parkir yang Terkelola. • Pelayanan Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

		•
2.	Perwujudan Sistem jaringan prasarana Lainnya. • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). • Pengembangan sistem pengelolaan air Limbah (SPAL) • Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). • Pengembangan Sistem jaringan persampahan • Pengembangan jaringan drainase	Program Tata Perumahan & Permukiman • Peningkatan Rasio Perumahan dan Permukiman Layak Huni Peningkatan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU. • Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan indikator Persentase Limbah B3 ditangani. • Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan indikator Persentase sampah terangkut ke TPA. • Program Peningkatan Infrastruktur Jalan Peningkatan Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air.

d. RPJMD-RKPD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan berkorelasi dengan RKPD Tahun 2021 terhadap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Korelasi tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RKPD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJMD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 5.10
Hubungan RPJMD – RKPD

No	RPJMD Tahun 2021-2026	RKPD Tahun 2021
	Visi	
1.	Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia
	Misi	
1.	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkesinambungan
2.	Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan Dan Kesehatan
4.	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara	Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah
5.	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan

e. RPJMD-KLHS (Isu Strategis Daerah/TPB SDGS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan berkorelasi dengan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021 terhadap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan KLHS yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJMD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 5.11
Hubungan RPJMD – KLHS

No	RPJMD Tahun 2021-2026	KLHS
	Visi	
1.	Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Terwujudnya Kabupaten Balangan sebagai Kabupaten pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup.
	Misi	
1.	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Mewujudkan penyediaan dan pelayanan sektor Industri, Inovasi, dan Infrastruktur yang berkelanjutan.
2.	Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan kehidupan sehat dan sejahtera.
4.	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara	Mewujudkan kelembagaan pemerintahan dan abdi negara yang tangguh.
5.	Mewujudkan kehidupan sosial,	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan

	budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	agama serta pemerintahan yang damai dan berkeadilan.

f. RPJMD dengan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Keselarasan RPJMD dan Kabupaten/Kota sekitar adalah pada isu strategis sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan masing-masing daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.12
Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Tabalong

No	RPJMD Kabupaten Balangan 2021 – 2026	RPJMD Kabupaten Tabalong 2021 - 2026
	Isu Strategis	
1	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang berorientasi Agribisnis & Pengelolaan SDA Berwawasan Lingkungan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Peningkatan Perekonomian Daerah	Pengembangan Perekonomian Daerah Pengembangan
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Reformasi Birokrasi.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5	Peningkatan Pemberdayaan dan keamanan Masyarakat Desa	

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Paser dengan RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.13

Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Paser

No	RPJMD Kabupaten Balangan 2021 – 2026	RPJMD Kabupaten Paser 2021 - 2026
	Isu Strategis	
1	Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Peningkatan Perekonomian Daerah	Peningkatan Perekonomian Daerah
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Reformasi Birokrasi.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5	Peningkatan Pemberdayaan dan keamanan Masyarakat Desa	

Tabel 5.14
Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Kotabaru

No	RPJMD Kabupaten Balangan 2021 – 2026	RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021 - 2024
	Isu Strategis	
1	Pembangunan Infrastruktur	Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan wilayah
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang Berkeadilan
3	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Reformasi Birokrasi.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

5	Peningkatan Pemberdayaan dan keamanan Masyarakat Desa	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan

Tabel 5.15
Hubungan RPJMD – RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	RPJMD Kabupaten Balangan 2021 – 2026	RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021 - 2026
	Isu Strategis	
1	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Peningkatan Perekonomian Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Reformasi Birokrasi.	Reformasi Birokrasi
5	Peningkatan Pemberdayaan dan keamanan Masyarakat Desa	Keharmonisan kehidupan bermasyarakat

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses mengagendakan aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Kabupaten Balangan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Strategi pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

VISI: MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA							
No	**Misi**		**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
1	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	1	Meningkatnya infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah
						2	Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang
						3	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
						4	Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah
				2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur Permukiman	5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman
						6	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	7	Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan
						8	Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
						9	Optimalisasi pengelolaan kenakeragaman hayati
2	Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian danperkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif	3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	10	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
						11	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa

VISI: MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA							
No	**Misi**		**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
						12	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
						13	Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi
				5	Menurunnya angka pengangguran terbuka	14	Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
3	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	4	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	15	Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
						16	Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
				7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	17	Meningkatkan Usia Harapan Hidup
						18	Menurunkan Angka Kematian Ibu
						19	Menurunkan Angka Kematian Bayi
						20	Menurunkan Prevalensi Stunting
						21	Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun
4	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	22	Meningkatkan nilai SAKIP
						23	Mempertahankan Opini BPK
						24	Meningkatkan nilai EKPPD
						25	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik
						26	Meningkatkan Indeks Kepuasan
5	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	6	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	27	Penurunan angka kemiskinan
						28	Meningkatkan Angka PPKS yang tertangani
				10	Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif	29	Mempertahankan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
				11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	Meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
						31	Menurunkan Indeks Resiko Bencana
				12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	32	Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan
				13	Meningkatnya status desa Kabupaten Balangan	33	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

6.2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, arah kebijakan ditempuh dengan upaya-upaya sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.2 dibawah ini.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi Ke -1 : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan					
Meningkatan kemantapan Jalan dan Jembatan	Meningkatan kemantapan Jalan dan Jembatan	Meningkatan kemantapan Jalan dan Jembatan	Meningkatan kemantapan Jalan dan Jembatan	Meningkatan kemantapan Jalan dan Jembatan	Meningkatan kemantapan Jalan dan Jembatan
Membangun Prasarana jalan yang menghubungkan wilayah strategis daerah dan potensial	Membangun Prasarana jalan yang menghubungkan wilayah strategis daerah dan potensial	Membangun Prasarana jalan yang menghubungkan wilayah strategis daerah dan potensial	Membangun Prasarana jalan yang menghubungkan wilayah strategis daerah dan potensial	Membangun Prasarana jalan yang menghubungkan wilayah strategis daerah dan potensial	Membangun Prasarana jalan yang menghubungkan wilayah strategis daerah dan potensial
Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat
	Penataan wajah kota	Penataan wajah kota	Penataan wajah kota	Penataan wajah kota	Penataan wajah kota
Peningkatan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang	Peningkatan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang	Peningkatan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang	Peningkatan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang	Peningkatan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang	Peningkatan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang
peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Peningkatan Pembangunansalura n pengairan dan irigasi	Peningkatan Pembangunansalura n pengairan dan irigasi	Peningkatan Pembangunansalura n pengairan dan irigasi	Peningkatan Pembangunansalura n pengairan dan irigasi	Peningkatan Pembangunansalura n pengairan dan irigasi	Peningkatan Pembangunansalura n pengairan dan irigasi
Peningkatan Pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi	Peningkatan Pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi	Peningkatan Pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi	Peningkatan Pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi	Peningkatan Pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi	Peningkatan Pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
Peningkatan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Peningkatan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Peningkatan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Peningkatan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Peningkatan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Peningkatan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
Peningkatan akses air bersih layak	Peningkatan akses air bersih layak	Peningkatan akses air bersih layak	Peningkatan akses air bersih layak	Peningkatan akses air bersih layak	Peningkatan akses air bersih layak
Peningkatan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan akses sanitasi layak dan aman	Peningkatan akses sanitasi layak dan aman
Peningkatan Penanganan rumah tidaklayak huni (RTLH)	Peningkatan Penanganan rumah tidaklayak huni (RTLH)	Peningkatan Penanganan rumah tidaklayak huni (RTLH)	Peningkatan Penanganan rumah tidaklayak huni (RTLH)	Peningkatan Penanganan rumah tidaklayak huni (RTLH)	Peningkatan Penanganan rumah tidaklayak huni (RTLH)
Peningkatan kualitas sarana, parasarana dan utilitas umum perumahan	Peningkatan kualitas sarana, parasarana dan utilitas umum perumahan	Peningkatan kualitas sarana, parasarana dan utilitas umum perumahan	Peningkatan kualitas sarana, parasarana dan utilitas umum perumahan	Peningkatan kualitas sarana, parasarana dan utilitas umum perumahan	Peningkatan kualitas sarana, parasarana dan utilitas umum perumahan
	Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh	Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh	Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh	Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh	Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh
	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase
Peningkatan cakupan akses jaringan internet	Peningkatan cakupan akses jaringan internet	Peningkatan cakupan akses jaringan internet			
Peningkatan Pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R	Peningkatan Pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R	Peningkatan Pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R	Peningkatan Pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R	Peningkatan Pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R	Peningkatan Pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R
	Peningkatan kuantitas dan kinerja Bank sampah	Peningkatan kuantitas dan kinerja Bank sampah	Peningkatan kuantitas dan kinerja Bank sampah	Peningkatan kuantitas dan kinerja Bank sampah	Peningkatan kuantitas dan kinerja Bank sampah

ARAH KEBIJAKAN					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasaranan pengelolaan persampahan
Peningkatan kebersihan jalan	Peningkatan kebersihan jalan	Peningkatan kebersihan jalan	Peningkatan kebersihan jalan	Peningkatan kebersihan jalan	Peningkatan kebersihan jalan
Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan	Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan	Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan	Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan	Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan	Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan
Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK	Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK	Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK	Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK	Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK	Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK
Peningkatan konservasi air , udara dan tanah	Peningkatan konservasi air , udara dan tanah	Peningkatan konservasi air , udara dan tanah	Peningkatan konservasi air , udara dan tanah	Peningkatan konservasi air , udara dan tanah	Peningkatan konservasi air , udara dan tanah
Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)
Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan	Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan	Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan	Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan	Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan	Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan
Peningkatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan	Peningkatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan	Peningkatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan	Peningkatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan	Peningkatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan	Peningkatan pemantauan penaatan dokumen lingkungan
Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan	Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan	Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan	Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan	Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan	Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan
Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
	Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang	Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang	Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang	Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang	Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang
	Peningkatan pembangunan RTH public	Peningkatan pembangunan RTH publik	Peningkatan pembangunan RTH publik	Peningkatan pembangunan RTH publik	Peningkatan pembangunan RTH publik
peningkatan pengelolaan RTH public	peningkatan pengelolaan RTH public	peningkatan pengelolaan RTH publik	peningkatan pengelolaan RTH publik	peningkatan pengelolaan RTH publik	peningkatan pengelolaan RTH publik
Misi Ke -2 : Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dqn ekonomi kreatif					
Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
a) Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komuditas tanaman pangan	a) Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komuditas tanaman pangan	a) Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komuditas tanaman pangan	a) Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komuditas tanaman pangan	a) Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komuditas tanaman pangan	a) Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komuditas tanaman pangan
b) Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura, peternakan,perikanan , perkebunan	b) Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura, peternakan,perikanan , perkebunan	b) Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura, peternakan,perikanan , perkebunan	b) Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura, peternakan,perikanan , perkebunan	b) Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura, peternakan,perikanan , perkebunan	b) Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura, peternakan,perikanan , perkebunan
c) peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	c) peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	c) peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	c) peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	c) peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	c) peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya	d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya	d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya	d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya	d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya	d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya

ARAH KEBIJAKAN					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa,
b) Peningkatan kemitraan dan Pengembangan Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa serta koperasi dan UMKM;	b) Peningkatan kemitraan dan Pengembangan Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa serta koperasi dan UMKM;	b) Peningkatan kemitraan dan Pengembangan Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa serta koperasi dan UMKM;	b) Peningkatan kemitraan dan Pengembangan Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa serta koperasi dan UMKM;	b) Peningkatan kemitraan dan Pengembangan Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa serta koperasi dan UMKM;	b) Peningkatan kemitraan dan Pengembangan Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa serta koperasi dan UMKM;
Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**Meningkatkan** Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**Meningkatkan** Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**Meningkatkan** Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**Meningkatkan** Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**Meningkatkan** Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya menuju dan di objek wisata,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya menuju dan di objek wisata,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya menuju dan di objek wisata,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya menuju dan di objek wisata,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya menuju dan di objek wisata,	a) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya menuju dan di objek wisata,
b) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif d) peningkatan peran BUMDes dalam perekonomian Masyarakat desa;	b) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif d) peningkatan peran BUMDes dalam perekonomian Masyarakat desa;	b) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif d) peningkatan peran BUMDes dalam perekonomian Masyarakat desa;	b) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif d) peningkatan peran BUMDes dalam perekonomian Masyarakat desa;	b) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif d) peningkatan peran BUMDes dalam perekonomian Masyarakat desa;	b) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif d) peningkatan peran BUMDes dalam perekonomian Masyarakat desa;
Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup melalui:	Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup melalui:	Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup melalui:	Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup melalui:	Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup melalui:	Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup melalui:
a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;	a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;	a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;	a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;	a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;	a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
b) Peningkatan promosi wisata;	b) Peningkatan promosi wisata;	b) Peningkatan promosi wisata;	b) Peningkatan promosi wisata;	b) Peningkatan promosi wisata;	b) Peningkatan promosi wisata;
c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;	d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;	d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;	d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;	d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;	d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;	e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;	e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;	e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;	e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;	e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah	Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah	Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah	Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah	Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah	Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah
Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung	Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung	Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung	Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung	Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung	Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung
Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas	Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas	Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas	Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas	Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas	Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas

ARAH KEBIJAKAN					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan untuk menunjang pemerataan pangan serta menjamin keamanan dan mutu pangan strategis;	Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan untuk menunjang pemerataan pangan serta menjamin keamanan dan mutu pangan strategis;	Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan untuk menunjang pemerataan pangan serta menjamin keamanan dan mutu pangan strategis;	Peningkatan kemampuan membangun ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan untuk menunjang pemerataan pangan serta menjamin keamanan dan mutu pangan strategis;	Peningkatan kemampuan membangun ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan untuk menunjang pemerataan pangan serta menjamin keamanan dan mutu pangan strategis;	Peningkatan kemampuan membangun ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan untuk menunjang pemerataan pangan serta menjamin keamanan dan mutu pangan strategis;
Menurunkan pengangguran melalui upaya:	Menurunkan pengangguran melalui upaya:	Menurunkan pengangguran melalui upaya:	Menurunkan pengangguran melalui upaya:	Menurunkan pengangguran melalui upaya:	Menurunkan pengangguran melalui upaya:
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
perluasan kesempatan kerja; dan	perluasan kesempatan kerja; dan	perluasan kesempatan kerja; dan	perluasan kesempatan kerja; dan	perluasan kesempatan kerja; dan	perluasan kesempatan kerja; dan
peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.	peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.	peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.	peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.	peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.	peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
	Melanjutkan arah kebijakan tahun 2021.	Melanjutkan arah kebijakan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.	Melanjutkan arah kebijakan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.	Melanjutkan arah kebijakan tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.	Melanjutkan arah kebijakan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.
Misi Ke -3 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan					
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi
Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan	Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan	Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan	Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan	Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan	Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan
Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah
Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	Peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat dan lingkungan sehat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat dan lingkungan sehat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat dan lingkungan sehat
Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil

ARAH KEBIJAKAN					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita
Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri	Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri	Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri	Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri	Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri	Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
Peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan keluarga sejahtera
Peningkatan penyuluhan dan edukasi terkait resiko pernikahan dini	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menurunkan angka pernikahan dini	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menurunkan angka pernikahan dini	Peningkatan penyuluhan dan edukasi terkait resiko pernikahan dini	Peningkatan penyuluhan dan edukasi terkait resiko pernikahan dini	Peningkatan penyuluhan dan edukasi terkait resiko pernikahan dini
Misi Ke -4 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara					
Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
Pelaksanaan Singkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD	Pelaksanaan Singkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD	Pelaksanaan Singkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD	Pelaksanaan Singkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD	Pelaksanaan Singkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD	Pelaksanaan Singkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD
Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku
Peningkatkan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Peningkatkan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Peningkatkan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Peningkatkan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Peningkatkan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Peningkatkan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan
Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Pelaksanaan Penguatan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan Penguatan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan Penguatan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan Penguatan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan Penguatan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan Penguatan pengendalian gratifikasi
Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Penguatan implementasi keterbukaan informasi public	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik
Pengembangan dan Penyelarasan Proses bisnis instansi dan unit	Pengembangan dan Penyelarasan Proses bisnis instansi dan unit	Pengembangan dan Penyelarasan Proses bisnis instansi dan unit	Pengembangan dan Penyelarasan Proses bisnis instansi dan unit	Pengembangan dan Penyelarasan Proses bisnis instansi dan unit	Pengembangan dan Penyelarasan Proses bisnis instansi dan unit
Pemantauan Implementasi SPM Kabupaten	Pemantauan Implementasi SPM Kabupaten	Pemantauan Implementasi SPM Kabupaten	Pemantauan Implementasi SPM Kabupaten	Pemantauan Implementasi SPM Kabupaten	Pemantauan Implementasi SPM Kabupaten
Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
Peningkatkan dan Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.	Peningkatkan dan Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.	Peningkatkan dan Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.	Peningkatkan dan Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.	Peningkatkan dan Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.	Peningkatkan dan Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan

ARAH KEBIJAKAN					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
publik secara berkala	publik secara berkala	publik secara berkala	publik secara berkala	publik secara berkala	publik secara berkala
Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
Peningkatan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Misi Ke -5 : Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif					
Peningkatan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	Peningkatan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	Peningkatan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	Peningkatan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	Peningkatan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	Peningkatan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan
Penanganan dan perlindungan anak yatim	Penanganan dan perlindungan anak yatim	Penanganan dan perlindungan anak yatim	Penanganan dan perlindungan anak yatim	Penanganan dan perlindungan anak yatim	Penanganan dan perlindungan anak yatim
Peningkatan Persentase cakupan ppks yang mendapatkan pelayanan sosial	Peningkatan Persentase cakupan ppks yang mendapatkan pelayanan sosial	Peningkatan Persentase cakupan ppks yang mendapatkan pelayanan sosial	Peningkatan Persentase cakupan ppks yang mendapatkan pelayanan sosial	Peningkatan Persentase cakupan ppks yang mendapatkan pelayanan sosial	Peningkatan Persentase cakupan ppks yang mendapatkan pelayanan sosial
Peningkatan Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan	Peningkatan Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan	Peningkatan Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan	Peningkatan Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan	Peningkatan Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan	Peningkatan Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan
Peningkatan Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	Peningkatan Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	Peningkatan Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	Peningkatan Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	Peningkatan Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	Peningkatan Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif
Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Inventarisasidan pendataan ragam budaya, adat dan kesenian khas Balangan	Inventarisasidan pendataan ragam budaya, adat dan kesenian khas Balangan	Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal	Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal	Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal	Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal
Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya
Penguatan Kelembagaan PUG	Penguatan Kelembagaan PUG	Penguatan Kelembagaan PUG	Penguatan Kelembagaan PUG	Penguatan Kelembagaan PUG	Penguatan Kelembagaan PUG
Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan

pencapaian sasaran. Program pembangunan daerah lima (5) tahun ke depan tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Pembangunan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Secara rinci, detail Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Balangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.3. berikut:

Tabel 6. 3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Balangan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MISI I : MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PERKOTAAN																		
Tujuan : Meningkatnya infrastruktur wilayah Perdesaan dan Perkotaan	Indeks infrastruktur wilayah	58,24	64,11	220.654.732.737,00	68,68	206.253.682.666,00	73	171.060.790.395,00	77,79	178.329.056.734,00	82,18	177.229.490.507,00	85,82	203.947.936.859,00	85,82	1.157.475.689.899,00		BALANGAN
	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	68:06:00	66,81		67,12		68,02		68,84		68,93		69,38		69,38			
Sasaran 1: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur Publik	31,73	33,99	172.563.606.981,00	37,81	179.711.932.016,00	41,58	146.164.371.500,00	45,73	152.169.181.350,00	49,42	150.444.664.985,00	52,71	175.609.080.184,00	52,71	976.662.837.016,00		BALANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	48,30%	55,48%	113.042.358.080,00	66,07%	131.768.740.000,00	73,67%	91.750.000.000,00	79,31%	79.200.000.000,00	85,24%	83.000.000.000,00	88,47%	82.900.000.000,00	88,47%	581.661.098.080,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
	Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap	76.90%	78.42%	13.572.295.200,00	80.06%	14.318.044.304,00	82.08%	1.800.000.000,00	84.61%	9.000.000.000,00	87.39%	13.800.000.000,00	90.17%	42.400.000.000,00	90.17%	94.890.339.504,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	78.00%	78.00%	7.105.559.500,00	82.00%	6.888.774.600,00	86.00%	8.301.213.000,00	91.00%	8.518.475.000,00	95.00%	8.163.888.000,00	100.00%	9.711.225.500,00	100.00%	48.689.135.600,00	DINAS PERHUBUNGAN	BALANGAN
	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	19.48%	23.42%		39.48%		57.95%		85.97%		91.18%		100.00%		100.00%			
	Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	20.00%	20.00%		26.67%		36.67%		57.95%		85.97%		91.18%		100.00%			
	Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	33.33%	44.44%		55.66%		66.67%		77.78%		88.89%		100.00%		100.00%			
	Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	15.8%	36.8%		66.7%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	00:28	00:29		00:32		00:35		00:39		00:42		00:47		00:47			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata (buah)	-	-	-	1	1.631.072.000,00	1	2.500.000.000,00	1	4.000.000.000,00	1	4.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	5	13.631.072.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	10%	27%	652.961.859,00	42%	1.000.000.000,00	56%	5.350.000.000,00	75%	5.750.000.000,00	89%	5.950.000.000,00	100%	5.400.000.000,00	100%	24.102.961.859,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah dalam kondisi baik	11.29%	11.79%	10.898.934.236,00	12.41%	6.811.450.000,00	13.03%	4.450.000.000,00	13.65%	5.650.000.000,00	14.27%	4.050.000.000,00	14.90%	7.350.000.000,00	14.90%	39.210.384.236,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik	21.53%	23.09%	4.772.135.000,00	24.20%	2.442.960.000,00	28.31%	10.498.880.000,00	34.55%	13.700.000.000,00	39.24%	15.260.000.000,00	44.39%	8.720.000.000,00	44.39%	55.393.975.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89.27%	89.38%	16.345.795.106,00	89.49%	11.845.539.912,00	89.60%	16.150.000.000,00	89.71%	20.150.000.000,00	89.82%	9.150.000.000,00	89.93%	9.150.000.000,00	89.93%	82.791.335.018,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62%	62%	6.173.568.000,00	10%	3.005.351.200,00	20%	5.364.278.500,00	20%	6.200.706.350,00	25%	7.070.776.985,00	25%	8.477.854.684,00	25%	36.292.535.719,00	DINAS KOMINFO	BALANGAN
	Persentase Layanan Publikyang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	0		18%		18%		18%		23%		23%		23%			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	26,51	30:12:00	46.168.533.056	30.87	23.453.412.450	31:42:00	21.129.518.895	32:06:00	22.553.475.384	32.75	23.128.225.522	33.11	24.429.656.675	33.11	160.862.821.983		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	78.65%	81.27%	7.793.459.000,00	82.27 %	200.000.000,00	83.27%	5.000.000.000,00	84.27%	5.000.000.000,00	85.27%	5.000.000.000,00	86.27%	5.000.000.000,00	86.27%	27.993.459.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah domestik	91.88%	92.40%	2.399.425.000,00	92.75 %	1.969.406.000,00	93.76%	3.240.000.000,00	94.76%	3.864.000.000,00	95.76%	3.264.000.000,00	96.76%	3.290.400.000,00	96.76%	18.027.231.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,28%	90,28%	-	95%	467.609.000,00	95%	667.609.000,00	96%	767.609.000,00	96%	867.609.000,00	97%	967.609.000,00	97%	3.738.045.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	71.40%	74.08%	75.675.000,00	78.49 %	1.405.942.450,00	84.78%	1.546.536.695,00	91.71	1.701.190.364,00	98.00	1.871.309.400,00	100%	2.058.440.341,00	100%	8.659.094.251,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	84%	85%	23.245.111.000,00	85%	15.501.987.000,00	87%	4.075.373.200,00	89%	4.480.676.020,00	91%	4.925.307.122,00	93%	5.413.207.334,00	85%	57.641.661.676,00	DINAS PUPR DAN PERKIM	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	72.55%	99%	12.654.863.056,00	99%	3.908.468.000,00	99%	6.600.000.000,00	99%	6.740.000.000,00	100%	7.200.000.000,00	100%	7.700.000.000,00	100%	44.803.331.056,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BALANGAN
Sasaran :Meningkatnya indeks kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas Air	53,33	50,1	1.922.592.700,00	50,2	3.088.338.200,00	50,3	3.766.900.000,00	50,4	3.606.400.000,00	50,5	3.656.600.000,00	50,6	3.909.200.000,00	50,6	19.950.030.900,00	DINAS ERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BALANGAN
	Indeks kualitasUdara	91,18	90,94		91,05		91,16		91,27		91,38		91,49		91,49			
	Indeks kualitas Lahan	50,61	52,3		53,99		55,67		57,36		59,05		60,74		60,74			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	486.770.000,00	100%	218.010.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	5.104.780.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BALANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	100%	100%	631.430.700,00	100%	797.444.000,00	100%	1.900.000.000,00	100%	1.900.000.000,00	100%	1.900.000.000,00	100%	1.900.000.000,00	100%	9.028.874.700,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	100%	100%	656.472.000,00	100%	1.928.362.900,00	100%	330.000.000,00	100%	355.000.000,00	100%	380.000.000,00	100%	405.000.000,00	100%	4.054.834.900,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BALANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	65.350.000,00	100%	99.960.000,00	100%	170.500.000,00	100%	178.200.000,00	100%	191.200.000,00	100%	205.400.000,00	100%	910.610.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BALANGAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	100%	100%	82.570.000,00	100%	44.561.300,00	100%	166.400.000,00	100%	173.200.000,00	100%	185.400.000,00	100%	198.800.000,00	100%	850.931.300,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	BALANGAN
MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BALANGAN BERBASIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																		
Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	-2,47	050 - 100	50.696.092.382,00	100 - 150	36.995.758.650,00	150 - 200	46.878.057.878,00	225 - 250	49.730.675.379,00	275 - 300	53.253.991.044,00	325 - 350	55.113.542.274,00	325 - 350	292.668.117.611,00		BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	12,23	12,64	42.862.178.598,00	12,89	30.183.252.150,00	13,14	31.636.735.493,00	13,39	33.388.195.987,00	13,64	35.241.339.666,00	13,89	37.223.978.006,00	13,89	210.535.679.900,00		BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	952:09:00	0	-	1%	105.000.000,00	1%	110.250.000,00	1%	121.275.000,00	1%	133.402.500,00	1%	146.742.750,00	5%	616.670.250,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Budidaya Ikan (ton)	884,92	10%	5.403.977.100,00	10%	3.468.723.337,00	10%	3.642.159.503,00	10%	4.006.375.454,00	10%	4.407.012.999,00	10%	4.847.714.299,00	60%	25.775.962.692,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	270 Ha	0,70%	98.560.900,00	0,70%	187.016.126,00	0,70%	196.366.933,00	0,70%	216.003.626,00	0,70%	237.603.988,00	0,70%	261.364.387,00	4,20%	1.196.915.960,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	46	46%	117.802.000,00	46,25 %	23.106.887,00	46,50 %	242.622.314,00	47,00&	266.884.546,00	47,50 %	293.573.000,00	48,00 %	322.930.300,00	48%	1.266.919.047,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	1000 Kg/Ha	0.25%	20.486.554.920,00	0,50%	16.369.904.650,00	0,75%	17.188.399.883,00	1,00%	18.047.819.877,00	1,25%	18.950.210.870,00	1,50%	19.897.721.414,00	1,50%	110.940.611.614,00		
	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	3 Ton/Ha	2,67%		2,68%		2,69%		2,70%		2,71%		2,72%		2,72%			
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	53.469 Kwintal/ha	0,11%		0,12%		0,13%		0,14%		0,15%		0,16%		0,16%			
	Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	140 Orang	50%		51,00 %		52%		53%		54%		55%		55%			
	Persentase Peningkatan Produksi Daging	1,933.289 Kg	3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		21%			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	140 ekor	6%		6%		6%		6%		6%		6%		36%			
	Persentase Peningkatan sarana Pertanian		5%		5%		5%		5%		5%		5%		30%			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	124 unit	36%	13.923.187.678,00	42,50 %	5.793.946.960,00	49%	6.083.644.308,00	55,50 %	6.387.826.523,00	62%	6.707.217.850,00	68,50 %	7.042.578.742,00	68,50%	45.938.402.061,00	Dinas KetahananPangan, Pertanian&Perikanan	BALANGAN
	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	18 Buah	6%		6%		6%		6%		6%		6%		6%			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	938 ekor	0,20%	58.660.000,00	0,20%	400.023.090,00	0,20%	420.024.245,00	0,20%	441.025.457,00	0,20%	463.076.730,00	0,20%	486.230.566,00	1,20%	2.269.040.088,00	Dinas KetahananPangan, Pertanian&Perikanan	BALANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	1000 Ha	3%	108.690.000,00	8%	488.103.100,00	13%	512.508.255,00	18%	538.133.668,00	23%	565.040.351,00	30%	593.292.369,00	30%	2.805.767.743,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	4000 Ha	5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
	Persentase SDM Terampil tanaman pangan dan Hortikultura Di tiap Kecamatan	100 Orang	10%		12%		14%		16%		18%		20%		20%			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Pengembangan Korporasi Petani	27 (2.29%)	3,60%	362.380.000,00	5%	1.856.393.200,00	6,30%	1.949.212.860,00	7,70%	2.046.673.503,00	10,40 %	2.149.007.178,00	100%	2.256.457.537,00	100%	10.620.124.278,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
	Persentasi Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh Sertifikat	4400	9,00%		20,30 %		31,60 %		42,90 %		54,20 %		65,50 %		65,50%			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	10	10%	1.199.591.000,00	12%	297.780.000,00	13%	303.735.600,00	14%	309.810.400,00	15%	316.006.700,00	15%	322.326.912,00	15%	2.749.250.612,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	87:04:00	87,4	1.080.455.000,00	87,4	919.739.800,00	87,5	711.554.988,00	87,6	724.586.196,00	87,7	731.769.900,00	87,8	753.452.724,00	87,8	4.921.558.608,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	5			5	168.160.000,00	5	168.687.200,00	5	172.060.944,00	5	175.502.300,00	5	179.012.400,00	5	863.422.844,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90%	80%	22.320.000,00	80%	105.355.000,00	80%	107.569.404,00	80%	109.720.793,00	80%	111.915.300,00	80%	114.153.606,00	80%	571.034.103,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	BALANGAN
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa (%)	5,96%	6,10%	3.917.081.550,00	6,30%	2.708.588.900,00	6,40%	3.581.635.150,00	6,50%	3.841.923.834,00	6,60%	4.147.391.407,00	6,70%	4.465.130.943,00	6,70%	22.661.751.787,00		BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	2.72	2.00	9.250.000,00	3.00	75.470.400,00	4.00	220.889.614,00	5.00	242.978.575,00	6.00	267.276.432,00	7.00	294.004.076,00	7.00	1.109.869.098,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	8.18	10.18	39.126.000,00	10.18	64.445.000,00	10.18	76.753.930,00	10.18	84.429.323,00	10.18	92.872.255,00	10.18	102.159.480,00	10.18	459.785.989,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	26.64	27.00	182.774.800,00	28.00	229.647.600,00	29.00	441.526.096,00	30.00	485.678.705,00	31.00	534.246.576,00	32.00	587.671.233,00	32.00	2.461.545.011,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	0.43	0.30	1.780.000.000,00	0.30	129.450.000,00	0.32	382.724.210,00	0.34	420.996.631,00	0.36	463.096.294,00	0.38	509.405.924,00	0.38	3.685.673.059,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	4.10	10.00	161.318.000,00	10.00	94.627.400,00	10.00	321.750.000,00	10.00	331.750.000,00	10.00	365.500.000,00	10.00	375.500.000,00	64.10	1.650.445.400,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	5.83	6.79	34.484.000,00	7.75	54.897.600,00	8.71	215.750.000,00	10.10	225.750.000,00	11.31	235.750.000,00	12.61	245.750.000,00	12.61	1.012.381.600,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	-	0.19	80.484.600,00	0.38	889.440.000,00	0.58	701.250.000,00	1.58	706.250.000,00	2.58	711.250.000,00	3.58	725.500.000,00	3.58	3.814.174.600,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sapras	50.00	40.00	763.033.650,00	44.44	784.340.000,00	60.00	742.171.500,00	70.00	816.388.700,00	80.00	898.027.650,00	90.00	987.830.550,00	90	4.991.792.050,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi(%)	15.00	15.00	665.185.800,00	26.00	198.602.900,00	29.05	238.533.100,00	57.00	262.386.450,00	59.00	288.625.100,00	68.00	317.487.700,00	68.00	1.970.821.050,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga	20.00	20.00		25.00	33.200.000,00	27.00	45.000.000,00	30.00	49.500.000,00	33.00	54.450.000,00	35.00	59.895.000,00	35.00	242.045.000,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHANPOKOKDANBARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	8.08	8.00	170.124.600,00	7.80	123.778.000,00	7.60	129.966.950,00	7.40	142.963.700,00	7.00	157.260.150,00	6.80	172.986.280,00	6.80	897.079.680,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	4.80	7.00	31.300.100,00	9.00	30.690.000,00	12.00	65.319.750,00	15.00	72.851.750,00	18.00	79.036.950,00	20.00	86.940.700,00	26.00	366.139.250,00	DINAS KUKMPP	BALANGAN
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	38%	40%	1.736.045.400,00	42%	1.500.000.000,00	44%	2.055.364.300,00	46%	2.260.900.330,00	48%	2.486.989.220,00	50%	2.735.685.500,00	50%	12.774.984.750,00	DISPORAPAR	BALANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	83.69	10%	768.194.000,00	20%	1.099.596.000,00	40%	1.309.656.700,00	60%	1.440.622.370,00	80%	1.584.683.755,00	100%	1.743.151.000,00	100%	7.945.903.825,00	DISPORAPAR	BALANGAN
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama kunjungan wisata	-	1 hari	765.495.000,00	1 hari	234.376.000,00	2 hari	455.401.100,00	2 hari	500.941.210,00	2 hari	551.035.000,00	2 hari	606.138.500,00	2 hari	3.113.386.810,00	DISPORAPAR	BALANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentasi Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	25%	10%	202.356.400,00	10%	166.028.000,00	20%	290.306.500,00	20%	319.336.750,00	20%	351.270.465,00	20%	386.396.000,00	100%	1.715.694.115,00	DISPORAPAR	BALANGAN
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	216,47 M	227,29 M	909.692.800,00	238,65 M	503.150.000,00	250,59 M	578.322.935,00	263,12 M	636.155.228,00	276,27 M	699.770.751,00	290,09 M	769.747.825,00	1546 M	4.096.839.540,00	DPMPTSP TRANSNAKER	BALANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	2	74.030.000,00	2	62.370.000,00	2	115.503.935,00	2	127.054.328,00	2	139.759.761,00	2	153.735.737,00	12	672.453.762,00	DPMPTSP TRANSNAKER	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan		1		1		1		1		1		1		0			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	100%	200	86.850.000,00	200	65.640.000,00	210	68.922.000,00	220	75.814.200,00	230	83.395.620,00	240	91.735.182,00	1,3	472.357.002,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja	BALANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	496.052.800,00	100%	95.830.000,00	100%	100.621.500,00	100%	110.683.650,00	100%	121.752.015,00	100%	133.927.216,00	100%	1.058.867.181,00	DPMPTSP TRANSNAKER	BALANGAN
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		100%	147.780.000,00	100%	133.400.000,00	100%	140.070.000,00	100%	154.077.000,00	100%	169.484.700,00	100%	186.433.170,00	100%	931.244.870,00	DPMPTSP TRANSNAKER	BALANGAN
	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	104.980.000,00	100%	145.910.000,00	100%	153.205.500,00	100%	168.526.050,00	100%	185.378.655,00	100%	203.916.520,00	100%	961.916.725,00	DPMPTSP TRANSNAKER	BALANGAN
Sasaran: Menurunnya angka pengangguran terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	2,46	2,46	1.271.094.034,00	2,43	2.100.767.600,00	2,4	9.026.000.000,00	2,37	9.603.500.000,00	2,34	10.678.500.000,00	2,3	9.919.000.000,00	2,3	42.598.861.634,00		BALANGAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi	6.95%	4.00%	946.980.234,00	4.00%	1.878.645.100,00	4.00%	7.991.000.000,00	4.00%	8.568.500.000,00	4.00%	9.643.500.000,00	4.00%	8.884.000.000,00	0.04	37.912.625.334,00	DPMPTSP TRANSNAKER	BALANGAN
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	64.26%	65.00%	324.113.800,00	65.00 %	222.122.500,00	65.00%	1.035.000.000,00	65.00%	1.035.000.000,00	65.00%	1.035.000.000,00	65.00%	1.035.000.000,00	65%	4.686.236.300,00	DPMPTSP TRANSNAKER	BALANGAN
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BALANGAN																		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas	Usia Harapan Hidup	67,72	67,92	186.528.892.634,00	68,12	129.747.538.060,00	68,12	164.869.431.197,00	68,52	174.013.758.207,00	68,72	181.883.689.057,00	68,92	191.725.048.538,00	68,92	1.028.702.580.893,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,55	7,82		8,09		8,36		8,63		8,9		9,17		9,17			
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,46	12,59		12,72		12,85		12,98		13,11		13,24		13,24			
Sasaran : Meningkatnya Indeks Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,55	7,82	78.661.097.889,00	8,09	67.146.215.710,00	8,36	97.019.001.679,00	8,63	102.130.737.676,00	8,9	106.584.722.460,00	9,17	112.027.853.164,00	9,17	563.569.628.578,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,46	12,59		12,72		12,85		12,98		13,11		13,24		13,24			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	68,65	77.789.817.889,00	70,75	66.144.445.710,00	72,85	95.714.990.507,00	74,95	100.719.325.387,00	77,05	105.056.168.942,00	79,15	110.371.444.294,00	79,15	555.796.192.729,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	91,89		93,69		95,49		97,29		99,09		100		100			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	74,56		76,26		77,96		79,66		81,36		83,06		83,06			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraaan	80,36	82,06		83,76		85,46		87,16		88,86		90,56		90,56			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase pengembangan kurikulum	100%	100%	-	100%	101.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	611.000.000,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	BALANGAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Sertifikasi	83%	84%	461.280.000,00	85%	695.770.000,00	86%	974.011.172,00	87%	1.071.412.289,00	88%	1.178.553.518,00	89%	1.296.408.870,00	89%	5.677.435.849,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100%	100%	410.000.000,00	100%	205.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	215.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	1.485.000.000,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	BALANGAN
Sasaran : Meningkatnya Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup	67,72	67,92	107.867.794.745,00	68,12	62.601.322.350,00	68,32	67.850.429.518,00	68,52	71.883.020.531,00	68,72	75.298.966.597,00	68,92	79.697.195.374,00	68,92	465.132.952.315,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALANGAN
	Angka Kematian Ibu (AKI)/100000 kelahiran hidup	89	221		177		176		132		131		130		130			
	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	7	15		14		13		12		11		10		10			
	Prevalensi Stunting	25,70%	21%		18,40 %		17%		16%		15%		14%		14%			
	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	24,71	23		21		20,58		20,32		20,03		19,32		19,32			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)/100000 kelahiran hidup	89	221	82.351.101.437,00	177	55.797.938.050,00	176	62.286.077.908,00	132	65.772.947.420,00	131	68.608.557.361,00	130	72.368.251.432,00	130	407.184.873.608,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALANGAN
	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	7	15		14		13		12		11		10		10			
	Prevalensi Stunting	25,70%	21%		18,40 %		17%		16%		15%		14%		14%			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	87%	100%	24.687.675.308,00	100%	6.391.373.100,00	100%	4.750.210.410,00	100%	5.225.231.451,00	100%	5.747.754.596,00	100%	6.322.530.056,00	100%	53.124.774.921,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALANGAN
	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%	525.222.000,00	100%	36.120.000,00	100%	37.926.000,00	100%	41.718.600,00	100%	45.890.460,00	100%	50.479.506,00	100%	737.356.566,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	43%	45%	277.580.000,00	50%	194.293.200,00	55%	387.215.200,00	60%	414.123.060,00	65%	440.764.180,00	70%	471.934.380,00	70%	2.120.133.220,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	24,71	23	26.216.000,00	21	181.598.000,00	20,58	389.000.000,00	20,32	429.000.000,00	0,2003	456.000.000,00	19,32	484.000.000,00	19,32	1.965.814.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALANGAN
MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS DAN LAYANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI ABDI MASYARAKAT DAN ABDI NEGARA																		
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	53,8	55,8	333.226.659.598,00	57,8	311.498.860.030,00	59,8	309.597.197.837,00	61,8	314.755.339.531,00	63,8	320.481.066.417,00	65,8	326.425.538.507,00	65,8	1.915.984.661.920,00	PEMKAB BALANGAN	BALANGAN
Sasaran : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	66,04 (B)	68,40(B)	38.677.238.632,00	70,40 (BB)	32.452.192.815,00	72,40 (BB)	33.865.094.782,00	74,40 (BB)	35.847.228.060,00	76,40 (BB)	37.989.486.953,00	78,20 (BB)	40.249.739.908,00	78,20(BB)	219.080.981.150,00	PEMKAB BALANGAN	BALANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	32.557.855.566,00	100%	26.472.390.015,00	100%	27.279.281.702,00	100%	28.602.833.702,00	100%	29.993.219.160,00	100%	31.453.845.336,00	100%	176.359.425.481,00	SEKRETARIAT DAERAH	BALANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	90%	75%	1.353.843.000,00	75%	1.197.050.000,00	78%	1.364.880.000,00	80%	1.501.368.000,00	82%	1.678.938.800,00	85%	1.846.832.680,00	85%	8.942.912.480,00	INSPEKTORAT	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, propinsi, kabupaten)		98.2%	3.787.148.300,00	98.4%	2.992.334.800,00	98.6%	3.251.473.280,00	98.8%	3.576.620.578,00	99%	3.934.282.635,00	99.2%	4.327.710.898,00	99.2%	21.869.570.491,00	BAPPEDA LITBANG	BALANGAN
PROGRAMKOORDINASI DAN SINKORONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan		91	978.391.766,00	92	1.790.418.000,00	93	1.969.459.800,00	94	2.166.405.780,00	95	2.383.046.358,00	96	2.621.350.994,00	96	11.909.072.698,00	BAPELLITBANG	BALANGAN
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan		91		92		93		94		95		96		96			
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		91		92		93		94		95		96		96			
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		91		92		93		94		95		96		96			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	209.795.311.834,00	WTP	208.167.620.285,00	WTP	205.698.066.341,00	WTP	206.026.970.757,00	WTP	206.629.667.834,00	WTP	207.292.634.617,00	WTP	1.243.610.271.668,00	PEMKAB BALANGAN	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	86	87	207.888.328.808,00	87	205.730.570.235,00	87	203.324.295.863,00	88	203.490.510.656,00	89	203.839.561.722,00	90	204.223.517.894,00	90	1.228.496.785.178,00	BKD	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	38	38,91	1.155.408.026,00	40	1.637.030.050,00	42	1.493.748.478,00	45	1.568.435.901,00	48	1.725.279.492,00	52	1.897.807.441,00	52	9.477.709.388,00	BKD	BALANGAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	0	WBBM : 1	751.575.000,00	WBK :1 WBBM : 1	800.020.000,00	WBK :1 WBBM : 2	880.022.000,00	WBK :2 WBBM : 2	968.024.200,00	WBK :2 WBBM : 3	1.064.826.620,00	WBK :3 WBBM : 4	1.171.309.282,00	WBK :3 WBBM : 4	5.635.777.102,00	INSPEKTORAT	BALANGAN
	Level Maturitas SPIP	100	3 (3,02)		3 (3,02)		3 (3,05)		3 (3,1)		3 (3,15)		3 (3,2)		3 (3,2)			
	Level kapabilitas APIP	100	3		3		3		3		3		3		3			
	Indeks Integritas	77,28	78		78		79		80		81		82		82			
Sasaran : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai EKPPD	3,5620	3,5750	19.638.398.000,00	3,5850	17.934.266.900,00	3,5900	15.475.473.310,00	3,5930	15.675.473.310,00	3,5970	15.875.473.310,00	3,6000	15.975.473.310,00	3,6000	100.574.558.140,00	PEMKAB BALANGAN	BALANGAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas	100%	100%	19.638.398.000,00	100%	17.934.266.900,00	100%	15.475.473.310,00	100%	15.675.473.310,00	100%	15.875.473.310,00	100%	15.975.473.310,00	100%	100.574.558.140,00	SEKRETARIAT DAERAH	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang kesejahteraan masyarakat yang terlaksana dan berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bidang bantuan hokum dan bidang dokumentasi dan informasi yang terlaksana dan berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Sasaran : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	3,01 (-B)	32.557.855.566,00	3,40 (-B)	26.472.390.015,00	3,51 (B)	27.279.281.702,00	3,80 (B)	28.602.833.702,00	4,01 (-A)	29.993.219.160,00	4,91 (A)	31.453.845.336,00	4,91 (A)	176.359.425.481,00	PEMKAB BALANGAN	BALANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	32.557.855.566,00	100%	26.472.390.015	100%	27.279.281.702	100%	28.602.833.702,00	100%	29.993.219.160,00	100%	31.453.845.336,00	100%	176.359.425.481,00	SEKRETARIAT DAERAH	BALANGAN
Sasaran : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,53	82,55	32.557.855.566,00	83,6	26.472.390.015,00	83,7	27.279.281.702,00	84	28.602.833.702,00	84,5	29.993.219.160,00	85	31.453.845.336,00	85	176.359.425.481,00	PEMKAB BALANGAN	BALANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	32.557.855.566,00	100%	26.472.390.015,00	100%	27.279.281.702,00	100%	28.602.833.702,00	100%	29.993.219.160,00	100%	31.453.845.336,00	100%	176.359.425.481,00	SEKRETARIAT DAERAH	BALANGAN
MISI V : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF																		
Sasaran : Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	Indeks Desa Membangun	6395	6495	182.258.383.216,00	0,6595	148.540.849.783,00	0,6695	186.884.777.095,00	0,6795	196.708.947.354,50	0,6895	208.197.723.305,00	0,6995	215.056.131.429,00	0,6995	1.137.646.812.185,00		BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SASARAN : Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,32	5,4-5,2	2.059.314.696,00	5,3-5,0	5.326.833.103,00	5,2-5,0	5.593.174.758,00	5,1-4,9	6.152.492.233,50	5,0-4,8	6.767.741.456,00	4,9-4,7	7.444.515.602,00		33.344.071.851,00	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES	BALANGAN
	Angka PPKS yang tertangani	40,95	46,95		52,95		58,95		64,95		70,95		76,95		76,95			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	75%	390.646.900,00	78%	413.725.000,00	81%	434.411.250,00	84%	477.852.375,00	87%	525.637.612,00	90%	578.201.373,00	90%	2.820.474.511,00	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES	BALANGAN
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	prosentase cakupan ppks (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	100%	38.050.000,00	100%	500.915.500,00	100%	525.961.275,00	100%	578.557.402,50	100%	636.413.142,00	100%	700.054.457,00	100%	2.979.951.777,00	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES	BALANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial	100%	65%	1.630.617.796,00	67%	4.412.192.603,00	69%	4.632.802.233,00	71%	5.096.082.456,00	73%	5.605.690.702,00	75%	6.166.259.772,00	75%	27.543.645.563,00	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES	BALANGAN
SASARAN : Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif	Angka Konflik Sosial bernuansa SARA	0	0	578.088.000,00	0	877.570.000,00	0	241.500.000,00	0	265.650.000,00	0	292.215.000,00	0	321.436.500,00	0	2.576.459.500,00	KESBANGPOL	BALANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan	100%	100%	489.463.000,00	100%	777.570.000	100%	136.500.000	100%	150.150.000,00	100%	165.165.000,00	100%	181.681.500,00	100%	1.900.529.500,00	KESBANGPOL	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	100%	100%	88.625.000,00	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	115.500.000,00	100%	127.050.000,00	100%	139.755.000,00	100%	675.930.000,00	KESBANGPOL	BALANGAN
SASARAN : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	4.490.807.000,00	100%	4.064.825.000,00	100%	4.162.131.750,00	100%	4.578.344.925,00	100%	5.036.179.418,00	100%	5.539.797.359,00	100%	27.872.085.452,00	SATPOL PP	BALANGAN
	Indeks Resiko Bencana	139,89	139,89	2.900.839.022,00	139,89	3.439.429.110,00	139,89	1.749.170.500,00	139,89	1.924.087.550,00	139,89	2.116.496.305,00	139,89	2.328.145.936,00	139,89	14.458.168.423,00	BPBD	BALANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat	29	25	4.490.807.000,00	23	4.064.825.000,00	20	4.162.131.750,00	18	4.578.344.925,00	16	5.036.179.418,00	14	5.539.797.359,00	14	27.872.085.452,00	SATPOL PP	BALANGAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	100%	2.900.839.022,00	100%	3.439.429.110,00	100%	1.749.170.500,00	100%	1.924.087.550,00	100%	2.116.496.305,00	100%	2.328.145.936,00	100%	14.458.168.423,00	BPBD	BALANGAN
Sasaran : Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48%	52%	2.138.457.000,00	58%	860.890.000,00	68%	2.285.000.000,00	81%	2.755.000.000,00	87%	3.165.000.000,00	100%	3.600.000.000,00	100%	14.804.347.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	33,33%	40%	-	47%	-	60%	440.000.000,00	80%	500.000.000,00	87%	500.000.000,00	100%	560.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0	40%	1.304.185.000,00	50%	178.175.000,00	63%	420.000.000,00	75%	590.000.000,00	88%	760.000.000,00	100%	930.000.000,00	100%	4.182.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persenatase Kesenian tradisional yang dikembangkan	63%	63%		69%		75%		81%		88%		100%					
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	0	25%	438.317.000,00	33%	359.845.000,00	50%	380.000.000,00	67%	425.000.000,00	83%	470.000.000,00	100%	520.000.000,00	100%	2.593.162.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	53%	60%	395.955.000,00	67%	322.870.000,00	73%	1.045.000.000,00	80%	1.240.000.000,00	87%	1.435.000.000,00	100%	1.590.000.000,00	100%	6.028.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
Sasaran : Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	Indeks Desa Membangun	6395	6495	170.090.877.498,00	0,6595	133.971.302.570,00	0,6695	172.853.800.087,00	0,6795	181.033.372.646,00	0,6895	190.820.091.126,00	0,6995	195.822.236.032,00	0,6995	1.044.591.679.959,00		BALANGAN
PROGRAMPEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)/100000 kelahiran hidup	89	221	82.351.101.437,00	177	55.797.938.050,00	176	62.286.077.908,00	132	65.772.947.420,00	131	68.608.557.361,00	130	72.368.251.432,00	130	407.184.873.608,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALANGAN
	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	7	15		14		13		12		11		10		10			
	Prevalensi Stunting	25,70%	21%		18%		17%		16%		15%		14%		14%			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	-	75%	2.486.763.900,00	80%	2.327.316.000,00	85%	6.197.910.000,00	90%	4.516.910.000,00	95%	7.893.910.000,00	100%	3.463.910.000,00	**100%**	26.886.719.900,00	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES	BALANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD)yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	40%	45%	3.691.075.250,00	50%	5.260.403.700,00	55%	5.601.640.000,00	60%	6.688.690.000,00	65%	5.616.405.000,00	70%	5.634.075.500,00	70%	32.492.289.450,00	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES	BALANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	100%	2.900.839.022,00	100%	3.439.429.110,00	100%	1.749.170.500,00	100%	1.924.087.550,00	100%	2.116.496.305,00	100%	2.328.145.936,00	100%	14.458.168.423,00	BPBD	BALANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	68,65	77.789.817.889,00	70,75	66.144.445.710,00	72,85	95.714.990.507,00	74,95	100.719.325.387,00	77,05	105.056.168.942,00	79,15	110.371.444.294,00	79,15	555.796.192.729,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BALANGAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	91,89		93,69		95,49		97,29		99,09		100		100			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	74,56		76,26		77,96		79,66		81,36		83,06		83,06			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraaan	80,36	82,06		83,76		85,46		87,16		88,86		90,56		90,56			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase pengembangan kurikulum	100%	100%	-	100%	101.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	611.000.000,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	BALANGAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Sertifikasi	83%	84%	461.280.000,00	85%	695.770.000,00	86%	974.011.172,00	87%	1.071.412.289,00	88%	1.178.553.518,00	89%	1.296.408.870,00	89%	5.677.435.849,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	BALANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100%	100%	410.000.000,00	100%	205.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	215.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	1.485.000.000,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	BALANGAN

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Untuk proyeksi lima tahun ke depan, berdasarkan *trend linier* beberapa tahun sebelumnya maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan akan terus meningkat dengan *trend* positif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Balangan memiliki potensi riil untuk lebih mandiri. Namun terdapat beberapa asumsi yang harus tetap dijaga agar asumsi APBD Kabupaten Balangan tetap sehat, antara lain : asumsi belanja pegawai, asumsi belanja modal, dan Pos Pendapatannya pada komposisi PAD lebih ditingkatkan proporsinya daripada Dana Perimbangan.

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah KabupatenBalangan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Balangan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi.Jelasnya proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

Dalam rangka menyesuaikan dengan PP No.12/2019, maka kerangka pendanaan sebagaimana tertuang pada table 7.1 hal VII-2 sampai dengan VII-3 disesuaikan menjadi Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (PP 12 Tahun 2019)

Kode	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.177.660.512.378,44**	**1.293.572.850.765,33**	**1.355.502.206.377,30**	**1.420.497.588.875,39**	**1.488.712.641.552,45**	**1.560.308.781.137,51**	**5,81**
04:01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**83.961.793.282,00**	**82.961.793.282,00**	**87.404.008.519,80**	**92.090.393.937,52**	**97.034.812.500,50**	**102.251.944.406,59**	**4,05**
04:01:01	Pajak Daerah	11.765.022.948,00	11.765.022.948,00	12.647.399.669,10	13.595.954.644,28	14.615.651.242,60	15.711.825.085,80	6
04:01:02	Retribusi Daerah	1.733.889.000,00	1.733.889.000,00	1.820.583.450,00	1.911.612.622,50	2.007.193.253,63	2.107.552.916,31	4
04:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.847.692.278,00	10.847.692.278,00	11.390.076.891,90	11.959.580.736,50	12.557.559.773,32	13.185.437.761,99	4
04:01:04	Lain-lain PAD yang Sah	59.615.189.056,00	58.615.189.056,00	61.545.948.508,80	64.623.245.934,24	67.854.408.230,95	71.247.128.642,50	3,66
04:02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.058.383.470.715,44**	**1.184.843.057.483,33**	**1.242.157.697.857,50**	**1.302.289.882.437,87**	**1.365.379.283.739,45**	**1.431.572.527.785,60**	**6,26**
04:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	983.163.470.715,44	1.107.742.557.483,33	1.163.129.685.357,50	1.221.286.169.625,37	1.282.350.478.106,64	1.346.468.002.011,97	6,53
04:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.220.000.000,00	77.100.500.000,00	79.028.012.500,00	81.003.712.812,50	83.028.805.632,81	85.104.525.773,63	2,5
04:03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**35.315.248.381,00**	**25.768.000.000,00**	**25.940.500.000,00**	**26.117.312.500,00**	**26.298.545.312,50**	**26.484.308.945,31**	**-4,86**
04:03:01	Pendapatan Hibah	16.500.000.000,00	6.900.000.000,00	7.072.500.000,00	7.249.312.500,00	7.430.545.312,50	7.616.308.945,31	-9,64
04:03:03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.815.248.381,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00	18.868.000.000,00	0,06
	Jumlah Pendapatan	**1.318.024.859.857,29**	**1.315.497.008.462,80**	**1.326.917.975.458,82**	**1.359.316.971.758,51**	**1.355.383.929.658,67**	**1.375.236.203.787,55**	**0,86**
5	**BELANJA**							
05:01	**BELANJA OPERASIONAL**	**854.750.941.165,05**	**834.969.950.272,00**	**843.980.233.773,36**	**861.010.318.692,23**	**843.060.805.285,69**	**846.218.544.312,12**	**-0,19**
05:01:01	Belanja Pegawai	395.455.996.937,94	418.628.438.272,00	420.721.580.463,36	422.825.188.365,68	424.939.314.307,51	427.064.010.879,04	1,57
05:01:02	Belanja Barang dan Jasa	433.415.085.273,11	383.428.262.000,00	385.345.403.310,00	387.272.130.326,55	389.208.490.978,18	391.154.533.433,07	-1,91

Kode	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
05:01:04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0	0	0	0	0	-100
05:01:05	Belanja Hibah	19.304.844.758,00	27.913.250.000,00	32.913.250.000,00	45.913.000.000,00	23.913.000.000,00	23.000.000.000,00	10,05
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial	5.575.014.196,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-2,06
05:02	**BELANJA MODAL**	**258.756.214.498,72**	**277.429.651.906,00**	**278.767.598.053,70**	**289.009.352.461,29**	**301.842.882.089,25**	**315.297.267.886,11**	**4,05**
05:02:01	Belanja Modal Tanah	1.615.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	0	0	-25,39
05:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.068.128.416,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00	15.313.702.912,00	-12,72
05:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.630.450.665,92	42.047.058.050,00	32.500.000.000,00	33.312.500.000,00	34.145.312.500,00	34.998.945.312,50	-5,01
05:02:04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	168.093.490.416,80	217.700.083.954,00	228.585.088.151,70	240.014.342.559,29	252.015.059.687,25	264.615.812.671,61	9,9
05:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	349.145.000,00	368.806.990,00	368.806.990,00	368.806.990,00	368.806.990,00	368.806.990,00	1,13
05:03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**12.528.852.728,72**	**7.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**-12,25**
05:03:01	Belanja Tidak Terduga	12.528.852.728,72	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-12,25
05:04	**BELANJA TRANSFER**	**191.988.851.464,80**	**196.097.406.284,80**	**199.170.143.631,76**	**202.297.300.605,00**	**205.480.242.283,73**	**208.720.391.589,32**	**1,69**
05:04:01	Belanja Bagi Hasil	2.258.814.864,80	2.910.391.294,80	3.085.323.416,91	3.271.208.086,93	3.468.758.377,89	3.678.735.424,89	10,59
05:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	189.730.036.600,00	193.187.014.990,00	196.084.820.214,85	199.026.092.518,07	202.011.483.905,84	205.041.656.164,43	1,56
	Jumlah Belanja	**1.318.024.859.857,29**	**1.315.497.008.462,80**	**1.326.917.975.458,82**	**1.359.316.971.758,51**	**1.355.383.929.658,67**	**1.375.236.203.787,55**	**0,86**
	Total Surplus/(Defisit)	**-140.364.347.478,85**	**-21.924.157.697,47**	**28.584.230.918,48**	**61.180.617.116,88**	**133.328.711.893,79**	**185.072.577.349,96**	**-8,8**
6	**PEMBIAYAAN**	**142.364.347.478,85**	**96.770.151.096,80**	**98.191.118.092,82**	**120.590.114.392,51**	**116.657.072.292,67**	**136.509.346.421,55**	**1,2**
06:01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**141.364.347.478,85**	**86.770.151.096,80**	**93.191.118.092,82**	**120.590.114.392,51**	**116.657.072.292,67**	**136.509.346.421,55**	**2,39**
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.363.847.478,85	86.770.151.096,80	93.191.118.092,82	120.590.114.392,51	116.657.072.292,67	136.509.346.421,55	2,39
06:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000,00	0	0	0	0	0	-100
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**141.364.347.478,85**	**86.770.151.096,80**	**93.191.118.092,82**	**120.590.114.392,51**	**116.657.072.292,67**	**136.509.346.421,55**	**2,39**
06:02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**250**

Kode	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
06:02:02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	0	0	250
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**250**
	Pembiayaan Netto	**140.364.347.478,85**	**76.770.151.096,80**	**88.191.118.092,82**	**120.590.114.392,51**	**116.657.072.292,67**	**136.509.346.421,55**	**4,01**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**54.845.993.399,33**	**116.775.349.011,30**	**181.770.731.509,39**	**249.985.784.186,45**	**321.581.923.771,51**	**58,69**
	TOTAL APBD	**1.319.024.859.857,29**	**1.325.497.008.462,80**	**1.331.917.975.458,82**	**1.359.316.971.758,51**	**1.355.383.929.658,67**	**1.375.236.203.787,55**	**0,84**

7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Balangan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati Balangan, danpenyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untukpenyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritasyang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnyadijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas merupakan bentuk instrument kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah.Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuarapada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD).

Rencana program prioritas diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program prioritas sesuai permasalahan pembangunan masing-masing. Indikasi program prioritas jelas menyebutkan SKPD penanggungjawab dan disertai pagu indikatifnya.

Secara lebih lengkap dan terperinci, program prioritas dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	771.506.972.323	100%	679.854.338.101	100%	688.289.500.701	100%	714.334.226.272	100%	736.326.587.828	100%	777.281.185.572	100%	4.430.175.635.807	Semua PD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				78.661.097.889		67.146.215.710		97.019.001.679		102.130.737.676		106.584.722.460		112.027.853.164		563.569.628.578	
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	68,65	77.789.817.889	70,75	66.144.445.710	72,85	95.714.990.507	74,95	100.719.325.387	77,05	105.056.168.942	79,15	110.371.444.294	79,15	555.796.192.729	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	91,89		93,69		95,49		97,29		99,09		100		100		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	74,56		76,26		77,96		79,66		81,36		83,06		83,06		

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraaan	80,36	82,06		83,76		85,46		87,16		88,86		90,56		90,56		
01:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase pengembangan kurikulum	100%	100%	-	100%	101.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	611.000.000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
01:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Sertifikasi	83.26 %	83.76%	461.280.000	85%	695.770.000	86%	974.011.172	87%	1.071.412.289	88%	1.178.553.518	89%	1.296.408.870	89%	5.677.435.849	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
01:01:05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100%	100%	410.000.000	100%	205.000.000	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	220.000.000	100%	225.000.000	100%	1.485.000.000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				107.841.578.745	327,31	62.419.724.350	334,62	67.461.429.518	341,93	71.454.020.531	349,24	74.842.966.597	355,66	79.213.195.374	355,66	563.569.628.578	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 kelahiran hidup	89	221	82.351.101.437	177	55.797.938.050	176	62.286.077.908	132	65.772.947.420	131	68.608.557.361	130	72.368.251.432	130	407.184.873.608	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB
		Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	7	15		14		13		12		11		10		10		

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Prevalensi Stunting	25.70 %	21%		18.40%		17%		16%		15%		14%		14%		
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	87%	100%	24.687.675.308	100%	6.391.373.100	100%	4.750.210.410	100%	5.225.231.451	100%	5.747.754.596	100%	6.322.530.056	100%	53.124.774.921	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB
		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%	525.222.000	100%	36.120.000	100%	37.926.000	100%	41.718.600	100%	45.890.460	100%	50.479.506	100%	737.356.566	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	43%	45%	277.580.000	50%	194.293.200	55%	387.215.200	60%	414.123.060	65%	440.764.180	70%	471.934.380	70%	2.185.910.020	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB
01:03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				171.124.360.799		181.678.867.216		151.879.700.500		158.585.902.550		156.858.092.805		180.517.902.086		1.000.644.825.956	
01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	48.30 %	55.48%	113.042.358.080	66.07%	131.768.740.000	73.67%	91.750.000.000	79.31%	79.200.000.000	85.24%	83.000.000.000	88.47%	82.900.000.000	88.47%	581.661.098.080	Dinas PUPR PERKIM

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap	76.90 %	78.42%	13.572.295.200	80.06%	14.318.044.304	82.08%	1.800.000.000	84.61%	9.000.000.000	87.39%	13.800.000.000	90.17%	42.400.000.000	90.17%	94.890.339.504	Dinas PUPR PERKIM
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah dalam kondisi baik	11.29 %	11.79%	10.898.934.236	12.41%	6.811.450.000	13.03%	4.450.000.000	13.65%	5.650.000.000	14.27%	4.050.000.000	14.90%	7.350.000.000	14.90%	39.210.384.236	Dinas PUPR PERKIM
		Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik	21.53 %	23.09%	4.772.135.000	24.20%	2.442.960.000	28.31%	10.498.880.000	34.55%	13.700.000.000	39.24%	15.260.000.000	44.39%	8.720.000.000	44.39%	55.393.975.000	Dinas PUPR PERKIM
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	78.65 %	81.27%	7.793.459.000	82.27%	200.000.000	83.27%	5.000.000.000	84.27%	5.000.000.000	85.27%	5.000.000.000	86.27%	5.000.000.000	86.27%	27.993.459.000	Dinas PUPR PERKIM
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	91.88 %	92.40%	2.399.425.000	92.75%	1.969.406.000	93.76%	3.240.000.000	94.76%	3.864.000.000	95.76%	3.264.000.000	96.76%	3.290.400.000	96.76%	18.027.231.000	Dinas PUPR PERKIM
01:03:07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Permukiman yang dikembangkan	89.85 %		1.418.800.033	90.18%	9.191.655.000	90.52%	10.110.820.500	90.85%	11.121.902.550	91.19%	12.234.092.805	91.52%	13.457.502.086	91.52%	57.534.772.974	Dinas PUPR PERKIM
01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata (buah)	-	-		1	1.631.072.000	1	2.500.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	1.500.000.000	5	13.631.072.000	Dinas PUPR PERKIM

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89.27 %	89.38%	16.345.795.107	89.49%	11.845.539.912	89.60%	16.150.000.000	89.71%	20.150.000.000	89.82%	9.150.000.000	89.93	9.150.000.000	89.93%	82.791.335.019	Dinas PUPR PERKIM
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	34.6 %	40.0%	228.197.284	50.0%	500.000.000	60.0%	1.030.000.000	72.5%	1.150.000.000	85.0%	1.150.000.000	95.0%	1.350.000.000	95.0%	5.408.197.284	Dinas PUPR PERKIM
01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	10%	27%	652.961.859	42%	1.000.000.000	56%	5.350.000.000	75%	5.750.000.000	89%	5.950.000.000	100%	5.400.000.000	100%	24.102.961.859	Dinas PUPR PERKIM
01:04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				23.919.866.000		18.191.944.450		7.399.437.895		8.215.944.385		9.086.369.523		10.021.575.675		76.835.137.927	
01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	599.080.000	100%	816.406.000	100%	1.109.919.000	100%	1.266.469.000	100%	1.422.144.000	100%	1.582.319.000	100%	6.796.337.000	Dinas PUPR PERKIM
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,28 %	90,28%	-	95%	467.609.000	95%	667.609.000	96%	767.609.000	96%	867.609.000	97%	967.609.000	97%	3.738.045.000	Dinas PUPR PERKIM
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	71.40 %	74.08%	75.675.000	78.49%	1.405.942.450	84.78%	1.546.536.695	91.71	1.701.190.365	98.00	1.871.309.401	100%	2.058.440.341	100%	8.659.094.251	Dinas PUPR PERKIM

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	84%	85%	23.245.111.000	85%	15.501.987.000	87%	4.075.373.200	89%	4.480.676.020	91%	4.925.307.122	93%	5.413.207.334	85%	57.641.661.676	Dinas PUPR PERKIM
01:05	**KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				7.626.126.022		8.094.604.110		6.241.302.250		6.865.432.475		7.551.975.723		8.307.173.295		44.686.613.875	
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	25	4.490.807.000	23	4.064.825.000	20	4.162.131.750	18	4.578.344.925	16	5.036.179.418	14	5.539.797.359	14	27.872.085.452	SATPOL PP
01:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	100%	2.900.839.022	100%	3.439.429.110	100%	1.749.170.500	100%	1.924.087.550	100%	2.116.496.305	100%	2.328.145.936	100%	14.458.168.423	BPBD
01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	100%	100%	234.480.000	100%	590.350.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	2.356.360.000	BPBD
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				2.273.614.696		5.632.194.103		5.913.803.808		6.505.184.189		7.155.702.608		7.871.272.867		35.351.772.272	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	75%	390.646.900	78%	413.725.000	81%	434.411.250	84%	477.852.375	87%	525.637.613	90%	578.201.373	90%	2.820.474.511	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	100%	100%	29.300.000	100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	40.425.000	100%	44.467.500	100%	48.914.250	100%	234.856.750	
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	100%	38.050.000	100%	500.915.500	100%	525.961.275	100%	578.557.403	100%	636.413.143	100%	700.054.457	100%	2.979.951.777	
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial	100%	65%	1.630.617.796	67%	4.412.192.603	69%	4.632.802.233	71%	5.096.082.456	73%	5.605.690.702	75%	6.166.259.772	75%	27.543.645.563	
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	185.000.000	100%	270.361.000	100%	283.879.050	100%	312.266.955	100%	343.493.651	100%	377.843.015	100%	1.772.843.671	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				242.362.634		2.588.869.600		9.750.000.000		10.376.500.000		11.518.000.000		10.832.750.000		45.308.482.234	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	8.73 %		-	30.00%	121.422.000,00	30.00%	100.000.000,00	30.00%	100.000.000,00	30.00%	100.000.000,00	30.00%	100.000.000,00	30%	521.422.000,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi	6.95 %	4.00%	150.052.634,00	4.00%	1.878.645.100,00	4.00%	7.991.000.000,00	4.00%	8.568.500.000,00	4.00%	9.643.500.000,00	4.00%	8.884.000.000,00	40%	37.115.697.734,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	64.26 %	65.00%	35.750.000,00	65%	222.122.500,00	55%	1.035.000.000,00	60%	1.035.000.000,00	65%	1.035.000.000,00	65%	1.035.000.000,00	65%	4.397.872.500,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPHI yang difasilitasi	100.00%	100.00%	56.560.000,00	100.00%	366.680.000,00	100.00%	624.000.000,00	100.00%	673.000.000,00	100.00%	739.500.000,00	100.00%	813.750.000,00	100%	3.273.490.000,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100%		
02:08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				1.005.284.100		1.647.974.300		1.671.462.100		1.747.380.960		1.832.119.058		1.925.330.963		9.742.205.680	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	12.35 %	18%	660.025.000	21%	1.004.335.000	21.05%	1.005.000.000	21.10%	1.015.500.000	21.15%	1.027.050.001	21.20%	1.039.755.000	21.20%	5.751.665.001	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	69:55:00	70.77		72		73:02:00		74:04:00		75		76		76		
		IPG (Indeks Pembangunan gender)	92:12:00	92.71		92.74		92.77		92:08:00		92.83		92.86		92.86		
02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	40.466.400	100%	65.103.000	100%	68.358.150	100%	75.193.965	100%	82.713.362	100%	90.984.698	100%	**422.819.574**	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	18.36 %	17.86%	87.345.800	17.26%	173.937.300	16.56%	176.335.000	15.76%	193.968.500	14.86%	213.365.350	13.86%	234.701.885	13.86%	992.308.035	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:08:05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100%	100%	62.227.300	100%	94.445.000	100%	99.167.250	100%	109.083.975	100%	119.992.373	100%	131.991.610	100%	616.907.508	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak	0	0	120.534.800	68	207.540.000	68:25:00	217.587.000	68:50:00	238.611.450	68.75	262.472.595	69	288.719.855	69	1.335.465.700	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100%	100%	34.684.800	100%	102.614.000	100%	105.014.700	100%	115.023.070	100%	126.525.377	100%	139.177.915	100%	623.039.862	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				2.302.366.000		1.491.034.800		1.291.547.192		1.316.178.333		1.335.194.200		1.368.945.642		9.105.266.167	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	10	10%	1.199.591.000	12%	297.780.000	13%	303.735.600	14%	309.810.400	15%	316.006.700	15%	322.326.912	15%	2.749.250.612	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	87:04:00	87,4	1.080.455.000	87,4	919.739.800	87,5	711.554.988	87,6	724.586.196	87,7	731.769.900	87,8	753.452.724	87,8	4.921.558.608	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	5			5	168.160.000	5	168.687.200	5	172.060.944	5	175.502.300	5	179.012.400	5	863.422.844	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasepangan segar asaltumbuhan yang memenuhipersyaratanmutu dan keamananpangan	90%	80%	22.320.000	80%	105.355.000	80%	107.569.404	80%	109.720.793	80%	111.915.300	80%	114.153.606	80%	571.034.103	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
02:10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				277.381.000		300.000.000		312.600.000		312.600.000		312.600.000		312.600.000		1.827.781.000	
02:10:02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	100%	12.000.000	100%	12.200.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	124.200.000	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	-	49.640.000	100%	46.753.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	296.393.000	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100%	-		100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	18.000.000	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	100%	201.491.000	100%	220.460.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	1.301.951.000	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	100%	14.250.000	100%	16.987.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	87.237.000	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				14.996.825.756		7.249.941.200		11.058.100.000		11.053.800.000		11.593.400.000		12.377.200.000		68.329.266.956	
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	486.770.000	100%	218.010.000	100%	1.200.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	5.104.780.000	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	631.430.700	100%	797.444.000	100%	1.900.000.000	100%	1.900.000.000	100%	1.900.000.000	100%	1.900.000.000	100%	9.028.874.700	-
02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	100%	100%	656.472.000	100%	1.928.362.900	100%	330.000.000	100%	355.000.000	100%	380.000.000	100%	405.000.000	100%	4.054.834.900	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	65.350.000	100%	99.960.000	100%	170.500.000	100%	178.200.000	100%	191.200.000	100%	205.400.000	100%	910.610.000	-
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	100%	82.570.000	100%	44.561.300	100%	166.400.000	100%	173.200.000	100%	185.400.000	100%	198.800.000	100%	850.931.300	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	100%	23.090.000	100%	35.000.000	100%	161.600.000	100%	168.000.000	100%	179.900.000	100%	192.700.000	100%	760.290.000	-
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	-	100%	35.645.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.235.645.000	-
02:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100	66.300.000	100%	131.590.000	100%	150.400.000	100%	156.300.000	100%	167.700.000	100%	179.700.000	100%	851.990.000	-
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	329.980.000	100%	50.900.000	100%	79.200.000	100%	83.100.000	100%	89.200.000	100%	95.600.000	100%	727.980.000	-

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	72.55 %	99%	12.654.863.056	99%	3.908.468.000	99%	6.600.000.000	99%	6.740.000.000	100%	7.200.000.000	100%	7.700.000.000	100%	44.803.331.056	-
02:12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				828.935.200		602.887.000		1.014.116.460		1.115.528.106		1.227.080.917		1.349.789.008		4.713.456.871	
02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-KK 100%	-KK 100%	266.262.000	-KK 100%	236.302.000	-KK 100%	307.020.000	-KK 100%	337.722.000	-KK 100%	371.494.200	-KK 100%	408.643.620	-KK 100%	502.564.000	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
			- KTP-el 9895 %	- KTP-el 9895%		- KTP-el 9895%		- KTP-el 9895%		- KTP-el 100%		- KTP-el 100%		- KTP-el 100%		- KTP-el 100%		
			- KIA 2329 %	- KIA 2329%		- KIA 30%		- KIA 40%		- KIA 50%		- KIA 60%		- KIA 70%		- KIA 70%		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	64,17 %	100%	160.173.200	73%	177.979.000	75%	370.565.160	78%	407.621.676	80%	448.383.844	83%	493.222.228	83%	2.057.945.108	
02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	394.800.000	100%	174.366.000	100%	321.579.300	100%	353.737.230	100%	389.110.953	100%	428.022.048	100%	2.061.615.531	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	7.700.000	100%	14.240.000	100%	14.952.000	100%	16.447.200	100%	18.091.920	100%	19.901.112	100%	91.332.232	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
02:13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				7.701.619.150		7.700.000.000		12.129.550.000		11.565.600.000		13.875.315.000		9.477.985.500		62.450.069.650	
02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	40%	45%	3.691.075.250	50%	5.260.403.700	55%	5.601.640.000	60%	6.688.690.000	65%	5.616.405.000	70%	5.634.075.500	70%	32.492.289.450	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:13:05	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	Program baru di 2021	1 Kerjasama	1.523.780.000	1 Kerjasama	112.280.300	1 Kerjasama	330.000.000	1 Kerjasama	360.000.000	1 Kerjasama	365.000.000	1 Kerjasama	380.000.000	**5 kerjasama**	3.071.060.300	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Program baru di 2021	75%	2.486.763.900	80%	2.327.316.000	85%	6.197.910.000	90%	4.516.910.000	95%	7.893.910.000	100%	3.463.910.000	**100%**	26.886.719.900	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				2.193.532.500		778.498.000		1.634.864.800		2.065.375.600		2.036.481.800		2.211.204.300		10.919.957.000	
02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduuduk (LPP)	01:17	01:12	23.024.000	1,09	129.720.000	01:08	457.864.800	01:07	729.375.600	01:06	596.481.800	01:05	645.204.300	01:05	2.581.670.500	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB
02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	81.21 %	81.25%	2.144.292.500	81.27%	467.180.000	81.29%	788.000.000	81.30%	907.000.000	81.31%	984.000.000	81.33%	1.082.000.000	81.33%	6.372.472.500	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB
02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	24.71	23	26.216.000	21	181.598.000	20:58	389.000.000	20:32	429.000.000	20:03	456.000.000	19:32	484.000.000	19:32	1.965.814.000	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,81 %	0,71%		0,71%		0.70%		0,69%		0,68%		0,67%		0,67%		
02:15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				7.105.559.500		6.888.774.600		8.301.213.000		8.556.544.000		8.163.888.000		9.711.225.500		48.727.204.600	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	78%	78%	7.105.559.500	82%	6.888.774.600	86%	8.301.213.000	91%	8.556.544.000	95%	8.163.888.000	100%	9.711.225.500	100%	48.727.204.600	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	19.48 %	23.42%		39.48%		57.95%		85.97%		91.18%		100%		100%		
		Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	20.00 %	20.00%		26.67%		36.67%		53.33%		76.67%		100.00%		100.00%		
		Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	33.33 %	44.44%		55.56%		66.67%		77.78%		88.89%		100%		100%		
		Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	15.8 %	36.8%		66.7%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	00:28	00:29		00:32		00:35		00:39		00:42		00:47		00:47		
02:16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				8.721.881.098		6.823.937.691		8.388.194.531		9.517.660.454		10.709.304.058		12.468.776.914		56.629.754.746	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:16:02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat (%)	75%	80%	2.548.313.098	80%	3.818.586.491	85%	3.023.916.031	90%	3.316.954.104	95%	3.638.527.073	100%	3.990.922.230	100%	20.337.219.027	Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase Publikasi di Media Massa	75%	80%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		Dinas Kominfo Statistik & Persandian
02:16:03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62%	62%	6.173.568.000	10%	3.005.351.200	20%	5.364.278.500	20	6.200.706.350	25.00	7.070.776.985	25%	8.477.854.684		36.292.535.719	Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	0%		18%		18%		18%		23%		23%		100		Dinas Kominfo Statistik & Persandian
02:17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**				2.359.081.900		846.944.100		1.504.618.060		1.655.079.866		1.820.587.852		2.002.646.639		10.188.958.418	
02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	2,72	2.00	9.250.000	3.00	75.470.400	4.00	220.889.614	5.00	242.978.575	6.00	267.276.433	7.00	294.004.076	7	1.109.869.099	Dinas Koperasi UKM Perindustrian &Perdagangan

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	8,18	10.18	39.126.000	10.18	64.445.000	10.18	76.753.930	10.18	84.429.323	10.18	92.872.255	10.18	102.159.481	10,18	459.785.989	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
		Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	26,64	27.00	182.774.800	28.00	229.647.600	29.00	441.526.096	30.00	485.678.706	31.00	534.246.576	32.00	587.671.234	32	2.461.545.012	
02:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	0,43	0.30	1.780.000.000	0.30	129.450.000	0.32	382.724.210	0.34	420.996.631	0.36	463.096.294	0.38	509.405.924	0,38	3.685.673.059	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
02:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Sudah Menerapkan E-Commerce	00:43	0,3	347.931.100	0,3	347.931.100	0,32	382.724.210	0,34	420.996.631	0,36	463.096.294	0,38	509.405.924	0,38	2.472.085.259	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
02:18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				591.245.000		503.150.000		564.116.500		620.528.150		682.581.765		750.839.062		3.712.460.477	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	2	219.200.000,00	2	62.370.000,00	2	131.277.000,00	2	144.404.700,00	2	158.845.970,00	2	174.729.687,00	12	890.827.357,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan		1		1		1		1		1		1		6		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	100%	200	0	200	65.640.000,00	210	68.923.000,00	220	75.815.300,00	230	83.396.830,00	240	91.736.513,00	1,3	385.511.643,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi &

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Tenaga Kerja
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	289.225.000,00	100%	95.830.000,00	100%	92.252.000,00	100%	101.477.200,00	100%	111.624.920,00	100%	122.787.412,00	100%	813.196.532,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	100%	62.720.000,00	100%	133.400.000,00	100%	132.744.500,00	100%	146.018.950,00	100%	160.620.845,00	100%	176.682.929,50	100%	812.187.225	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
		Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	0	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	20.100.000,00	100%	145.910.000,00	100%	138.920.000,00	100%	152.812.000,00	100%	168.093.200,00	100%	184.902.520,00	100%	810.737.720	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
02:19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				3.675.277.500		1.989.974.260		2.188.971.686		2.407.868.855		2.648.655.741		2.913.521.314		15.824.269.356	
02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wira usaha muda	-	5%	494.940.900	10%	587.241.000	15%	645.965.100	20%	710.561.610	25%	781.617.771	30%	859.779.548	30%	4.080.105.929	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan		10%		20%		30%		40%		50%		60%		60%		
02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga yang diraih	-	20%	2.980.336.600	30%	1.327.731.760	40%	1.460.504.936	50%	1.606.555.430	60%	1.767.210.973	70%	1.943.932.070	70	11.086.271.769	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
02:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	60%	200.000.000	60%	75.001.500	60%	82.501.650	60%	90.751.815	60%	99.826.997	60%	109.809.696	60%	657.891.658	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
02:02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				344.200.000		890.800.000		979.880.000		1.077.868.000		1.185.654.800		236.352.325		4.714.755.125	
02:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	50%	60%	344.200.000	-	890.800.000	75%	979.880.000	80%	1.077.868.000	90%	1.185.654.800	100%	236.352.325	100%	4.714.755.125	Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase OPD yang memiliki sistem aplikasi	0%			25%		50%		70%		90%		100%		100%		Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase desa telah mengakses sistem informasi data	0%			25%		50%		70%		90%		100%		100%		Dinas Kominfo Statistik & Persandian

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				14.698.050		109.574.400		120.531.840		132.585.024		145.843.526		160.427.879		683.660.719	
02:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan informasi yg berhasil dilaksanakan	10%	10%	14.698.050	20%	109.574.400	40%	120.531.840	60%	132.585.024	80%	145.843.526	100%	160.427.879	100%	683.660.719	Dinas Kominfo Statistik & Persandian
02:22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				2.138.457.000		860.890.000		2.285.000.000		2.755.000.000		3.165.000.000		3.600.000.000		14.804.347.000	
02:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	33.33 %	40.00%	-	47.00%	-	60.00%	440.000.000	80.00%	500.000.000	86.67%	500.000.000	100.00%	560.000.000	100.00%	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
02:22:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0.00 %	40.00%	1.304.185.000	50.00%	178.175.000	62.50%	420.000.000	75.00%	590.000.000	87.50%	760.000.000	100.00%	930.000.000	100.00%	4.182.360.000	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Persenatase Kesenian tradisional yang dikembangkan	62.50 %	62.50%		68.75%		75.00%		81.25%		87.50%		100.00%		100.00%		
02:22:04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	0.00 %	25.00%	438.317.000	33.33%	359.845.000	50.00%	380.000.000	66.67%	425.000.000	83.33%	470.000.000	100.00%	520.000.000	100.00%	2.593.162.000	Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02:2 2:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	53.33 %	60.00%	395.955.000	66.70%	322.870.000	73.33%	1.045.000.000	80.00%	1.240.000.000	86.66%	1.435.000.000	100.00%	1.590.000.000	100.00%	6.028.825.000	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
02:2 3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				1.131.342.400		1.138.400.000		686.109.900		754.720.890		830.192.979		913.212.277		5.453.978.446	
02:2 3:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90%	95%	1.047.807.700	13%	1.025.040.000	15%	494.382.000	17%	543.820.200	20%	598.202.220	22%	658.022.442	22%	4.367.274.562	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
02:2 3:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	10%	90%	83.534.700	20%	113.360.000	30%	191.727.900	40%	210.900.690	50%	231.990.759	60%	255.189.835	60%	1.086.703.884	
02:2 4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				237.878.700		514.000.000		262.500.000		288.750.000		317.625.001		349.387.500		1.829.866.700	
02:2 4:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip daerah	Program baru di 2021	100%	20.195.600	10%	46.425.000	20%	21.026.250	30%	23.128.875	40%	25.441.763	50%	27.985.939	50%	151.584.126	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
######	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Program baru di 2021	100%	217.683.100	6.67%	451.875.000	16.67%	238.848.750	30%	262.733.625	46.67%	289.006.988	66.67%	317.907.686	66.67%	1.663.599.949	
02:24:04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentasi Pelayanan Perijinan dan Penggunaan Arsip	Program baru di 2022	-	-	20%	15.700.000	40%	2.625.000	60%	2.887.500	80%	3.176.250	100%	3.493.875	100%	14.682.625	
	URUSAN PILIHAN PEMERINTAH DAERAH																	
03:25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN**				5.620.340.000		3.783.846.350		4.191.398.750		4.610.538.626		5.071.592.487		5.578.751.736		5.578.751.736	
03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	952.09	0		1%	105.000.000	1%	110.250.000	1%	121.275.000	1%	133.402.500	1%	146.742.750	5%	146.742.750	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
03:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Budidaya Ikan (ton)	884,92	10%	5.403.977.100	10%	3.468.723.337	10%	3.642.159.503	10%	4.006.375.454	10%	4.407.012.999	10%	4.847.714.299	60%	4.847.714.299	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
03:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	270 Ha	0,70%	98.560.900	0,70%	187.016.126	0,70%	196.366.933	0,70%	216.003.626	0,70%	237.603.988	0,70%	261.364.387	4,20%	261.364.387	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	46	46%	117.802.000	46,25%	23.106.887	46,50%	242.622.314	4700&	266.884.546	47,50%	293.573.000	48,00%	322.930.300	48%	322.930.300	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
03:26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				1.736.045.400		1.500.000.000		2.055.364.300		2.260.900.330		2.486.989.220		2.735.685.500		12.774.984.750	
03:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	Persentase Kunjungan Wisata	83.69	10%	768.194.000	20%	1.099.596.000	40%	1.309.656.700	60%	1.440.622.370	80%	1.584.683.755	100%	1.743.151.000	100.00	7.945.903.825	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
03:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama kunjungan wisata	-	1 hari	765.495.000	1 hari	234.376.000	2 hari	455.401.100	2 hari	500.941.210	2 hari	551.035.000	2 hari	606.138.500	2 hari	3.113.386.810	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
03:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kelompok sadar wisata	25%	10%	202.356.400	10%	166.028.000	20%	290.306.500	20%	319.336.750	20%	351.270.465	20%	386.396.000	100	1.715.694.115	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
		Persentase produk kreasi unggulan	-	10%		20%		30%		40%		50%		60%		60%		
03:27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				34.939.472.598		24.908.371.000		26.153.789.551		27.461.479.028		28.834.552.979		30.276.280.628		172.573.945.783	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	1000 Kg/Ha	0.25%	20.486.554.920	0,50%	16.369.904.650	0,75%	17.188.399.883	1,00%	18.047.819.877	1,25%	18.950.210.870	1,50%	19.897.721.414	1,50%	110.940.611.614	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	3 Ton/Ha	2,67%		2,68%		2,69%		2,70%		2,71%		2,72%		2,72%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		persentase Produktifitas Hortikultura (Ton/Ha)	53.469 kwintal/ha	0,12%		0,13%		0,14%		0,15%		0,16%		0,17%		0,17%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	140 Orang	50%		51,00%		52%		53%		54%		55%		55%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi Daging	1933.289Kg	3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		21%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	140 ekor	6%		6%		6%		6%		6%		6%		36%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan sarana Pertanian		5%		5%		5%		5%		5%		5%		30%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	124 unit	36%	13.923.187.678	42,50%	5.793.946.960	49%	6.083.644.308	55,50%	6.387.826.523	62%	6.707.217.850	68,50%	7.042.578.742	68,50%	45.938.402.061	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
		Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	18 Buah	6%		6%		6%		6%		6%		6%		36%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	938 ekor	0,20%	58.660.000	0,20%	400.023.090	0,20%	420.024.245	0,20%	441.025.457	0,20%	463.076.730	0,20%	486.230.566	1,20%	2.269.040.087	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	1000 Ha	3%	108.690.000	8%	488.103.100	13%	512.508.255	18%	538.133.668	23%	565.040.351	30%	593.292.369	30%	2.805.767.743	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
		Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	4000 Ha	5%		6%		7%		8%		9%		10%		10%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
		Persentase SDM Terampil tanaman pangan dan Hortikultura Di tiap Kecamatan	100 Orang	10%		12%		14%		16%		18%		20%		20%		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Pengembangan Korporasi Petani	Kab Balangan	27 (2.29%)	362.380.000	5%	1.856.393.200	6,30%	1.949.212.860	7,70%	2.046.673.503	10,40%	2.149.007.178	100%	2.256.457.537	100%	10.620.124.278	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentasi Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh Sertifikat	Kab Balangan	4400	0		0		0		0		1		1			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian &Perikanan
03:30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				1.849.211.250		1.411.091.000		1.459.569.300		1.386.650.500		1.726.327.450		1.882.861.160		9.915.710.660	
03:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sapras	50.00	40.00	763.033.650	44.44	784.340.000	60.00	742.171.500	70.00	816.388.700	80.00	898.027.650	90.00	987.830.550	90	4.991.792.050	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi(%)	15.00	15.00	665.185.800	26.00	198.602.900	29.05	238.533.100	57.00	62.386.450	59.00	288.625.100	68.00	317.487.700	68.00	1.970.821.050	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga	20.00	20.00		25.00	33.200.000	27.00	45.000.000	30.00	49.500.000	33.00	54.450.000	35.00	59.895.000	35.00	242.045.000	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	74.00	76.00	219.567.100	77.00	240.480.100	78.00	238.578.000	79.00	242.559.900	80.00	248.927.600	81.00	257.720.930	81.00	1.447.833.630	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
		Persentase alat – alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	17.00	27.00		20.00		22.00		24.00		26.00		28.00		30.00		

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	8.08	8.00	170.124.600	7.80	123.778.000	7.60	129.966.950	7.40	142.963.700	7.00	157.260.150	6.80	172.986.280	6.80	897.079.680	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	4.80	7.00	31.300.100	9.00	30.690.000	12.00	65.319.750	15.00	72.851.750	18.00	79.036.950	20.00	86.940.700	20.0tarikwisay0	366.139.250	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				276.286.600		1.038.965.000		1.238.750.000		1.263.750.000		1.312.500.000		1.346.750.000		6.477.001.600	
03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	4.10	10.00	161.318.000	10.00	94.627.400	10.00	321.750.000	10.00	331.750.000	10.00	365.500.000	10.00	375.500.000	64.10	1.650.445.400	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	5.83	6.79	34.484.000	7.75	54.897.600	8.71	215.750.000	10.10	225.750.000	11.31	235.750.000	12.61	245.750.000	12.61	1.012.381.600	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	-	0.19	80.484.600	0.38	889.440.000	0.58	701.250.000	1.58	706.250.000	2.58	711.250.000	3.58	725.500.000	3.58	3.814.174.600	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
03:32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				60.079.800		226.457.000		480.800.000		507.380.000		536.618.000		1.186.446.800		2.997.781.600	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	0	8,00%	12.522.400,00	0,00%	0	16%	265.800.000,00	16%	292.380.000,00	16%	321.618.000,00	16%	353.779.800,00	72%	1.246.100.200,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	18,76 %	19,12%	47.557.400,00	18,91%	226.457.000,00	19,05%	215.000.000,00	19,20%	215.000.000,00	19,35%	215.000.000,00	19,50%	832.667.000,00	19,50%	1.751.681.400,00	Dinas Namdal, PTSP, Transmigrasi & Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
04:01	**SEKRETARIAT DAERAH**				21.024.479.500		19.174.003.700		17.133.215.940		17.482.786.656		17.846.504.265		18.125.742.950		110.786.733.011	
04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas	-	100%	19.638.398.000	100%	17.934.266.900	100%	15.475.473.310	100%	15.675.473.310	100%	15.875.473.310	100%	15.975.473.310	100%	100.574.558.140	Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan di bidang Bina Mental dan Spiritual bidang Kesejahteraan Rakyat dan bidang Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana dan berkualitas	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase kebijakan di bidang Perundang-Undangan bidang Bantuan Hukum dan bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
04:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD bidang perekonomian bidang sumber daya alam terlaksana dan berkualitas	-	100%	1.386.081.500	100%	1.239.736.800	100%	1.657.742.630	100%	1.807.313.346	100%	1.971.030.955	100%	2.150.269.640	100%	10.212.174.871	Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan di bidang pengelolaan PBJ bidang Pengelolaan LPSE bidang Pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana dan berkualitas	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program evaluasi serta pelaporan yang terlaksana dan berkualitas	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
04:02	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**				29.804.993.514		12.259.679.500		9.127.224.480		10.039.946.928		11.043.941.621		12.148.335.783		84.424.121.826	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	–	IKM minimal Baik	29.804.993.514	IKM minimal Baik	12.259.679.500	IKM minimal Baik	9.127.224.480	IKM minimal Baik	10.039.946.928	IKM minimal Baik	11.043.941.621	IKM minimal Baik	12.148.335.783	IKM minimal Baik	84.424.121.826	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
06:01	**INSPEKTORAT DAERAH**				2.105.418.000		1.997.070.000		2.244.902.000		2.469.392.200		2.743.765.420		3.018.141.962		14.578.689.582	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	95%	75%	1.353.843.000	75%	1.197.050.000	78%	1.364.880.000	80%	1.501.368.000	82%	1.678.938.800	85%	1.846.832.680	85%	8.942.912.480	Inspektorat
06:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	0	WBBM : 1	751.575.000	WBK :1 WBBM : 1	800.020.000	WBK :1 WBBM : 2	880.022.000	WBK :2 WBBM : 2	968.024.200	WBK :2 WBBM : 3	1.064.826.620	WBK :3 WBBM : 4	1.171.309.282	WBK :3 WBBM : 4	5.635.777.102	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	100	3 (3,02)		3 (3,02)		3 (3,05)		3 (3,1)		3 (3,15)		3 (3,2)		3 (3,2)		
		Level kapabilitas APIP	100	3		3		3		3		3		3		3		

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Indeks Integritas	77,28	78		78		79		80		81		82		82		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
05:01	**PERENCANAAN**				4.765.540.066		4.782.752.800		5.220.933.080		5.743.026.358		6.317.328.993		6.949.061.892		33.778.643.189	
05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)		98.2%	3.787.148.300	98,4%	2.992.334.800	98,6%	3.251.473.280	98,8%	3.576.620.578	99%	3.934.282.635	99,2%	4.327.710.898	99,2%	21.869.570.491	Bappeda Litbang
05:01:03	PROGRAMKOORDINASI DAN SINKORONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan		91	978.391.766	92	1.790.418.000	93	1.969.459.800	94	2.166.405.780	95	2.383.046.358	96	2.621.350.994	96	11.909.072.698	Bappeda Litbang
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan		91		92		93		94		95		96		96		

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		91		92		93		94		95		96		96		
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		91		92		93		94		95		96		96		
05:02	**KEUANGAN**				210.159.006.198		208.467.356.675		205.972.788.551		206.271.427.977		206.898.570.776		207.588.427.853		1.245.357.578.030	
05:02:02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	87	87	207.888.328.808	87	205.730.570.235	87	203.324.295.863	88	203.490.510.656	89	203.839.561.722	90	204.223.517.894	90	1.228.496.785.178	BPKPAD
05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	38	38.91	1.155.408.026	40	1.637.030.050	42	1.493.748.478	45	1.568.435.901	48	1.725.279.492	52	1.897.807.441	52	9.477.709.388	BPKPAD
05:02:04	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PBB P-2 dan BPHTB % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB dan Persentase Pendapatan non PAD	100%	100%	1.115.269.364	100%	1.099.756.390	100%	1.154.744.210	100%	1.212.481.420	100%	1.333.729.562	100%	1.467.102.518	100%	7.383.083.464	BPKPAD

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05:03	**KEPEGAWAIAN**				2.524.227.200		5.375.980.100		2.766.022.500		2.766.022.500		2.766.022.500		2.766.022.500		18.964.297.300	
05:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.71	85	2.524.227.200	90	5.375.980.100	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	90	18.964.297.300	BKPSDM
		Indeks Profesionalitas (IP) ASN	67:06:00	69		75		80		85		86		87		87		
		Indeks Sistem Merit	257	265		270		270		275		300		325		325		
		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	-	45		50		60		65		70		75		75		
05:04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				697.235.200		2.084.311.900		2.646.658.140		2.699.591.303		2.753.583.129		2.808.654.791		13.690.034.463	

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	57%	65%	697.235.200	70%	2.084.311.900	75%	2.646.658.140	80%	2.699.591.303	85%	2.753.583.129	90%	2.808.654.791	90%	13.690.034.463	BKPSDM
		Persentasi Calon ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Latsar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
05:05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.924.424.800**		**1.123.759.900**		**1.236.135.890**		**1.359.749.479**		**1.495.724.426**		**1.645.296.868**		**8.785.091.363**	
05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi	1.616	50 (Inovatif)	1.924.424.800	55 (Inovatif)	1.123.759.900	60 (Sangat Inovatif)	1.236.135.890	65 (Sangat Inovatif)	1.359.749.479	70 (Sangat Inovatif)	1.495.724.426	75 (Sangat Inovatif)	1.645.296.868	75 (Sangat Inovatif)	8.785.091.363	Bappeda Litbang
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	70	100		100		100		100		100		100		100		
UNSUR KEWILAYAHAN																		
7.01	**KECAMATAN**				**5.404.102.600**		**4.932.960.186**		**5.203.862.390**		**5.784.158.822**		**7.787.415.075**		**6.967.483.084**		**23.056.310.038**	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		100; 100 Persen; Persen		100; 100 Persen; Persen	**68.193.200,00**	100; 100 Persen; Persen	**54.771.780,00**	100; 100 Persen; Persen	**63.118.000,00**	100; 100 Persen; Persen	**69.429.800,00**	100; 100 Persen; Persen	**76.372.750,00**	100; 100 Persen; Persen	**84.010.000**	Kec. Lampihong

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	85%	**126.096.200**	85%	**75.438.800**	86%	**79.210.740**	87%	**87.131.814**	88%	**95.844.995**	89%	**105.429.495**	90%	**443.055.845**	Kec. Paringin
		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan			**93.624.000**	87,5	**106.327.736**	88	**110.000.000**	88,5	**120.000.000**	89	**125.000.000**	89,5	**135.000.000**	89,5	**689.951.736**	Kec. Batumandi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**80%**		**80%**	**98.523.500,00**	**80%**	**108.375.850,00**	**80%**	**119.213.435,00**	**80%**	**836.261.976,00**	**80%**	**144.248.256,35**	**80%**	**144.248.256**	Kec. Juai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**85%**	**85%**	**205.704.200**	**86%**	**117.435.000**	**87%**	**123.306.750**	**88%**	**135.637.425**	**89%**	**149.201.168**	**90%**	**164.121.284**	**85%**	**164.121.284**	Kec. Paringin Selatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**80**	**80**	**107.327.000**	**82**	**108.420.000**	**83**	**113.850.000**	**84**	**125.250.000**	**85**	**137.775.000**	**86**	**151.550.000**	**86**	**636.845.000**	Kec. Halong
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		100%		100%	140.309.400	100%	154.340.350	100%	169.774.400	100%	186.751.850	100%	205.427.000	100%	856.603.000	Kec. Tebing Tinggi
		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	**56.185.000**	100%	**61.885.000**	100%	**56.185.000**	100%	**65.185.000**	100%	**66.185.000**	100%	**76.185.000**	100%	**381.810.000**	Kec. Awayan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100%		100%	318.729.600,00	100%	329.873.040,00	100%	380.139.450,00	100%	418.153.400,00	100%	459.968.700,00	100%	505.965.600	Kec. Lampihong
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100% 100%	100%	**2.245.090.000**	100%	**245.750.000**	100%	**258.037.500**	100%	**283.841.250**	100%	**312.225.375**	100%	**343.447.913**	100%	**1.443.302.038**	Kec. Paringin
		Persentase akomodasi usulan			**268.895.400**	100%	**267.080.000**	100%	**270.000.000**	100%	**280.000.000**	100%	**315.000.000**	100%	**330.000.000**	100%	**1.730.975.4**	Kec. Batumandi

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		hasil musrenbang kecamatan															**00**	
		Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan		**45%**		**52%**	**10.897.500,00**	60%	**11.987.250,00**	65%	**13.185.975,00**	70%	**524.723.457,50**	75%	**15.955.029,75**	75%	**17.550.533**	Kec. Juai
		Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan	100%	100%	**6.525.000**	100%	**0**	100%	**5.832.750**	100%	**6.416.025**	100%	**6.416.025**	100%	**7.057.628**	100%	**7.763.390**	Kec. Paringin Selatan
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	100%	100%	**0**	100%	**275.700.000**	100%	**328.860.000**	100%	**361.750.000**	100%	**361.750.000**	100%	**437.700.000**	100%	**1.765.760.000**	Kec. Halong
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100%	100%	**264.240.000**	100%	**267.740.000**	100%	**267.740.000**	100%	**267.740.000**	100%	**267.740.000**	100%	**267.740.000**	100%	**1.602.940.000**	Kec. Awayan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100%	0	100%	33.472.600,00	100%	30.353.190,00	100%	34.978.500,00	100%	38.476.300,00	100%	42.323.950,00	100%	46.556.350	Kec. Lampihong
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor			0	100%	**7.650.000**	100%	**8.032.500**	100%	**8.835.750**	100%	**9.719.325**	100%	**10.691.258**	100%	**44.928.833**	Kec. Paringin

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan pemerintahan umum dan trantib, koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan wasbang dengan lintas sektor	0		**13.200.000**	100%	**11.750.000**	100%	**12.000.000**	100%	**13.500.000**	100%	**15.000.000**	100%	**17.500.000**	100%	**82.950.000**	Kec. Batumandi
		Penurunan jumlah pelnggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	1 keg			1 keg	**45.180.000,00**	1 keg	**49.698.000,00**	1 keg	**54.667.800,00**	1 keg	**60.134.580,00**	1 keg	**66.148.038,00**	1 keg	**72.762.842**	Kec. Juai
		Penurunan jumlah pelnggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)				100%	**9.015.000**	100%	**9.500.000**	100%	**10.450.000**	100%	**11.500.000**	100%	**12.650.000**	100%	**53.115.000**	Kec. Halong
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	100%	**9.540.000**	100%	**17.090.000**	100%	**12.590.000**	100%	**17.590.000**	100%	**17.590.000**	100%	**20.590.000**	100%	**94.990.000**	Kec. Awayan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	meningkatnya Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	–	100%	0	100%	**138.726.800,00**	100%	**137.940.600,00**	100%	**158.960.200,00**	100%	**174.856.500,00**	100%	**192.341.800,00**	100%	**211.576.000**	Kec. Lampihong
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	100%	**120.129.500**	100%	**116.995.000**	100%	**122.844.750**	100%	**135.129.225**	100%	**148.642.148**	100%	**163.506.362**	100%	**687.117.485**	Kec. Paringin

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa			**96.299.500**	100%	**140.812.500**	100%	**145.000.000**	100%	**159.500.000**	100%	**195.000.000**	100%	**225.000.000**	100%	**961.612.000**	Kec. Batumandi
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%		100%	**199.205.000,00**	100%	**219.125.500,00**	100%	**241.038.050,00**	100%	**510.218.885,00**	100%	**291.656.040,50**	100%	**617.364.851**	Kec. Juai
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	100%	238.920.000	100%	**232.740.000**	100%	**244.377.000**	100%	**268.814.700**	100%	**295.696.170**	100%	**325.265.787**	100%	**325.265.787**	Paringin Selatan
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	**98.950.000**	100%	**149.940.000**	100%	**160.000.000**	100%	**175.000.000**	100%	**195.000.000**	100%	**215.000.000**	100%	**894.940.000**	Halong
		Persentase kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan		100%	**0**	100%	276.836.000	100%	304.519.600	100%	334.971.560	100%	368.468.716	100%	405.315.588	100%	1.859.122.500	Kec. Tebing Tinggi
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	100%	**287.428.800**	100%	**139.800.000**	100%	**135.300.000**	100%	**220.850.000**	100%	**250.850.000**	100%	**280.850.000**	100%	**1.315.078.800**	Kec. Awayan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase RT yang menyampaikan laporan,Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	–	100,100,100 persen	0	100,100,100 persen	**45.073.100,00**	100%	**50.608.715,00**	100%	**57.830.100,00**	100%	**62.913.200,00**	100%	**68.504.400,00**	100%	**74.654.900**	Kec. Lampihong

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	100%	**335.433.000**	100%	**80.937.500**	100%	**84.984.375**	100%	**93.482.813**	100%	**102.831.094**	100%	**113.114.203**	100%	**475.349.984**	Kec. Paringin
		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa			**26.700.000**	100%	**23.850.000**	100%	**25.500.000**	100%	**27.500.000**	100%	**32.500.000**	100%	**37.500.000**	100%	**173.550.000**	Kec. Batumandi
		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik		100%	**0**	100%	**184.130.000,00**	100%	**202.543.000,00**	100%	**222.797.300,00**	100%	**245.077.030,00**	100%	**269.584.733,00**	100%	**296.543.206**	Kec. Juai
		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik, Persentase desa dengan pencatatan aset desa baik, Persentase hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	100%	100%	**334.250.000**	100%	**273.360.000**	100%	**287.028.000**	100%	**315.730.800**	100%	**347.303.880**	100%	**382.034.268**	100%	**382.034.268**	Kec. Paringin Selatan
		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik dan hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	100%	100%	**386.215.000**	100%	**64.865.000**	100%	**68.115.000**	100%	**74.950.000**	100%	**82.445.000**	100%	**90.700.000**	100%	**381.075.000**	KecHalong

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		100%	**0**	100%	497.891.950	100%	547.681.150	100%	602.449.250	100%	662.694.200	100%	728.963.600	100%	3.039.680.150	Kec.Tebing Tinggi
		Persentase pengelolaan keuangan dan aset desa	100%	100%	**83.350.000**	100%	**81.210.000**	100%	**73.750.000**	100%	**76.750.000**	100%	**88.040.000**	100%	**88.040.000**	100%	**491.140.000**	Kec. Awayan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
08:01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				3.225.962.758		1.822.293.000		2.336.170.000		2.510.385.000		2.721.521.500		2.981.371.650		15.597.703.908	
08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100%	100%	2.429.574.758	100%	60.850.000	100%	93.900.000	100%	103.290.000	100%	113.619.000	100%	124.980.900	100%	2.926.214.658	Badan Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
08:01:03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif	100%	100%	119.685.000	100%	833.870.000	100%	**968.820.000**	100%	**991.300.000**	100%	**1.016.028.000**	100%	**1.043.228.800**	100%	4.972.931.800	Badan Kesbangpol
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100%	100%	88.625.000	100%	100.000.000	100%	105.050.000	100%	115.555.000	100%	127.110.500	100%	139.821.550	100%	676.162.050	Badan Kesbangpol
08:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100%	100%	98.615.000	100%	50.003.000	100%	51.900.000	100%	57.090.000	100%	62.799.000	100%	69.078.900	100%	389.485.900	Badan Kesbangpol
08:01:06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	489.463.000	100%	777.570.000	100%	1.116.500.000	100%	1.243.150.000	100%	1.401.965.000	100%	1.604.261.500	100%	6.632.909.500	Badan Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026 dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Balangan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

8.1 Indikator Makro Daerah

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator makro pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana

lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan.
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 dapat diuraikan dalam tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Makro Daerah Dalam Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68,82	69,27	69,71	70,16	70,61	71,05	71,5	71,5
2	Angka Kemiskinan	5,32	5,4 - 5,2	5,3 - 5,0	5,2 - 5,0	5,1 - 4,9	5,0 - 4,8	4,9 - 4,7	4,9 - 4,7
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	02:46	02:46	02:43	02:40	02:37	02:34	02:30	02:30
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	-2,47	1 - 2,5	2,5 – 3	3 - 3,3	3,3 - 3,5	3,5 - 4	4 - 4,5	4,5 - 5
5	Pendapatan Perkapita (PDRB) (%)	-3.41	1 – 1,5	1,5 – 2	2 – 2,5	2,5 – 3	3 – 3,5	3,5 -4,5	4,5
6	Indeks Gini	0,298	0,295	0,29	0,287	0,285	0,28	0,275	0,275
7	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	66,81	67,12	68,02	68,84	68,93	69,38	69,38
8	NILAI SAKIP	66,04 (B)	68,40 (B)	70,40 (BB)	72,40 (BB)	74,40 (BB)	76,40 (BB)	78,20 (BB)	78,20 (BB)
9	Nilai IKM (%)	82,53	82,55	83,6	83,7	84	84,5	85	85
10	Indeks RB	53,8	55,8	57,8	59,8	61,8	63,8	65,8	65,8
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Nilai EKPPD	3,5620	3,5750	3,5850	3,5900	3,5930	3,5970	3,6000	3,6000

8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penyajian indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Balangan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Balangan
Tahun 2021-2026

INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indeks infrastruktur publik	31,73	33,99	37,81	41,58	45,73	49,42	52,71	52,71
2	Indeks infrastruktur permukiman	26,51	30,12	30.87	31,42	32,06	32.75	33,11	1,38
3	Indeks Kualitas Air	53,33	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50.60	50.60
4	Indeks Kualitas Udara	91,18	90,94	91,50	91,16	91,27	91,38	91,49	91,49
5	Indeks Kualitas Lahan	50,61	52,30	53.99	55.67	57,36	59,05	60.74	60.74
6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	12,23	12,64	12,89	13,14	13,39	13,64	13,89	13,89
7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	50,61	6,1	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,7
8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	0,5	0,5
9	Nilai Realisasi Investasi PMDN (milyar rupiah)	5,96	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	290,09 M	1.546 M
10	Angka Pengangguran Terbuka (%)	216,47 M	2,46	2,43	2,40	2,37	2,34	2,30	2,30
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12,46	7,82	8,09	8,36	8,03	8,90	9,17	9,17
12	Angka Harapan Lama Sekolah	67,72	12,59	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,24
13	Usia Harapan Hidup	89,00	67.92	68,12	68,12	68,82	68.72	68.92	68.92
14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	7,00	221	177	176	132	131	130	130
15	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	25,70	15	15	14	13	12	11	11
16	Prevalensi stunting (%)	68.40 (B)	21	18,40	17	16	15	14	14
17	Angka kelahiran remaja umur usia 15 - 19 tahun (ASFR)	24.71	23	21	20,58	20,32	20,03	19,32	19,32
18	NILAI SAKIP	66,04 (B)	68,40 (B)	70,40 (BB)	72,40 (BB)	74,40 (BB)	76,40 (BB)	78,20 (BB)	78,20 (BB)

INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
19	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Nilai EKPPD	3,5620	3,5750	3,5850	3,5900	3,5930	3,5970	3,6000	3,6000
21	Indeks Pelayanan Publik	03:01	3.01 (-B)	3.40 (-B)	3.51 (B)	3.80 (B)	4.01 (-A)	4.91 (A)	4.91 (A)
22	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	82,53	82,55	83,6	83,7	84	84,5	85	85
23	Angka Kemiskinan	5,32	5,4 - 5,2	5,3 - 5,0	5,2 - 5,0	5,1 - 4,9	5,0 - 4,8	4,9 - 4,7	4,9 - 4,7
24	Angka PPKS yang tertangani (%)	40,95	46,95	52,95	58,95	64,95	70,95	76,95	76,95
25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Indeks Resiko Bencana	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89
28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48	52	58	68	81	87	100	100
29	Indeks Desa Membangun	0,6395	0,6495	0,6595	0,6695	0,6795	0,6895	0,6995	0,6995

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
A				**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
	A.1			**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
		1		**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
			1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	-2,47	1 - 2,5	2,5 - 3	3 - 3,3	3,3 - 3,5	3,5 - 4	4 - 4,5	4,5 - 5
			2	Indeks Gini	0,298	0,295	0,29	0,287	0,285	0,28	0,275	0,275
			3	Angka Kemiskinan	5,32	5,4 - 5,2	5,3 - 5,0	5,2 - 5,0	5,1 - 4,9	5,0 - 4,8	4,9 - 4,7	4,9 - 4,7
			4	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68,82	69,27	69,71	70,16	70,61	71,05	71,5	71,5
			5	NILAI SAKIP	66,04 (B)	68,40 (B)	70,40 (BB)	72,40 (BB)	74,40 (BB)	76,40 (BB)	78,20 (BB)	78,20 (BB)
			6	Nilai IKM (%)	82,53	82,55	83,6	83,7	84	84,5	85	85
			7	Indeks RB	53,8	55,8	57,8	59,8	61,8	63,8	65,8	65,8
			8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			9	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	3,5620	3,5750	3,5850	3,5900	3,5930	3,5970	3,6000	3,6000

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A.2			**Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat**								
		1		**Pendidikan**								
			1	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.46	12.59	12.72	12.85	12.98	13.11	13.24	13.24
			2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7.55	7.82	8.09	8.36	8.63	8.9	9.17	9.17
		2		**Kesehatan**								
			1	Usia Harapan Hidup (UHH)	67.72	67.92	68.12	68.32	68.52	68.72	68.92	68.92
			2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 kelahiran hidup	89	221	177	176	132	131	130	130
			3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7	15	15	14	13	12	11	11
			4	Prevalensi stunting	25.7	21	18.4	17	16	15	14	14
		3		**Ketenagakerjaan**								
			1	Angka Pengangguran Terbuka	2.46	2.46	2.43	2.4	2.37	2.34	2.3	2.3
			2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja (%)	8.73	0	30	30	30	30	30	30
			3	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi (%)	6.95	4	4	4	4	4	4	4
			4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri (%)	64.26	65	65	65	65	65	65	65
			5	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi (%)	100	100	90	90	90	90	90	90
		4		**Keuangan Daerah**								

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	6	6	6	7	7	8	8
			2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			3	Indeks pengelolaan keuangan	86	87	87	87	88	89	90	90
			4	Indeks pengelolaan asset (%)	38	38,91	40	42	45	48	52	52
			5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8	8	8	8	9	9	10	10
B				**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
	B.1			**Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar**								
		1		**Pendidikan**								
			1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	68,65	70,75	72,85	74,95	77,05	79,15	79,15
			2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	91,89	93,69	95,49	97,29	99,09	100	100
			3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	74,56	76,26	77,96	79,66	81,36	83,06	83,06
			4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraaan	80,36	82,06	83,76	85,46	87,16	88,86	90,56	90,56
			5	Persentase Guru Sertifikasi (%)	83.26	83.76	85	86	87	88	89	89
			6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):								
				- TK/PAUD	74.36	74.86	75.36	75.86	76.36	76.86	77.36	77.36
				- SD	79.39	79.89	80.39	80.89	81.39	81.89	82.39	82.39

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- SMP	96.04	96.54	97.04	97.54	100	100	100	100
		2		**Kesehatan**								
			1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1	2	2	2	2	1	1	1
			2	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (per 1000)	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
			3	Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS (%)	43	50	55	60	65	70	75	75
			4	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	83	85	87	89	91	93	95	95
			5	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar (%)	75	75	83.33	83.33	91.67	100	100	100
			6	Persentase pemenuhan sarana prasarana kesehatan sesuai standar (%)	30.64	33	35	37	39	41	43	43
			7	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			8	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			9	Presentase Pelayanan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
			11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			12	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			13	Persentase warga negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			15	Persentase penderita DM Yang mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			17	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
			1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	48.3	55.48	66.07	73.67	79.31	85.24	88.47	88.47
			2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	76.9	78.42	80.06	82.08	84.61	87.39	90.17	90.17
			3	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik (%)	21.53	23:09	24.2	28.31	34.55	39.24	44.39	44.39
			4	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun (%)	11.29	11.79	12:41	13.03	13.65	14:27	14.9	14.9
			5	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak (%)	78.65	81.27	82.27	83.27	84.27	85.27	86.27	86.27
			6	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic (%)	91.88	92.4	92.75	93.76	94.76	95.76	96.76	96.76
			7	Jumlah Bangunan yang ditata (buah)			1	1	1	1	1	5

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Persentase bangunan/gedung dalam kondisi baik (%)	89.27	89.38	89.49	89.6	89.71	89.82	89.93	89.93
			9	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina (%)	34.6	40	50	60	72.5	85	95	95
			10	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang (%)	10	27	42	56	75	89	100	100
			11	Persentase tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah (%)	20	27	42	56	75	80	100	100
			12	Persentase tersedianya luasan RTH (%)	3,91	3,91	4	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
		4		**Permukiman dan Perumahan Rakyat**								
			1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.28	90.28	95	95	96	96	97	97
			3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	84	85	85	87	89	91	93	93
			4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani (%)	71.4	74.08	78.49	84.78%	91.71	98	100	100
		5		**Ketenteraman Umum, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat**								
			1	Angka kejadian gangguan ketentraman sosial	4	4	3	3	3	2	2	2
			2	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			3	Indeks Resiko Bencana	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89	139.89
			4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
			5	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6	Angka pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat	29	29	28	27	26	25	24	24
		6		**Sosial**								
			1	Angka PPKS yang tertangani (%)	40.95	46.95	52.95	58.95	64.95	70.95	76.95	76.95
			2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	10	11	12	13	14	15	16	16
	B.2			**Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar**								
		7		**Tenaga Kerja**								
			1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja(%)	8.73		30	30	30	30	30	30
			2	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi (%)	6.95	4	4	4	4	4	4	4
			3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri (%)	64.26	65	65	65	65	65	65	65
			4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi (%)	100	100	90	90	90	90	90	90
		8		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
			1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.22	92.71	92.74	92.77	92.8	92.83	92.86	92.86
			2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,14	70.77	72	73.02	74.04	75	76	76
			3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15.9	14.1	14	13.9	13.8	13.7	13.6	13.6
			4	Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5
			5	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12.35	18	21	21.05	21.1	21.15	21.2	21.2

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(%)								
			6	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun (%)	18.36	17.86	17.26	16.56	15.76	14.86	13.86	13.86
			7	Indeks Kualitas keluarga	52.67	62	64	66	68	70	72	72
		9		**Pangan**								
			1	Persentase cadangan pangan masyarakat (%)	10	10	10	10	10	10	10	10
			2	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah (%)	87,4	87.3	87.3	87,5	87,6	87,7	87,8	87,8
			3	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	5	5	5	5	5	5	5	5
			4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	90	90	90	90	90	90	90	90
		10		**Lingkungan Hidup**								
			1	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			2	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			3	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			4	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			5	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH. (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			7	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			8	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			9	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			10	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	72.55	99	99	99	99	100	100	100
		11		**Pertanahan**								
			1	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			2	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	-	100	100	100	100	100	100
			3	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100	-	100	100	100	100	100	100
			4	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			5	Persentase Penatagunaan Tanah(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		12		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
			1	Cakupan kepemilikan dokumen penduduk (%)	69	90	92	94	95	96	97	97
		13		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
			1	Jumlah Desa Berkembang	127	132	136	137	138	139	140	140

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0.2	0.33	0.52	0.65	0.78	0.92	1	1
			3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	36.92	36.99	37.05	37.12	37.18	37.24	37.31	37,31
			4	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)			64,28	64,29	64,3	64,31	64,32	64,32
		14		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
			1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.17	1.12	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.05
			2	Angka kelahiran remaja umur usia 15 - 19 tahun (ASFR)	24.71	23	21	20.58	20.32	20.03	19.32	19.32
			3	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	81.21	81.25	81.27	81.29	81.3	81.31	81.33	81.33
		15		**Perhubungan**								
			1	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan (%)	78	78	82	86	91	95	100	100
			2	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan(%)	19.48	23.42	39.48	57.95	85.97	91.18	100	100
			3	Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai (%)	20	20	26.67	36.67	53.33	76.67	100	100
			4	Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai(%)	33.33	44.44	55.56	66.67	77.78	88.89	100	100
			5	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek(%)	15.8	36.8	66.7	100	100	100	100	100
			6	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0.29	0.29	0.32	0.35	0.39	0.42	0.47	0.47
		16		**Komunikasi dan Informatika**								
			1	Persentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat (%)	75	80	80	85	90	95	100	100
			2	Persentase pengaduan masyarakat yang	100	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ditindaklanjuti								
			3	Persentase Publikasi di Media Massa	75	80	80	85	90	95	100	100
			4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62	62	10	20	20	25	25	25
			5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	0	18	18	18	23	23	23
		17		**Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**								
			1	Persentase Koperasi Berkualitas	2.72	2	3	4	5	6	7	7
			2	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	8.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
			3	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	26.64	27	28	29	30	31	32	32
			4	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	0.43	0.3	0.3	0.32	0.34	0.36	0.38	0.38
		18		**Penanaman Modal**								
			1	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	2	2	2	2	2	2	12
			2	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	100%	1	1	1	1	1	1	6
			3	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	100%	200	200	210	220	230	240	1300
			4	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			5	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP(%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			7	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		19		**Kepemudaan dan Olahraga**								
			1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan & Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)		6,69	0,045	0,046	0,047	0,048	0,049	0,049
			2	Peningkatan Prestasi Olahraga	10	9	10	11	12	13	14	14
			3	Jumlah Atlit Berprestasi	19	21	22	23	24	25	26	26
		20		**Statistik**								
			1	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	50	60	0	75	80	90	100	100
			2	Persentase OPD yang memiliki sistem aplikasi	0		25	50	70	90	100	100
			3	Persentase desa telah mengakses sistem informasi data	0		25	50	70	90	100	100
		21		**Persandian**								
			1	Persentase pengamanan informasi yg berhasil dilaksanakan	10	10	20	40	60	80	100	100
		22		**Kebudayaan**								
			1	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48	52	58	68	81	87	100	100
			2	Persentase cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	53.33	60	66.67	73.33	80	86.67	100	100
		23		**Perpustakaan**								

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	50	50	60	70	75	80	85	420
			2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.052	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
		24		**Kearsipan**								
			1	Indeks pengawasan kearsipan	83.47	83.49	83.51	83.53	83.55	83.57	83.59	83.59
	B.3			**Fokus Pelayanan Urusan Pilihan**								
		1		**Kelautan dan Perikanan**								
			1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	952.09	800.00	810.00	820.00	830.00	840.00	850.00	850.00
			2	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (ton)	884.92	650.00	675.00	750.00	825.00	900.00	975.00	975.00
			3	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	250.00	270.00	290.00	310.00	330.00	350.00	370.00	370.00
			4	Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/thn)	46.00	46.00	46.25	46.50	47.00	47.50	48.00	48.00
		2		**Pariwisata**								
			1	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	100	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
			2	Rata-rata lama kunjungan wisata	0	1 hari	1 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
			3	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	25.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
		3		**Pertanian**								
			1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	1000 Kg/Ha	0.25%	0,50%	0,75%	1,00%	1,25%	1,50%	1,50%
			2	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	3 Ton/Ha	2,67%	2,68%	2,69%	2,70%	2,71%	2,72%	2,72%

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3	Persentase Produktifitas Hortikultura (Ton/Ha)	53.469 Kwintal/Ha	0,12%	0,13%	0,14%	0,15%	0,16%	0,17%	0,17%
			4	Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	140 Orang	50%	51,00%	52%	53%	54%	55%	55%
			5	Persentase Peningkatan Produksi Daging	1,933.289Kg	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	21%
			6	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	140 ekor	6%	6%	6%	6%	6%	6%	36%
			7	Persentase Peningkatan sarana Pertanian		5%	5%	5%	5%	5%	5%	30%
			8	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	124 unit	36%	42,50%	49%	55,50%	62%	68,50%	68,50%
			9	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	18 Buah	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
			10	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	938 Ekor	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1,20%
			11	JumlahKegiatan dan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan	11 Kegiatan	16 Kegiatan	24 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	132 Kegiatan
			12	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	1000 Ha	3%	8%	13%	18%	23%	30%	30%
			13	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	4000 Ha	5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%
			14	Persentase SDM Terampil tanaman pangan dan Hortikultura Di tiap Kecamatan	100 Orang	10%	12%	14%	16%	18%	20%	20%
			15	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Pengembangan Korporasi Petani	27 (2.29%)	3,60%	5%	6,30%	7,70%	10,40%	100%	100%
		5		**Perdagangan**								
			1	Persentase Peningkatan Sapras	50.00	40.00	44.44	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi(%)	15.00	15.00	26.00	29.05	57.00	59.00	68.00	68.00
			3	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui MOU dengan retail	20.00	20.00	25.00	27.00	30.00	33.00	35.00	35.00
			4	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	74.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00	81.00
			5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	17.00	27.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00
			6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	8.08	8.00	7.80	7.60	7.40	7.00	6.80	6.80
			7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	4.80	7.00	9.00	12.00	15.00	18.00	20.00	26.00
		6		**Perindustrian**								
			1	Persentase IKM Yang Menerapkan Teknologi Industri (%)	4.10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	80.00
			2	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal (%)	5.83	6.79	7.75	8.71	10.10	11.31	12.61	12.61
			3	Profil IKM Yang Berkembang (%)	0.00	0.19	0.38	0.58	1.58	2.58	3.58	3.58
		7		**Transmigrasi**								
			1	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi (%)	18.82	19.12	18.91	19.11	19.29	19.41	19.55	19.55
			2	Persentase Jumlah warga transmigrasi di Kabupaten Balangan (%)	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	B.4			**Fokus Pelayanan Urusan Penunjang**								
		1		**Perencanaan**								
			1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	-	95	95:05:00	96	96:05:00	97	98	98

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, propinsi, kabupaten)	-	98.2 %	98.4 %	98.6 %	98.8 %	99%	99.2 %	99.2 %
			3	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	-	91.8 %	92.6 %	93.4 %	94.2 %	95%	96.8 %	96.8 %
			4	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	-	91.8 %	92.6 %	93.4 %	94.2 %	95%	96.8 %	96.8 %
			5	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	91.8 %	92.6 %	93.4 %	94.2 %	95%	96.8 %	96.8 %
			6	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	91.8 %	92.6 %	93.4 %	94.2 %	95%	96.8 %	96.8 %
		2		**Keuangan Daerah**								
			1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	6	6	6	7	7	8	8
			2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			3	Indeks pengelolaan keuangan	86	87	87	87	88	89	90	90
			4	Indeks pengelolaan asset (%)	38	38,91	40	42	45	48	52	52
			5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8	8	8	8	9	9	10	10
			6	Persentase APBD disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			7	Persentase penerimaan PBB-P2 dan BPHTB (%)	_	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Persentase penerimaan PAD selain PBB-P2 dan BPHTB (%)	_	100	100	100	100	100	100	100
			9	Persentase pendapatan non PAD (%)	_	100	100	100	100	100	100	100
		3		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
			1	Indeks merit system	257	260	265	270	275	300	325	325
			2	Indeks profesionalitas ASN	67.06	69	75	80	85	86	87	87
			3	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	-	45	50	60	65	70	75	75
			4	Persentase calon ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat manajerial (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi S2/S3 (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	5,8	10	10	17	20	22	25	25
			6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	51,13	51,85	52,42	56,45	64,52	72,58	80,65	80,65
			7	Persentase Pemenuhan kepegawaian sesuai formasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		4		**Penelitian dan Pengembangan**								
			1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	70	100	100	100	100	100	100	100
			2	Indeks Inovasi	1.616	50 (inovatif)	55 (inovatif)	60 (sangat inovatif)	65 (sangat inovatif)	70 (sangat inovatif)	75 (sangat inovatif)	75 (sangat inovatif)
		5		**Administrasi Pemerintahan Umum**								
			1	Nilai capaian pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai amanat Permendagri No. 4 tahun 2010 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	3.562	3.575	3.585	3.587	03:59	3.593	3.597	03:06
			3	Indeks kelembagaan	76.9	77.1	77.3	77.6	78.4	78.6	80.1	80.1
			4	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (%)	20	66	74	82	82	87	87	87
			5	Indeks Pelayanan Publik	-	3,01 (-B)	3,40 (-B)	3,51 (B)	3,80 (B)	4,01 (-A)	4,91 (A)	4,91 (A)
			6	Persentase Raperda yang dibahas DPRD (%)	82	84	84	87	89	89	90	90
		6		**Pengawasan**								
			1	Indeks Integritas kabupaten (SPI)	77.28	78	78	79	80	81	82	82
			2	Maturitas SPIP	100	3 (3,02)	3 (3,02)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)	3 (3,2)
			3	Tingkat Kapabilitas APIP	100	3	3	3	3	3	3	3
			4	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti (%)	90	75	75	78	80	82	85	85
			5	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	0	WBBM : 1	WBK : 1 WBBM : 1	WBK : 1 WBBM : 2	WBK : 2 WBBM : 2	WBK : 2 WBBM : 3	WBK : 3 WBBM : 4	WBK : 3 WBBM : 4
		7		**Kewilayahan**								
			1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.72	84.625	85.88	86.88	87.88	90.13	89.81	89.81
			2	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif (%)	_	100	100	100	100	100	100	100
			3	Persentase koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum (%)	_	100	100	100	100	100	100	100
			4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	_	100	100	100	100	100	100	100
			5	Persentase desa dengan pencatatan aset baik (%)	_	100	100	100	100	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8		**Pemerintahan Umum**								
			1	Persentase Koordinasi gugus tugas;Persentase Masyarakat yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			2	Persentase Parpol yang aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			3	Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			4	Persentase Koordinasi Penyuluhan narkoba; Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			5	Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
C				**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
	C.1			**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**								
		1		**Produktivitas Daerah**								
			1	PDRB per kapita (ADHK) (juta)	68,87	74.66	76.52	78.43	80.4	82.41	84.47	84.47
			2	PDRB per kapita (ADHB) (juta)	80,46	88.2	90.41	92.67	94.98	97.36	99.79	99.79
		2		**Pengeluaran Penduduk**								
			1	Rata-Rata Pengeluaran per kapita	1,186,190	1,245,500	1,276,637	1,308,553	1,341,267	1,374,798	1,409,168	1,409,168
		3		**Pertanian**								
			1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,98	100,99	101	101,01	101,02	101,03	101,04	101,04

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
	C.2			**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**								
			1	Indeks Infrastruktur Wilayah	58,24	64,11	68,68	73	77,79	82,18	85,82	85,82
			2	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	22.931	23.631	24.331	25.031	25.731	26.431	27.131	22.931
			3	Jumlah rumah tangga yang mendapat aliran listrik (PLN)	28.252	28.752	29.252	29.752	30.252	30.752	31.252	31.252
			4	Jumlah hotel, penginapan dan losmen	4	4	4	4	5	5	5	5
	C.3			**Fokus Iklim Berinvestasi**								
			1	Lama Proses Perizinan (hari)	5	5	5	5	5	5	5	5

BAB IX
PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a) SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-progam dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
b) SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
c) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD, dan antara Renstra dan Renja SKPD;
d) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2016–2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dan dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat.

Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan

dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan untuk mewujudkan Balangan yang lebih maju dan sejahtera.

Paringin, 23 Agustus 2021
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom